Kata Pengantar

Nomor : 130/4352/438.1.2.2/2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Marilah kita memanjatkan segenap puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2021 ini dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dengan tepat waktu, yaitu sebelum batas akhir 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagaimana amanah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Pasal 71, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2021 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 yang merupakan transisi pelaksanaan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dan tahun baseline RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Capaian kinerja tahun 2021 merupakan capaian baseline dari periode perencanaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 baik dalam RPJMD, Renstra OPD, RKPD, maupun Renja OPD. Sehingga dapat menjadi acuan untuk pencapaian target kinerja tahun selanjutnya. Pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja pelaksanan program / kegiatan menjadi hal yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap setiap penggunaan uang Negara / Daerah harus berorientasi kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2021 meliputi hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri atas : capaian pelaksanaan program dan kegiatan beserta permasalahan dan upaya penyelesaiannya; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan laporan hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2021, telah banyak target kinerja yang tercapai walaupun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan rekomendasi hasil pembahasan DPRD diharapkan menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun – tahun selanjutnya.

Demikian pengantar LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2021, semoga dapat menjadi bentuk pertanggung jawaban dan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo agar menjadi sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan bagi kita semua untuk senantiasa menuju Sidoarjo yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI SIDOARJO,

Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD MUHDLOR, S.IP.

AHMAD MUHDLOR, S.IP.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Dasar Hukum 1

B. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 4

C. Gambaran Umum Daerah 14

1. Kondisi Geografis Daerah 14

2. Gambaran Umum Demografis 20

3. Kondisi Perekonomian 25

D. Sumber Daya PNS 28

E. Pengelolaan Pendapatan Daerah 30

F. Pengelolaan Belanja Daerah 36

G. Pengelolaan Pembiayaan Daerah 41

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 47

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 58

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 58

1. Indeks Good Governance 58

2. Indeks Reformasi Birokrasi 61

3. Pertumbuhan Ekonomi 64

4. Indeks GINI 65

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 66

6. Indeks Kebahagiaan 68

7. Indeks Infrastruktur 71
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 74
10. Tingkat Kemiskinan 78

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Per Urusan Pemerintahan Tahun 2021 80

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 80

- Urusan Pendidikan 80
- Urusan Kesehatan 100
- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 139
- Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 157
- Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 165
- Urusan Sosial 187

2. Urusan Wajib Yang Tidak berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 200

- Urusan Tenaga Kerja 200
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 211
- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 220
- Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 228
- Urusan Pangan 235
- Urusan Lingkungan Hidup 242
- Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 256
- Urusan Perhubungan 264
- Urusan Komunikasi dan Informatika 271

- Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 279
- Urusan Penanaman Modal 293
- Urusan Kepemudaan dan Olahraga 297
- Urusan Kebudayaan 302
- Urusan Pertanahan 305
- Urusan Persandian 307
- Urusan Statistik 311
- Urusan Kearsipan 314
- Urusan Perpustakaan 318

3. Urusan Pilihan 325

- Urusan Kelautan dan Perikanan 325
- Urusan Pertanian 340
- Urusan Pariwisata 354
- Urusan Industri 366
- Urusan Perdagangan 375

4. Unsur Penunjang Pemerintahan 383

- Unsur Penunjang Sekretariat Daerah 383
- Unsur Penunjang Sekretariat DPRD 398
- Unsur Penunjang Pengawasan 404
- Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan 411
- Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan 416
- Unsur Penunjang Keuangan 425
- Unsur Penunjang Kepegawaian dan Diklat 436

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 448

BAB V PRESTASI DAN PENGHARGAAN 449

BAB VI PENUTUP 452

Daftar Tabel

Tabel I.1	Pokok – Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo	5
Tabel I.2	Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026	7
Tabel I.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026	11
Tabel I.4	Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2021	15
Tabel I.5	Desa dan Kelurahan per Kecamatan	16
Tabel I.6	Suhu dan Kelembapan per Bulan di Tahun 2021	18
Tabel I.7	Kecapatan Angin dan Tekanan udara per Bulan di Tahun 2021	19
Tabel I.8	Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan penyinaran Matahari per Bulan di Tahun 2021	20
Tabel I.9	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2021	21
Tabel I.10	Penduduk per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	22
Tabel I.11	Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021	24
Tabel I.12	PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (dalam Miliar Rupiah)	26
Tabel III.A.1	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan kerja	74
Tabel III.A.2	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan	77
Tabel III.B.1	Data 26 Jenis PMKS di Kabupaten Sidoarjo	187
Tabel III.B.2	Pelatihan Ketenagakerjaan	202
Tabel III.B.3	Capaian Indeks Desa Membangun Tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo	213
Tabel III.B.4	Capaian Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo	213
Tabel III.B.5	PPH (Pola Pangan Harapan) Ketersediaan Kabupaten Sidaorjo	238
Tabel III.B.5	Sarana dan Prasarana Perhubungan	265
Tabel III.C.1	Kunjungan Wisatawan	355
Tabel III.C.2	Kunjungan Hotel di Kabupaten Sidoarjo	356
Tabel III.C.3	Pemenuhan Kriteria Pasar SNI	379
Tabel III.D.1	Nilai SKM Kabupaten Sidoarjo	387
Tabel III.D.2	Rincian Penerimaan Pajak	429

Daftar Grafik

Grafik I.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2021	16
Grafik I.2	Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo	17
Grafik I.3	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo	21
Grafik I.4	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	23
Grafik I.5	Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2021	24
Grafik I.6	Share PDRB Berdasarkan ADHK	27
Grafik I.7	Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sidoarjo	32
Grafik I.8	Perkembangan Belanja Kabupaten Sidoarjo	38
Grafik III.A.1	Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo	59
Grafik III.A.2	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo	63
Grafik III.A.3	Perbandingan Indeks RB Kab. Sidoarjo dengan Rata-Rata Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur	63
Grafik III.A.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo	65
Grafik III.A.5	Disparitas (Indeks GINI)	65
Grafik III.A.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo	67
Grafik III.A.7	Indeks Kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo	70
Grafik III.A.8	Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo	71
Grafik III.A.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73
Grafik III.A.10	Status Pekerjaan Utama Penduduk	76
Grafik III.A.11	Tingkat Penganguran Terbuka	77
Grafik III.A.12	Tingkat Kemiskinan	78
Grafik III.B.1	Angka Harapan Lama Sekolah	82
Grafik III.B.2	Rata – Rata Lama Sekolah	83
Grafik III.B.3	Capaian APM Tahun 2020 dan Tahun 2021	85
Grafik III.B.4	APK PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs	87
Grafik III.B.5	Persentase Lembaga SD yang telah terakreditasi A	92
Grafik III.B.6	Persentase Lembaga SMP yang telah terakreditasi A	92
Grafik III.B.7	Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2021	101
Grafik III.B.8	Persentase Keluarga Sehat (KS) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 – 2021	102
Grafik III.B.9	Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019 – 2021	104

Grafik III.B.10	Angka Kematian Bayi Tahun 2019 – 2021	106
Grafik III.B.11	Stunting Balita Tahun 2019 – 2021	107
Grafik III.B.12	Nilai Rata – Rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas Tahun 2019 – 2021	108
Grafik III.B.13	Perbandingan BOR Covid-19 dan BOR Total RSUD Tahun 2021	112
Grafik III.B.14	Bed Occupancy Rate RSUD	113
Grafik III.B.15	Average Length of Stay RSUD	115
Grafik III.B.16	Turn Over Interval RSUD	116
Grafik III.B.17	Bed Turn Over RSUD	117
Grafik III.B.18	Net Death Rate RSUD	119
Grafik III.B.19	Gross Death Rate RSUD	121
Grafik III.B.20	Tren Mingguan Kasus Positif, Kesembuhan dan Kematian Covid-19 Kab. Sidoarjo Tahun 2021	125
Grafik III.B.21	Perkembangan Jalan Mantap	140
Grafik III.B.22	Realisasi Kecukupan Air Irigasi	142
Grafik III.B.23	Genangan Tertangani	143
Grafik III.B.24	Kesesuaian Rencana Tata Ruang	145
Grafik III.B.25	Perkembangan Kecukupan Kebutuhan Air Bersih	158
Grafik III.B.26	RT Bersanitasi Sehat	158
Grafik III.B.27	Rumah Layak Huni	159
Grafik III.B.28	Luas Kawasan Kumuh	160
Grafik III.B.29	Indeks Rasa Aman	166
Grafik III.B.30	Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	168
Grafik III.B.31	Penanganan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah	170
Grafik III.B.32	Indeks Toleransi	172
Grafik III.B.33	Perbandingan Capaian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 – 2021	173
Grafik III.B.34	Capaian Kinerja Sasaran dengan tahun – tahun sebelumnya	176
Grafik III.B.35	Capaian Indikator Sasaran Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2017 – 2021	189
Grafik III.B.36	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di Sembilan Sektor	201
Grafik III.B.37	Persentase Lulusan Pelatihan yang telah bekerja	203
Grafik III.B.38	Persentase Pencari Kerja yang telah Ditempatkan	204
Grafik III.B.39	Persentase Kasus PHI yang Diselesaikan dengan PB	205
Grafik III.B.40	Tren Capaian Persentase Desa Mandiri	214

Grafik III.B.41	Tren Capaian Persentase Desa Maju	215
Grafik III.B.42	Indeks Pembangunan Gender	221
Grafik III.B.43	Indeks Pemberdayaan Gender	222
Grafik III.B.44	Perkembangan Pasangan Usia Subur	229
Grafik III.B.45	Perkembangan Pendewasaan Usia Perkawinan	230
Grafik III.B.46	Perkembangan Angka Kelahiran Kasar	231
Grafik III.B.47	Perkembangan Skor PPH Konsumsi	236
Grafik III.B.48	Perkembangan Skor PPH Ketersediaan	237
Grafik III.B.49	Indeks Kualitas Air	243
Grafik III.B.50	Indeks Kualitas Udara	244
Grafik III.B.51	Indeks Kualitas Lahan	245
Grafik III.B.52	Persentase Sampah yang terkelola (%)	248
Grafik III.B.53	Perkembangan Kepemilikan KTP Elektronik	257
Grafik III.B.54	Perkembangan Kepemilikan Kartu Keluarga	258
Grafik III.B.55	Perkembangan Persentase Penduduk Usia 0 – 18 Tahun yang Ber Akta Kelahiran	259
Grafik III.B.56	Koperasi Berkualitas	281
Grafik III.B.57	Koperasi Sehat	282
Grafik III.B.58	Koperasi Aktif	284
Grafik III.B.59	Persentase Usaha Mikro Mandiri	285
Grafik III.B.60	Wirausaha Baru	286
Grafik III.B.61	Jumlah Prestasi Pemuda yang diperoleh di tingkat regional, nasional, dan internasional	297
Grafik III.B.62	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional, dan internasional	298
Grafik III.B.63	Nilai Indeks KAMI	308
Grafik III.B.64	Perkembangan Lembaga yang menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku	315
Grafik III.B.65	Perkembangan Indeks Minat Baca	320
Grafik III.C.1	Data Hasil Produksi Perikanan Laut (Kg/Tahun)	326
Grafik III.C.2	Produksi Perikanan Umum Daratan (Kg/Tahun)	327
Grafik III.C.3	Budidaya Air Payau	328
Grafik III.C.4	Budidaya Air Tawar	329
Grafik III.C.5	Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang	331
Grafik III.C.6	Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap	333
Grafik III.C.7	Perkembangan Tingkat Konsumsi Ikan Per Tahun (Kg/Kapita/Tahun)	334

Grafik III.C.8	Perkembangan Produksi Pertanian Padi	341
Grafik III.C.9	Perkembangan Produksi Pertanian Jagung, Kacang Hijau, Kedelai	342
Grafik III.C.10	Perkembangan Produksi Pertanian Sawi, Bayam, Kangkung	342
Grafik III.C.11	Perkembangan Produktivitas Pertanian Padi, Jagung, Kacang Hijau	344
Grafik III.C.12	Perkembangan Produktivitas Pertanian Kedelai, Sawi, Bayam, Kangkung	344
Grafik III.C.13	Perkembangan Produktivitas Tebu	345
Grafik III.C.14	Perkembangan Produksi Tebu	346
Grafik III.C.15	Perkembangan Produksi Peternakan	347
Grafik III.C.16	Perkembangan Kunjungan Wisatawan	354
Grafik III.C.17	Jumlah Industri / Usaha Kreatif Pendukung Sektor Pariwisata	360
Grafik III.C.18	Rata – Rata Lama Tinggal Wisatawan	361
Grafik III.C.19	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	367
Grafik III.C.20	Perkembangan Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	368
Grafik III.C.21	Pertumbuhan Persentase IKM Berstandarisasi	369
Grafik III.C.22	Perkembangan Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	375
Grafik III.C.23	Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas	376
Grafik III.D.1	Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	384
Grafik III.D.2	Rata – Rata Nilai SAKIP Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur	385
Grafik III.D.3	Perkembangan Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo	386
Grafik III.D.4	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	398
Grafik III.D.5	Penyelesaian Produk Hukum yang masuk dalam Prolegda	399
Grafik III.D.6	Capaian Kapabilitas APIP 3 Tahun Terakhir	406
Grafik III.D.7	Capaian Hasil Penilaian MCP	409
Grafik III.D.8	Perkembangan Aset yang terdokumentasi legal	427
Grafik III.D.9	Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah	429
Grafik III.D.10	Perkembangan Indeks Profesionalisme ASN	428
Grafik III.D.11	Perkembangan Penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya	441
Grafik III.D.12	Perkembangan IKM Kepegawaian	443

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Sidoarjo Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penglolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Ligkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

B. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut.

1. Visi

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokrastis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah :

" TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN "

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I.1

Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"	***Sidoarjo Sejahtera***	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (*equality*). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola an diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan

		dtingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan *People Centered Develompement* atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable development*). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Keempat pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

2. Misi

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel I.2

Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"	***Sidoarjo Sejahtera***	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha
	Sidoarjo Berkarakter	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	Pembangunan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada tabel di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1: ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha*****.**

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat .

Misi 2: ***Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan*****.**

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk

pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: *Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan*.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo

Misi 4: *Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya*.

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar

lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi 5: ***Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.***

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilainilai kegamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan cara untuk mencapainya melalui Tujuan dan Sasaran. Tujuan adalah kinerja jangka menengah / lima tahunan, sedangkan Sasaran adalah kinerja tahunan. Adapun Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerjanya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel I.3

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi-1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Nilai SAKIP Kabupaten
				Opini atas Audit BPK
				Survey Eksternal Persepsi Korupsi
				Status Kinerja LPPD
				Nilai Indeks SPBE
				Indeks Inovasi Daerah
				Tingkat Maturitas SPIP
			Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Misi-2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan
				Persentase kontribusi PDRB sektor industri
				Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas
				Pesentase pertumbuhan nilai investasi

		Indeks GINI	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase usaha mikro mandiri
				Persentase koperasi berkualitas
				Persentase Desa Mandiri
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentar tenaga kerja yang teserap di semblan sektor
		Persentase penduduk miskin	Menurunnya Penduduk miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan
Misi-3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
				Indeks Infrastruktur Pendidikan
				Indeks Infrasstruktur Kesehatan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Tutuan Lahan
				Indeks Resiko Bencana
Misi-4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
			Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Misi-5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi
				Indeks Pelestarian Budaya
			Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Rasa Aman

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

4. Program Prioritas

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode tahun 2021-2026.

Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang Maju, Aman dan Sejahtera, maka disusun 17 (tujuh belas) Program Strategis yang merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Program Prioritas 1 : 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. Program Prioritas 2 : BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Program Prioritas 3 : Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. Program Prioritas 4 : 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Program Prioritas 5 : Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Program Prioritas 6 : Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Program Prioritas 7 : Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT
8. Program Prioritas 8 : 20.000 UMKM Naik Kelas
9. Program Prioritas 9 : Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan

10. Program Prioritas 10 : Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu
11. Program Prioritas 11 : Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer
12. Program Prioritas 12 : Youth Center, Bangun Pusa Kreativitas Anak Muda
13. Program Prioritas 13 : 2.000 Warung Rakyat Direnovasi
14. Program Prioritas 14 : Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera
15. Program Prioritas 15 : 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat
16. Program Prioritas 16 : Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif
17. Program Prioritas 17 : Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sidoarjo, secara astronomis terletak di antara 7,3° – 7,5° LS (Lintang Selatan) dan antara 112,5° – 112,9° BT (Bujur Timur). Sementara secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 714.243 km2 ini terbagi menjadi 18 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,34 persen terhadap luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Diikuti oleh Kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,12 persen terhadap luas wilayah kabupaten.

Tabel I.4

Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase
1	Tarik	36,06	5,05
2	Prambon	34,23	4,79
3	Krembung	29,55	4,14
4	Porong	29,82	4,18
5	Jabon	81,00	11,34
6	Tanggulangin	32,29	4,52
7	Candi	40,67	5,69
8	Tulangan	31,21	4,37
9	Wonoayu	33,92	4,75
10	Sukodono	32,68	4,58
11	Sidoarjo	62,56	8,76
12	Buduran	41,03	5,74
13	Sedati	79,43	11,12
14	Waru	30,32	4,25
15	Gedangan	24,06	3,37
16	Taman	31,54	4,42
17	Krian	32,50	4,55
18	Balongbendo	31,40	4,40
Jumlah		**714,24**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Grafik I.1

Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2021

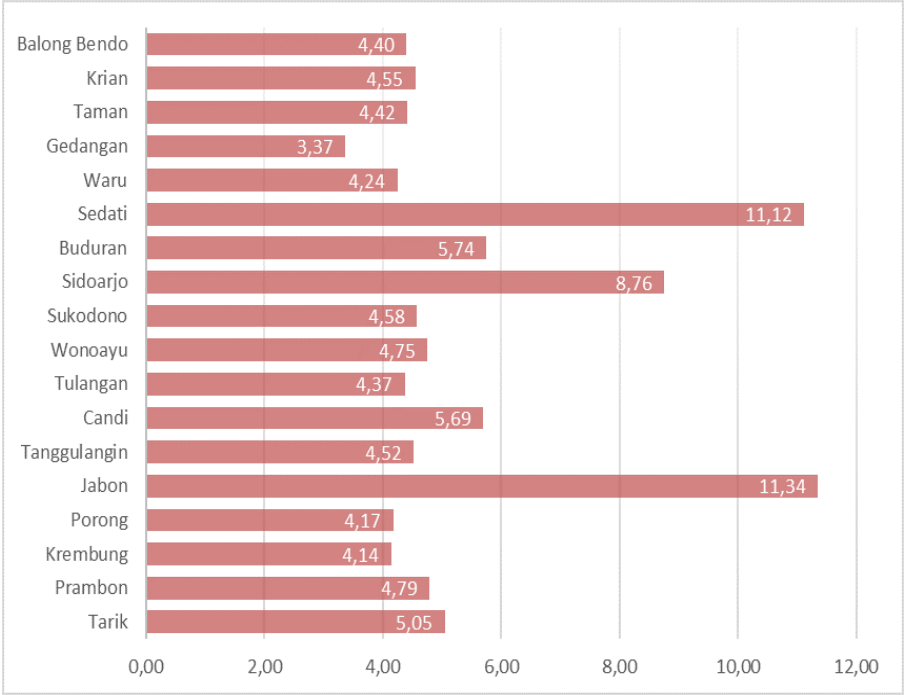

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area)* dan desa perkotaan (*urban area*).

Tabel I.5

Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	13	6
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	19	-

8.	Jabon	15	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	**322**	**31**

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Grafik I.2

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota “Delta”, dikarenakan wilayahnya yang berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Surabaya di sebelah utara dan Kali Porong di sebelah selatan.

Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada pada ketinggian 0-25 mdpl dan terbagi atas tiga kelas, yaitu :

- 0-3 meter, merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau, berada di sebelah timur.
- 3-10 meter, merupakan daerah bagian tengah yang berair tawar.
- 10-25 meter, terletak di daerah bagian barat.

Sepanjang tahun 2021, Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 35,6oC, terjadi di bulan Oktober. Sementara suhu terendah terjadi di bulan Juli, sebesar 19,1oC dengan kelembaban rata-rata sebesar 74,9 persen.

Sementara itu, bersumber dari lokasi penakar hujan yang terdapat di 30 titik berbeda yang tersebar di semua kecamatan di Sidoarjo, diketahui bahwa selama Januari- Desember 2021 terdapat 174 hari hujan.

Curah hujan dan jumlah hari hujan relatif tinggi selama Januari-Mei, tercatat sebanyak 113 hari hujan dengan curah hujan tertinggi sebesar 527,5 mm di bulan Februari. Curah hujan turun secara signifikan mulai bulan Juni sampai dengan Oktober, tercatat hanya 19 hari hujan dalam 5 bulan.

Tabel I.6

Suhu dan Kelembapan per Bulan di Tahun 2021

Bulan	Suhu (°C)			Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	24,3	27,0	31,5	58,8	84,8	100,0
Februari	24,2	27,3	31,6	55,9	83,2	100,0
Maret	24,4	27,9	32,2	51,2	82,6	100,0
April	24,5	28,5	32,7	44,3	77,5	96,7
Mei	25,8	29,0	32,4	52,1	76,6	93,5
Juni	25,2	28,2	32,1	54,3	76,5	99,1

Juli	23,5	28,8	31,9	44,0	75,4	95,0
Agustus	24,2	28,2	31,9	44,0	75,4	95,0
September	24,7	28,5	33,0	41,5	73,3	96,7
Oktober	25,2	29,5	33,9	40,5	70,0	94,2
Nopember	24,9	27,9	32,3	45,1	81,7	98,3
Desember	25,0	28,2	32,7	48,2	81,3	98,3

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Tabel I.7

Kecepatan Angin dan Tekanan Udara per Bulan di Tahun 2021

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mb)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	0,0	4,4	13,9	1.003,6	1.008,6	1.011,5
Februari	0,0	5,1	17,0	1.002,6	1.009,4	1.012,5
Maret	0,0	4,4	17,0	1.002,4	1.009,7	1.013,1
April	0,0	3,4	14,4	1.002,8	1.010,6	1.013,6
Mei	0,0	3,4	7,7	1.001,3	1.010,2	1.012,8
Juni	0,0	3,5	11,3	1.005,1	1.011,2	1.013,5
Juli	0,0	3,6	10,3	1.006,5	1.011,3	1.013,9
Agustus	0,0	3,9	9,8	1.006,5	1.011,8	1.014,4
September	0,0	4,0	13,4	1.006,1	1.011,3	1.014,8
Oktober	0,0	3,9	22,6	1.004,8	1.010,8	1.014,5
Nopember	0,0	3,4	12,9	1.003,4	1.009,1	1.012,6
Desember	0,0	3,9	10,3	1.004,4	1.009,8	1.013,1

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Tabel I.8

Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari per Bulan di Tahun 2021

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (day)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	572,0	26	33,6
Februari	417,0	23	54,1
Maret	258,8	17	65,6
April	102,6	9	80,2
Mei	10,2	3	89,6
Juni	211,2	10	78,0
Juli	17,1	3	88,6
Agustus	1,5	1	96,2
September	47,0	3	79,3
Oktober	15,0	2	75,4
Nopember	365,6	18	32,8
Desember	436,4	21	33,3

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019. Sedangkan mulai tahun 2020 jumlah penduduk mengalami penurunan karena mengalami koreksi melalui pembersihan database Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Setelah dilakukan konsolidasi dan penyandingan database, sehingga jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah terkoreksi. Berdasarkan laporan

perkembangan penduduk di tahun 2021, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.064.168 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Grafik I.3

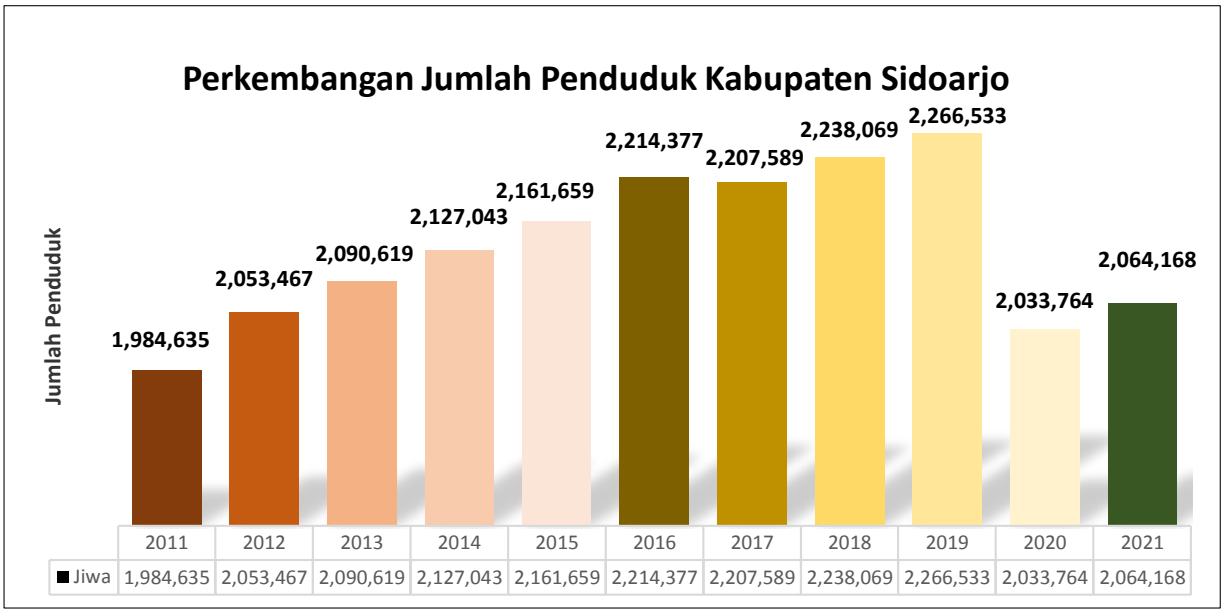

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Jumlah penduduk per Kecamatan, beserta laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.9

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km2
Tarik	69.970	1,13	3,39%	1 940,38
Prambon	80.959	1,26	3,92%	2 365,15
Krembung	70.956	1,54	3,44%	2 401,22
Porong	74.290	1,15	3,60%	2 491,28
Jabon	57.183	1,62	2,77%	705,96
Tanggulangin	91.119	1,47	4,41%	2 821,90
Candi	156.451	1,97	7,58%	3 846,84
Tulangan	104.407	2,02	5,06%	3 345,31

Wonoayu	87.278	1,98	4,23%	2 573,05
Sukodono	124.734	2,36	6,04%	3 816,83
Sidoarjo	204.441	1,65	9,90%	3 267,92
Buduran	100.296	1,60	4,86%	2 444,46
Sedati	98.246	1,67	4,76%	1 236,89
Waru	201.920	0,58	9,78%	6 659,63
Gedangan	121.920	1,25	5,89%	5 049,92
Taman	209.510	0,82	10,15%	6 642,68
Krian	134.051	2,38	6,49%	4 124,65
Balongbendo	76.856	1,07	3,72%	2 447,64
JUMLAH	**2.064.168**	**1,50**	**100,00%**	**2.890,02**

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Dari tabel tersebut terlihat bahwa berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 209.510 jiwa atau 10,15%, sedangkan kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 57.183 jiwa atau 2,77%.

Jumlah penduduk per Kecamatan menurut jenis kelamin berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel I.10

Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TARIK	35,267	34,703	69,970
2	PRAMBON	40,836	40,123	80,959
3	KREMBUNG	35,508	35,448	70,956
4	PORONG	37,544	36,746	74,290
5	JABON	28,743	28,440	57,183
6	TANGGULANGIN	45,747	45,372	91,119
7	CANDI	78,328	78,123	156,451
8	SIDOARJO	101,594	102,847	204,441

9	TULANGAN	52,437	51,970	104,407
10	WONOAYU	44,058	43,220	87,278
11	KRIAN	67,914	66,137	134,051
12	BALONGBENDO	38,827	38,029	76,856
13	TAMAN	105,446	104,064	209,510
14	SUKODONO	63,194	61,540	124,734
15	BUDURAN	50,404	49,892	100,296
16	GEDANGAN	60,961	60,540	121,501
17	SEDATI	49,487	48,759	98,246
18	WARU	100,373	101,547	201,920
T O T A L		**1.036.668**	**1.027.500**	**2.064.168**

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terbanyak adalah penduduk laki-laki yaitu 1.036.668 jiwa atau 50,22%, sedangkan penduduk perempuan yaitu 1.027.500 jiwa atau 49,78%. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel dan grafik berikut :

Grafik I.4

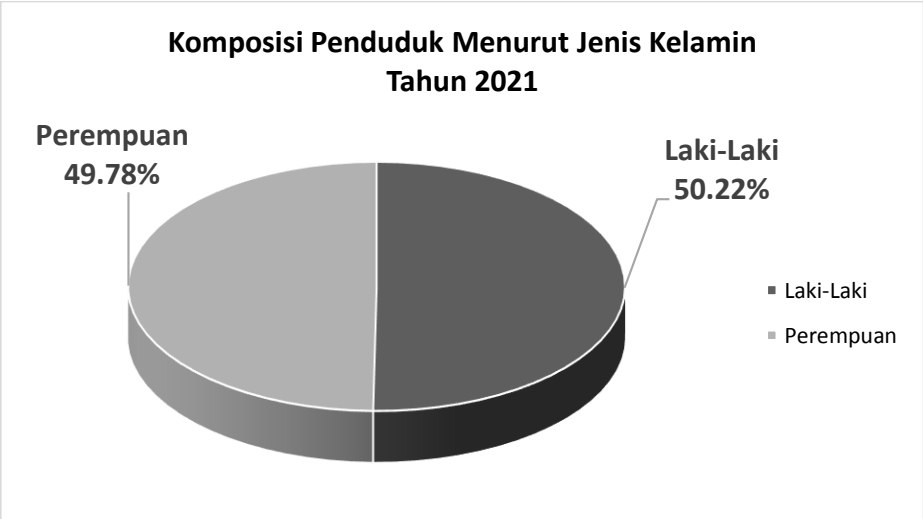

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Sedangkan berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Sidoarjo sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur

muda yaitu 15 tahun samai dengan 19 tahun. Hal ini terlihat pada grafik berikut.

Grafik I.5

Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2021

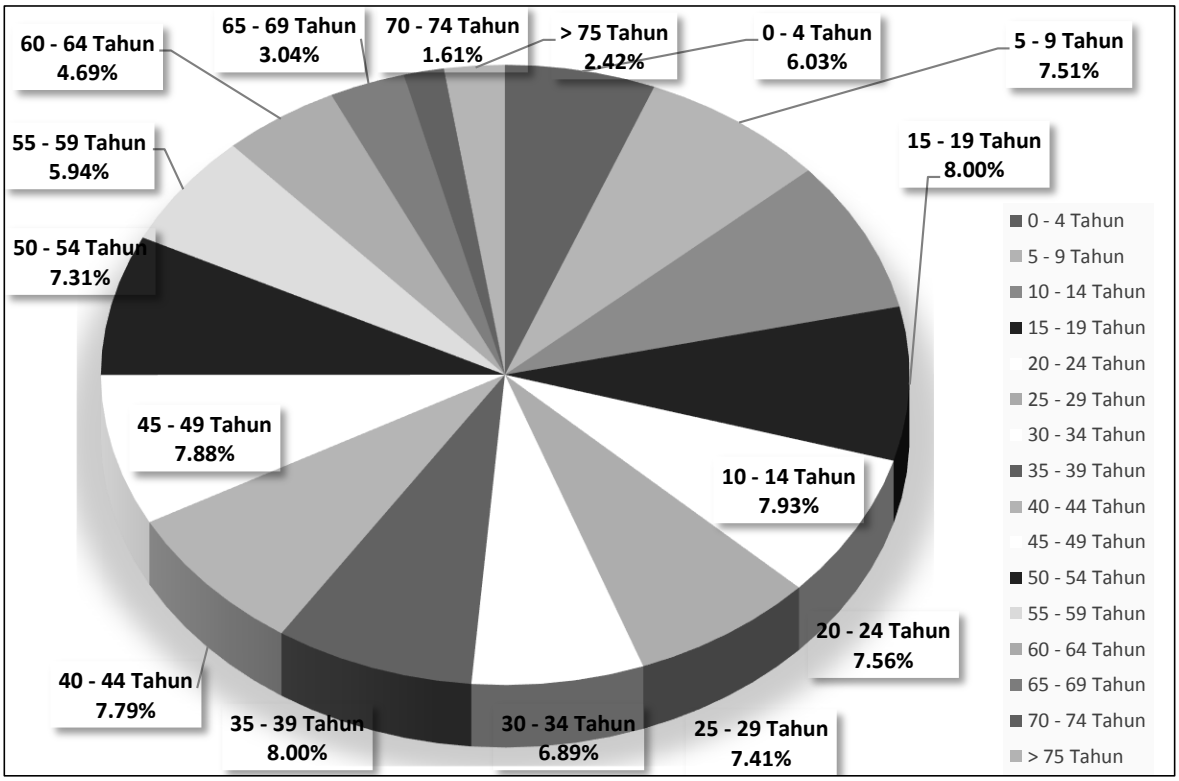

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Tabel I.11

Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Struktur Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	63,224	58,613	121,837
2.	5-9	77,580	72,505	150,085
3.	10-14	82,985	77,906	160,891
4.	15-19	85,359	79,564	164,923
5.	20-24	80,290	76,804	157,094
6.	25-29	78,460	75,930	154,390
7.	30-34	70,600	68,708	139,308
8.	35-39	80,048	79,727	159,775

9.	40-44	78,369	82,152	160,521
10.	45-49	77,120	82,559	159,679
11.	50-54	75,766	78,728	154,494
12.	55-59	60,701	65,098	125,799
13.	60-64	48,799	48,955	97,754
14.	65-69	35,468	32,199	67,667
15.	70-74	17,663	18,785	36,448
16.	> 75	24,236	29,267	53,503
	JUMLAH	**1.036.668**	**1.027.500**	**2.064.168**

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

3. Kondisi Perekonomian

Nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 197,24 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 6,96 triliun rupiah dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 204,20 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh penurunan produksi di seluruh lapangan usaha akibat adanya pandemi covid 19.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 140,49 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 135,31 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 terjadi perlambatan terhadap perekonomian Sidoarjo sebesar 3,69 persen. Penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi tiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021), struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha,

sebagai berikut: industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; dan kategori konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing- masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Sidoarjo.

Pada tahun 2021, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sidoarjo dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 51,17 persen, meningkatdari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya lapangan usaha perdaganan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 16,02, turun 0,27 persen dari tahun 2020, disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 8,68 persen.

Kondisi ekonomi daerah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 17 (tujuh belas) sektor usaha yang dominan di masyarakat. Rincian PDRB per sektor usaha release terakhir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, yaitu pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel I.12

PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (dalam Miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.478,98	2.626,37
2	Pertambangan dan Penggalian	134,92	101,68
3	Industri Pengolahan	109.461,90	76.097,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.784,97	1.078,33
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	139,82	117,09
6	Konstruksi	16.070,90	11.386,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	35.456,16	22.721,41
8	Transportasi dan Pergudangan	15.037,48	6.672,86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.4169,71	4.922,01
10	Informasi dan Komunikasi	7.997,72	7.070,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.550,76	1.614,91
12	Real Estate	1.994,61	1.406,46

13	Jasa Perusahaan	327,12	211,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.881,62	2.298,30
15	Jasa Pendidikan	2.479,17	1.693,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	729,41	519,60
17	Jasa Lainnya	648,64	462,02
	TOTAL	**210.643,89**	**141.000,36**

Sumber data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berikut *share* PDRB berdasarkan ADHK Kabupaten Sidoarjo per sektor, sebagaimana grafik :

Grafik I.6

***Share* PDRB Berdasarkan ADHK**

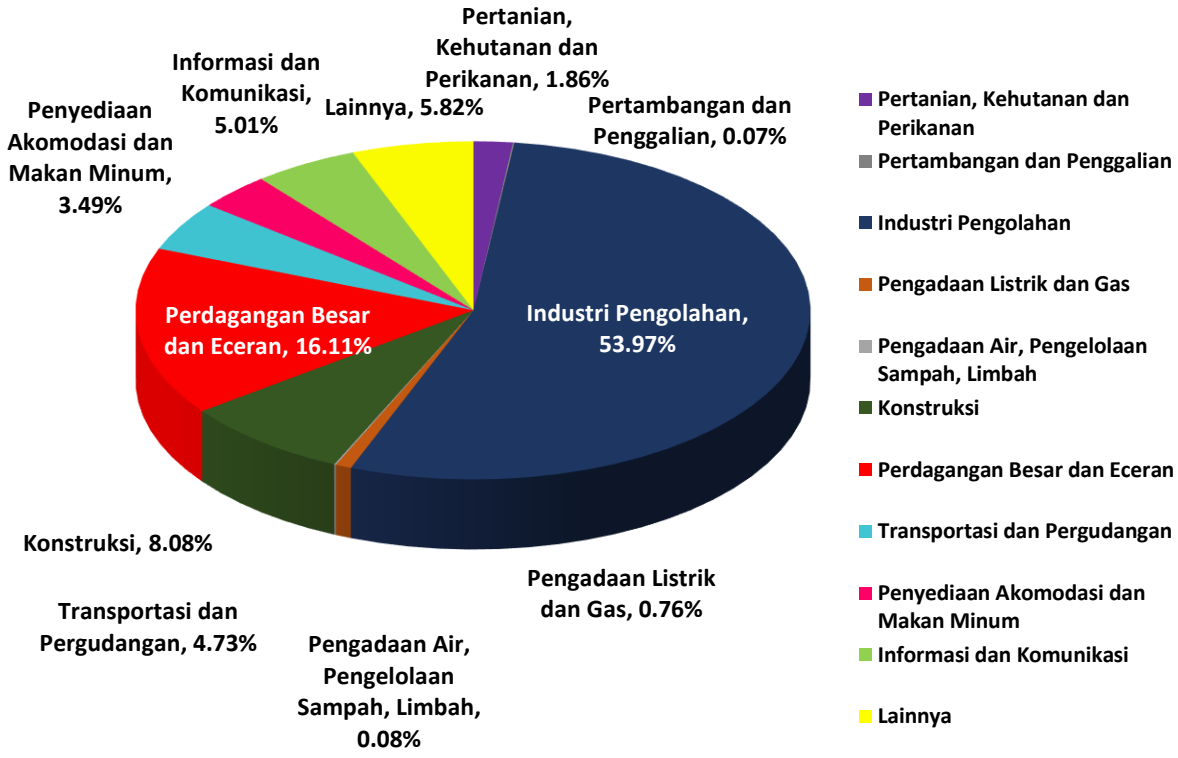

Sumber data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

D. Sumber Daya PNS

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 10.262 orang yang terdiri dari, sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Jabatan Struktural	Fungsional Umum / Pelaksana	Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Daerah	18	120	26	164
2	Badan Kepegawaian Daerah	7	42	24	73
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4	20	4	28
4	Badan Pelayanan Pajak Daerah	6	55	11	72
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	57	6	69
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5	49	9	63
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	28	18	52
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	4	45	7	56
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	30	16	51
10	Dinas Kesehatan	8	245	1.154	1.407
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	39	15	59
12	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	6	27	8	41
13	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	6	259	20	285
14	Dinas Pangan Dan Pertanian	9	55	67	131
15	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	7	95	15	117
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	21	12	38
17	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13	566	5.022	5.602
18	Dinas Perhubungan	14	53	18	85

19	Dinas Perikanan	6	29	6	41
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5	140	19	164
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5	14	15	34
22	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang	8	32	13	53
23	Dinas Sosial	6	18	8	32
24	Dinas Tenaga Kerja	6	15	13	34
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	16	12	35
26	Inspektorat	7	20	40	67
27	Kecamatan Balongbendo	7	18	1	26
28	Kecamatan Buduran	6	15	1	22
29	Kecamatan Candi	5	21	1	27
30	Kecamatan Gedangan	6	13	1	20
31	Kecamatan Jabon	5	11	1	17
32	Kecamatan Krembung	8	17	1	26
33	Kecamatan Krian	13	23	0	36
34	Kecamatan Porong	14	26	1	41
35	Kecamatan Prambon	4	22	2	28
36	Kecamatan Sedati	8	19	1	28
37	Kecamatan Sidoarjo	38	54	1	93
38	Kecamatan Sukodono	7	15	1	23
39	Kecamatan Taman	18	32	1	51
40	Kecamatan Tanggulangin	7	19	1	27
41	Kecamatan Tarik	8	21	1	30
42	Kecamatan Tulangan	7	19	2	28
43	Kecamatan Waru	8	19	1	28
44	Kecamatan Wonoayu	6	18	1	25
45	Rumah Sakit Umum Daerah	25	145	481	651
46	Satuan Polisi Pamong Praja	7	28	61	96
47	Sekretariat DPRD	6	39	11	56
48	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	7	13	10	30
	JUMLAH	**404**	**2.698**	**7.160**	**10.262**

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

E. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah yang diamanatkan pada UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menuntut semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Pagu pendapatan dapat didorong melalui penggalian potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara umum struktur pendapatan daerah setelah otonomi, sumber penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Dana Alokasi Umum (DAU), (4) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (5) Bagi Hasil Pajak dan Batuan Keuangan dari Propinsi.

Secara umum peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan :

1) Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2) Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru.
3) Optimalisasi penarikan pendapatan pajak dan retribusi dilakukan melalui pemanfaat information and communication technologi (ICT).
4) Proyeksi atas perhitungan pendapatan daerah harus berdasarkan pada pemetaaan potensi dan kajian akademik.

5) Penyelesaian pajak dan retribusi terutang dioptimalkan melalui penagihan secara terus menerus dan diserta kajian mengenai cleansing data.

Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Sidoarjo.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Pendapatan (Rp.)	Realisasi Pendapatan (Rp.)	%
2016	Rp. 3.389.966.737.239,00	Rp. 3.668.041.957.746,70	108,20%
2017	Rp. 4.029.066.902.057,03	Rp. 4.045.685.362.112,53	100,41%
2018	Rp. 4.124.471.103.455,83	Rp. 4.332.577.984.768,01	105,05%
2019	Rp. 4.394.906.478.896,00	Rp. 4.444.626.346.624,69	101,13%
2020	Rp. 4.058.099.090.414,00	Rp. 4.422.599.399.218,15	108,98%
2021	Rp. 4.270.781.226.451,00	Rp. 4.669.635.698.473,41	109,34%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2020 Audited, seangkan untuk Tahun 2021 Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Grafik I.7

Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sidoarjo

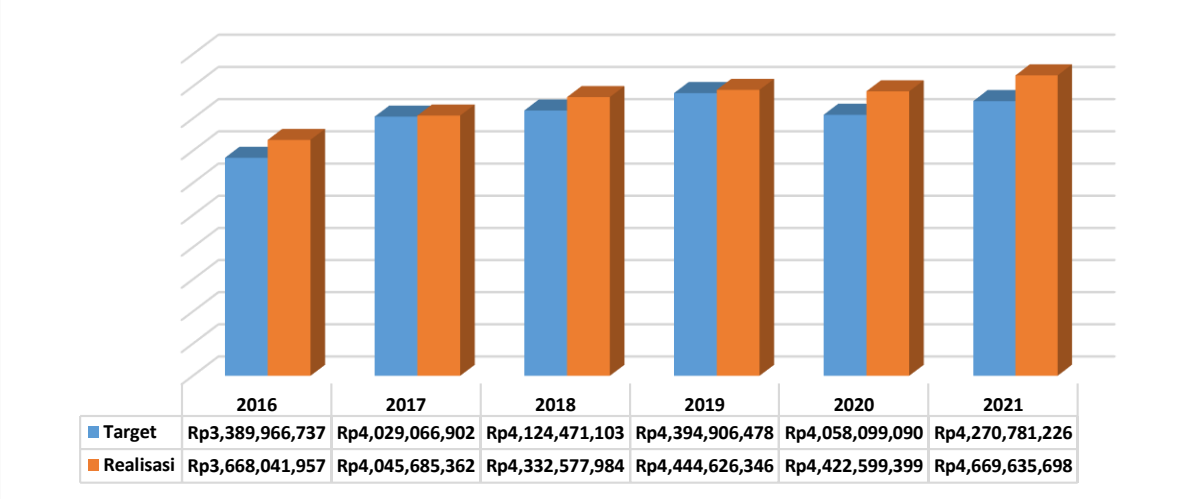

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2020 Audited, seangkan untuk Tahun 2021 Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,714,484,423,345.00	1,921,244,253,335.69	112.06
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2,331,099,589,317.00	2,521,918,383,870.00	108.19
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	225,197,213,789.00	226,473,061,267.72	100.57
	JUMLAH PENDAPATAN	**4,270,781,226,451.00**	**4,669,635,698,473.41**	**109.34**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.4.669.635.698.473,41 atau 109,34% dari target / anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.270.781.226.451,00.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 sebesar Rp.1.921.244.253.335,69 atau tercapai sebesar 112,06% dari seluruh target PAD sebesar Rp.1.714.484.423.345,00.

Rincian realisasi dan target PAD tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1.	Pajak Daerah	962,962,000,000.00	1,027,822,704,720.00	106.74
1.1.2.	Retribusi Daerah	71,797,328,070.00	65,341,926,569.00	91.01
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31,057,199,907.00	31,133,395,762.50	100.25
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah	648,667,895,368.00	796,946,226,284.19	122.86
	JUMLAH	**1,714,484,423,345.00**	**1,921,244,253,335.69**	**112.06**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

b. Pajak Daerah

Pajak daerah tahun 2021 realisasinya tercapai sebesar Rp.1.027.822.704.720,00 atau 106,74% dari seluruh target penerimaan pajak daerah.

JENIS / OBYEK PAJAK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pajak Daerah	**962,962,000,000.00**	**1,027,822,704,720.00**	**106.74**
Pajak Hotel	12,000,000,000.00	14,080,874,501.00	117.34
Pajak Restoran	56,742,000,000.00	63,518,290,481.00	111.94
Pajak Hiburan	1,056,000,000.00	1,201,039,009.00	113.73
Pajak Reklame	14,000,000,000.00	14,593,286,453.00	104.24
Pajak Penerangan Jalan	352,000,000,000.00	313,967,752,550.00	89.20
Pajak Parkir	11,781,000,000.00	11,788,834,175.00	100.07
Pajak Air Tanah	3,080,000,000.00	3,167,681,195.00	102.85
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	258,000,000,000.00	254,650,339,833.00	98.70

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	254,303,000,000.00	350,854,606,523.00	137.97

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Pajak penerangan jalan tidak tercapai karena adanya pandemi covid yang berdampak pada sektor industri (industri, mall, bioskop, dan lain sebagainya), serta kebijakan pemerintah pusat terkait pembebasan / relaksasi pembayaran listrik.

PBBP2 tidak tercapai karena wajib pajak mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi covid sehingga mengajukan pengurangan, dan partisipasi wajib pajak dengan ketetapan kecil belum maksimal karena terkendala menurunnya aktivitas ekonomi akibat pandemi covid.

c. Retribusi Daerah

Retribusi daerah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.65.341.926.569,00 atau tercapai 91,01% dari seluruh target retribusi daerah yang ditetapkan. Seluruh jenis retribusi realisasinya terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK RETRIBUSI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Retribusi Daerah	**71,797,328,070.00**	**65,341,926,569.00**	**91.01**
Retribusi Jasa Umum	47,593,252,500.00	35,630,980,382.00	74.87
Retribusi Jasa Usaha	5,351,798,000.00	5,587,920,734.00	104.41
Retribusi Perizinan Tertentu	18,852,277,570.00	24,123,025,453.00	127.96

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.31.133.395.762,50 dan terealisasi sebesar Rp.31.057.199.907,00 atau tercapai sebesar 100,25%.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**31,057,199,907.00**	**31,133,395,762.50**	**100.25**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas	23,847,730,993.00	23,847,730,993.50	100.00

Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) DELTA ARTHA & BANK JATIM			
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) PDAU	375,834,464.00	375,834,464.00	100.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) PDAM DELTA TIRTA	6,833,634,450.00	6,909,830,305.00	101.12
JUMLAH	**31,057,199,907.00**	**31,133,395,762.50**	**100.25**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

e. Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan lain–lain PAD tahun 2021 sebesar Rp.796.946.226.284,19 atau tercapai 122,86%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.648.667.895.368,00.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	658,380,545.00	1,944,696,219.00	295.38
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3,066,197,000.00	3,567,742,928.00	116.36
Jasa Giro	5,253,029,190.00	5,484,020,201.10	104.40
Pendapatan Bunga	30,106,849,314.00	18,644,513,626.16	61.93
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	58,431,000.00	141,718,400.00	242.54
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	682,506,208.00	1,667,648,229.45	244.34
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	338,613,579.00	1,791,919,877.39	529.19
Pendapatan Denda Pajak Daerah	2,093,827,331.00	2,561,423,056.00	122.33
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	63,947,040.00	94,653,722.00	148.02
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	961,482,834.00	961,482,834.00	100.00
Pendapatan dari Pengembalian	170,828,876.00	247,736,588.00	145.02
Pendapatan BLUD	603,056,302,451.00	757,229,531,438.09	125.57
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	57,200,000.00	57,200,000.00	100.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	25,000,000.00	34,265,665.00	137.06
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2,075,300,000.00	2,517,673,500.00	121.32
JUMLAH	**648,667,895,368.00**	**796,946,226,284.19**	122.86

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

f. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.2.521.918.383.870,00 atau 108,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.331.099.589.317,00. Rincian target dan realisasi pendapatan dana perimbangan adalah sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN TRANSFER	2,331,099,589,317.00	2,521,918,383,870.00	108.19
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,674,648,082,317.00	1,716,490,317,781.00	102.50
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	317,151,507,000.00	315,483,708,200.00	99.47
Transfer Pemerintah Provinsi	339,300,000,000.00	489,944,357,889.00	144.40
JUMLAH	2,331,099,589,317.00	2,521,918,383,870.00	108.19

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

g. **Lain – Lain Pendapatan Yang Sah**

Realisasi atas Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**225,197,213,789.00**	**226,473,061,267.72**	**100.57**
Pendapatan Hibah	177,238,450,000.00	174,790,689,148.53	98.62
Pendapatan Lainnya	47,958,763,789.00	51,682,372,119.19	107.76
JUMLAH	**225,197,213,789.00**	**226,473,061,267.72**	100.57

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

F. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, sebagi upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien

serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing- masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk menadanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Pada jenis belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan multi-years dan atau model pembayaran dengan turn-keys, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian misi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana berikut :

1) Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, antara lain belanja pegawai dan overhead cost di setiap Perangkat Daerah secara proporsional.
2) Belanja Daerah difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar dan 17 (tujuh belas) program prioritas yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi misi pembangunan kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026,
3) Kebijakan selektif dalam pembangunan infrastruktur, yang akan diprioritaskan pada pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
4) Kebijakan matching program lintas Perangkat Daerah maupun dengan pihak swasta.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
2016	Rp. 3.957.737.172.284,80	Rp. 3.651.619.251.558,26	92,27%
2017	Rp. 4.613.059.104.900,67	Rp. 3.748.313.122.059,10	81,25%
2018	Rp. 5.005.097.845.031,35	Rp. 4.188.537.810.911,10	83,69%
2019	Rp. 5.423.124.488.516,28	Rp. 4.344.722.393.986,67	80,11%
2020	Rp. 5.182.074.462.157,57	Rp. 4.441.673.370.394,65	85,71%
2021	Rp. 5.376.163.555.617,00	Rp. 4.936.099.885.354,76	91,81%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2020 Audited, seangkan untuk Tahun 2021 Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Grafik I.8

Perkembangan Belanja Kabupaten Sidoarjo

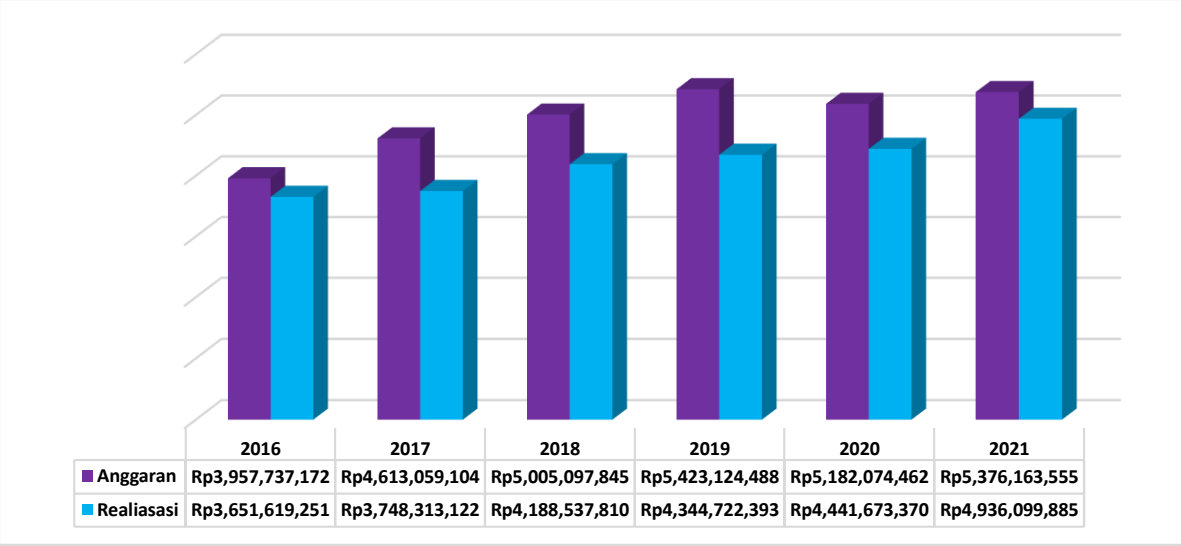

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2020 Audited, seangkan untuk Tahun 2021 Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Target belanja daerah untuk tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.5.376.163.555.617,00, dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.4.936.099.885.354,76 atau tercapai sebesar 91,81%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2	BELANJA DAERAH	5,376,163,555,617.00	4,936,099,885,354.76	*91.81*
2.1.	BELANJA OPERASI	3,560,645,958,978.00	3,295,658,462,944.69	*92.56*
2.2.	BELANJA MODAL	1,073,360,369,732.00	919,008,763,415.00	*85.62*
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	75,110,000,000.00	56,550,687,585.07	*75.29*
2.4.	BELANJA TRANSFER	667,047,226,907.00	664,881,971,410.00	*99.68*
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5,376,163,555,617.00	4,936,099,885,354.76	*91.81*

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.3.295.658.462.944,69 atau 92,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.560.645.958.978,00.

Rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.1.	**Belanja Operasi**	**3,560,645,958,978.00**	**3,295,658,462,944.69**	**92.56**
2.1.1	Belanja Pegawai	1,690,813,768,611.00	1,620,047,237,731.00	95.81
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,594,323,663,013.00	1,413,430,367,412.79	88.65
2.1.3	Belanja Subsidi	5,880,000,000.00	4,563,492,001.00	77.61
2.1.4	Belanja Hibah	155,090,239,117.00	147,342,921,799.90	95.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	114,538,288,237.00	110,274,444,000.00	96.28
	JUMLAH	**3,560,645,958,978.00**	**3,295,658,462,944.69**	**92.56**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

b. Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.919.008.763.415,00 atau 85,62% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.073.360.369.732,700

Rincian realisasi belanja langsung adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.2.	BELANJA MODAL	1,073,360,369,732.00	919,008,763,415.00	85.62
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	81,175,000,000.00	34,014,902,017.00	41.90
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	351,231,977,235.00	308,230,302,940.00	87.76
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	327,607,870,610.00	301,625,990,175.00	92.07
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	310,399,131,887.00	272,453,365,570.00	87.78
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	620,690,000.00	546,754,325.00	88.09
2.2.5.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2,325,700,000.00	2,137,448,388.00	91.91
	Jumlah Belanja Modal	1,073,360,369,732.00	919,008,763,415.00	85.62

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Belanja modal tanah yang prosesnya belum selesai antara lain pembebasan lahan untuk pembangunan Frontage Road, dan pembangunan Puskesmas Sekardagangan.

c. Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja Tidak Terduga tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.56.550.687.585,07 atau 72,59% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.75.110.000.000,00

Belanja Transfer tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.664.881.971.410,00 atau 99,68% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.667.047.226.907,00

Rincian realisasi belanja tidak terduga dan belanja transfer adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	75,110,000,000.00	56,550,687,585.07	75.29
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	75,110,000,000.00	56,550,687,585.07	75.29
2.4.	BELANJA TRANSFER	667,047,226,907.00	664,881,971,410.00	99.68
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	103,475,932,807.00	103,200,571,603.00	99.73

2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	563,571,294,100.00	561,681,399,807.00	99.66

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

G. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Sedangkan Arah Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada sisi penerimaan pembiayaan akan diarahkan kepada beberapa hal sebagai berikut :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan estimasi selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Silpa yang ditimbulkan oleh adanya keggalan penyerapan anggaran akan ditekan seminimal mungkin untuk memastikan APBD di tahun berkenaan dapat terserap dengan baik sesuai target yang telah ditentukan. Sedangkan Silpa yang diperoleh atas keberhasilan efisiensi anggaran yang tidak berdampak pada pengurangan target pembangunan apat terus dilakukan.

b. Penerimaan kembali pengembalian Dana Bergulir

Penerimaan kembali pengembalian dana bergulir digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang berasal dari pengembalian angsuran pokok pinjaman dana bergulir. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada jenis-jenis penerimaan pembiayaan daerah.

c. Alternatif Pendanaan Non APBD

Untuk menunjang kinerja pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki opsi alternatif pendanaan pembangunan daerah melalui beberapa kebijakan sebagai berikut :

1) Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah bersumber dari :

I. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
II. Pemerintah Daerah lain;
III. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
IV. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalkan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI); dan
V. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

2) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP) KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan tujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruh modalnya menggunakan sumber dari badan usaha dengan sebuah pembagian risiko antar para pihak. keterlibatan swasta bukan hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional serta menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih tinggi bagi pengguna akhir.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur. Pada saat ini telah diregulasi melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan

Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2015 tentang pelaksanaan KPBU, melalui alternative skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Jawa Timur, khususnya bidang infrastruktur publik.

3) Obligasi Pemerintah Daerah.

Obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah, namun efek yang diterbitkan tidak dijamin oleh Pemerintah. Revenue Bond adalah salah satu jenis obligasi pendapatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan digunakan hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.

4) Corporate Social Responsibility (CSR)

Kinerja pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk Dunia Usaha melalui pelaksanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau i (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peran Pemerintah daerah dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah memberikan data-data pembangunan pada bidang-bidang yang dapat menjadi item pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat membantu dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran tim fasilitasi CSR/PKBL harus lebih ditingkatkan, baik pada level provinsi maupun Kabupaten / Kota. Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), sebagai salah satu

bentuk kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kontribusi ini lebih didasarkan kepada kesukarelaan dan fasilitasi yang di berikan oleh pemerintah daerah diarahkan untuk memperluas dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah melalui penyediaan data base, sinergi dan sinkronisasi program, joint monitoring, dan pembinaan teknis.

5) Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO

Pada pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentan kerjasama daerah, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Kerjasama daerah ini merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan promosi potensi daerah, serta objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Internasional disebut juga dengan 'NGO' (Non Govermental Organization) merupakan organisasi/lembaga internasional kegiatannya bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan manfaat dari mitra kerjasama ini

diantaranya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, Transfer of knowledge, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat direplikasikan ke daerah lain.

6) PINA

Pemerintah mengembangkan skema investasi yang murni tidak melibatkan Dana dari Pemerintah melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), namun dapat berkolaborasi dengan proyek KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 diarahkan pada :

1. Penutupan defisit riil anggaran tahun berjalan, dimana pengeluaran pembiayaan ini banyak ditopang di komponen SILPA,
2. Pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi belanja yang urgent di masa depan, antara lain antisipasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada tahun 2024.
3. Penyertaan Modal pada badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Sidoarjo. Dimana penyertaan modal ini bertujuan untuk memberikan stimulus kepada berkembangnya BUMD agar dapat memberikan peran yang lebih besar bagi penguatan ekonomi masyarakat.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah.

Struktur Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Surplus/Defisit			**838,918,142,285.00**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**1,108,082,329,166.00**	**1,109,326,717,092.78**	**1,244,387,926.78**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1,106,084,911,309.00	1,106,084,911,309.00	0.00
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	1,997,417,857.00	3,241,805,783.78	1,244,387,926.78

Pengeluaran Pembiayaan daerah	**2,700,000,000.00**	**1,866,000,000.00**	**(834,000,000.00)**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2,700,000,000.00	1,866,000,000.00	(834,000,000.00)
Badan Usaha Swasta			
Pembiayaan Netto	**1,105,382,329,166.00**	**1,107,460,717,093.00**	**2,078,387,927.00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			**840,996,530,211.00**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.5.329.318.676.819,00 bertambah sebesar Rp.28.565.604.034,00 sehingga menjadi Rp.5.327.884.280.853,00 sebagaimana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :	
a. Semula	Rp.4.210.818.676.819,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.41.683.274.868,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.4.252.501.951.687,00
2. Belanja Daerah :	
a. Semula	Rp.5.329.318.676.819,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.28.565.604.034,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.5.327.884.280.853,00
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp.1.123.000.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.14.917.670.834,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.1.108.082.329.166,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.4.500.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.1.800.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.2.700.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.1.105.382.329.166,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,00

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dimaksud, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.1.609.820.835.819,00
2. Bertambah	Rp.104.663.587.526,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.1.714.484.423.345,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.2.450.517.541.000,00
2. Berkurang	(Rp.100.159.710.947,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.2.350.357.830.053,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.150.480.300.000,00
2. Bertambah	(Rp.37.179.398.289,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.187.659.698.289,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.953.962.000.000,00
2. Bertambah	Rp.9.000.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.962.962.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.73.314.210.960,00
2. Berkurang	(Rp.1.516.882.890,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.71.797.328.070,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.30.251.300.720,00
2. Bertambah	Rp.805.899.187,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.31.057.199.907,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.552.293.324.139,00
2. Bertambah	Rp.96.374.571.229,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.648.667.895.368,00

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp.2.014.317.541.000,00
2. Berkurang	(Rp.33.656.026.447,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.1.980.661.514.553,00

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp.436.200.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.66.503.684.500,00)
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.369.696.315.500,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah	Rp.2.700.000.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.2.700.000.000,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula	Rp.150.480.300.000,00
2. Bertambah	Rp.34.479.398.289,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.184.959.698.289,00

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp.3.517.547.482.219,00
2. Bertambah	Rp.35.135.476.759,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.3.552.682.958.978,00

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.2.930.682.806.493,00
2. Berkurang	(Rp.109.699.184.436,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.1.062.244.094.968,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.38.910.000.000,00
2. Bertambah	Rp.37.000.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.75.910.000.000,00

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp.600.917.915.196,00
2. Bertambah	Rp.66.129.311.711,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.667.047.226.907,00

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp.1.635.778.054.037,00
2. Bertambah	Rp.55.035.714.574,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.1.690.813.768.611,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.1.630.699.190.065,00
2. Berkurang	(Rp.37.197.327.052,00)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.1.593.501.863.013,00

c. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.0,00

d. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.2.520.000.000,00
2. Bertambah	Rp.3.360.000.000,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.5.880.000.000,00

e. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.156.290.093.117,00
2. Berkurang	(Rp.1.199.854.000,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.155.090.239.117,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.92.260.145.000,00
2. Bertambah	Rp.15.136.943.237,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.107.397.088.237,00

Belanja Modal sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.89.000.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.7.825.000.000,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.81.175.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.179.289.182.162,00
2. Bertambah	Rp.160.826.520.309,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.340.115.702.471,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp.523.914.421.098,00
2. Berkurang	(Rp.196.306.550.488,00)
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.327.607.870.610,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. Semula	Rp.376.491.077.394,00
2. Berkurang	(Rp.66.091.945.507,00)
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.310.399.131.887,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.3.248.598.750,00
2. Berkurang	(Rp.362.708.750,00)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.2.885.890.000,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah	Rp.60.500.000,00
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.60.500.000,00

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud, yaitu :

1. Semula	Rp.38.910.000.000,00
2. Bertambah	Rp.37.000.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.75.910.000.000,00

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.102.727.621.096,00
2. Bertambah	Rp.748.311.711,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.103.475.932.807,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.498.190.294.100,00
2. Bertambah	Rp.65.381.000.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.563.571.294.100,00

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.1.123.000.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.14.917.670.834,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.1.108.082.329.166,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.4.500.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.1.800.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.2.700.000.000,00

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.1.122.500.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.16.415.088.691,00)
Jumlah sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.1.106.084.911.309,00

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan

Rp.0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1. Semula Rp.500.000.000,00
2. Bertambah Rp.1.497.417.857,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan

Rp.1.997.417.857,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Rp.0,00

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud, terdiri :

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan

Rp.0,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1. Semula Rp.4.500.000.000,00
2. Berkurang (Rp.1.800.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp.2.700.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pembayaran pokok utang	Rp.0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

a. Semula	Rp.0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Semula	Rp.0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.0,00

Tema pembangunan Tahun 2021 sebagaimana RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 adalah “Menciptakan Stabilisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang Berdaya Saing”, dimana Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Sidaorjo Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan
   a) Pembangunan RKB SD Negeri
   b) Pembangunan RKB SMP Negeri
   c) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Negeri
   d) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SMP Negeri
   e) Pembangunan Bumi Perkemahan
2. Kesehatan
   a) Pembangunan RSUD Barat
   b) Pembangunan Puskesmas Baru
   c) Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk PBI Daerah

3. Infrastruktur
    a) Pembangunan Frontage Road
    b) Pelebaran Jalan Simpang Majapahit
    c) Pengendalian Banjir (diluar Perpres 80/2019)
    d) Gedung Pemerintahan Daerah yang representatif
    e) Belanja Modal Infrastruktur Lainnya (PJU, Sanitasi, Jalan Lingkungan, Peningkatan Jalan Kabupaten, RTH / Taman Tematik, dan sebagainya)
4. Kewilayahan
    a) PIWK
    b) Pelayanan Kecamatan / Kelurahan
    c) Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. Sosial
    a) Pembangunan Liponsos
    b) Belanja Hibah
    c) Belanja Bansos
    d) Belanja Tidak Terduga
6. Kepemudaan dan Olahraga
    a) Revitalisasi Kawasan GOR
    b) Pembangunan Wisma Atlet

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran capaain kinerja tertinggi dari tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 terdapat 10 IKU, yang hasil keberhasilan kinerjanya dapat disampaikan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	STATUS
			2020	2021	2021		
1	Indeks Good Governance	Poin	77,78	70,76	80,39	113,61%	Tercapai
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B	BB	*)	*)	Belum Rilis
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	-3,69	1,00	4,21	421%	Tercapai
4	Indeks Gini	Poin	0,31	0,365	0,347	105,19%	Tercapai
5	Tingkat Kemiskinan	%	5,59	6,34	5,93	106,91%	Tercapai
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,97	10,54	10,87	96,96%	Belum Tercapai
7	Indeks Infrastruktur	Poin	1,348	0,755	0,763	101,06%	Tercapai
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	80,29	80,41	80,65	100,30%	Tercapai
9	Indeks Kebahagiaan	Poin	71,60	81,14	82,07	101,15%	Tercapai
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,30	59,79	59,81	100,03%	Tercapai

**) Belum Rilis dari Kementerian PAN dan RB*

1. Indeks Good Governance

Indikator ini digunakan untuk memastikan berjalannya pemerintahan yang baik dan transparan sebagai prinsip pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks Good Governance (IGG) dalam hal ini berposisi sebagai tolok ukur yang dipakai oleh Pemerintah Pusat dalam mengukur tingkat kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Untuk memastikan berjalannya pemerintahan yang baik dan transparan sebagai prinsip pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan penilaian kinerja pemerintahan dengan mengukur indeks good governance. Tujuan menghitung indeks good governance adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang lebih akurat tentang kapasitas Pemda
2. Menjadi informasi bagi Pemda dalam mengukur daya saing dan keunggulan daerah
3. Menjadi salah satu bentuk dari pertanggung jawaban (akuntabilitas) Pemerintah Daerah terhadap stakeholders di daerah
4. Menjadi informasi bagi pihak swasta dalam membangun kerjasama dan atau kerjasama di daerah
5. Menjadi salah satu indikasi makro keberhasilan pembangunan yang dapat dikomparasi dengan daerah lainya

Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 ditargetkan sebesar 70,76 dan berdasarkan hasil survey yang dilakukan, tahun 2021 realisasi sebesar 80.39 dengan kategori sangat baik, atau capaian 113,61%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 77,78 terdapat kenaikan sebesar 2,61 poin. Berikut perkembangan Indeks Good Governance di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.A.1

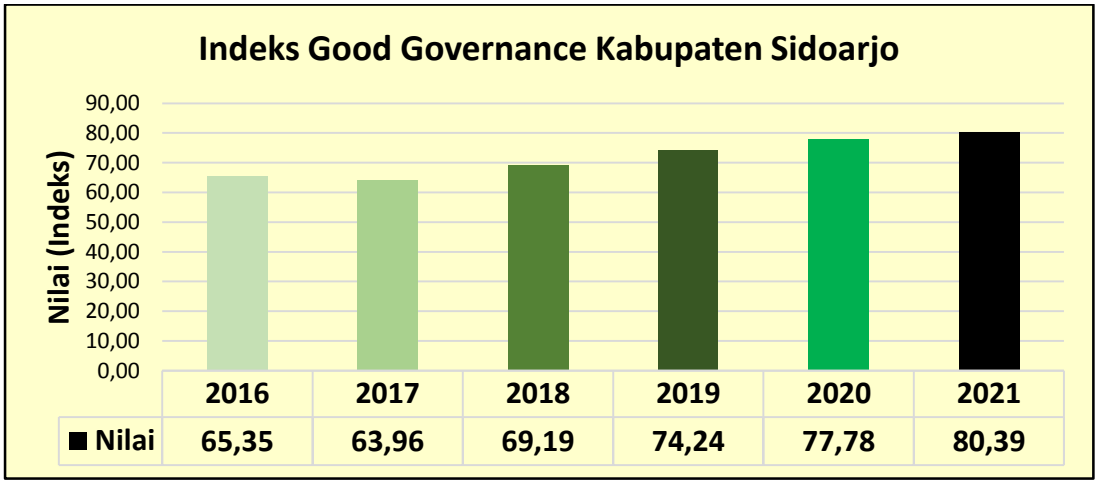

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Good Governance

Jika dilihat perkembangan Indeks Good Governance dari beberapa tahun sebelumnya mengalami trend yang cukup baik, artinya secara garis besar selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga dapat di simpulkan bahwa secara sudut pandang masyarakat terhadap tatakelola pemerintah kabupaten sidoarjo, dari tahun ke tahun semakin baik.

Nilai Indeks Good Governance 80,39 di tahun 2021 menggambarkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Baik. Berikut range / skala kategori dari Indeks Good Governance, sebagai berikut :

Nilai	Kategori
40.00 – 59.99	Buruk
60.00 – 79.99	Baik
80.00 – 100.00	Sangat Baik

Adapun apabila dijabarkan untuk setiap prinsip dalam implementasi Good Governance, maka berdasarkan hasil survey, berikut nilai untuk 8 (delapan) prinsip yang menjadi perhitungan survey Indeks Good Governance :

No.	Uraian	Nilai
1	Prinsip Taat Hukum	82,63
2	Prinsip Partisipasi	78,06
3	Prinsip Transparansi	79,19
4	Prinsip Akuntabilitas	79,90
5	Prinsip Daya Tanggap	80,00
6	Prinsip Kesetaraan / Keadilan	80,69
7	Prinsip Efektifitas / Efisiensi	78,81
8	Prinsip Visi Strategis	83,81
	Indeks Good Governance	**80,39**

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Good Governance

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Sebagaimana Permenpan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terdapat 8 (delapan) area perubahan yang menjadi pengungkit pelaksaan Reformasi Birokrasi, yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Organisasi
3. Tata Laksana
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
5. Deregulasi Kebijakan
6. Pengawasan
7. Akuntabilitas Kinerja
8. Pelayanan Publik

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 ditargetkan BB (Sangat Baik), sedangkan untuk tahun 2021 nilai belum rilis dari Kementerian PAN dan RB. Namun jika melihat capaian tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo tercapai B (Baik), dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebagai berikut :

No.	Komponen Pengungkit	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		11,55
	I. Pemenuhan	20,00	11,55
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,43
	III. Reform	30,00	13,91
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,89

B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,41
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,97
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,28
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,07
	Total Komponen Hasil	40,00	33,73
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	65,62

Sumber Data : LHE Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Untuk Hasil Antara dari masing-masing penilaian leading sector K/L, sebagaimana pada tabel berikut :

No.	Hasil Antara	Nilai	Sumber Data
1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	86,20 (Memuaskan)	ANRI
2.	Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	40,00 (Kurang)	LKPP
3.	Merit System	297,00 (Baik)	KASN
4.	ASN Profesional	71,00 (Sedang)	BKN
5.	Maturitas SPIP	3,00 (Terdefinisi)	BPKP
6.	Kapabitas APIP	2,00+ (Infarstructure)	BPKP
7.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	78,64 (Zona Kuning)	ORI

Sumber Data : LHE Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Sedangkan pada pelaksanaan Survey Eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, berikut tabel hasilnya :

No.	Hasil Survey	Indeks
1.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan Publik	3,59
2.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,71

Sumber Data : LHE Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Berikut perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.A.2

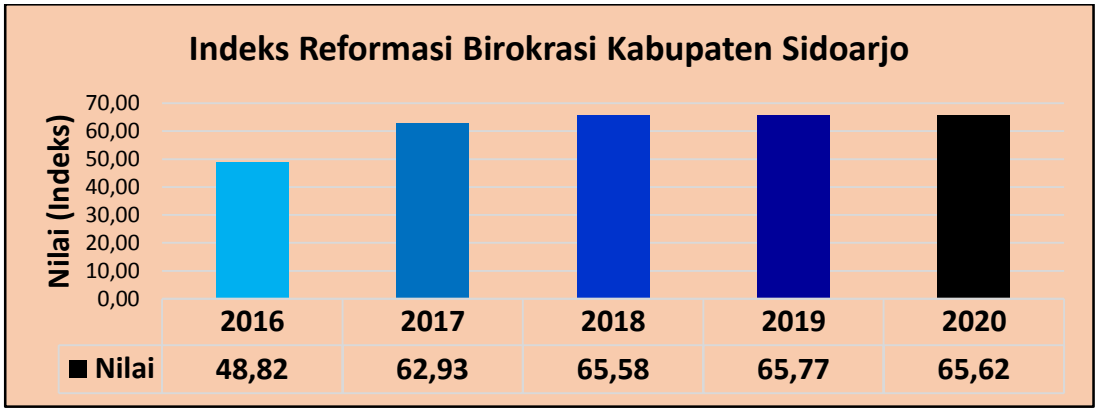

Sumber Data : LHE Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur, maka posisi Kabupaten Sidoarjo dapat terlihat seperti grafik dibawah ini :

Grafik III.A.3

Perbandingan Indeks RB Kab. Sidoarjo dengan Rata-Rata Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur

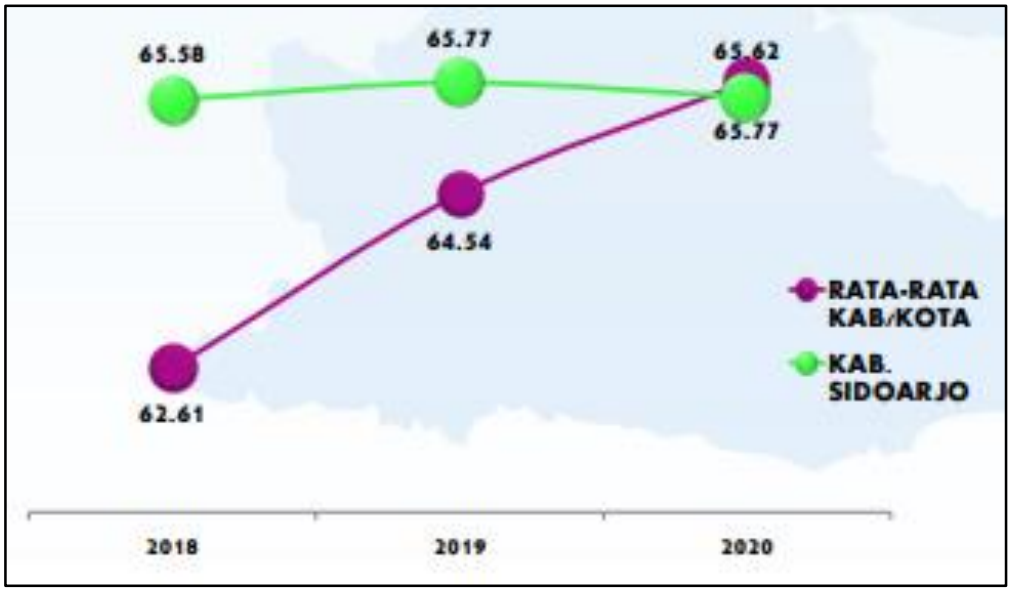

Sumber Data : LHE Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo cenderung stagnan dan Tren Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo tidak sejalan dengan tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh dibangun melalui Perangkat Daerah, tidak lagi hanya sampling.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah. Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK mengalami fase peningkatan, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 ditargetkan sebesar 1,00 dan realisasi sebesar 4.21 atau capaian 421%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar -3,69 maka terdapat kenaikan yang sangat tajam di tahun 2021 sebesar 7,9 poin dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi yang melesat tajam ini disebabkan antara lain :

1) Keberhasilan Kabupaten Sidoarjo dalam memasifkan Vaksinasi ke seluruh pelosok, sehingga tercipta *herd immunity* yang menurunkan resiko penyebaran Covid-19 yang cepat.
2) Banyaknya program pelatihan kerja yang dilaksanakan untuk menciptakan lapangan kerja baru
3) Program KURDA SAYANG (Kredit Usaha Rakyat Daerah Sidoarjo yang Gemilang) dan Program KURMA (Kartu Usaha Perempuan Mandiri) yang membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan kredit bunga kecil / ringan

4) Program renovasi warung dari konvensional menjadi semi minimarket
5) Pemberian bantuan sosial untuk warga yang membutuhkan

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.A.4

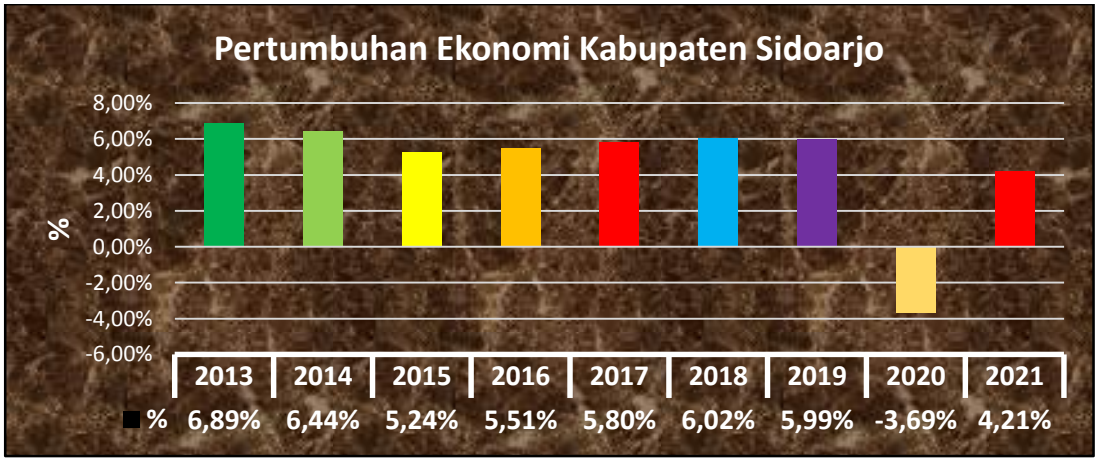

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

4. Indeks GINI

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Berikut perkembangan Disparitas (Indeks GINI) di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.A.5

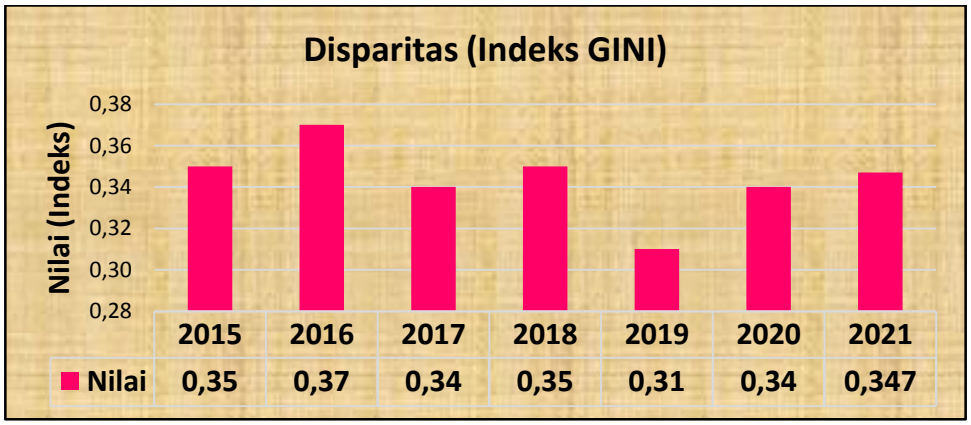

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1, atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 tercapai 0,347 dari target 0,365 capaian 105,19% atau masih berada dalam kisaran rendah dan masih dalam proporsi yang baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, yaitu 0,34 maka capaian memang terlihat naik, tapi tidak terlalu tinggi.

Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kualitas infrastruktur dasar (pendidikan dan kesehatan) secara menyeluruh, yang diharapka pembangunan merata tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah yang masih terpencil.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and helaty life*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :
   a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
   b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mencapai 80,65 dari target 80,41 atau capaian 100,30%. Apabila dibanding dengan capaia tahun 2020 yaitu 80,29 maka terdapat kenaikan 0,36 poin. Kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan.

Pemulihan sosial ekonomi di tengah Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Sidoarjo. Peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,06 tahun, lebih lama 0,02 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Sedangkan indikator pendidikan, untuk komponen Harapan Laman Sekolah (HLS) tahun 2021 tercatat sebesar 14,94, lebih tnggi 0,07 persen dibanding sebelumnya yaitu 14,93, sedangkan komponen pendidikan lainnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25thn+) tahun 2021 mencapai 10,72, atau meningkat 2,09 persen dibanding tahun lalu.

Indikator Pengeluaran per Kapita per Tahun pada tahun 2021 mencapai Rp14.578.000 atau meningkat 0,83 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 14.458.000 per tahun.

Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :

Grafik III.A.6

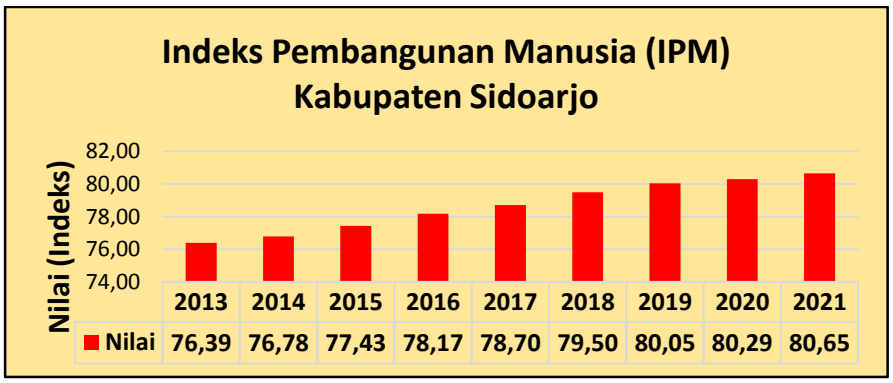

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Angka Harapan Hidup (tahun)	74,06
- Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,94
- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,72
- Pengeluaran perkapita riiel disesuaikan (Rp.000)	14.578

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

6. Indeks Kebahagiaan

Indeks kebahagiaan (IKH) merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan (IKH) merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap :

1) Rumah dan Fasilitas Rumah,
2) Pendapatan Rumah Tangga,
3) Hubungan Sosial,
4) Kesehatan,
5) Kondisi Keamanan,
6) Ketesediaan Waktu Luang,
7) Keharmonisan Keluarga,
8) Pekerjaan,
9) Pendidikan, dan
10) Keadaan Lingkungan.

Indeks Kebahagiaan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan mengukur kebahagiaan dengan menggunakan formulasi perhitungan Indeks Kebahagian (IKH). Pengukuran indeks kebahagiaan (IKH) ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menginformasikan tafsiran indeks kebahagiaan (IKH) penduduk Kabupaten Sidoarjo baik secara umum maupun indeks kebahagiaan menurut kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan keharmonisan keluarga.
2. Menginformasikan tafsiran indeks kebahagiaan (IKH) penduduk Kabupaten Sidoarjo menurut variabel hubungan sosial, lingkungan, ketersediaan waktu luang, kondisi rumah dan aset, serta kondisi keamanan.
3. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan indeks kebahagiaan penduduk Kabupaten Sidoarjo

Indeks Kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mencapai 82,07 dari target 81,14 atau capaian 101,15%. Apabila dibanding dengan capaia tahun 2020 yaitu 81,60 maka terdapat kenaikan 0,47 poin.

Ranking 10 Aspek Kehidupan, Nilai Indeks Kebahagiaan dan Bobot Kontribusinya (BK) terhadap Indeks Kebahagiaan (IK) Segmen Kepala Rumah Tangga / Pasangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :

Ranking	Aspek IK	Nilai IK	BK terhadap Nilai IK
1	Rumah dan Fasilitas Rumah	88,95	10,14
2	Pendapatan Rumah Tangga	87,78	9,98
3	Hubungan Sosial	87,66	9,82
4	Kesehatan	83,75	8,98
5	Kondisi Keamanan	83,58	9,55
6	Ketersediaan Waktu Luang	78,33	8,91
7	Keharmonisan Keluarga	78,33	9,55
8	Pekerjaan	77,23	9,36
9	Pendidikan	76,71	9,49
10	Keadaan Lingkungan	70,5	9,53
Rata-Rata IKH		**82,07**	

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Kebahagiaan

Berikut perkembangan Indeks Kebahagiaan di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.A.7

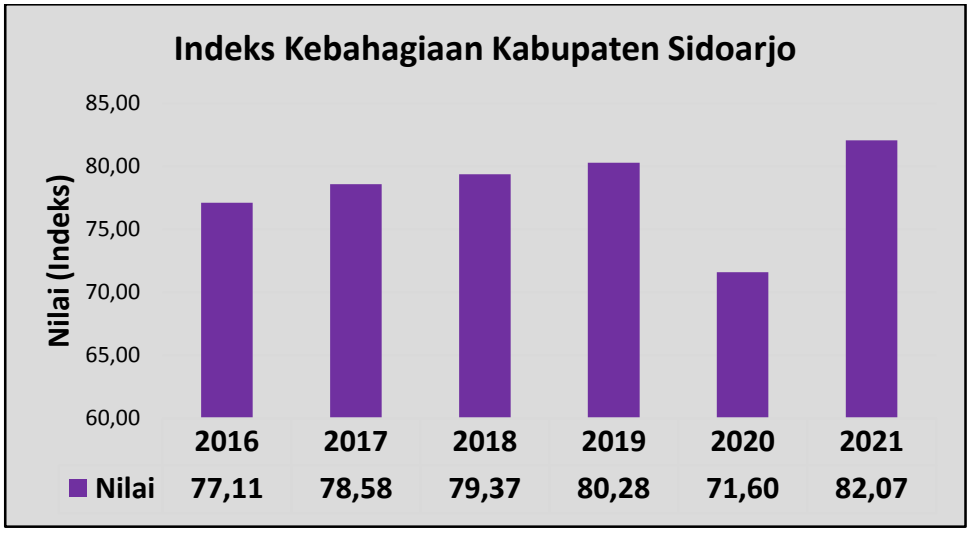

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Kebahagiaan

Dari 10 dimensi yang dljadikan tolok ukur kebahagiaan, dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: kebahagiaan yang bersifat internal individu (ketersediaan waktu luang, kesehatan, pekerjaan, pendidikan), kebahagiaan yang bersifat Kelompok (keharmonisan keluarga, hubungan sosial, kondisi rumah & aset, dan pendapatan rumah tangga)_ dan kebahagiaan yang bersifat Kota (kondisi keamanan dan keadaan lingkungan)- Pengkategorian tersebut. mengarah pada kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil membuat warganya bahagia. Kepala keluarga-pasangan memberikan nilai tinggi (*top three rank*) pada dimensi skala kota. Hasil evaluasi bermanfaat untuk memperbaiki dan merancang program inovatif dan keberlanjutan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sidoarjo. Perbaikan dan rancangan program perlu diimplementasikan pada masyarakat dan kemudian kembali dievaluasi untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan kebahagiaan sebagai akibat dari penerapan program-program tersebut (*Total Continuous Improvement*)

7. Indeks Infrastruktur

Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api.

Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mencapai 0,763 dari target 0,755 atau capaian 101,06%. Apabila dibanding dengan capaian tahun 2020 yaitu 0,348 maka terdapat kenaikan 0,415 poin.

Berikut perkembangan Indeks Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.A.8

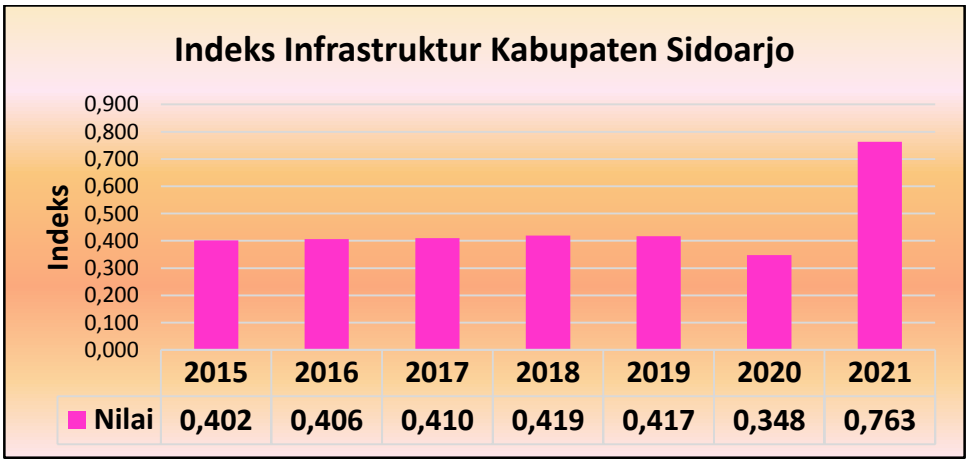

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Infrastruktur

Pada tahun 2021 banyak terdapat penambahan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat yang meliputi : Pembangunan RSUD Sidoarjo Barat; Pembangunan 3 (tiga) Puskemas Baru, Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Road, Betonisasi Jalan, Rehabilitasi Sekolah Negeri, Rehabilitasi Puskesmas, Gedung Hemodialisis RSUD Sidoarjo, Infrastruktur Perhubungan, Penerangan Jalan Umum (PJU), Normalisasi Sungai, dan lain sebagainya.

Apabila dijabarkan hasil perhitungan Indeks Infrastruktur untuk setiap aspek, maka dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021
1	Persentase jalan Kabupaten kondisi mantap	90,1	91,93
2	Persentase saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik	57	56,5
3	Persentase sarana dasar permukiman	71	72,64
4	Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	60,5	60,39
5	Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	82,53	92,8
6	Persentase fasilirasi kesehatan dalam kondisi baik	71,13	61,97
Indeks Infrastruktur		0,7555	0,763

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Infrastruktur

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks kualitas lingkungan hidup dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran masyarakat awam sehingga indeks dapat menjadi alat penggerak bagi keterlibatan publik.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mencapai 59,81 dari target 59,79 atau capaian 100,03%. Namun apabila dibanding dengan capaian tahun 2020 yaitu 65,30 maka terdapat penurunan 5,49 poin. Penurunan ini disebabkan karena terdapat perubahan regulasi terkait pengukuran Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi, yaitu perhitungan menggunakan media website https://ppkl.menlhk.go.id/ dan melalui proses verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dilanjutkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun perkembangan nilai/skor IKLH setiap tahunnya dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.A.9

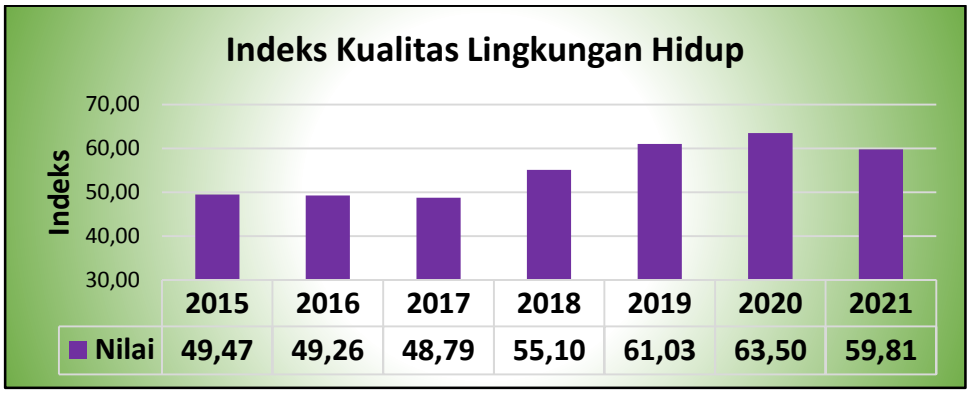

Sumber Data : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IKLH di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Indikator IKLH Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Indeks Kualitas Air	54,05
- Indeks Kualitas Udara	84,67
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi	23,72

Sumber : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, agar dapat meningkat di tahun selanjutnya, antara lain :

a. Melakukan revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
b. Melakukan revitalisasi sungai melalui Program Sidoresik, yang merubah sungai menjadi destinasi wisata baru yang dapat mendorong kemajuan perekonomian warga sekitarnya
c. Menambah taman yang bertajuk / hutan kota
d. Melakukan revitalisasi TPST dan merancang inovasi pengelolaan sampah

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebesar 10,87 persen, turun 0,10 persen poin dibandingkan dengan tahun 2020.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 sebanyak 1,21 juta orang, bertambah 6,93 ribu orang dibanding tahun 2020. Meski demikian, Tingkat Partsipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 turun sebesar 0,71 persen poin dibandingkan TPAK tahun 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 1,07 juta orang, meningkat sebanyak 7,39 ribu orang dari tahun 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan adalah Sektor Manufaktur (7,46 persen). Sementara sektor Pertanian dan Sektor Jasa yang mengalami penurunan masing-masing sebesar -4,92 persen dan -3,22 persen.

Penduduk usia kerja adalah semua orang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia kerja di Sidoarjo pada tahun 2021 sebanyak 1,81 juta orang, naik 29,42 ribu orang dibandingkan tahun 2020. Penduduk usia kerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Berikut perkembangan penduduk usia kerja dan angkatan kerja Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 :

Tabel III.A.1

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

STATUS KETENAGAKERJAAN	Agustus 2019 (ribu orang)	Agustus 2020 (ribu orang)	Agustus 2021 (ribu orang)	Perubahan 1 Tahun (Agustus 2020 - Agustus 2021)	
				(ribu orang)	(Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	1 753,75	1 783,77	1 813,19	29,42	1,65
Angkatan Kerja	1 174,73	1 198,24	1 205,17	6,93	0,58
Bekerja	1 120,48	1 066,79	1 074,19	7,40	0,69
Pengangguran	54,25	131,44	130,98	- 0,47	-0,35
Bukan Angkatan Kerja	579,02	585,53	608,02	22,49	3,84

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibanding Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) perbandingannya sebagai berikut :

	persen	persen	persen	persen poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,62	10,97	10,87	-0,10
Laki-laki	...	11,65	11,37	-0,29
Perempuan	...	9,91	10,06	0,15
Tingkat Pertisipasi Ang-katan Kerja (TPAK)	66,98	67,17	66,47	=0,71
Laki-laki	...	81,55	82,06	0,51
Perempuan	...	52,78	50,86	-1,92

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Dari seluruh penduduk Sidoarjo yang bekerja pada tahun 2021, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 60,72 persen diikut oleh berusaha sendiri (17,54 persen), dan pekerja bebas di non pertanian (6,13 persen). Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas di pertanian memiliki persentase paling kecil, yaitu sebesar 1,21 persen.

Dibandingkan kondisinya pada tahun 2020, penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri mengalami penurunan paling besar yaitu 0,83 persen poin. Penurunan lainnya terjadi pada penduduk bekerja dengan status pekerja bebas di pertanian sebesar 0,53 persen poin dan penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 0,47 persen poin. Status penduduk bekerja yang mengalami peningkatan tertnggi adalah pekerja bebas di non pertanian yang meningkat 0,75 persen poin dibandingkan tahun 2020.

Sebanyak 678 ribu orang (63,15 persen) bekerja pada kegiatan formal. Sedangkan penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 395 ribu orang (36,85 persen), Dibanding tahun 2020, penduduk bekerja pada kegiatan informal turun 0,16 persen poin.

Adapun perkembangan penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.A.10

Status Pekerjaan Utama Penduduk

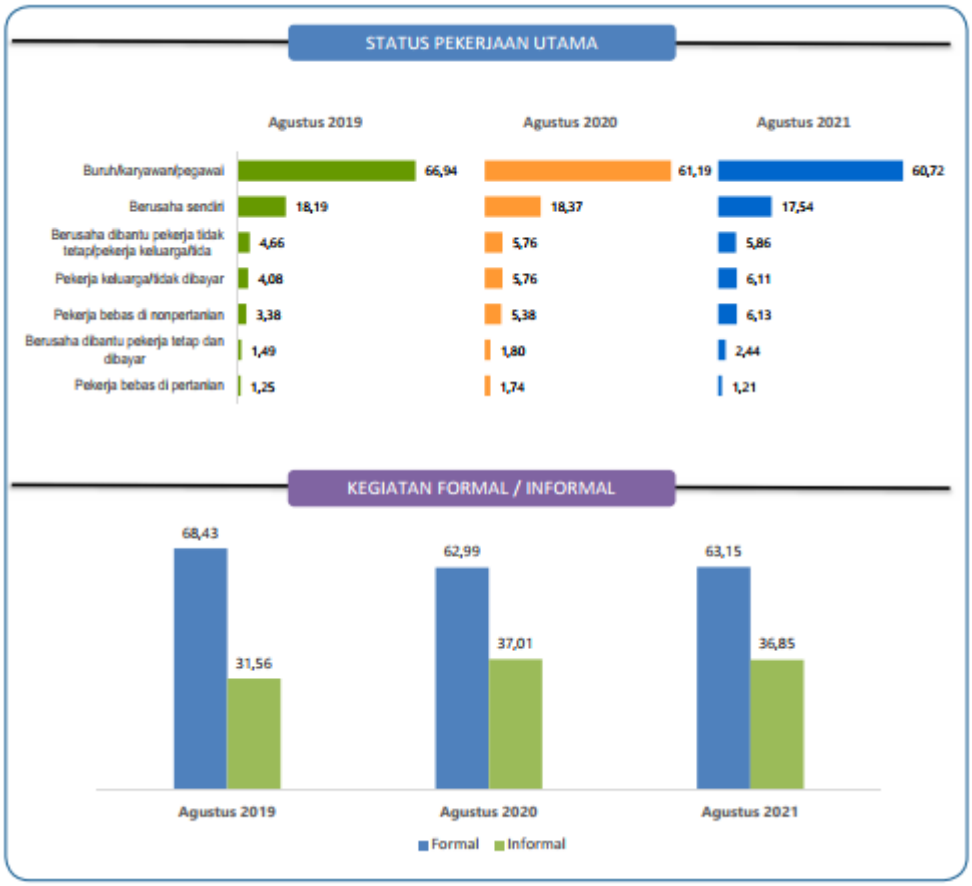

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Pandemi covid-19 memberi dampak luas bukan hanya pada masalah kesehatan, melainkan banyak aspek kehidupan lainnya. Aspek ketenagakerjaan juga mendapatkan imbas sebagai dampak pandemi terhadap aktvitas sosial dan perekonomian penduduk. Belum pulihnya perekonomian berdampak pada tngginya jumlah pengangguran serta dinamika ketenagakerjaan secara umum di Sidoarjo.

Dampak pandemi covid-19 pada penduduk usia kerja dapat dikelompokkan menjadi empat (4) komponen, yaitu Penganggur dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) yang pernah berhenti bekerja pada periode tahun 2021 bagi mereka yang saat ini tidak

bekerja, serta penduduk yang berstatus sementara tdak bekerja dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja bagi mereka yang saat ini masih bekerja.

Terdapat 224,38 ribu orang (12,37 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (23,03 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (6,10 ribu orang), sementara tdak bekerja karena COVID-19 (18,52 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (176,73 ribu orang).

Berikut tabel data dampak Pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan :

Tabel III.A.2

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan

	Komponen	Total
	(1)	(2)
a.	Pengangguran karena Pandemi Covid-19 (ribu orang)	23,03
b.	Bukan Angkatan Kerja karena Pandemi Covid-19 (ribu orang)	6,10
c.	Sementara tak Bekerja karena Pandemi Covid-19 (ribu orang)	18,52
d.	Pengurangan jam kerja karena Pandemi Covid-19 (ribu orang)	176,73
	Total (ribu orang)	**224,38**
	Penduduk Usia Kerja/PUK (ribu orang)	**1 813,19**
	Persentase terhadap PUK	**12,37**

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

Grafik III.A.11

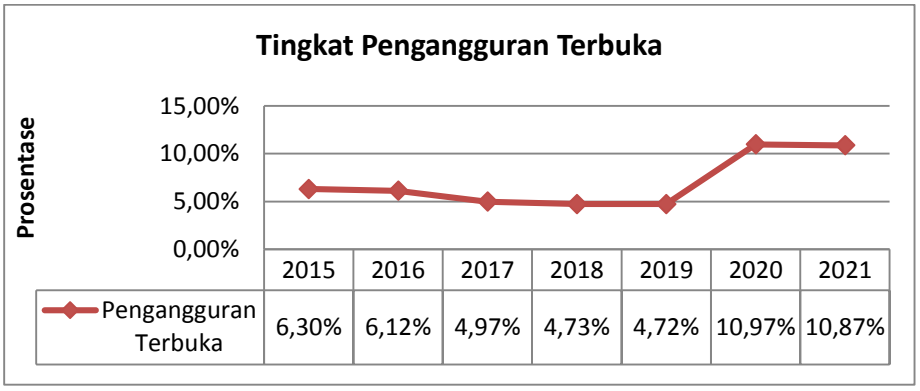

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Upaya – upaya yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran terbuka, antara lain :

1. Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi baik yang bersertifikasi maupun yang berorientasi pada membuka lapangan usaha secara mandiri.
2. Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus.
3. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka pemutusan hubungan kerja

10. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Selama periode tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo bertambah sebanyak 10,10 ribu jiwa, dari 127,05 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 137,15 ribu jiwa pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 7,95 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo dalam rentang waktu satu tahun, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,34 persen poin, dari 5,59 persen pada tahun 2020 menjadi 5,93 persen pada tahun 2021.

Perkembangan tingkat miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat sebagaimana grafik sebagai berikut :

Grafik III.A.12

Tingkat Kemiskinan

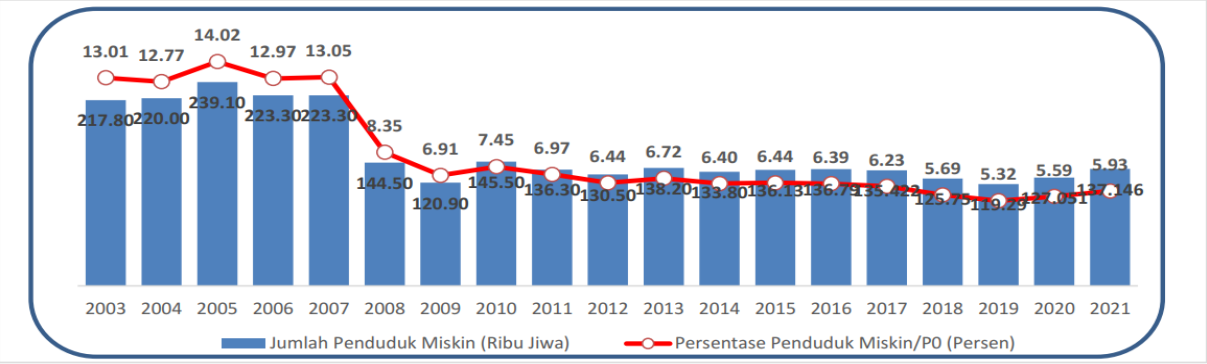

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo selama periode tahun 2021 antara lain adalah :

a) Aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19. Hal ini tercermin dari informasi big data (https://dataforgood.facebook.com) pergerakan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang rata-rata masih -0,14 terhadap kondisi tahun 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).
b) Dalam upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan perluasan covid-19, masyarakat di Kabupaten Sidoarjo masih banyak berdiam diri di rumah. Kondisi ini tercermin dari informasi big data (https://dataforgood.facebook.com) pergerakan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang rata-rata masih 0,20 terhadap kondisi tahun 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).

Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebesar Rp.502.524,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp.16.103,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 3,31 persen, bila dibandingkan kondisi tahun 2020 yang sebesar Rp.486.421,00.

Pada tahun 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Kabupaten Sidoarjo memiliki 4,30 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.160.853,20 per rumah tangga miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebesar 0,95 mengalami penurunan sebesar -0,01 poin dibandingkan tahun 2020 yaitu 0,96. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebesar 0,24, mengalami penurunan sebesar -0,02 poin dibandingkan tahun 2020 yaitu 0,26.

B. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PER URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2021

1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Pendidikan dilaksanakan dalam rangka terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,55	14,94	102,68%
2	Rata – Rata Lama Sekolah	10,80	10,72	99,26%
3	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	SD / MI	97,88%	99,67%	101,83%
	SMP / MTs	79,95%	89,86%	112,40%
4	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	PAUD	95,72 %	92,89%	131,27%
	SD / MI	109,96 %	108,89%	110,65%
	SMP / MTs	99,46 %	99,78%	110,23%
5	Rasio Guru terhadap Murid			
	SD Negeri	1 : 28	1 : 42	150%
	SMP Negeri	1 : 32	1 : 23	71,88%
6	Rasio Jumlah Ruang Kelas terhadap Jumlah Siswa			
	SD Negeri	1 : 28	1 : 27	103,70%
	SMP Negeri	1 : 32	1 : 28	114,29%
7	Persentase Bangunan Ruang Kelas Belajar dalam kondisi baik			
	SD Negeri	95,85%	89,53%	93,41%
	SMP Negeri	95,39%	99,53%	104,34%

8	Persentase Sekolah yang telah terakreditasi A			
	SD Negeri	73,41%	71,87%	97,90%
	SMP Negeri	65,66%	62,30%	94,88%

Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TAHUN 2021		
		2020	TARGET	REALISASI	%
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,93	14,55	14,94	102,68%

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik dalam “Sidoarjo Dalam Angka”, menunjukkan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 tercapai 14,94 tahun dari target 14,55 tahun sehingga tercapai 102,68%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah semakin meningkat, yaitu tahun 2020 pada angka 14,93 maka terdapat peningkatan angka 0,01 atau sekitar 0,06%. Dengan realisasi Angka Harapan Lama Sekolah 14,94 tahun ini menunjukkan bahwa peserta didik lulusan SD dan SMP sekarang di Kabupaten Sidoarjo punya potensi untuk bisa melanjutkan pada tingkat pendidikan SMA.. Adapun upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi capaian kinerja Angka Harapan Lama Sekolah adalah dengan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SD dan SMP. Dan tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.1

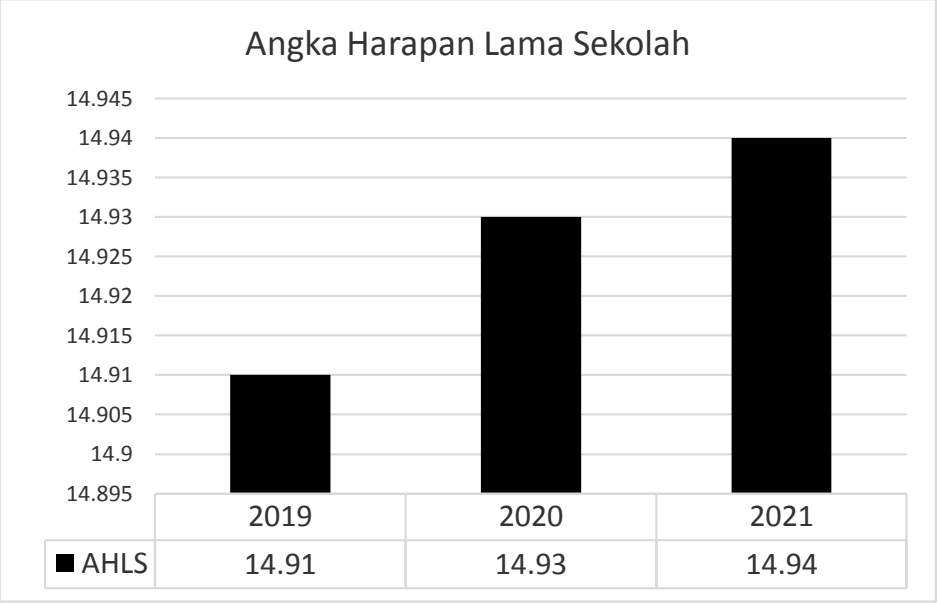

Sumber Data : Diknasbud Kab. Sidoarjo

Adapun upaya - upaya yang dilakukan agar Angka Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

- Tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah, madrasah dan lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.
- Tetap memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun.
- Dengan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SD dan SMP.

Rata – Rata Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik, Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun

tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TAHUN 2021		
		2020	TARGET	REALISASI	%
2	Rata – Rata Lama Sekolah	10,50	10,80	10,72	99,26%

Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2021 tercapai 10,72 tahun dari target 10,80 tahun sehingga tercapai 99,26%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 10,50 tahun maka terdapat peningkatan selama 3 tahun angka 0,47 atau sekitar 4.35% dan 0,22 atau sekitar 2.04%.

Dengan realisasi Rata – Rata Lama Sekolah 10,72 tahun ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo rata-rata sudah dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan secara angka perhitungan ketercapaian rata-rata lama sekolah tersebut sudah mendekati Wajar Pendidikan Menengah 12 Tahun. Adapun tren capaian Rata – Rata Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.2

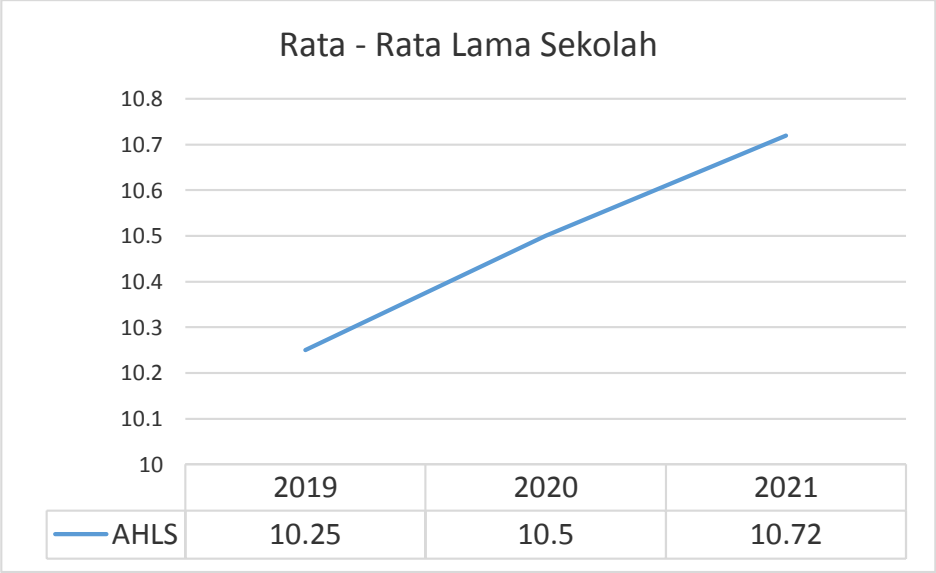

Sumber Data : Diknasbud Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang akan dilakukan agar Rata – Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu dengan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SD dan SMP.

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	%
	Angka Partisipasi Murni (APM) :				
1	SD / MI	99,29	97,88%	99,67%	101,83%
2	SMP / MTs	84,42	79,95%	89,86%	112,40%

Dari tabel di atas nampak bahwa :

- APM SD/MI Tahun 2021 tercapai 99,67 dari target 97,88 sehingga tercapai 101,83%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 99,29 maka terdapat peningkatan angka 0,38.
- APM SMP/MTs Tahun 2021 tercapai 89,86 dari target 79,95 sehingga tercapai 112,40%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 84,42 maka terdapat peningkatan angka 5,44.

Tren capaian APM SD/MI dan SMP/MTs dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.3

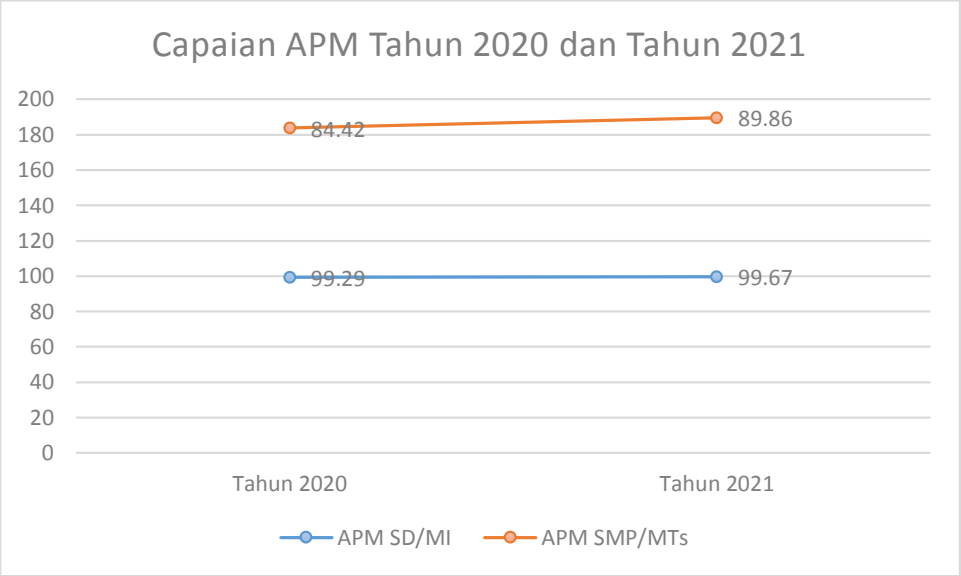

Sumber Data : Diknasbud Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar APM SD/MI dan SMP/MTs dapat tercapai optimal, yaitu :

- Kebijakan bersama tentang mekanisme penerimaan peserta didik baru antara Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sekolah wilayah perbatasan sebagai sekolah rujukan
- Mendorong sekolah formal untuk melakukan koordinasi dengan Kementrian Agama pada program Diniyah setingkat SD dan SMP dan pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa SD dan SMP untuk biaya operasional sekolah..

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020	TAHUN 2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) :				
1	PAUD	95,72 %	92,89%	131,27%	141,32%
2	SD / MI	109,96 %	108,89%	110,65%	101,62%
3	SMP / MTs	99,46 %	99,78%	110,23%	100,45%

Dari tabel di atas Nampak bahwa :

- APK PAUD Tahun 2021 tercapai 131,27 dari target 92,89 sehingga tercapai 141,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 95,72 maka terdapat peningkatan angka 35,55.
- APK SD/MI Tahun 2021 tercapai 110,65 dari target 108,89 sehingga tercapai 101,62%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 109,96 maka terdapat peningkatan angka 0,69.
- APK SMP/MTs Tahun 2021 tercapai 110,23 dari target 99,78 sehingga tercapai 100,45%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 99,46 maka terdapat peningkatan angka 0,77.

Adapun tren capaian APK PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.4

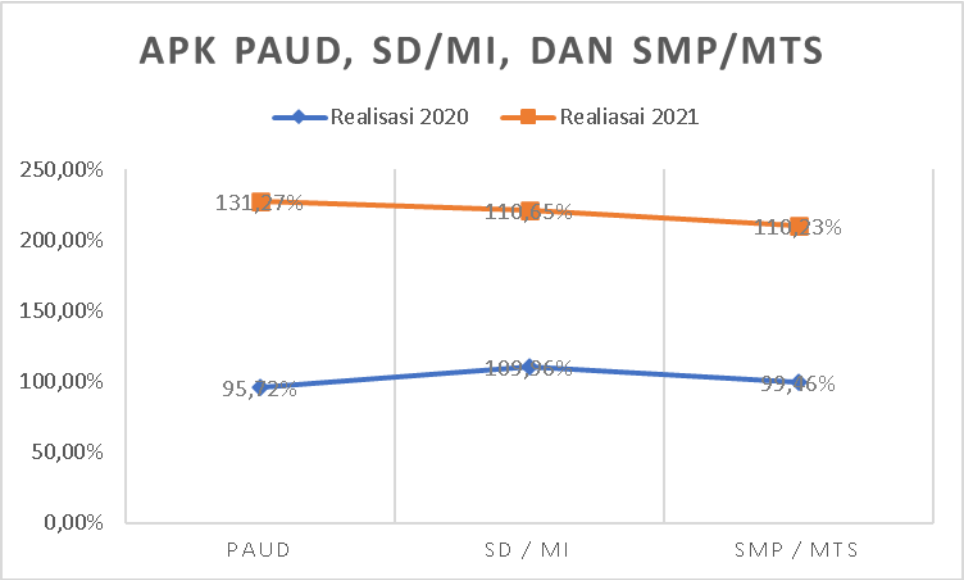

Sumber Data : Diknasbud Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar APK PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dapat tercapai optimal, yaitu :

- Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa SD dan SMP untuk biaya operasional sekolah.
- Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara online
- Pemberian bantuan kepada sekolah swasta berupa hibah partisipatif untuk rehab dan penambahan ruang kelas baru.

Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio Guru Terhadap Murid diukur untuk mengetahui perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Target rasio guru terhadap murid dalam satu rombongan belajar pada jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud No. 32 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di bidang Pendidikan yaitu 1 : 28 untuk SD dan 1 : 32 untuk

SMP. Berikut kami tampilkan data jumlah murid dan jumlah guru serta rasionya pada satuan pendidikan negeri dan swasta.

No	Nama Lembaga	Target sesuai Permendikbud	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Realiasasi Rasio 2021
1.	SDN	1 : 28	113.708	2.716	1 : 42
2.	SDS	1 : 28	34.318	4.167	1 : 9
3.	SMPN	1 : 32	41.548	1.811	1 : 23
4.	SMPS	1 : 32	35.251	3.427	1 : 10

Sumber Data : Dapodik 2021

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulkan bahwa **:**

1. Jumlah guru SD Swasta sebanyak 4.167 orang dengan jumlah murid SD swasta sebanyak 34.318 anak, sehingga rasionya adalah 1 : 9

2. Jumlah guru SMP untuk sekolah swasta sebanyak 3.427 orang dengan jumlah murid SMP swasta sebanyak 35.251 anak, sehingga rasionya adalah 1 : 10

3. Jumlah guru SD Negeri sebanyak 2.716 orang dengan jumlah murid SD negeri sebanyak 113.708 anak sehingga rasio yang didapat adalah 1 : 42. Jika melihat Permendikbud 32 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa rasio guru terhadap murid adalah 1 : 28 untuk SD maka dapat disimpulkan bahwa jumlah guru SD Negeri masih kurang. Dengan asumsi perhitungan jumlah murid SD Negeri 113.708 dibagi 28, sama dengan 4.061 di kurangi jumlah guru yang ada 2.716 sehingga kekurangan guru SD negeri sejumlah 1.355 orang guru .

4. Sedangkan untuk SMP Negeri dengan Jumlah guru SMP Negeri sebanyak 1.811 orang dan jumlah murid SMP negeri sebanyak 41.548 anak . Sehingga rasio yang didapat adalah 1 : 23, namun untuk guru SMP negeri penghitungan rasio guru terhadap murid tidak bisa langsung jumlah murid dibagi dengan jumlah guru, karena guru SMP adalah guru mata pelajaran bukan guru kelas seperti halnya guru SD Negeri. Selain itu persebaran murid di wilayah Kabupaten Sidoarjo tidak merata, untuk daerah padat dan perkotaan jumlah murid lebih banyak sehingga tidak sebanding dengan jumlah guru yang ada .

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Rasio guru terhadap murid dapat ideal untuk jenjang SD dan SMP, yaitu :

- Melakukan pemenuhan kebutuhan guru pada jenjang SD dan SMP Negeri
- Melakukan pembekalan dan fasilitasi terhadap kebutuhan guru pada lembaga negeri .

Rasio Jumlah Ruang Kelas terhadap Jumlah Siswa

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET SESUAI PERMENDIKBUD	REALISASI	%
	Rasio Jumlah Ruang Kelas terhadap Jumlah Siswa			
1	SD	1 : 28	1 : 27	103,70%
2	SMP	1 : 32	1 : 28	114,29%

Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa diukur untuk mengetahui perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah ruang kelas belajar. Target tersebut diatas adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat, yaitu 1 : 28 untuk SD dan 1 : 32 untuk SMP. Sedangakan rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa pada tahun 2021 sebagai berikut :

(1) Jumlah ruang kelas yang ada pada SD negeri sebanyak 4.145 ruang dengan jumlah murid SD negeri sebanyak 114.124 anak; sehingga rasionya adalah 1 : 28

(2) Jumlah ruang kelas yang ada pada SD swasta sebanyak 1.521 ruang dengan jumlah murid SD swasta sebanyak 34.318 anak; sehingga rasionya adalah 1 : 23

(3) Jumlah ruang kelas yang ada pada SMP negeri sebanyak 1.260 ruang dengan jumlah murid SMP negeri sebanyak 41.548 anak; sehingga rasionya adalah 1 : 33

(4) Jumlah ruang kelas yang ada pada SMP swasta sebanyak 1.490 ruang dengan jumlah murid SMP swasta sebanyak 35.251 anak; sehingga rasionya adalah 1 : 24

Dengan data tersebut, menunjukkan bahwa masih kurangnya ruang kelas yang ada pada sekolah SD dan SMP Negeri, sehingga proses kegiatan belajar mengajar siswa kurang maksimal, dengan jumlah maksimal 28 siswa pada SD dan 32 siswa pada SMP.

No	Nama Lembaga	Jumlah Siswa	Jumlah kelas
1.	SDN	114.244	4.145
2.	SDS	34.318	1.521
3.	SMPN	41.548	1.260
4.	SMPS	35.251	1.490

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa dapat ideal untuk jenjang SD dan SMP, yaitu :

- Menyesuaikan data Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Jumlah ruang kelas yang ada.
- Memberi batasan terhadap jumlah rombel penerimaan peserta didik baru..

Persentase Bangunan Ruang Kelas Belajar dalam kondisi baik

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
	Persentase Bangunan Ruang Kelas Belajar dalam kondisi baik			
1	SD	95,85%	89,53%	93,41%
2	SMP	95,39%	99,53%	104,34%

Kondisi bangunan Ruang Kelas Belajar baik pada jenjang SD maupun jenjang SMP, adalah sebagai berikut :

No	Lembaga Sekolah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat
1	SD	5.082 bangunan 89,69 %	486 bangunan 6,24 %	80 bangunan 1,41 %
2	SMP	1.749 bangunan 63,60 %	988 bangunan 24,37 %	1 bangunan 0,04 %

Apabila diproporsi maka sebagian besar kondisi bangunan ruang kelas belajar untuk jenjang SD maupun SMP adalah dalam kondisi baik

Upaya yang telah dilakukan agar bangunan ruang kelas belajar kondisi baik meningkat dan layak fungsi untuk dimanfaatkan proses belajar mengajar, baik untuk jenjang SD dan SMP, yaitu :

- Melakukan Update Data terkait kondisi bangunan gedung/ruang kelas kondisi rusak
- Melakukan pemetaan terhadap kondisi bangunan gedung/ruang kelas kondisi rusak dalam skala prioritas

Persentase Sekolah yang telah terakreditasi A

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
	Persentase lembaga yang telah terakreditasi A			
1	SD	73,41%	71,87%	97,90%
2	SMP	65,66%	62,30%	94,88%

Jumlah SD yang terakreditasi A sampai dengan tahun 2021 sebanyak 419 SD atau sekitar 71,87% dari keseluruhan SD yang berjumlah 583 sekolah. Apabila dibandingkan dari target 73,41% maka tercapai 97,90%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 73,64%, maka terdapat penurunan 1,77 %.

Sedangkan jumlah SMP yang terakreditasi A sampai dengan tahun 2021 sebanyak 114 SMP dari keseluruhan SMP yang berjumlah 183 sekolah atau sekitar 62,30%. Adapun apabila dibandingkan dari target 65,66 maka tercapai 94,88% dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 66,67%, maka terdapat penurunan 4,37%. Penurunan tersebut disebabkan karena situasi pandemi sehingga tidak terpenuhinya persyaratan akreditasi oleh lembaga pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT).

Adapun tren capaian Sekolah yang telah memiliki akreditasi A dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.5

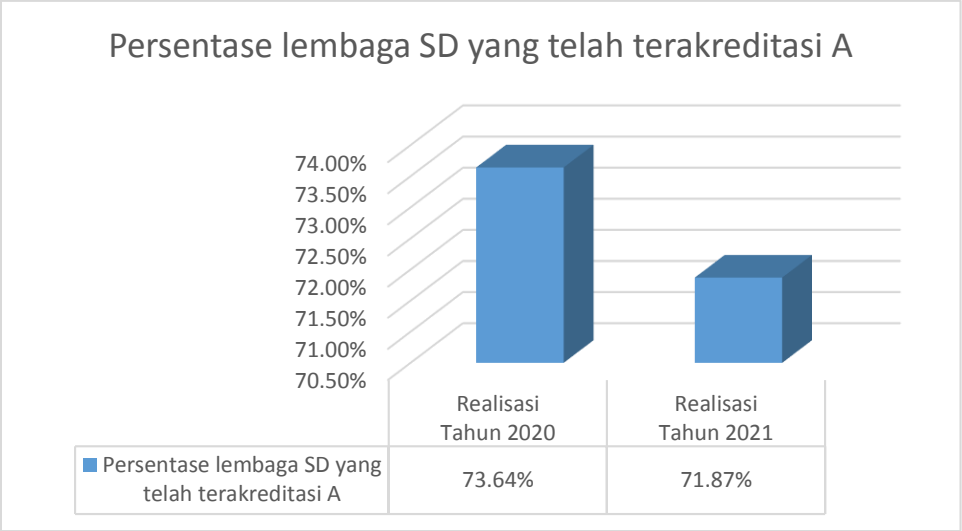

Sumber Data : Diknasbud Kab. Sidoarjo

Pada umumnya persyaratan yang tidak bisa dipenuhi dalam masa pandemi, sehingga berakibat turunnya jumlah SD yang terakreditasi A adalah :

1. Adanya lembaga baru yang belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti Akreditasi.
2. Di tahun 2021 karena pandemic Covid-19, maka pelaksanaan akreditasinya ditunda sehingga status akreditasi berlaku untuk satu tahun berikutnya.

Grafik III.B.6

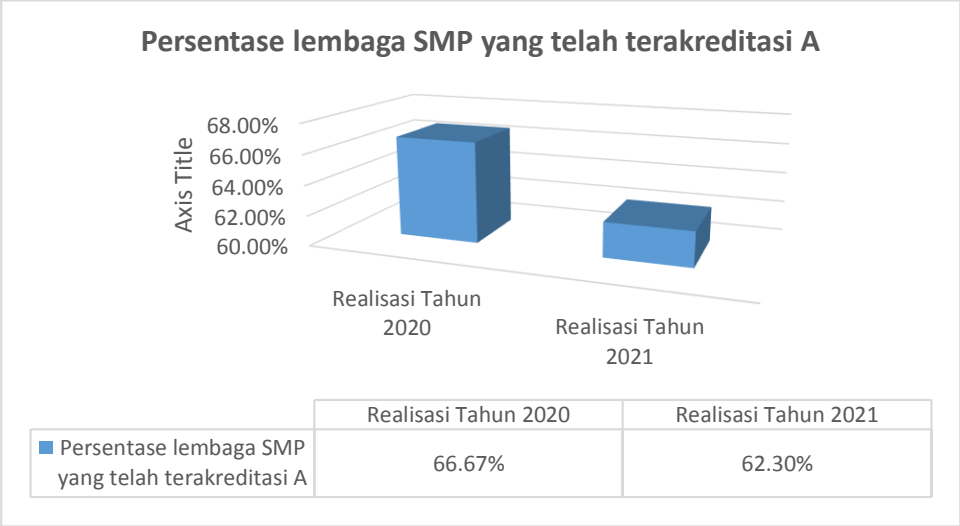

Sumber Data : Diknasbud Kab. Sidoarjo

Pada umumnya persyaratan yang tidak bisa dipenuhi dalam masa pandemi, sehingga berakibat turunnya jumlah SMP yang terakreditasi A adalah :

1. Adanya lembaga baru yang belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti Akreditasi.
2. Di tahun 2021 karena pandemic Covid-19, maka pelaksanaan akreditasinya ditunda sehingga status akreditasi berlaku untuk satu tahun berikutnya.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar semakin banyak Sekolah yang mendapatkan akreditasi A, yaitu :

- menginventarisasi dan evaluasi permasalahan persyaratan lembaga yang kurang.
- Memfasilitasi lembaga/sekolah yang terdapat permasalahan dalam proses akreditasi

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **100.000 Lapangan Kerja Baru**

  Telah dilaksanakan Pelatihan Life Skil, Pelatihan IT dan Pelatihan Make Up Artis (MUA) dengan target peserta 90 orang dan tercapai 90 orang yang mengikuti. Hasil dari pelatihan ini adalah peserta pelatihan dapat berwirausaha mandiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- **Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama**
- Telah diberikan bantuan uang kepada Guru ngaji dengan target 7.307 orang tercapai 7.105 orang guru ngaji yang diberi insentif sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang / bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 2.486.750.000 (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Selain itu juga telah diberikan bantuan uang kepada Guru Madin Ula/Wustho dengan target 1.937 orang tercapai 1.246 orang dengan nilai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per orang / bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 373.800.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) .

- **Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta dan Tenaga Honorer**

  Telah dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan untuk GTT, Guru Swasta dan Tenaga Honorer, berupa bantuan, insentif dan penyediaan honorarium, sebagai berikut :

Keterangan	Target	Realisasi	Orang/ bulan
Penyediaan honorarium GTT dan PTT Guru TK dan SD serta penjaga	2.585 orang	2584 orang	
- Penyediaana honorarium GTT SD	1955 orang	1954 orang	Rp. 3,171,800,-
- Penyediaana honorarium PTT SD	374 orang	373 orang	Rp. 2,702,000,-
-Penyediaan honorarium GTT TK Negeri pembina	6 orang	6 orang	Rp. 3.171.800,-
-Penyediaan Honorarium Penjaga Sekolah SD Negeri	253 orang	251 orang	Rp. 2.588.000,-
Insentif Guru SD/SDLB/MI Swasta	2.597 orang	2.590 orang	Rp. 300,000,-
Bantuan Uang kepada Guru PAUD	2.500 orang		Rp. 350,000,-
-Tahap 1		2.375 orang	Rp. 350,000,-
-Tahap 2		2.247 orang	Rp. 350,000,-
Bantuan Uang kepada Guru TK/RA/BA Swasta	3.466 orang		Rp. 400,000,-
-Tahap 1		3.370 orang	Rp. 400,000,-
-Tahap 2		3.276 orang	Rp. 400,000,-
Penyediaan honorarium GTT SMP Negeri	297 orang	297 orang	Rp. 3,171,800,-
Insentif Guru SMP/MTs/SMPLB Swasta	1.698 orang	1.698 orang	Rp. 300,000,-

c. **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

1. **Program Pengelolaan Pendidikan** dengan anggaran sebesar Rp. 670.891.220.107,00 dan terealisasi sebesar Rp.642.935.565.046,07 atau 95,83%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dengan nilai *scorecard* minimum 75 (kategori tinggi)	70 %	-	0 %

   Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat	48,02%	40,59%	84,53%
	Persentase SD yg update data pokok pendidikan	100%	100%	100,00%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang Update data pokok sekolah	100%	100%	100,00%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yg update data pokok pendidikan	96,96%	100%	103,14%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Non Formal yang difasilitasi	80%	80%	100,00%

   Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	378,230,994,793.00	366,723,846,165.53	96.96%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	174,386,615,354.00	169,920,883,949.54	97.44%

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	69,498,890,236.00	60,506,949,447.00	87.06%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	48,774,719,724.00	45,783,885,484.00	93.87%

2. **Program Pengendalian Perizinan Pendidikan** dengan anggaran sebesar Rp.48.158.302,- dan terealisasi sebesar Rp.36.033.734,- atau 83,49%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Lembaga Pendidikan yang memenuhi ijin operasional	75%	100%	133.33%

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase lembaga SD yang mendapatkan ijin	75%	100%	133,33%
	Persentase lembaga SMP yang mendapatkan ijin.	75%	100%	133,33%
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD yang mendapatkan ijin	20%	20%	100,00%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3,058,431.00	970,000.00	31.72%
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	40,099,871.00	35,063,734.00	87.44%

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan urusan pendidikan, sebagai berikut :

No.	Perda / Perbup	Tentang
1	Perbup Nomor 15 Tahun 2021	Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan SD/ SDLB/ MI Dan SMP/ SMPLB/ MTS Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021
2	Perbup Nomor 21 Tahun 2021	Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sidoarjo
3	Perbup Nomor 27 Tahun 2021	Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, Serta Pendidikan Non Formal Dan Informal Di Kabupaten Sidoarjo
4	Perbup Nomor 28 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sidoarjo
5	Perbup Nomor 29 Tahun 2021	Pembelajaran Di Luar Kelas Pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, Dan Pendidikan Non Formal Di Kabupaten Sidoarjo
6	Perbup Nomor 64 Tahun 2021	Pendidikan Kewirausahaan Pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, Dan Pendidikan Non Formal Di Kabupaten Sidoarjo

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan pendidikan, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Arah kebijakan belanja daerah di perubahan APBD Tahun 2021 difokuskan pada normalisasi pelayanan pendidikan untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan akibat pandemi *Covid-19*	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mempersiapkan kegiatan yang menunjang peningkatan proses belajar mengajar antara lain kegiatan pelatihan kreativitas media pembelajaran, Pembuatan modul pembelajaran SD, penyusunan naskah dan pembuatan video pembelajaran SD, Workshop Pembelajaran HOTs berbasis IT, Workshop Pembuatan dan Penggunaan media interaktif digital jenjang SD, pelatihan pengembangan sekolah model, Pemantapan Mapel MIPA, pemantapan mapel SBK, pemantapan mapel Bahasa Jawa
2	Harus ada perhatian lebih dari Pemerintah Daerah terhadap sekolah swasta di Kabupaten Sidoarjo agar bisa mendapat akreditasi “A”	Pembinaan akreditasi dengan melakukan pendampingan pada sekolah-sekolah yang terdaftar pada Badan Akreditasi Sekolah atau self assesment, meningkatkan strategi sistem akreditasi satuan pendidikan melalui sekolah model
3	Membuat program dan kegiatan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten adalah pada tingkat pendidikan dasar (usia 0-15 Tahun) yang telah di fasilitasi dengan Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar ; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar; Pengelolaan BOS

		Sekolah Menengah Pertama; Pengelolaan Dana BOP PAUD.
4	Mencarikan solusi agar Guru Tidak Tetap bisa mengikuti sertifikasi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mempersiapkan kegiatan yang menunjang peningkatan proses belajar mengajar antara lain kegiatan pelatihan kreativitas media pembelajaran, Pembuatan modul pembelajaran SD, penyusunan naskah dan pembuatan video pembelajaran SD, Workshop Pembelajaran HOTs berbasis IT,Workshop Pembuatan dan Penggunaan media interaktif digital jenjang SD, pelatihan pengembangan sekolah model, Pemantapan Mapel MIPA, pemantapan mapel SBK, pemantapan mapel Bahasa Jawa
5	Agar pembangunan infrastruktur sekolah sarana dan prasarana sekolah yang sudah dibangun oleh Dinas P2CKTR segera diserah terimakan ke Dinas Pendidikan agar bisa dipergunakan	Pembangunan infrastruktur sudah diserahterimakan dapat sudah dipergunakan dengan baik.
6	DPRD merekomendasikan untuk membangun sekolah SMPN di Prambon dan Tulangan sebagai antisipasi penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi	Sudah Kami alokasikan dan kami Anggarkan namun dalam kondisi pandemi kegiatan pembangunan sekolah di SMPN Prambon dan Tulangan dapat mulai dilakukan di Tahun 2022

Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Kesehatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit, serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,06	73,69	100,5%
2	Persentase Keluarga Sehat	27,7	23,67	117,03%
3	Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan	53,10/ 100.000 KH	59,59/100.000 KH	89%
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	3,8 / 1.000 KH	3,01 / 1.000 KH	126%
5	Persentase Balita Stunting	8,80%	7,60%	116%
6	Rata – Rata Nilai SKM Pelayanan Puskesmas	89,14	84,79	104,76%
7	Status Akreditasi Rumah Sakit	Progres Menuju Status Akreditasi Internasional	Terakreditasi Internasional	Paripurna
8	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	A (90,77)	A (81,26)	A (90,87)
9	*Bed Occupancy Rate (BOR)*	60,8%	70-85%	54,4%
10	*Average Length of Stay (ALOS)*	3,9 hari	3-5 hari	4,5 hari
11	*Turn Over Interval (TOI)*	2,4 hari	1-3 hari	3,7 hari
12	*Bed Turn Over (BTO)*	60,6 kali	40-50 kali	45,2 kali
13	*Net Death Rate (NDR)*	44,6‰	≤45‰	50,7‰
14	*Gross Death Rate (GDR)*	77,6‰	≤70‰	109,3‰

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada tabel diatas menunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan dan apabila dibandingkan tahun 2020 terjadi peningkatan. mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Kesehatan cukup berhasil, perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Sidoarjo ke arah yang lebih baik.

Perbandingan capaian AHH Provinsi Jawa Timur dan capaian AHH Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada grafik 1 dibawah ini.

Grafik III.B.7

Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2021

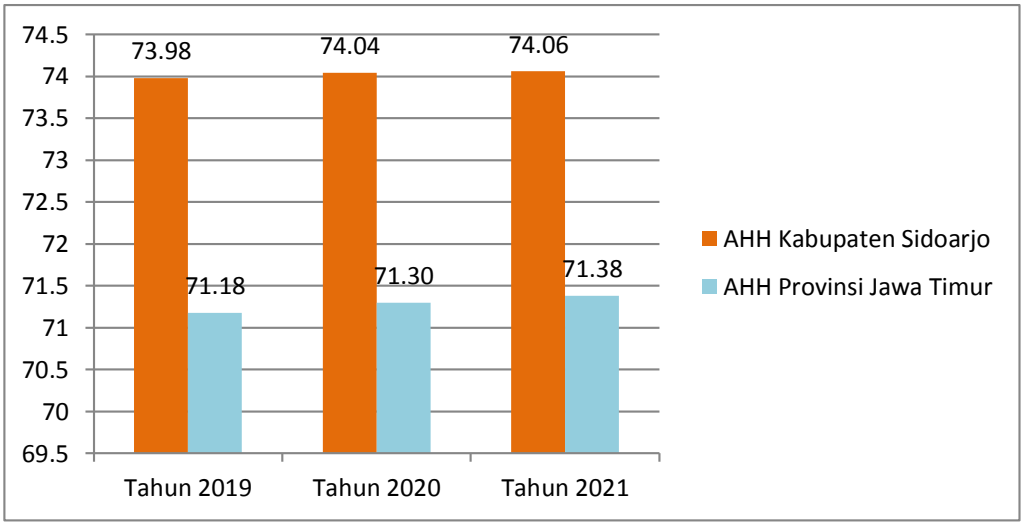

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Grafik diatas menjelaskan bahwa jika dibanding dengan rata – rata AHH Provinsi Jawa Timur, AHH Kabupaten Sidoarjo jauh lebih baik. Hal tersebut merupakan

dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo.

Persentase Keluarga Sehat

Yang dimaksud dengan Keluarga Sehat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 adalah Keluarga sehat adalah keluarga yang anggota keluarganya melakukan 12 indikator keluarga sehat, antara lain mengikuti program KB, ibu yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi yang mendapat ASI eksklusif, balita yang dipantau pertumbuhannya, penderita TB paru yang berobat sesuai standar, penderita hipertensi yang melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, tidak merokok, anggota keluarga menjadi anggota JKN, keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Grafik III.B.8

Persentase Keluarga Sehat (KS) Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2019 – 2021

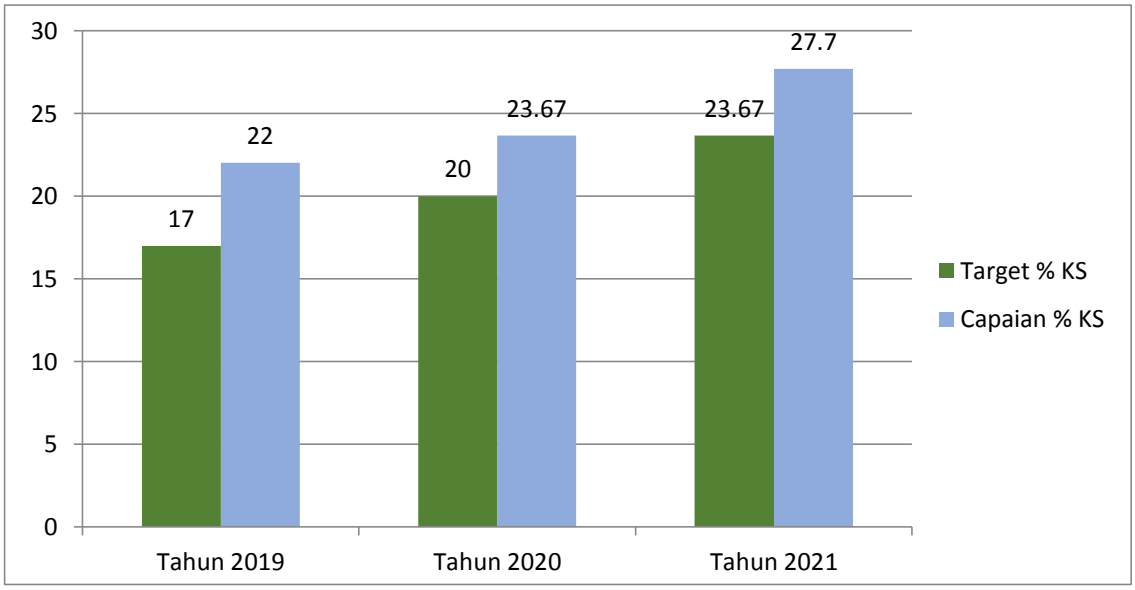

Sumber Data : Dinkes Kab. Sidoarjo

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka capaian kinerja Persentase Keluarga Sehat (KS) tahun 2021 sudah mencapai target, hal ini dikarenakan adanya keberhasilan dan kesinambungan program-program lainnya, juga karena

adanya program KOPIPU (Konseling Dari Pintu Ke Pintu), yang terintegrasi dengan program KS, yang akhirnya ikut mendongkrak kunjungan ke keluarga rawan, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 kunjungan difokuskan kepada peningkatan status kesehatan keluarga dengan melalui kunjungan intervensi lanjut, dan apabila dibandingkan dengan tingkat capaian nasional (19%) dan provinsi (19%), maka capaian KS Kabupaten Sidoarjo (27,7%) jauh diatas capaian nasional dan provinsi.

Untuk tetap mempertahankan keluarga sehat tetap tinggi bahkan meningkat hal yang akan dilakukan:

- Optimalisasi peran/ kerjasama lintas sektor, dalam hal ini organisasi masyarakat dan kader
- Dukungan anggaran yang cukup memadai untuk kunjungan intervensi.
- Komitmen petugas dan kader untuk tetap melakukan kunjungan pada masa pandemi sehingga meningkatkan capaian indikator KS.
- Penataan kembali aplikasi PISPK, sehingga update secara otomatis setelah data dientri tidak sering eror, sehingga tidak berimbas pada capaian 12 indikator yang tidak *up to date kembali*.

Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu Tahun 2021 di Kabupaten Sidoarjo adalah 59,59/100.000 kelahiran hidup (21 ibu hamil/ nifas meninggal) dari target 53,10/100.000 kelahiran hidup (19 ibu hamil/ nifas meninggal) atau tercapai sebesar 89%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (53,10/ 100.000 KH) maka terdapat peningkatan angka sebesar 6,49 atau sekitar 1,05%. Peningkatan tersebut disebabkan karena dari 21 ibu hamil/ nifas yang meninggal, 12 diantaranya karena covid-19.

Grafik III.B.9

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019 – 2021

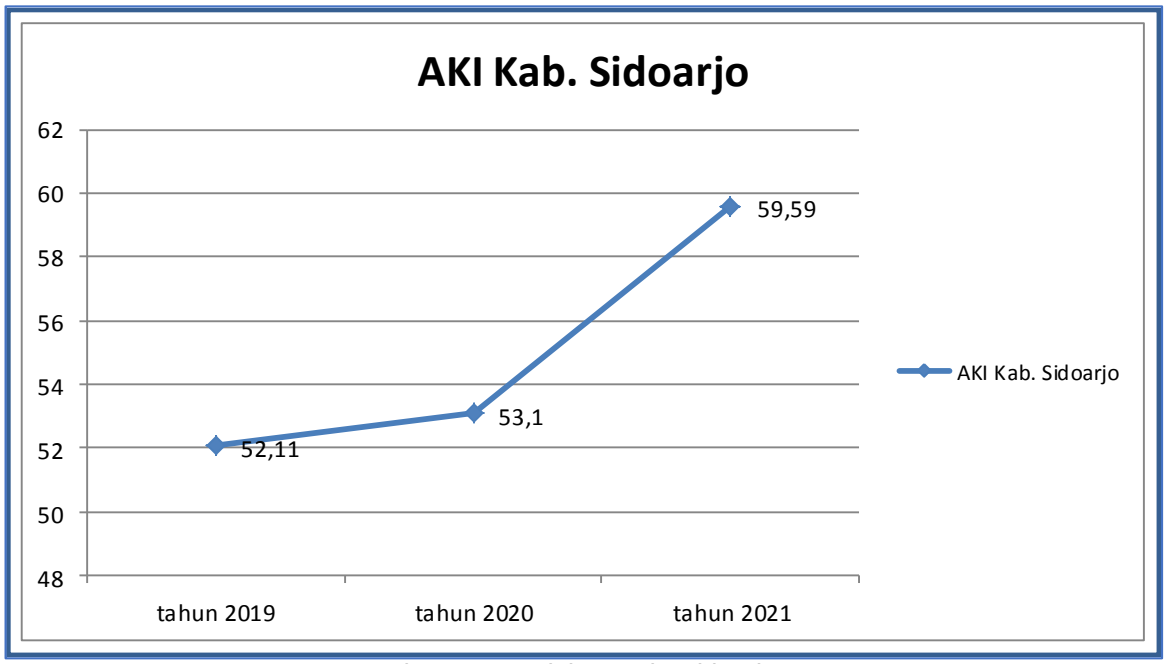

Sumber Data : Dinkes Kab. Sidoarjo

Upaya yang telah dilakukan agar Angka Kematian Ibu dapat terus menurun, yaitu:

- Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (*Ante Natal Carel* ANC terpadu-10T);
- Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam APN (*Peer Review* Asuhan Persalinan Normal), kelas ibu, kegawatdaruratan;
- Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil;
- Refreshing deteksi risiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll)
- Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk dalam Pokja I (Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 (Tabulin & Dasolin). Pokja 3 (Donor Darah), Pokja 4 (Ambulan Desa);
- Melakukan penilaian tatalaksana pada gawat darurat maternal dan neonatal melalui *skill assesment* dengan sasaran tenaga kesehatan (bidan);

- Optimalisasi sistem rujukan : kolaborasi SI CANTIK dengan SIMANIS RSUD, untuk kasus *emergency/* rujukan darurat persalinan;
- Melakukan pengkajian dan pembelajaran *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada perinatal dan neonatal.
- Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah
- Evaluasi dan optimalisasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Penakib) Kabupaten Sidoarjo;
- Aplikasi Software Si Cantik (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak), program bayi sampai dengan anak..

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2021 di Kabupaten Sidoarjo sebesar 3,01/1.000 kelahiran hidup (106 bayi meninggal) dari target 3,8/1.000 (136 bayi meninggal) kelahiran hidup atau tercapai 126%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (3,8/1.000 KH) maka terdapat penurunan angka 0,07 atau sekitar 22,05%. Penurunan tersebut disebabkan karena Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Kesehatan terus berupaya menekan Angka Kematian Bayi, dengan melaksanakan program-program, antara lain :

- Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
- Adanya rujukan dini berencana, maksudnya dari persalinan yang bermasalah (mulai ibu hamil beresiko, ibu bersalin beresiko dan neonatus beresiko) dilakukan monitoring evaluasi untuk kemudian dirujuk ke RS;
- Melaksanakan *skill assesment* pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan;
- Melakukan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian neonatal;
- Pemberian pelayanan *Ante Natal Care (ANC)* terpadu (10 T);
- Pengembangan aplikasi software si CANTIK (Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan Anak) untuk pemantauan kesehatan anak (mulai dari lahir sampai dengan

balita), dipantau tumbuh kembangnya untuk mengantisipasi terjadinya stunting.

Perkembangan Angka Kematian Bayi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.B.10

Angka Kematian Bayi Tahun 2019 – 2021

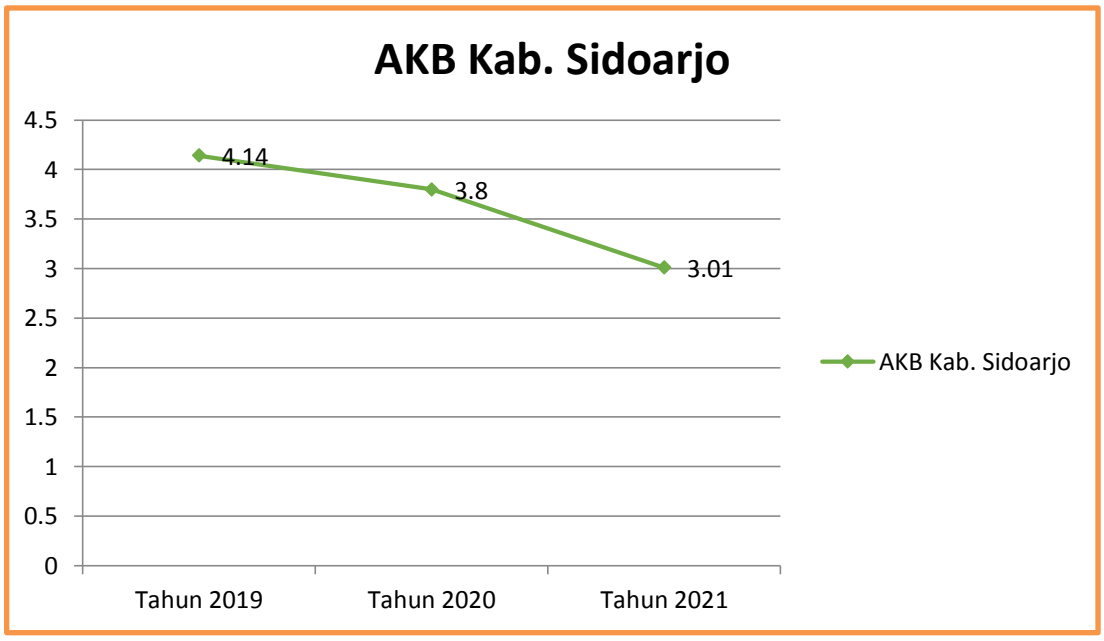

Sumber Data : Dinkes Kab. Sidoarjo

Persentase Balita Stunting

Balita stunting adalah balita yang panjang badannya/ tinggi badannya tidak sesuai dengan usia (Panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur < -2 SD. Persentase Balita Stunting Tahun 2021 tercapai 7,60% atau sebanyak 6.376 balita dari keseluruhan 84.440 balita yang diukur tinggi badannya di Kabupaten Sidoarjo. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu 8,80% maka tercapai 116%.

Adapun tren capaian persentase balita stunting tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.B.11

Stunting Balita Tahun 2019 – 2021

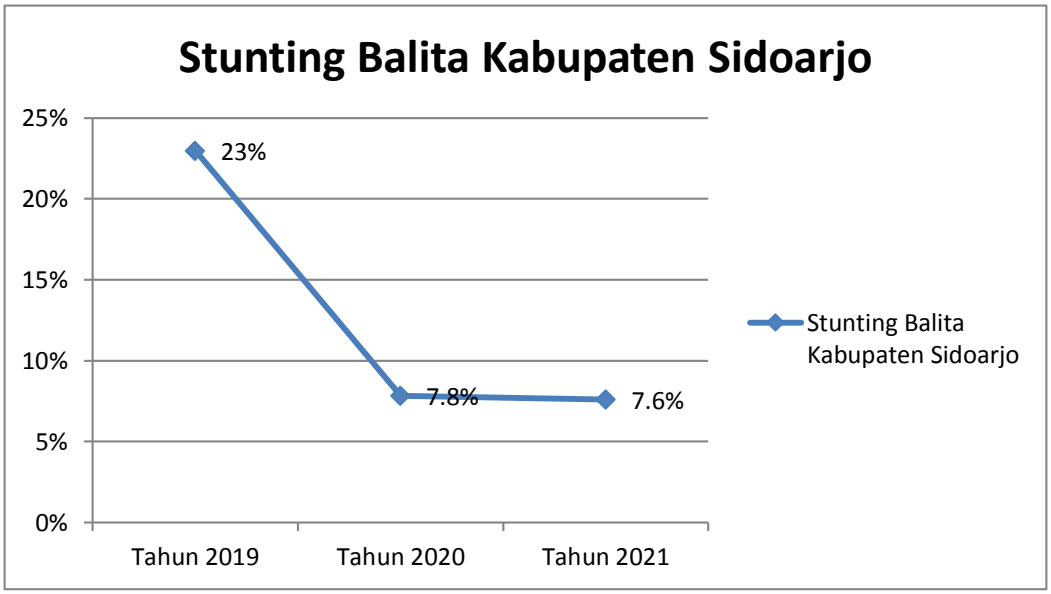

Sumber Data : Dinkes Kab. Sidoarjo

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka penurunan stunting antara lain :

- Mengaktifkan kader pendamping ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) cegah stunting;
- Pemberdayaan masyarakat (toga, kader lansia, toma) deteksi dini percepatan penurunan stunting dengan lebih aktif dating ke posyandu;
- Mengaktifkan konseling PMBA (Pembirian Makanan Bayi dan Anak).

Rata-Rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Puskesmas

Upaya optimalisasi layanan kesehatan kepada masyarakat melalui Puskesmas yang berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo terus ditingkatkan melalui pembangunan baru Gedung Puskesmas, pemenuhan kelengkapan alat medis/ kedokteran/ laboratorium dan sarana dan prasarana lainnya, kecukupan SDM tenaga medis (dokter, perawat, bidang) terus ditingkatkan, demikian pula tenaga non medis yang akan mendukung kelancaran tugas dan fungsi Puskesmas.

Grafik III.B.12

Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas

Tahun 2019 – 2021

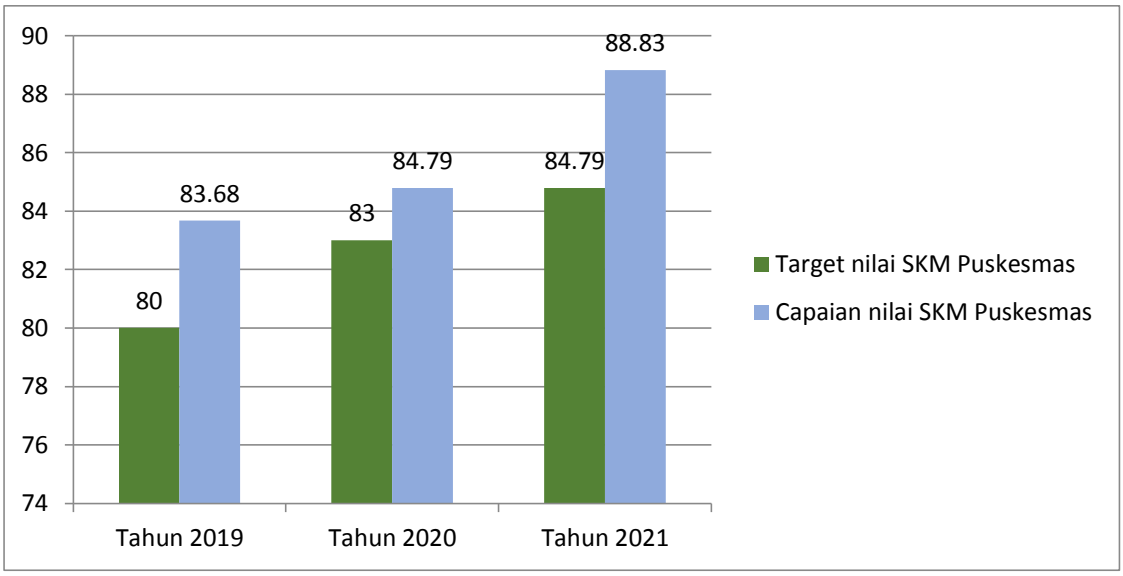

Sumber Data : Dinkes Kab. Sidoarjo

Capaian kinerja untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Puskesmas tahun 2021 mencapai target (88,83%), hal ini dikarenakan 26 puskesmas telah terakreditasi, sehingga terjadi peningkatan mutu layanan, selain itu karena adanya dukungan anggaran sehingga sarana prasarana di puskesmas tercukupi dan kualitas layanan menjadi lebih baik.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 (84,79%), maka capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan, dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 84,79% capaian kinerja secara signifikan jauh diatas target yang ditetapkan.

Selain itu, masa pandemi covid 19 yang dimulai sejak Maret 2020, masyarakat memberikan apresiasi tinggi dan dukungan sepenuhnya terhadap pelayanan kesehatan terutama dalam hal penanganan Covid 19.

Berikut adalah rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas pada tahun 2021.

No	Puskesmas	Hasil Survei SKM
1	TARIK	88,18
2	PRAMBON	87,85
3	KREMBUNG	93.3
4	PORONG	87,36
5	KEDUNGSOLO	86,37
6	JABON	84,7
7	TANGGULANGIN	87,91
8	CANDI	91,83
9	TULANGAN	91,77
10	KEPADANGAN	87,61
11	WONOAYU	89,16
12	SUKODONO	96,22
13	SIDOARJO	93,3
14	URANGAGUNG	87,99
15	SEKARDANGAN	93,74
16	BUDURAN	84,7
17	SEDATI	89,16
18	WARU	89,68
19	MEDAENG	91,08
20	GEDANGAN	89,79
21	GANTING	93,29
22	TAMAN	88,72
23	TROSOBO	85,8
24	KRIAN	83,39
25	BARENGKRAJAN	89,46
26	BALONGBENDO	83,43
27	SIDODADI	87,07

Sumber Data : Dinkes Kab. Sidoarjo

Upaya Optimalisasi Pelayanan Kesehatan yang dapat dilakukan melalui Puskesmas antara lain :

- Pembangunan puskesmas baru. Mengingat rasio jumlah penduduk terhadap jumlah puskesmas yang masih belum sesuai standar, sehingga kualitas pelayanan belum sepenuhnya bisa optimal.
- Penambahan SDM tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan pada Puskesmas

Status Akreditasi Rumah Sakit

Status Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan kepada Rumah Sakit oleh Pemerintah melalui badan yang berwenang dalam hal ini Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk memenuhi standar pelayanan dengan tingkat kelulusan yang telah ditentukan. RSUD Sidoarjo telah melaksanakan 2 (dua) kali akreditasi dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	Status Akreditasi Rumah Sakit	Keterangan
2014	Paripurna	Akreditasi ke-I
2017	Paripurna	Akreditasi ke-II

Sumber data: RSUD Kab. Sidoarjo

Hasil tersebut menunjukkan bahwa RSUD Sidoarjo telah melaksanakan akreditasi yang pertama tahun 2014 dengan hasil paripurna dan akreditasi kedua pada tahun 2017 dengan hasil paripurna pula. Tingkat paripurna adalah tingkat kelulusan tertinggi yang dapat diraih oleh rumah sakit. Penilaian akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk kemudian dilakukan reakreditasi.

Status Akreditasi Rumah Sakit dengan target Terakreditasi Internasional pada tahun 2021 belum mencapai target dikarenakan kegiatan Akreditasi tidak dilaksanakan dalam masa Pandemi Covid-19. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 Tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan dan survei akreditasi untuk rumah sakit dan laboratorium kesehatan dilakukan kembali setelah status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah sehingga masa sertifikat akreditasi rumah sakit dengan status Paripurna masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Selain itu, RSUD Sidoarjo juga telah berkirim surat ke Kementerian Kesehatan yang menyatakan Komitmen Untuk Menjaga dan Melakukan Upaya Peningkatan Mutu hingga kegiatan akreditasi selanjutnya dilaksanakan. Oleh karena itu, status akreditasi RSUD Sidoarjo pada tahun 2021 masih tetap terakreditasi paripurna

sesuai survei akreditasi yang dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tahun 2017.

Meskipun dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan kegiatan akreditasi rumah sakit tahun 2021, upaya yang dilakukan untuk menuju Status Akreditasi Internasional antara lain:

a. Melaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja (Pokja) akreditasi;
b. Melaksanakan *review* dan revisi dokumen akreditasi;
c. Mengunggah dokumen ke aplikasi Sismadak (Sistem Manajemen Data Akreditasi);
d. Rutin melakukan bimbingan akreditasi secara daring

Nilai SKM RSUD Kabupaten Sidoarjo

Survei Kepuasan Masyarakat versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dilaksanakan satu tahun sekali. Survei ini dilakukan dengan merujuk pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	A	A (90,77)	100	A	A (90,87)	100

Pada tahun 2021, SKM RSUD Sidoarjo memperoleh predikat Sangat Baik (A) dengan nilai konversi IKM sebesar 90,87. Nilai SKM RSUD Sidoarjo di tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 90,77. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin puas dengan pelayanan RSUD Sidoarjo. Untuk hasil SKM per unsur pelayanan di RSUD Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut :

Unsur	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan
U1	Persyaratan	3.6853	Sangat baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.6865	Sangat baik
U3	Waktu Penyelesaian	3.6342	Sangat baik
U4	Biaya/ Tarif	3.6835	Sangat baik
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3.6635	Sangat baik

U6	Kompetensi pelaksana	3.7125	Sangat baik
U7	Perilaku pelaksana	3.6984	Sangat baik
U8	Penanganan pegaduan, saran dan masukan	3.6255	Sangat baik
U9	Sarana dan prasarana	3.6551	Sangat baik
	IKM	**3.6348**	**Sangat baik**

Sumber data: RSUD Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar kualitas pelayanan RSUD Sidoarjo dapat terus meningkat, yaitu:

- Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit;
- Meningkatkan kompetensi dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Menyederhanakan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan untuk mempermudah pelanggan serta mempersingkat waktu penyelesaian..

Bed Occupancy Rate (BOR)

Bed Occupancy Rate (BOR) merupakan angka yang menunjukkan persentase tingkat penggunaan tempat tidur pada satuan waktu tertentu di unit rawat inap. BOR yang berada di bawah standar berarti bahwa tingkat pemanfaatan tempat tidur rendah. Berikut grafik tren perbandingan antara capaian BOR Covid-19 dan BOR Total RSUD Sidoarjo selama tahun 2021 :

Grafik III.B.13

Perbandingan BOR Covid-19 dan BOR Total RSUD Tahun 2021

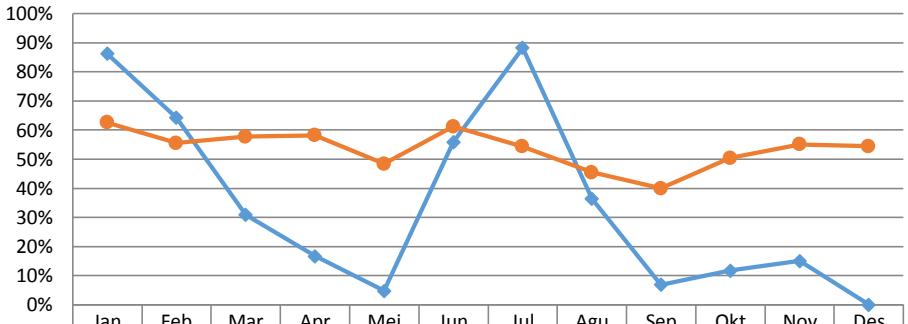

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
BOR Covid-19	86.24%	64.26%	30.90%	16.64%	4.80%	55.91%	88.26%	36.42%	6.89%	11.70%	15.00%	0.00%
Bor Total	62.61%	55.55%	57.76%	58.20%	48.41%	61.23%	54.39%	45.43%	39.98%	50.37%	55.12%	54.40%

Sumber data: RSUD Kab. Sidoarjo

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa grafik BOR Total cenderung lebih stabil dibandingkan dengan BOR Covid-19. Pada bulan Juni - Juli 2021, BOR Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan jumlah kasus Covid-19 menunjukkan tren peningkatan tertinggi sejak adanya kasus Covid-19 pada bulan April 2020. Namun pada bulan Agustus 2021 mulai mengalami penurunan hingga pada bulan Desember 2021 BOR Covid-19 terealisasi sebesar 0% atau tidak ada pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Sidoarjo. Sehingga BOR Total pada bulan Desember 2021 terealisasi sebesar 54,4% dari target 70-85% atau berada di bawah standar dengan capaian 84,4%.

Meningkatnya jumlah pasien Covid-19 berbanding terbalik dengan jumlah kunjungan pasien Non Covid-19 yang justru mengalami penurunan pada bulan Juni-September 2021. Rendahnya jumlah kunjungan pasien Non Covid-19 disebabkan karena pasien takut untuk berobat ke RSUD Sidoarjo dan adanya isu yang beredar bahwa pasien akan didiagnosis Covid-19 jika berobat ke rumah sakit. Selain itu, beberapa fasilitas ruang rawat inap yang semula merupakan rawat inap biasa dialihfungsikan menjadi ruang isolasi khusus Covid-19.

Adapun tren capaian *Bed Occupancy Rate* selama tiga tahun terakhir dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.14

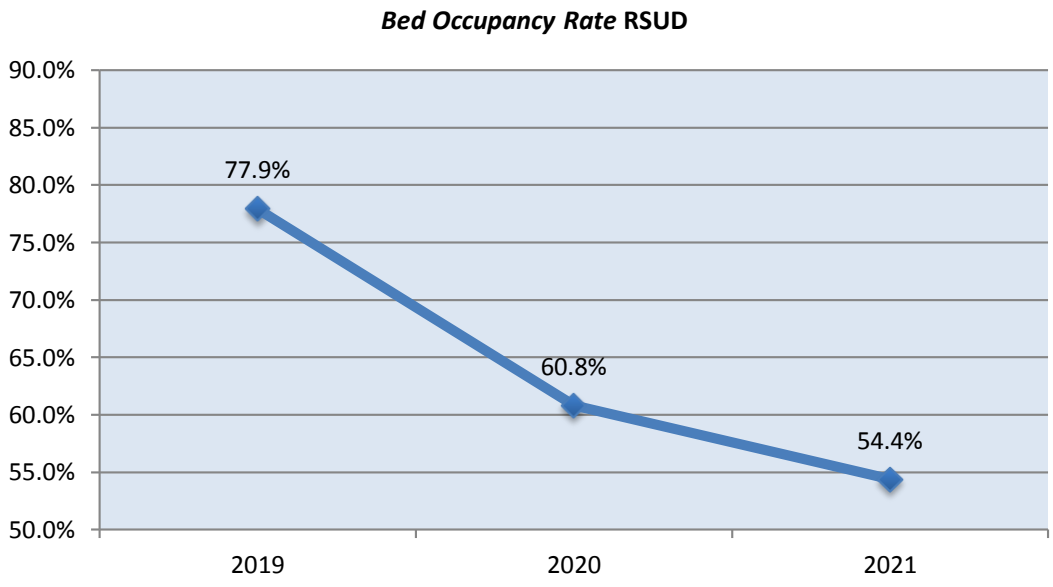

Sumber data: RSUD Kab. Sidoarjo

Pada tahun 2021 realisasi BOR RSUD yaitu 54,4% dari target 70-85% atau tercapai 84,4%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 60,8% maka terdapat penurunan sebesar 6,4% atau sekitar 10,53%. Upaya yang dilakukan agar BOR memenuhi standar, antara lain :

- Membuat edaran dan kebijakan terkait pelayanan pasien agar tetap menerapkan protokol kesehatan baik bagi petugas maupun pasien dan pengunjung;
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa RSUD Sidoarjo aman dan nyaman untuk dikunjungi karena telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan melakukan pemisahan pelayanan antara pasien Covid-19 dan Non Covid-19;
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan dan SPO Pelayanan Pasien;.

Average Length of Stay (ALOS)

Average Length of Stay (ALOS) merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama hari rawat inap pasien dalam periode waktu satu tahun. Standar ALOS yang ditetapkan di RSUD Sidoarjo adalah 3-5 hari. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan. Nilai ALOS yang terlalu rendah mengindikasikan kualitas layanan kesehatan baik dan secara ekonomi akan mengurangi *cost* yang dikeluarkan seorang pasien, sedangkan terlalu tingginya ALOS mengindikasikan lambatnya penanganan pasien oleh tenaga medis.

Pada tahun 2021, ALOS RSUD Sidoarjo telah memenuhi standar yakni selama 4,5 hari dari standar 3-5 hari yang bermakna bahwa pelayanan diberikan secara cepat dan tepat (efisien) sehingga pasien dapat segera pulih. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 3,9 hari maka terdapat kenaikan 0,6 hari atau sekitar 15,38%.

Adapun tren capaian *Average Length of Stay* selama tiga tahun terakhir dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.15

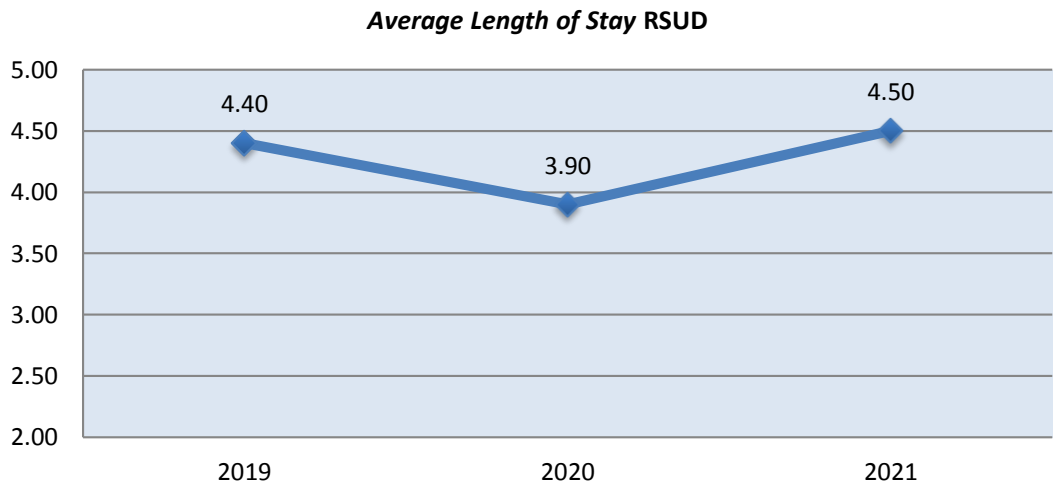

Sumber data: RSUD Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar ALOS tetap memenuhi standar, yaitu :

- Tetap menjaga mutu pelayanan dan penerapan sasaran keselamatan pasien antara lain ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi efektif, peningkatan keamanan obat atau *high alert* yang harus diwaspadai, kepastian tepat lokasi, prosedur dan pasien operasi, pengurangan terhadap risiko infeksi setelah menggunakan pelayanan kesehatan, serta pengurangan risiko jatuh;
- Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar operasional yang berlaku, dan etika profesi.
- Menerapkan konsep pelayanan prima melalui optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan, efisiensi proses pelayanan, dan membudayakan mutu pelayanan.

Turn Over Interval (TOI)

Turn Over Interval (TOI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur waktu rata-rata tempat tidur kosong atau waktu antara satu tempat tidur ditinggalkan oleh pasien sampai ditempati lagi oleh pasien lain. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Standar yang ditetapkan Kemenkes untuk TOI yaitu 1-3 hari. Semakin besar angka TOI atau melebihi standar yang ditetapkan, semakin lama waktu tempat tidur menunggu pasien berikutnya.

Interval ini dimaksudkan untuk meminimalisir kejadian infeksi nosokomial terutama Covid-19 sehingga meningkatkan kepuasan dan keselamatan pasien.

TOI RSUD Sidoarjo pada tahun 2021 terealisasi 3,7 hari atau melebihi standar 1-3 hari dikarenakan terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien dan jumlah kasus Covid-19 yang dirawat di rumah sakit pada bulan Agustus-Desember 2021 sehingga waktu tempat tidur kosong menjadi lebih lama. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 2,4 hari maka terdapat kenaikan 1,3 hari atau sekitar 54,17%. Adapun tren capaian *Turn Over Interval* selama tiga tahun terakhir dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.16

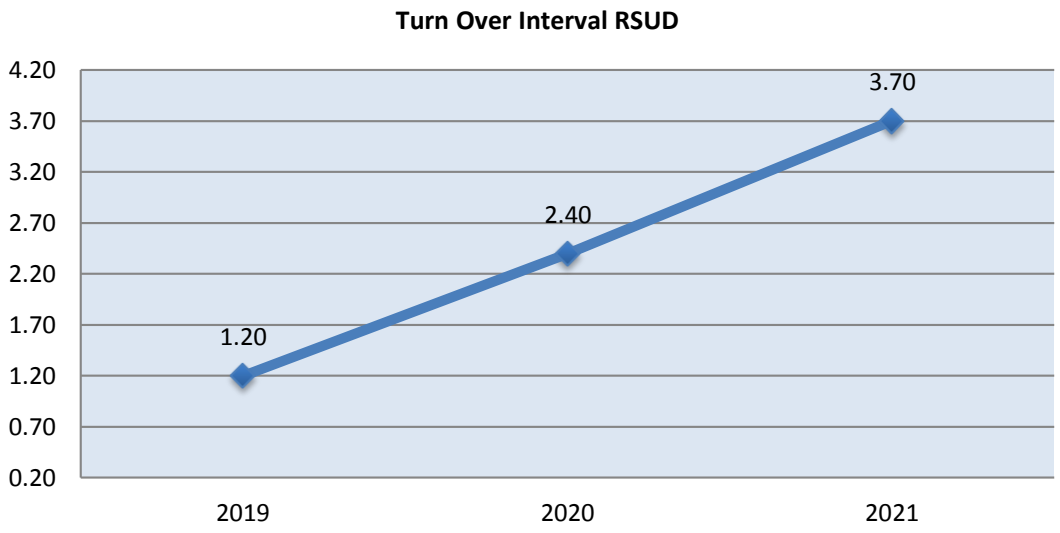

Sumber data: RSUD Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar TOI memenuhi standar, yaitu menjaga kualitas pelayanan terutama dalam hal sarana prasarana. Salah satunya adalah pembersihan tempat tidur menggunakan disinfektan tiap kali tempat tidur selesai dipakai sehingga kejadian infeksi nosokomial dapat dihindari..

Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO) merupakan indikator untuk mengukur frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Rasio ini mengindikasikan tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur.

Pada tahun 2021, BTO RSUD telah memenuhi standar dengan realisasi pemakaian tempat tidur rata-rata sebanyak 45,2 kali dari target 40-50 kali per tahun atau telah memenuhi standar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 60,6 kali maka terdapat penurunan sebanyak 15,4 kali atau sekitar 25,41%. Adapun tren capaian *Bed Turn Over* selama tiga tahun terakhir dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.17

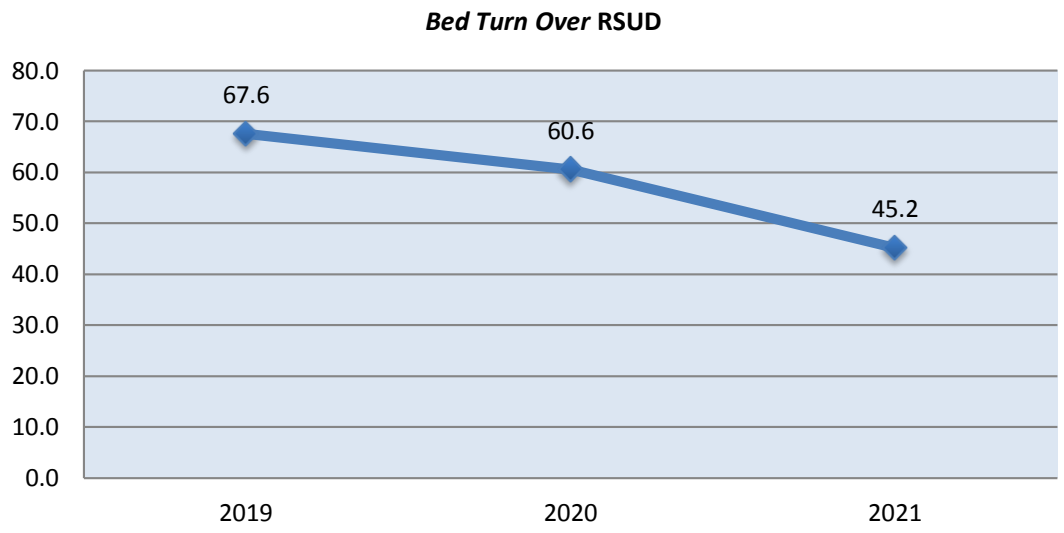

Sumber data : RSUD Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar BTO tetap memenuhi standar, yaitu :

- Peningkatan dan sarana prasarana kesehatan yang berteknologi canggih, misalnya *Cathlab*, USG 4D (Ultrasonografi), Transcranial *Magnetic Stimulation* (TMS), *Echocardiography, Electroensephalogram* (EEG), *CT-Scan 128 Slices*, MRI 3 Tesla, dan ESWL;
- Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar operasional yang berlaku, dan etika profesi.
- Monitoring yang berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Panduan Praktik Klinik, *Clinical Pathway*, serta Daftar Obat Medik dan Audit Medik).

Net Death Rate (NDR)

Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1.000 pasien keluar rumah sakit. NDR RSUD tidak memenuhi standar dengan realisasi 50,7‰ dari standar ≤45‰. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 44,6‰ maka terdapat peningkatan 6,1‰ atau sekitar 13,68%. Berikut perhitungan NDR di RSUD Sidoarjo pada tahun 2021*:*

$$NDR = \frac{\sum Pasien\ keluar\ mati \geq 48\ jam}{\sum Pasien\ keluar\ hidup\ dan\ mati}\ x\ 1.000‰$$

$$= \frac{1.605}{31.640}\ x\ 1.000‰ = \mathbf{50{,}7‰}$$

NDR yang tinggi disebabkan oleh kondisi pasien pra rujukan yang datang ke RSUD Sidoarjo sudah dalam kondisi terlambat penanganan atau kritis. RSUD Sidoarjo juga menjadi salah satu dari 7 pusat rujukan regional di Jawa Timur sehingga pasien yang masuk ke RSUD Sidoarjo tidak murni berasal dari Kabupaten Sidoarjo saja namun juga berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo misalnya dari wilayah Pasuruan dan Mojokerto. Selain itu, tingginya NDR juga disebabkan karena tingginya angka kematian pasien akibat Covid-19.

Berikut daftar 10 besar diagnosis penyakit rawat inap di RSUD Sidoarjo pada tahun 2021 :

No	Diagnosis	Jumlah Pasien
1	*Coronavirus Infection, Unspecified*	4.000
2	*Pneumonia, Unspecified*	1.953
3	*Dyspepsia*	1.268
4	Diare *(Diarhoea and Gastroenteritis of Presumed Infectious Origin)*	1.197
5	*Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Without Complications*	1.049
6	*Cerebral Infarction, Unspecified*	801
7	*Chronic Kidney Disease, Stage 5*	658
8	*Singleton, Born In Hospital*	557
9	*Dengue Haemorrhagic Fever*	480
10	*Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Renal Complications*	469

Sumber data : RSUD Kab. Sidoarjo

Adapun tren capaian *Net Death Rate* selama tiga tahun terakhir dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.18

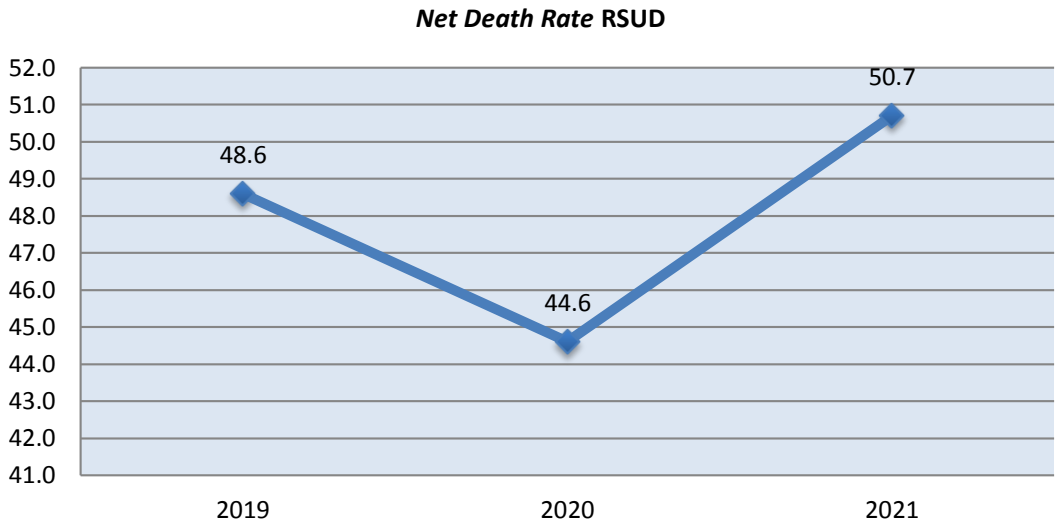

Sumber data : RSUD Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar NDR memenuhi standar, yaitu :

- Meningkatkan kualitas pelayanan (kecepatan dan ketersediaan) Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), dan fasiltas pendukung melalui Rapat koordinasi antar DPJP dan Kelompok Staf Medis (KSM) yang difasilitasi Bidang Pelayanan Medis setelah hasil dari Audit Kematian oleh Komite Medik;
- Meningkatkan komunikasi efektif antar pemberi asuhan pelayanan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan peralatan untuk pelayanan pasien kritis..

Gross Death Rate (GDR)

Gross *Death Rate (GDR)* adalah adalah angka kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 pasien keluar. GDR RSUD Sidoarjo tidak mencapai target dengan realisasi 109,3‰ dari standar ≤70‰. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 77,6‰ maka terdapat peningkatan 31,7‰ atau sekitar 40,85%. Berikut perhitungan GDR di RSUD Sidoarjo pada tahun 2021*:*

$$GDR = \frac{\sum Pasien\ keluar\ mati}{\sum Pasien\ keluar\ hidup\ dan\ mati}\ x\ 1.000‰$$

$$= \frac{3.457}{31.640}\ x\ 1.000‰ = \mathbf{109,3‰}$$

GDR yang tinggi disebabkan oleh kondisi pasien pra rujukan yang datang ke RSUD Sidoarjo sudah dalam kondisi terlambat penanganan atau kritis. RSUD Sidoarjo juga menjadi salah satu dari 7 pusat rujukan regional di Jawa Timur sehingga pasien yang masuk ke RSUD Sidoarjo tidak murni berasal dari Kabupaten Sidoarjo saja namun juga berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo misalnya dari Pasuruan dan Mojokerto. Selain itu, tingginya GDR juga disebabkan karena tingginya angka kematian pasien akibat Covid-19 di tahun 2021. Persentase kematian akibat Covid-19 di RSUD Sidoarjo dapat dilihat dalam perhitungan berikut :

Persentase kematian pasien Covid-19 $= \frac{\sum Kematian\ pasien\ Covid-19}{\sum Kematian\ di\ rumah\ sakit}$ *x 100%*

$$= \frac{1.515}{3.457}\ x\ 100\% = \mathbf{43,82\%}$$

Selain GDR, *Case Fatality Rate (CFR)* atau angka kematian kasus Covid-19 di RSUD Sidoarjo juga cukup tinggi yang dapat dilihat dalam perhitungan berikut :

$$CFR = \frac{\sum Kematian\ akibat\ Covid-19}{\sum pasien\ Covid-19}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{1.515}{5.926}\ x\ 100\% = \mathbf{25,57\%}$$

Adapun tren capaian *Gross Death Rate* selama tiga tahun terakhir dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.19

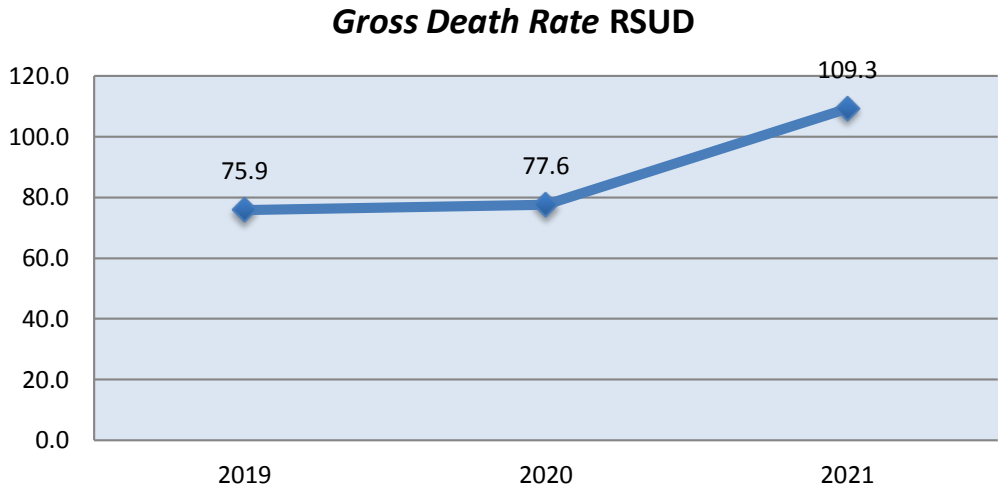

Sumber data : RSUD Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar GDR memenuhi standar, yaitu :

- Meningkatkan kualitas pelayanan (kecepatan dan ketersediaan) Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), dan fasiltas pendukung melalui Rapat koordinasi antar DPJP dan Kelompok Staf Medis (KSM) yang difasilitasi Bidang Pelayanan Medis setelah hasil dari Audit Kematian oleh Komite Medik;
- Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar operasional yang berlaku, dan etika profesi;
- Meningkatkan sarana prasarana dan peralatan untuk pelayanan pasien kritis;
- Monitoring yang berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Panduan Praktik Klinik, *Clinical Pathway*, serta Daftar Obat Medik dan Audit Medik).

Penanganan dan penanggulangan Covid-19 Tahun 2021

Pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo telah berupaya untuk menanggulangi pandemi covid-19, dengan capaian kasus pada setiap pekannya yang tercatat sampai dengan Desember 2021 sebagaimana tabel berikut :

MINGGU	KASUS POSITIF	KESEMBUHAN	KEMATIAN
Minggu 1	232	145	11
Minggu 2	214	164	8
Minggu 3	271	215	9
Minggu 4	326	276	8
Minggu 5	216	238	9
Minggu 6	195	203	8
Minggu 7	255	254	8
Minggu 8	213	290	8
Minggu 9	251	295	6
Minggu 10	299	290	5
Minggu 11	172	187	2
Minggu 12	125	123	1
Minggu 13	89	92	1
Minggu 14	88	92	4
Minggu 15	107	110	5
Minggu 16	95	93	1
Minggu 17	82	84	3
Minggu 18	81	77	3
Minggu 19	59	61	1
Minggu 20	50	49	2
Minggu 21	50	51	0
Minggu 22	47	45	4
Minggu 23	78	64	1
Minggu 24	91	70	4
Minggu 25	169	130	2
Minggu 26	387	281	5
Minggu 27	469	421	2
Minggu 28	2993	618	10
Minggu 29	2682	1038	46
Minggu 30	2442	2263	64
Minggu 31	1452	3167	44
Minggu 32	998	1766	73
Minggu 33	678	922	32
Minggu 34	461	1144	12
Minggu 35	279	701	12
Minggu 36	141	296	11
Minggu 37	107	127	4

Minggu 38	70	88	5
Minggu 39	44	78	3
Minggu 40	37	62	1
Minggu 41	37	64	2
Minggu 42	24	31	1
MINGGU	**KASUS POSITIF**	**KESEMBUHAN**	**KEMATIAN**
Minggu 43	22	22	0
Minggu 44	22	23	0
Minggu 45	12	14	0
Minggu 46	15	19	0
Minggu 47	13	10	0
Minggu 48	4	7	0
Minggu 49	10	8	0
Minggu 50	6	7	0
Minggu 51	1	4	0
Minggu 52	2	2	0
TOTAL	**17263**	**16881**	**441**

Jika dibuat grafik, maka gelombang puncak kasus covid dapat dilihat terjadi pada Bulan Agustus 2021.

Grafik III.B.20

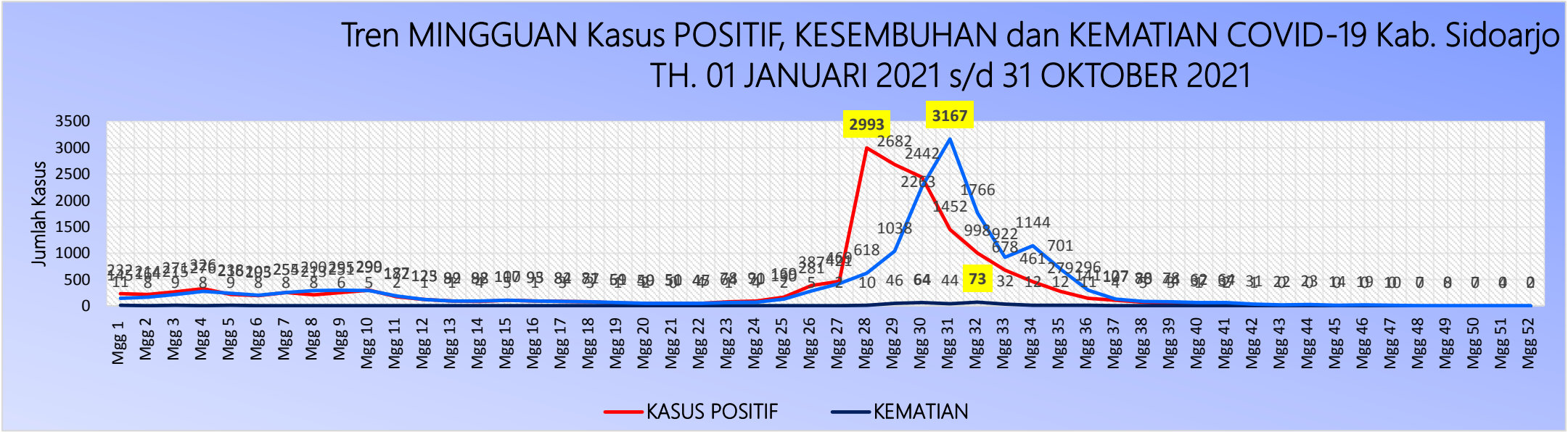

Sumber Data : Dinkes Kab. Sidoarjo

Untuk menekan laju perkembangan covid-19, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan kegiatan Vaksinasi ke berbagai pelosok di Kabupaten Sidoarjo dengan capaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 menurut wilayah kecamatan adalah sebagai berikut.

NO	KECAMATAN SUBDISTRICT	JUMLAH PENDUDUK YANG TELAH DIVAKSIN	
		VAKSIN DOSIS 1	VAKSIN DOSIS 2
1	TARIK	38622	34855
2	PRAMBON	52305	40938
3	KREMBUNG	39760	31718
4	PORONG	56938	51332
5	JABON	26140	18316
6	TANGGULANGIN	36041	26697
7	CANDI	60758	48362
8	TULANGAN	57396	45790
9	WONOAYU	40523	33540
10	SUKODONO	64202	44295
11	SIDOARJO	344904	302424
12	BUDURAN	84304	63707
13	SEDATI	126783	89467
14	WARU	95524	73443
15	GEDANGAN	61157	48761
16	TAMAN	96319	71255
17	KRIAN	64602	50346
18	BALONGBENDO	50627	41920

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan selaku bagian dari satgas covid-19 diantaranya :

1) Menyiapkan selter dan ruang isolasi bagi pasien covid dengan gejala ringan di Mal Pelayanan Publik (MPP), Hotel Delta Mayang, Puskesmas Sedati , Puskesmas Porong, serta SMP Taman.
2) Bekerjasama lintas sektor mendirikan posko covid-19 (24 jam) yang melayani pengaduan seputar kasus covid-19 serta informasi tentang vaksinasi.
3) Pelaksanaan *contact tracing* bagi pasien covid-19 secara intensif dengan melibatkan pemerintah desa.

4) Pengembangan media promosi sadar hidup sehat, baik secara online maupun cetak, seperti leaflet dan brosur.
5) Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) untuk belanja obat-obatan/ vitamin petugas dan pasien terpapar covid-19, serta bahan penunjang medis covid-19 lainnya.
6) Mulai melaksanakan vaksin dan percepatan vaksin bagi tenaga kesehatan dan warga Kabupaten Sidoarjo, baik dosis 1 maupun dosis 2.

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga**
  - **Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.**

    Bentuk kegiatannya adalah pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat, baik yang termasuk dalam program JKN (sudah terdaftar dalam BPJS) maupun di luar program JKN (yang belum terdaftar dalam BPJS), dengan pagu anggaran Rp.148.774.313.815,- dan realisasi penyerapan Rp.148.312.807.835,-. jumlah penduduk yang dibayarkan sejumlah 6.174.837 jiwa.
  - **Pembangunan Puskesmas**

    Terdapat pembangunan 3 (tiga) Puskesmas baru, antara lain :

    1. Puskesmas Wonokasian di Kecamatan Wonoayu
    2. Puskesmas Tambakrejo di Kecamatan Waru

       Puskesmas Tari di Kecamatan Tarik

    Bentuk kegiatannya adalah pembangunan Puskesmas Wonokasian di Wonoayu, Puskesmas Tambakrejo di Waru dan Puskesmas Tari di Tarik. Dengan anggaran sebesar Rp.19.199.711.200,- dan realisasinya sebesar Rp. 18.976.758.750,- atau sebesar 98,84%
- **Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu**
  - **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**

    Bentuk kegiatannya adalah pemberian honor bagi kader posyandu setiap bulan di wilayah kelurahan sejumlah 606 orang dengan anggaran sebesar Rp. 331.600.000,- dengan *unit cost* per bulannya sebesar Rp. 50.000,-. Ini

hanya diberikan kepada wilayah kelurahan saja karena untuk wilayah desa sudah didanai oleh pemerintah desa.

c. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp. 358,661,598,960,- dan terealisasi sebesar Rp. 308,097,773,945,- atau 85,90%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. AKI;	53,10/ 100.000 KH	59,59/100.000 KH	89%
2. AKB;	3,8 / 1.000 KH	3,01 / 1.000 KH	126%
3. Persentase balita stunting	8,80%	7,60%	116%
4. Persentase Usia Lanjut yang sehat	71,97%	74%	103%
5. Persentase desa/ kelurahan UCI	91,00%	95,2%	105%
6. Persentase penduduk > 15 tahun dengan hipertensi	100%	67,59%	67,59%
7. Persentase orang terinfeksi HIV yang mendapatkan ARV	90%	42,7%	47,4%
8. Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100%	100%	100%
9. Persentase puskesmas yang memiliki alat kesehatan	100%	100%	100%

   Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	1:85.000	1:85.000	1:85.000
	2. Persentase pemenuhan kebutuhan obat sesuai perencanaan	90%	90%	90%

	3. Persentase Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar di puskesmas (akumulasi 60% sesuai ASPAK)	100%	100%	100%
	4. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai sesuai perencanaan	90%	90%	90%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	33,98%	100%	43,07%
	2. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tahun N	61,92%	100%	65,48%
	3. Persentase TFU (Tempat Fasilitas Umum) yang memenuhi syarat kesehatan	60%	60%	60%
	4. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	42,16%	100%	67,6%
	5. Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78,46%	100%	84,44%
	6. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	98,81%	100%	119,57%
	7. Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT(Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)	19%	50%	49%
	8. Presentase Puskesmas yang memiliki akreditasi minimal madya	66%	66%	66%
	9. Presentase fasilitas kesehatan primer swasta yang memiliki akreditasi minimal dasar	100%	100%	100%
	10. Presentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	81,83%	100%	100%

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sistem informasi kesehatan yang dikelola	100%	100%	100%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan kelas C dan D memiliki izin operasional;	100%	100%	100%
	2. Persentase fasilitas pelayanankesehatan primer memiliki izin operasional	100%	100%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	117.912.697.801	87.184.329.166	73,95
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	232.084.524.077	212.462.105.722	91,55
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	145.267.071	137.123.000	94,39
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.421.510.011	8.218.966.057	97,59

2. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** dengan anggaran sebesar Rp.11,695,950,113,- dan terealisasi sebesar Rp.11.308.113.401,- atau 96,68%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktik	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik	100%	100%	100
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang tercukupi Kebutuhan SDM Kesehatan	75%	100%	133,33
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	100%	100%	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	146.941.041	146.759.871	99,88
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	10.420.225.872	10.132.063.530	97,23
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.128.783.200	1.029.290.000	91,19

3. **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman** dengan anggaran sebesar Rp.416.877.879,- dan terealisasi sebesar Rp.275.443.073,- atau 66,07%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase PIRT yang mendapatkan sertifikat ijin edar	100%	100%	100

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki sertifikat	100%	100%	100

Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah izin edar yang dikeluarkan untuk perusahaan perbekalan kesehatan rumah tangga Alkes / PKRT kelas tertentu	10	10	100
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang bersertifikat	100%	100%	100
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	100%	100%	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	87.597.169	66.435.148	75,84
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	19.506.685	6.031.500	30,92
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	178.084.025	142.316.175	79,92
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	131.690.000	60.660.250	46,06

4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** dengan anggaran sebesar Rp.2.274.586.119,- dan terealisasi sebesar Rp.1.750.492.337,- atau 75,96%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	54%	52,45%	97,13

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi/kebijakan kesehatan yang dihasilkan	3	3	100
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase rumah tangga sehat berPHBS	60%	65%	108,33
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan	75%	100%	133,33

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.377.991.100	1.050.843.748	76,26
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	370.296.519	244.553.589	66,04
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	526.298.500	455.095.000	86,47

5. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp.844.158.805.557,- dan terealisasi sebesar Rp.745.361.579.900,- atau 88,30%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1	Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi	≥95%	92,36%	97,22%
2	*Bed Occupancy Rate (BOR)*	70-85%	54,40%	84,40%
3	*Average Length of Stay (ALOS)*	3-5 hari	4,5 hari	100%
4	*Turn Over Interval (TOI)*	1-3 hari	3,7 hari	99,30%
5	*Bed Turn Over (BTO)*	40-50 kali	45,2 kali	100%
6	*Net Death Rate (NDR)*	≤45‰	50,7‰	94,30%

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
7	*Gross Death Rate (GDR)*	≤70‰	109,3‰	60,70%
8	Persentase terlaksananya pengukuran parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar akreditasi	90%	100%	111,11%
9	Persentase indikator SPM bidang pelayanan medis yang mencapai target	85%	83,30%	87,68%
10	Persentase indikator SPM Bidang Penunjang Medis dan Non Medis yang mencapai target	100%	82,76%	82,76%
11	Persentase terlaksananya evaluasi Standar Asuhan Keperawatan	100%	100%	100%
12	Persentase indikator SPM Bagian Perencanaan dan Pemasaran yang mencapai target	100%	100%	100%
13	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100%	95,24%	95,24%
14	Persentase KSO baru dibidang pelayanan kesehatan yang diselesaikan	15%	13,21%	88,07%
15	Persentase KSO baru dibidang non pelayanan kesehatan yang diselesaikan	23%	4%	17,39%
16	Persentase indikator SPM Bagian SDM dan Diklit yang mencapai target	100%	80%	80%
17	Persentase terlaksananya pengukuran parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar akreditasi	90%	100%	111,11%
18	Presentase diselesaikannya penelitian dalam Karya Tulis Ilmiah	80%	100%	100%
19	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,26%	90,87%	111,83%
20	Persentase indikator SPM Bagian Keuangan yang mencapai target	100%	100%	100%
21	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%
22	Persentase indikator SPM Bagian Umum yang mencapai target	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1	Persentase elemen penilaian pokja di bidang pelayanan medis yang memenuhi standar	≥95%	91,08%	95,87%
2	Persentase elemen penilaian pokja di bidang pelayanan keperawatan yang memenuhi standar	≥95%	92,29%	97,15%
3	Persentase elemen penilaian pokja di bidang pelayanan manajemen yang memenuhi standar	≥95%	94,31%	99,27%
4	Persentase indikator SPM jenis pelayanan gawat darurat yang mencapai target	85%	71,40%	84%
5	Persentase indikator SPM pelayanan rawat jalan yang mencapai target	85%	100%	117,65%
6	Persentase indikator SPM pelayanan rekam medis yang mencapai target	85%	50%	58,82%
7	Persentase perolehan pasien baru (Customer Acquisition)	2%	2,15%	107,50%
8	Persentase perolehan pasien lama (Customer Loyalty)	75%	83,47%	111,29%
9	Kepatuhan dalam pengisian Clinical Pathway (CP)	70%	70%	100%
10	Persentase komponen Laporan Analisa Rawat Inap yang telah dilaporkan secara berkala	100%	100%	100%
11	Persentase indikator SPM pelayanan rawat inap yang mencapai target	85%	83,30%	98%
12	Persentase indikator SPM pelayanan bedah sentral yang mencapai target	85%	100%	117,65%
13	Persentase indikator SPM pelayanan persalinan, perinatologi dan KB yang mencapai target	85%	77,80%	91,53%
14	Persentase indikator SPM pelayanan intensif yang mencapai target	85%	66,70%	78,47%
15	Persentase indikator SPM pelayanan GAKIN yang mencapai target	85%	100%	117,65%
16	Persentase indikator SPM pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang mencapai target	85%	66,70%	78,47%
17	Persentase indikator SPM pelayanan radiologi yang mencapai target	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
18	Persentase indikator SPM pelayanan Laboratorium Patologi Klinik yang mencapai target	100%	100%	100%
19	Persentase indikator SPM pelayanan Rehabilitasi Medik yang mencapai target	100%	100%	100%
20	Persentase indikator SPM pelayanan Farmasi yang mencapai target	100%	60%	60%
21	Persentase indikator SPM pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi yang mencapai target	100%	100%	100%
22	Persentase indikator SPM pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah yang mencapai target	100%	66,67%	66,67%
23	Persentase indikator SPM pelayanan Pemulasaran Jenazah yang mencapai target	100%	100%	100%
24	Persentase indikator SPM pelayanan Gizi yang mencapai target	100%	66,67%	66,67%
25	Persentase indikator SPM pelayanan Transfusi Darah yang mencapai target	100%	100%	100%
26	Persentase indikator SPM pelayanan Laundry yang mencapai target	100%	50%	50%
27	Evaluasi SAK (Standar Asuhan Keperawatan) Rawat Jalan dan Khusus	4 kali	4 kali	100%
28	Evaluasi SAK (Standar Asuhan Keperawatan) Rawat Inap	4 kali	4 kali	100%
29	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang mencapai target	100%	100%	100%
30	Persentase dokumen perencanaan yang telah disusun	100%	100%	100%
31	Jumlah perusahaan yang diprospek untuk bekerjasama dibidang pelayanan kesehatan	15 perusahaan	34 perusahaan	226,67%
32	Jumlah perusahaan yang diprospek untuk bekerjasama dibidang non pelayanan kesehatan	20 perusahaan	34 perusahaan	170%
33	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Administrasi SDM yang mencapai target	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
34	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Pengembangan SDM yang mencapai target	100%	0%	0%
35	Persentase pegawai mendapat minimal 1 pelatihan dalam setahun	55%	35,10%	63,82%
36	Persentase parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang diukur	100%	100%	100%
37	Persentase penelitian yang berhasil diselesaikan	100%	100%	100%
38	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,26%	90,87%	111,83%
39	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
40	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi yang mencapai target	100%	100%	100%
41	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Pendapatan yang mencapai target	100%	100%	100%
42	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Anggaran dan Belanja yang mencapai target	100%	100%	100%
43	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang mencapai target	100%	100%	100%
44	Persentase indikator SPM pelayanan Pengelolaan Limbah yang mencapai target	100%	100%	100%
45	Persentase indikator SPM pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit yang mencapai target	100%	100%	100%
46	Persentase indikator SPM pelayanan Pemeliharaan Elektromedik Rumah Sakit yang mencapai target	100%	100%	100%
47	Persentase indikator SPM pelayanan Pemeliharaan Elektromedik Rumah Sakit yang mencapai target	100%	100%	100%
48	Penyusunan laporan number of complain	100%	100%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.844.158.805.557,-	Rp.745.361.579.900,-	88,30

d. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan urusan kesehatan, sebagai berikut :

No.	Perda / Perbup	Tentang
1	Perbup Nomor 038 Tahun 2021	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
2	Perbup Nomor 079 Tahun 2021	Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan
3	Perbup Nomor 082 Tahun 2021	Pencabutan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Yang Sehat, Disiplin, Dan Produktif Di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Sidoarjo
4	Perbup Nomor 089 Tahun 2021	Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi
5	Perbup Nomor 090 Tahun 2021	Peran Desa Dalam Upaya Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi
6	Perbup Nomor 17 Tahun 2021	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
7	Perbup Nomor 95 Tahun 2021	Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

8	Perbup Nomor 19 Tahun 2021	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo

e. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan kesehatan, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Membuat kajian untuk pembangunan Rumah Sakit Tipe D dan membangun minimal 4 (empat) Puskesmas baru setiap tahunnya dan pembangunan Puskesmas baru agar menggunakan asset Pemerintah Daerah.	Kajian RS tipe D sudah ada yaitu di Sedati dan Sukodono dengan memakai aset pemerintah Kami sudah menyusun grand design analisa kebutuhan puskesmas dari tahun ke tahun, termasuk di tahun 2020 (terlampir). Namun untuk urutan pembangunannya sesuai aset yang suidah siap.
2	Bahwa untuk tahun 2020 pembangunan infrastruktur di RSUD menggunakan dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan untuk tahun 2021 tidak ada dana APBD di RSUD	1. Pembangunan Ruang Isolasi (APBD) 2. Kekurangan Pembayaran Tahun 2019 Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Parkir (APBD) 3. Perbaikan Lantai Keramik Selasar RSUD (APBD PAK)
3	Membuat / memperbaiki drainase/saluran air, membuat sumur resapan di lingkungan RSUD Sidoarjo serta penambahan pompa air untuk mengurangi genangan/banjir saat hujan	1. Pembuatan Saluran Drainase 2. Pembuatan Sumur Resapan 3. Pembuatan Pompa Celup Drainase

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai baik jalan, jembatan, sarana dan prasarana irigasi, pengendalian banjir, dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang.

Pada Tahun 2021 capaian kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, adalah sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentse jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	90%	91,93%	102,14%
2	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	86%	77,60%	90,23%
3	Persentase luasan genangan / banjir tertangani	67%	74,01%	110,47%
4	Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	67	71,13	106%

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Panjang jalan yang dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang., dimana capaian tahun 2021 adalah 91,93% dari target 90% sehingga tercapai 102,14%. Sampai dengan tahun 2021, panjang ruas jalan Kabupaten Sidoarjo adalah 1.016,620 km dengan kondisi jalan sebagai berikut :

Kondisi Baik	Kondisi Sedang	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat
819,460 km	115,119 km	63,454 km	18,587 km
80,606%	11,324%	6,242%	1,828%

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 91,11% maka terdapat peningkatan 4,174%, sebagaimana Nampak pada grafik berikut :

Grafik III.B.21

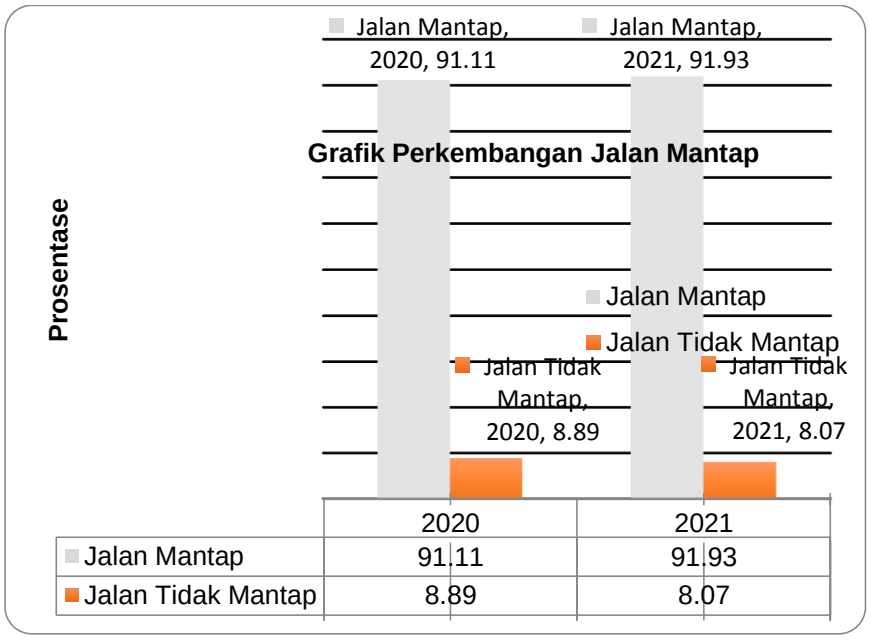

Sumber Data : Dinas PUBMSDA Kab. Sidoarjo

Kondisi jalan dimaksud, apabila dijabarkan kondisi setiap Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan			
		Mantap		Tidak Mantap	
		KM		KM	
1	Jabon	62.660		11.491	
2	Tanggulangin	62.282		9.141	
3	Sidoarjo	59.247		3.173	
4	Candi	65.244		3.651	
5	Buduran	51.534		3.986	
6	Gedangan	45.607		4.326	
7	Porong	45.327		3.041	
8	Tulangan	71.571		4.886	
9	Krembung	46.354	91.93%	6.641	8.07%
10	Prambon	55.350		3.041	
11	Tarik	52.500		3.116	
12	Balongbendo	45.724		2.366	
13	Krian	72.899		6.466	
14	Taman	31.527		5.066	
15	Wonoayu	49.125		2.741	
16	Sukodono	49.445		3.776	
17	Waru	35.655		2.666	
18	Sedati	32.480		2.516	

Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Sampai dengan tahun 2021 baku sawah yang tercukupi kebutuhan air irigasi yaitu 3025 hektar dari kebutuhan yang seharusnya 3898 hektar sehingga capaian persentase kecukupan kebutuhan air irigasi tahun 2021 adalah 77,60% dari target 86% atau tercapai 90,23%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 76,06% maka terdapat peningkatan sekitar 1,54%. Peningkatan tersebut dapat optimal, dikarenakan antara lain :

a) Pemberian air secara giliran pada saluran irigasi primer dan sekunder untuk mengatasi kekurangan air
b) Menambah debit suplisi dari afvoer ke saluran pembawa dengan pompa

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan air irigasi dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.22

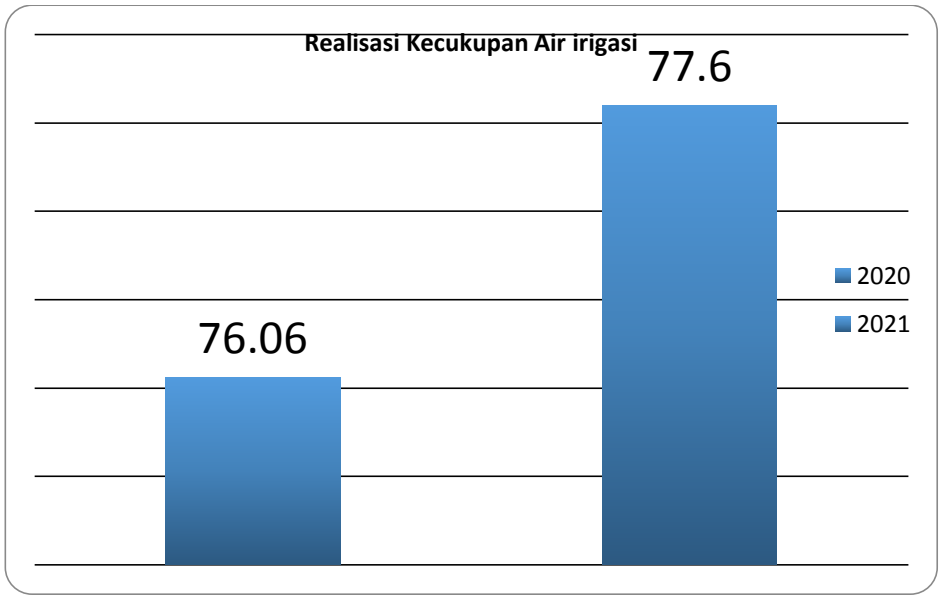

Sumber Data : Dinas PUBMSDA Kab. Sidoarjo

Di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan PermenPUPR No. 14/PRT/M/2015, pembagian Kewenangan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha masuk dalam Kewenangan Pusat yakni seluas 17.766 Ha. Sedangkan Kewenangan Kabupaten (luasnya kurang dari 1000 ha) seluas 4.118 (Kondisi Tahun 2015). Namun pada tahun 2021 dikarenakan adanya alih fungsi lahan terjadi penurunan yakni Kewenangan Pusat seluas 17.050 Ha dan Kewenangan Kabupaten Sidoarjo seluas 3.898 Ha.

Luas daerah kewenangan kabupaten sampai dengan tahun 2021 adalah sepanjang 3.898 hektar sebagai berikut :

No.	Nama Saluran	Luas Irigasi (Ha)	Luas Daerah Kewenangan Kabupaten (Ha)
1	D.I. Kedunguling Kiri	280	295
2	D.I. Kedunguling Kanan	523	654
3	D.I. Bader	300	375
4	D.I. Bulubendo	44	59
5	D.I. Buntung	12	62
6	D.I. Kalidawir	352	440
7	D.I. Gedek	140	140
8	D.I. Kedungpandan	186	233

9	D.I. Wilayut II	165	207
10	D.I. Kali Pucang	165	207
11	D.I. Bahgepuk	278	341
12	D.I. Kragan	24	30
13	D.I. Jomblong	24	42
14	D.I. Karangbong I	65	86
15	D.I. Karangbong II	99	124
16	D.I. Wilayut I	29	29
17	D.I. Jatianom	278	417
18	D.I. Kedungan	61	157
	Jumlah	**3025**	**3898**

Sedangkan untuk tahun 2022, Upaya yang akan dilakukan terkait pemenuhan air irigasi adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan kualitas SDM operasi pemeliharaan jaringan irigasi melalui Bimtek Juru dan PPA (Penjaga Pintu Air)
b) Mengatur pola tanam sesuai dengan RTTG (padi, padi, palawija)

Persentase luasan genangan / banjir tertangani

Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah delta memiliki resiko yang tinggi terkena genangan / banjir. Luas rawan genangan di Kabupaten Sidoarjo adalah 558 Ha. Dari Luasan tersebut dalam tahun 2021 telah tertangani seluas 413 Ha atau 74,01%. Capaian tersebut bila dibandingkan dengan targetnya 67% telah tercapai 110,47%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 92,12% maka terdapat penurunan 18,11%.

Grafik III.B.23

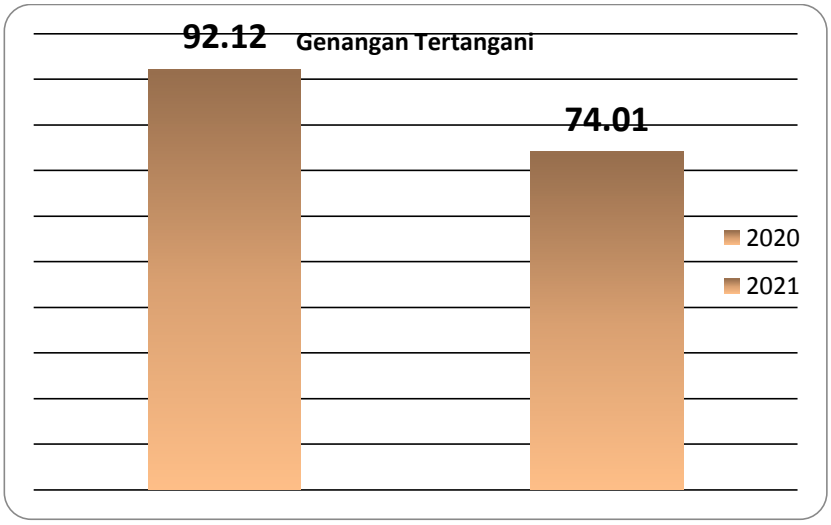

Sumber Data : Dinas PUBMSDA Kab. Sidoarjo

Penurunan tersebut disebabkan oleh:

- Curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari membuat tanah jenuh air, sehingga menimbulkan genangan
- Pasang tinggi air laut menyebabkan aliran ke hilir menjadi lambat
- Kapasitas saluran/afvour tidak seimbang dengan volume debit tambahan dari air hujan

Kawasan permukiman yang rawan banjir di Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

No	Uraian	Luas Kawasan Terlindungi Infrastruktur (Ha)	Luas Kawasan Rawan Banjir (Ha)
1	Bringinbendo	75	75
2	Pucanganom	26	30
3	Tambak Sawah	35	70
4	Kedungbanteng	17	17
5	Lemahputro	32	32
6	Rangkahkidul	20	40
7	Sidokare	38	38
8	Tambakrejo	49	98
9	Banjarasri	30	30
10	Banjarpanji	10	10
11	Porong	25	30
12	Pesawahan	14	28
13	Candipari	9	18
14	Wunut	5	10
15	Bluru Kidul	14	14
16	Kalitengah	3	7
17	Balongdowo	4	4
18	Kemiri	7	7
	Jumlah	**413**	**558**

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Rumah Pompa Jalan Raya Jati (Depan Lippo Plaza) Kec. Sidoarjo dengan kapasitas rencana 200 lt/dt
- Pembangunan Embung/ Kolam Resapan di Sidoarjo
- Rencana revitalisasi sungai dan pembangunan dam muara, serta kolam resisten di muara Afvoer Buntung dan Kepetingan.
- Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa Saluran Gedangrowo Ds. Banjarpanji Kec. Tanggulangin dengan kapasitas rencana total 1800 lt/dt
- Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa di DAM Afv. Kedungpeluk Ds. Kedungbanteng Kec. Tanggulangin dengan kapasitas rencana 1400 lt/dt

Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang

Sampai dengan tahun 2021 terdapat 355,59 Ha pembangunan yang telah sesuai dengan rencana tata ruang atau sekitar 71,13% dari target 67% sehingga tercapai 106%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 30% dengan luas 60 Ha maka terdapat peningkatan angka sekitar 76%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Review RTBL pada 3 Koridor yang dilaksanakan pada Tahun 2021 mempunyai rata-rata luasan yng cukup besar, yaitu:

1. RTBL Kota Baru Puzzle A dengan luasan 179,3 Ha
2. RTBL Kawasan Mix Use Lingkar Timur dengan luasan 96,41 Ha
3. RTBL Kawasan Kota Lama dengan luasan 79,88 Ha

Adapun tren capaian persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan pembangunan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Uraian	2018	2019	2020	2021
Target	60 Ha	120 Ha	200 Ha	300 Ha
Realisasi	**95 Ha**	**200 Ha**	**60 Ha**	**355,59 Ha**

Grafik III.B.24

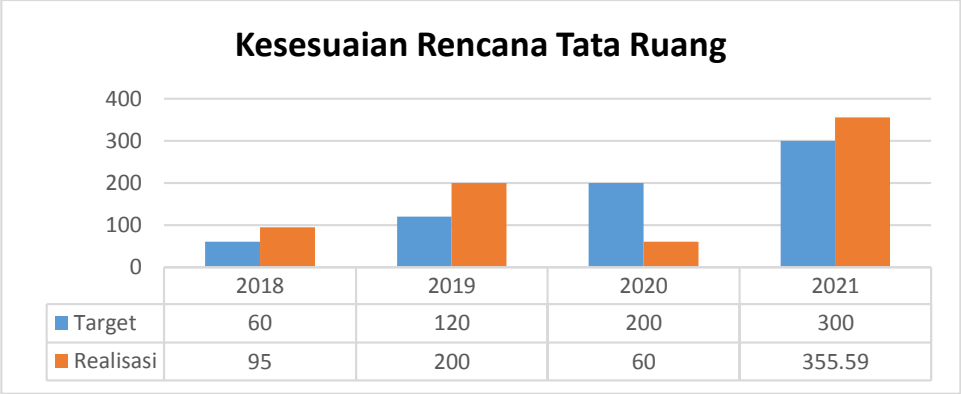

Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Pada tahun 2021 dilakukan pembangunan gedung baik untuk instansi pemerintah maupun umum, diantaranya :

1. Pembangunan Pagar Makam, Dusun Ngingas Desa Balongtani Kab.Sidoarjo Kec.Jabon
2. Rehab Gedung LVRI Lanjutan
3. Pembangunan Saranan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Permukiman, Rehab Makam Mbah Sentono Kelurahan Urangagung, Kab.Sidoarjo Kec.Sidoarjo

4. Pembangunan Saranan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Permukiman, Pembuatan Gapura dan Pagar Depan Lapangan Desa Banjarsari, Kab.Sidoarjo Kec.Buduran
5. Pemel Gedung Kantor P2CKTR Pemeliharaan Gedung Kantor P2CKTR
6. Pemeliharaan/Pembangunan Paving halaman perkantoran, Halaman Perpustakaan, Kab. Sidoarjo, Kec. Krian
7. Pematangan Lahan Liponsos
8. Pembangunan Gedung Kantor Instansi Vertikal
9. Pembangunan Pagar Gudang Candi
10. Pembangunan Gedung Instansi Vertikal (Rumah Dinas Kasie)
11. Pembangunan Gedung Eks. Asrama Putri
12. Pembangunan RSUD Krian
13. Pembangunan PKM Balongbendo Lanjutan
14. Pembangunan Sarana Prasarana Masjid Agung
15. Pemb RKB, TK Dharma Wanita Kelurahan Taman, Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar pembangunan selalu sesuai dengan rencana tata ruang adalah melalui pemberian informasi peruntukan lahan dan penataan bangunan pada saat terdapat permohonan pengajuan Ijin Lokasi atau Ijin Mendirikan Bangunan melalui Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)

Pembangunan gedung RSUD Sidoarjo Barat

Pada tahun 2021 telah dilakukan pembangunan gedung RSUD Sidoarjo Barat yang terselesaikan pada akhir tahun anggaran 2021 baik eksterior, interior, mauun fungsi fisik secara umum. Lokasi pembangunan gedung RSUD Sidoarjo Barat adalah di Desa Tambak Kemerakan Kecamatan Krian yang menghabiskan anggaran senilai Rp.124.052.141.000,-

Sejalan dengan pembangunan fisik gedung, faktor-faktor penunjang lainnya seperti SDM, perizinan, dan lain-lain segera dipenuhi di tahun 2022 sehingga target beroperasi pada bulan Mei 2022 dapat terpenuhi.

RSUD Sidoarjo Barat merupakan pemerataan fasilitasi kesehatan bagi seluruh warga Sidoarjo khususnya Sidoarjo wilayah barat yang meliputi Kecamatan Krian, Balongbendo, Tarik, Wonoayu, dan Prambon.

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan**
  - **Pembangunan jalan dan jembatan frontage road.**

    Pada tahun 2021 dilanjutkan pengerjaan frontage road dengan realisasi pembangunan sepanjang 1.290 meter, sehingga total sampai dengan tahun 2021 telah terbangun 3.977 meter dari total yang harus dibangun sepanjang 9.450 meter atau 42,08%.

    Pengerjaaan frontage road mulai Bundaran Aloha sampai batas pemukiman warga Desa Gedangan (Segmen-1) telah dituntaskan, sedangkan untuk Segmen-2 dan Segmen-3 dilanjutkan pengerjaannya di tahun 2022.

    Jembatan penghubung pada Segmen-2 telah diselesaikan.
  - **Pembebasan lahan frontage road**

    Sampai dengan tahun 2021 telah dibebaskan lahan untuk pembangunan frotage road seluas 44.443 meter persegi dari 73.930 meter persegi atau sekitar 60,11% yang harus dibebaskan.

    Untuk sisa pembebasan 11 bidang lahan, yang terdiri dari 9 lahan milik warga Desa Gedangan dan 2 musholla akan diupayakan maksimall terselesaikan di tahun 2022, sehingga pembangunan frontage road dapat dilanjutkan kembali.

    Segmen-2 (awal batas pemukiman warga Desa Gedangan sampai arah timur rel perempatan Gedangan) dan Segmen-3 (mmebujur perempatan Gedangan sampai batas fly over Kecamatan Buduran) dilakukan optimalisasi pelaksanaannya di tahun 2022.

    Kendala dalam pembangunan frontage road Waru – Buduran, antara lain ;

    1. Hasil penilaian / appraisal yang dilakukan pejabat/ instansi berwenang sebagian sebagai ukuran norma nilai yang legal dibagikan terkadang masih ada sebagian kecil masyarakat yang merasa belum puas.
    2. Terkendala kelengkapan administrasi waris
    3. Penggantian lahan musholla yang harus dicarikan pengganti terlebih dahulu di wilayah yang sama.

- **Peningkatan jalan dengan konstruksi beton**

  Untuk peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 telah dilakukan betonisasi jalan sebanyak 26 ruas jalan, sebagai berikut :

No	Nama Lokasi Pekerjaan	Volume	
		Panjang (m)	Lebar (m)
1	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarasri S/D Sentul – SENTUL	765,5	5
2	Peningkatan Jalan RT.4 Dan 8 Desa Tambak Oso	181,6	4
3	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarasri Dari KUD Mina Dwisamudra Ke Timur - BANJAR ASRI	250	5
4	Peningkatan Jalan Desa Tambak Sumur	259,7	7
5	Peningkatan Jalan Ngaban - Kedung Banteng (Ljt)	602,5	5
6	Peningkatan Jalan Sepanjang Jalan Mangga S/D Jl Gadung Desa Wage	116,9	4
7	Peningkatan Jalan Ganting - Wage (Desa Bohar) (Ljt)	925	4
8	Peningkatan Jalan Betro - Damarsi (Desa Kwangsan) Ruas No 047	968	5
9	Peningkatan Jalan Betro - Kalanganyar (Ljt) (DAK)	980	6
10	Peningkatan Jalan Kebon Agung - Kemasan(ljt)	1721	6
11	Peningkatan Jalan Wonoplintahan-jedongcangkring	2026,3	6
12	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Frontage Road Waru Buduran	1580	3,9-15
13	Peningkatan Jalan Taruna Desa Wage	515	5.50
14	Peningkatan Jalan Jeruk S/D Jl. Mangga Desa Wage	352	4
15	Peningkatan Jalan Dsn Suko Legok RT 15 RW 05 Desa Suko	225	5
16	Peningkatan Jalan Kebon Agung - Sukodono (Ljt) Pajak Rokok	676	7
17	Peningkatan Jalan Gedangan - Betro (Ljt)	518	9
18	Peningkatan Jalan Mandala RW.04 Dan RW.05 Desa Semambung	564	4
19	Pembangunan Jalan RW.5 - 6 Desa Semambung Kec. Gedangan - SEMAMBUNG	146,2	4
20	Peningkatan Jalan Tenggulunan - Sugihwaras (085) - TENGGULUNGAN	437,5	4
21	Peningkatan Jalan Pilang - Sawo Cangkring (Pajak Rokok)	750	5
22	Peningkatan Jalan Krembung - Kepadangan (Ljt)	445	7
23	Peningkatan Jalan Ds. Tebel S/D Ds. Kragan - TEBEL	456	4
24	Peningkatan Jalan A. Yani Depan Balai Desa Medaeng	200	3
25	Peningkatan Jalan Aryo Bebangah (Desa Bangah RW 01, 03, 04)	262	5,5
26	Peningkatan Jalan Wadungasri – Tambaksumur	209	5
	JUMLAH	**16132,20**	

- **Penyusunan Dokumen RTBL**

  Telah dilakukan review terhadap 3 dokumen RTBL (Rencana Tata Bangun Lingkungan), antara lain :

  1. RTBL Kota Baru Puzzle A dengan luasan 179,3 Ha
  2. RTBL Kawasan Mix Use Lingkar Timur dengan luasan 96,41 Ha
  3. RTBL Kawasan Kota Lama dengan luasan 79,88 Ha

- **Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah**
  - **Pembangunan rumah pompa dan instalasinya**

    Manfaat pembangunan rumah pompa utk mengendalikan banjir saat debit di saluran meningkat akibat curah hujan tinggi dan pasang air laut

    Akan dilakukan pembangunan rumah pompa instalasi pompa pada 2 lokasi, sebagai berikut :

    1. Pembangunan rumah pompa saluran Gedungrowo
    2. Pembangunan rumah pompa dan instalasi pompa di DAM Afvour Kedungpeluk Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin
  - **Pembangunan / peningkatan DAM / bendung / busem peningkatan pintu air**

    Telah dilakukan pembangunan / peningkatan pada 2 lokasi, sebagai berikut:

    1. Pembangunan / peningkatan DAM / bendung / busem Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin
    2. Pembangunan / peningkatan Pintu Air dan rumah pompa Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin
  - **Rehabilitasi saluran drainase utama**

    Dilakukan rehabilitasi saluran drainase utama sepanjang 2.000 meter yaitu pada Afvoer kali Pucang.
  - **Program Sidoresik "Sidoarjo Revitalisasi Fungsi Kali"**

    Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan Sumber Daya Air (PU-BMSDA) Sidoarjo membuat terobosan dalam upaya revitalisasi fungsi sungai. Dinas PU-BMSDA ini melalui Sosialisasi Satgas Peduli Sungai meluncurkan Program "Sidoarjo Revitalisasi Fungsi Kali" (Sido Resik) yang secara substansi dalam bentuk:

a. Semua kalangan diajak terlibat menjaga dan memperbaiki kondisi sungai yang artinya, Sidoresik jadi gerakan sosial untuk menggalang kolaborasi banyak pihak agar menjaga dan meningkatkan kebersihan sungai
b. Program Sidoresik adalah program menjaga kebersihan sungai usai dilakukan normalisasi. Melalui program tersebut diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan sungainya.

c. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Penyelenggaraan Jalan** dengan anggaran sebesar Rp.279.300.101.488,- dan terealisasi sebesar Rp.223.294.168.394,- atau 80%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	914	934,53	102,14

   Program tersebut didukung oleh 9 sub kegiatan yaitu :

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyusunan Rencana. Kebijakan. dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan teknis	39	39	100%
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	luas lahan yang dibebaskan untuk jalan kabupaten	6.000	4.772	79%
Pembangunan Jalan	Jumlah panjang jalan kabupaten yang dibangun	1.630	2.555	156%
	Jumlah panjang Penahan jalan kabupaten yang dibangun	6.750	9.129	135%
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan menuju standar	9.500	10.963	115%
Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan kabupaten yang ditingkatkan	9.168	8.482	92%
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	127.779	127.779	100%

Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten yang Dibangun	2	2	100%
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi / dipelihara	11	11	100%
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Perijinan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan yangdikeluarkan	0	0	0%
	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Jalan	30	30	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.665.764.490,00	2.953.811.921,00	80,58
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	61.684.786.656,00	34.098.929.017,00	55,28
Pembangunan Jalan	67.934.772.990,00	61.217.700.855,00	90,11
Pelebaran Jalan Menuju Standar	52.992.927.291,00	41.847.566.150,00	78,97
Rekonstruksi Jalan	54.681.702.399,00	47.598.474.654,00	87,05
Pemeliharaan Rutin Jalan	24.770.214.954,00	23.396.495.643,00	94,45
Pembangunan Jembatan	11.857.115.708,00	10.565.184.846,00	89,10
Rehabilitasi Jembatan	652.817.000,00	577.251.834,00	88,42
Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.060.000.000,00	1.038.753.474,00	98,00

2. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** dengan anggaran sebesar Rp.62.519.908.058,- dan terealisasi sebesar Rp.55.218.501.025,- atau 88%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	87%	87%	100%

Program tersebut didukung oleh 17 Sub kegiatan yaitu :

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	%
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung yang dibangun	3	3	100%
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang saluran pematusan yang direhabilitasi	8,400	8,400	100%
Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang saluran pematusan yang ditingkatkan	33,000	33,000	100%
Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rumah Pompa yang ditingkatkan	7	7	100%

Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang pematusan yang dinormalisasi	24,500	24,500	100%
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang saluran yang dipelihara	400	400	100%
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	pompa yang dioperasikan dan dipelihara	29	5	17%
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Stasiun Penakar yang dikelola	30	30	100%
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah GHIPPA yang dibina	1	1	100%
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomtek yang diterbitkan	30	30	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Sidang Komir yang dilaksanakan	1	-	0%
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah perencanaan teknis irigasi yang disusun sesuai ketentuan teknis	75	108	144%
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi yang ditingkatkan	8.900	8.698	97%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	9.800	7.736	78%
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung yang direhabilitasi	80	73	91%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran yang beroperasi dan dipelihara	20	20	100%
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Bendung yang beroperasi dan dipelihara	4	4	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.797.569.383,00	1.684.184.764,00	93,69
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.425.000.000,00	3.345.073.100,00	97,67
Peningkatan Tanggul Sungai	16.508.082.664,00	15.699.077.350,00	95,10
Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	1.720.000.000,00	1.604.769.700,00	93,30
Normalisasi/Restorasi Sungai	5.982.821.593,00	5.801.543.300,00	96,97
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	12.360.511.887,00	9.844.649.474,00	79,65
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	2.630.882.000,00	1.756.514.763,00	66,77
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	83.858.894,00	49.652.000,00	59,21

Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	487.932.903,00	263.048.000,00	53,91
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	50.575.700,00	67,43
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.800.000,00	97,60
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.349.714.979,00	1.864.021.347,00	79,33
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.305.439.780,00	1.275.815.200,00	97,73
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.464.634.000,00	4.313.463.850,00	78,93
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	7.926.388.782,00	7.393.150.177,00	93,27
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	108.227.000,00	0,00	0,00
Operasional Unit Pengelola Irigasi	243.844.193,00	224.162.300,00	91,93

3. **Program Penataan Bangunan Gedung** dengan anggaran sebesar Rp.153.799.989.045,96 dan terealisasi sebesar Rp.152.164.775.537,00 atau 98%

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase bangunan pemerintah berkondisi baik	43	43	100

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan pemerintah berkondisi baik	43	43	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp 153.799.989.045,96	Rp 152.164.775.537,00	98

4. **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** dengan anggaran sebesar Rp.2.184.193.885,50 dan terealisasi sebesar Rp.887.883.858,00 atau 40%

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase bangunan yang ber-IMB	66	75,98	115

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan yang sesuai dengan IMB yang diterbitkan	450 Bangunan	790 Bangunan	175,5

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.184.193.885,50	Rp 887.883.858,00	40

5. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi** dengan anggaran sebesar Rp.561.020.061,27 dan terealisasi sebesar Rp.326.089.600,00 atau 58% Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Prosentase terlaksananya sertifikasi pekerja konstruksi terampil	40	40	100

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pekerja terampil yang tersertifikasi	100 Orang	112 Sertifikat	112
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah pembinaan terhadap pengusaha jasa konstruksi	100 Sertifikat	158 Orang	158

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 445.410.353,77	Rp 313.490.600,00	70
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Rp 115.609.707,50	Rp 12.599.000,00	10

6. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan anggaran sebesar Rp.404.253.260,00 dan terealisasi sebesar Rp.391.703.500,00 atau 96% Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	67	71,13	106,2

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana teknis tata ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana teknis tata ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 317.385.260,00	Rp 307.921.000,00	97
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 86.868.000,00	Rp 83.782.500,00	96

e. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan urusan pekerjaaan umum dan penataan ruang, sebagai berikut :

No.	Perda / Perbup	Tentang
1	Perbup Nomor 018 Tahun 2021	Pedoman Penerbitan Riil Tapak
2	Perbup Nomor 094 Tahun 2021	Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung

f. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Membuat aplikasi yang mewadahi pengaduan masyarakat tentang kondisi jalan dan menambah Tim Satgas Jalan sehingga segera dapat ditangani.	Untuk aplikasi sudah di akomodir lewat e-lapor sebagai media menyampaikan pengaduan. Kedepan akan ada dari diskominfo membuat pusat pengaduan dari masyarakat untuk semua OPD melalui call center 112 selama 24 jam
2	Peningkatan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala dengan didukung pendanaan yang cukup, penyusunan road map kemantapan jalan Kabupaten yang jelas dan terukur.	Untuk Road Map Pemantapan Jalan Kabupaten kita mengacu pada skala prioritas

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase pelayanan air minum aman	35,83	37,76	105,4
2	Persentase akses sanitasi layak	96,76	97,29	100,5
3	Persentase rumah layak huni	100	100	100
4	Presentase luas tidak kumuh	99,65	99,67	100,02

Persentase Pelayanan Air Minum Aman

Sampai dengan tahun 2021 jumlah masyarakat yang terlayani sarana air bersih perpipaan yang dibangun oleh PDAM sebanyak 161.376 SR dan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebanyak 8.805 SR. Secara keseluruhan masyarakat yang terlayani air bersih sebanyak 170.181 SR dari target 673.078 SR sehingga tercapai 25,28%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 159.391 SR maka terdapat peningkatan angka 10.790 SR atau sekitar 1,6% dari target.

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan air bersih dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target SR	**200**	**760**	**430**	**676**	**907**
PEMDA	3.001	4.624	6.671	7.898	8.805
PDAM	134.897	137.094	138.128	151.493	161376
SR pengguna air bersih (TOTAL)	137.898	141.718	144.799	159.391	170.181

Grafik III.B.25

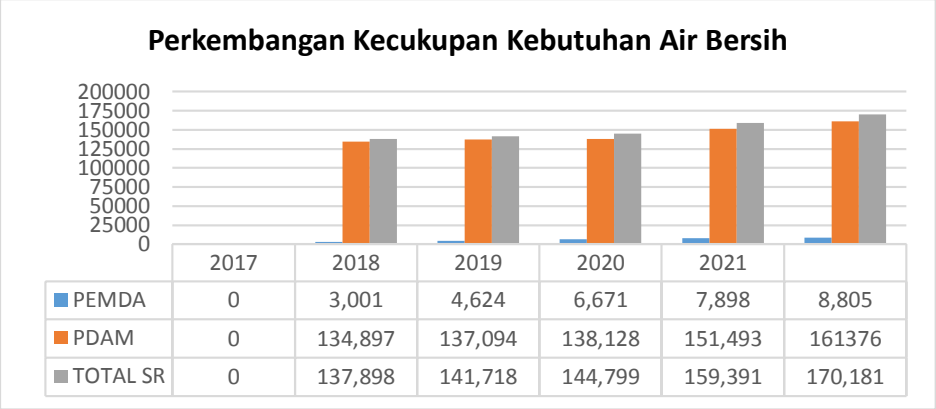

Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan akses air bersih yaitu pelaksanaan kegiatan Pembangunan pipa distribusi dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pamsimas pada daerah-daerah yang menjadi target pada tahun berkenaan.

Persentase akses sanitasi layak

Sampai dengan tahun 2021 rumah tangga bersanitasi sehat di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 437.694 KK atau sekitar 97,29% dari jumlah penduduk, dimana apabila dibandingkan dengan target 96,76% tercapai 100,5% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 429.661 KK atau 95,5% dari jumlah penduduk maka terdapat peningkatan angka 8.033 atau sekitar 1.8%

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan air bersih dapat diilustrasikan sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target RT		**3.305**	**3.450**	**3.374**	**8.033**
RT bersanitasi sehat	415.057	417.665	421.070	429.661	437.694

Grafik III.B.26

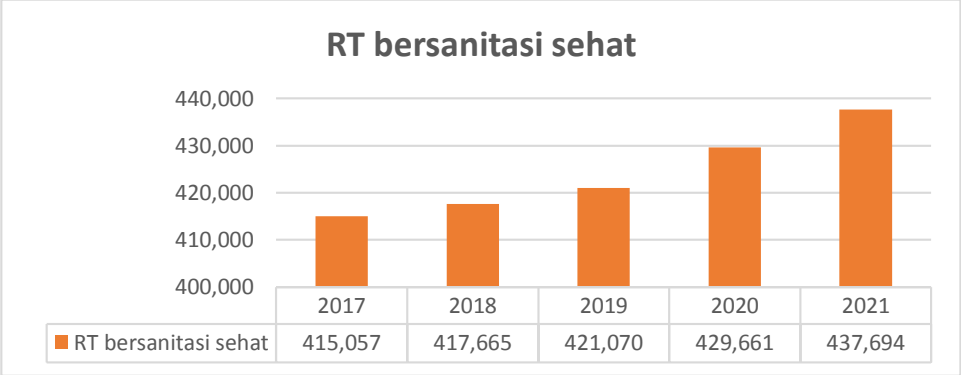

Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan akses sanitasi layak, antara lain :

- Pembangunan jamban sehat di wilayah tidak padat penduduk
- Pembangunan IPAL Komunal di wilayah padat penduduk

Persentase rumah layak huni

Sampai dengan tahun 2021 rumah tangga yang memiliki rumah layak huni di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 442.880 unit rumah atau sekitar 99,89% dari jumlah keseluruhan rumah, dimana apabila dibandingkan dengan target 100% tercapai 99,89% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 442.857 unit rumah atau 99,89% dari seluruh rumah maka tidak terdapat perubahan presentase yang, hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan terkait Pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Adapun tren capaian persentase rumah layak huni dapat diilustrasikan sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target Perbaikan (RTLH)				**100**	**100**	**30**	**23**
Realisasi perbaikan RTLH (unit)	159	229	280	395	106	104	23

Grafik III.B.27

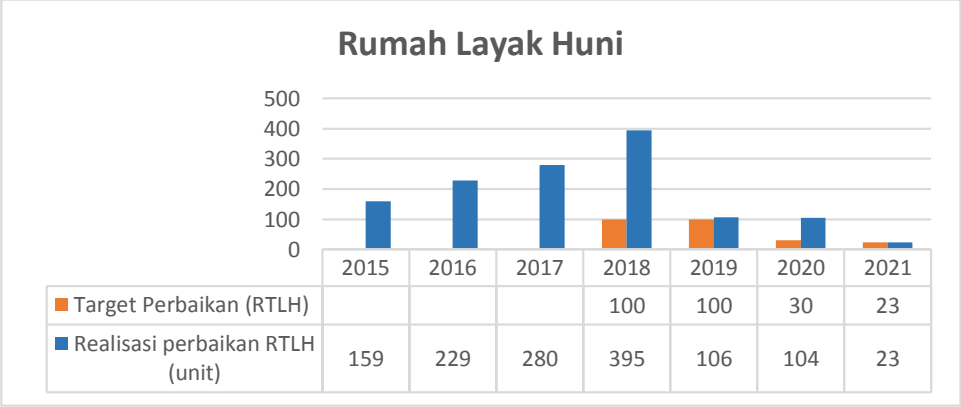

Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Luas Kawasan Kumuh

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui SK Bupati No.188/452/404.1.3.2/2015 tanggal 27 April 2015 tentang kawasan permukiman kumuh Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa Luasan kawasan kumuh adalah 301,08 Ha dari luas keseluruhan Kabupaten Sidoarjo 71.424 Ha.

Dengan luasan Kabupaten Sidoarjo sebesar 71.424 Ha, sampai akhir Tahun 2021 penyelesaian kawasan kumuh telah tercapai. Namun terdapat SK Kumuh Bupati

Tahun 2021 sesuai arahan PERMEN PUPR Nomor 14 Tahun 2018 seluas 276,62 Ha. Jika berdasar pada SK terbaru telah terselesaikan 43,40 Ha kumulatif sampai Tahun 2021. Sisa luasan kumuh pada tahun 2021 sebsesar 233,22 Ha atau 99,67% dari luas seluruh Kabupaten Sidoarjo.

Basis Luasan SK Kumuh Bupati/Walikota :

Luasan Kumuh Awal	Capaian Absolut Tahun 2020	Capaian Absolut Tahun 2021	Kumulatif S/d Tahun 2021	Sisa Luasan Kumuh 2021
(a)	(b)	(c)	(d) = (b) + (c)	(e) = (a) – (d)
276.62 Ha	3.50 Ha	39.90 Ha	43.40 Ha	233.22 Ha

Adapun tren capaian penanganan kawasan kumuh dapat diilustrasikan sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target						
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	301,08	300,03	298,98	249,85	31,22	20,99

Grafik III.B.28

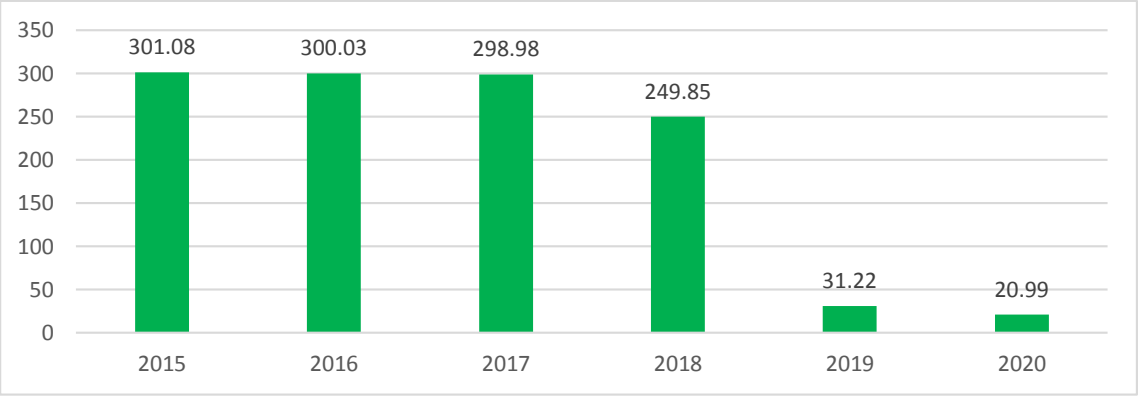

Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Untuk mendukung tercapainya Perbaikan RTLH tersebut di atas, selain perbaikan unit rumah didukung dengan indikator program yang memberikan konstribusi atas sasaran diatas yaitu :

- Masyarakat bersanitasi sehat
- Masyarakat pengguna air bersih

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah**

  Telah dilakukan penyusunan DED (Detail Engineering Desain) ppada 2 Kawasan, yaitu berupa pembangunan vertical drain sumur resapan / biopori, antara lain pada :

  1. Kawasan Sidokare
  2. Kawasan Tropodo

c. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengelolaan dan Pengembbangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran sebesar Rp.8.162.105.782,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.713.776.148,00 atau 82%

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase pelayanan air minum aman	35,83	37,76	105,4

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang air bersih	903 SR	907 SR	100,44

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.162.105.782,00	Rp 6.713.776.148,00	82

2. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** dengan anggaran sebesar Rp.22.513.720.524,26 dan terealisasi sebesar Rp.17.782.707.745,00 atau 78%

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	96	97,29	100,5

   Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yng terlayani sanitasi yang sehat	2700 unit	2389 unit	88

   Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.513.720.524,26	17.782.707.745,00	78

3. **Program Pengembangan Permukiman** dengan anggaran sebesar Rp.23.104.811.469,79 dan terealisasi sebesar Rp.16.878.263.415,00 atau 73%

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase jalan lingkungan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	82,2	82,2	100

   Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	85 Paket	81 Paket	95

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	23.104.811.469,79	16.878.263.415,00	73

4. **Program Pengembangan Perumahan** dengan anggaran sebesar Rp.4.351.709.229,19 dan terealisasi sebesar Rp.3.231.098.277,00 atau 74%

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase operasional Rusunawa yang dipelihara dan dilaksanakan	98	98	100

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah operasional Rusunawa yang dipelihara dan dilaksanakan	960 Hunian	960 Hunian	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4.351.709.229,19	3.231.098.277,00	74

5. **Program Kawasan Permukiman** dengan anggaran sebesar Rp.468.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.377.780.000,00 atau 80%

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	59	59	100

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang ditangani	23	23	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	468.000.000,00	377.780.000,00	80

d. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut :

No.	Perda / Perbup	Tentang
1	Perbup Nomor 005 Tahun 2021	Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2021
2	Perbup Nomor 030 Tahun 2021	Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2025

e. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menuntaskan permasalahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) atau tanah Fasum yang ada di Sidoarjo, karena masih ada Fasum perumahan yang belum diserahkan ke Pemda.	Telah dilakukan rapat koordinasi dengan beberapa pemgembang perumahan -Tahun 2021 pendataan PSU di Kecamatan Waru dan Sedati - Tahun 2020 pendataan PSU di Kecamatan Porong, Prambon, Wonoayu, Balongbendo - Pada Tahun 2022 telah dianggarkan pendataan PSU pada Kecamatan Buduran, Gedangan, dan Sidoarjo
2	Membuat inovasi untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi atau jamban sehat dan air bersih di Sidoarjo yang Non PDAM	- untuk sanitasi pemasangan jaringan dan SR IPAL Komunal - untuk Air bersih pendampingan dan pemasangan SR

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang aman, tertib, dan tentram melalui peningkatan perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah, pencegahan konflik, serta penurunan resiko bencana.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Rasa Aman	76,48	76,60	108 %
2	Rasio Jumlah anggota linmas terhadap RT	1 : 1,1	1 : 1,1	100 %
3	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
4	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100 %	100 %	100 %
5	Indeks Toleransi	77,64	80,18	103,27%
6	Indeks Resiko Bencana	104,72	99,21	105,65
7	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo) sesuai SPM	55%	42,29%	76,89

Indeks Rasa Aman

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Indeks rasa aman digunakan untuk mengukur tingkat keamananan dan kenyamanan suatu masyarakat dilihat dari aspek kesejahteraan sosial, aspek ekonomi, dan aspek peristiwa politik.

Indeks rasa aman Tahun 2021 tercapai 76,60 dari target 76,48 sehingga tercapai 108 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 76,03 maka terdapat peningkatan sebesar 1 % .Dengan realisasi Indeks Rasa Aman sebesar 76,60 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Aman Tinggi. Kategori indeks rasa aman dapat diklasifikan sebagai berikut :

Nilai Indeks Rasa Aman (IRA)	Keterangan
0<=IRA<=20	Rasa Aman Sangat Rendah
20<IRA<=40	Rasa Aman Rendah
40<IRA<=60	Rasa Aman Sedang
60<IRA<=80	Rasa Aman Tinggi
80<IRA<=100	Rasa Aman Sangat Tinggi

Adapun capaian masing-masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut :

Dimensi	Capaian
Keamanan dari Bencana	
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	83,13
Perlindungan dan Pemanfaatan Kebhinekaan	86,59
Keamanan dan Kekerasan	57,61
Indeks Rasa Aman	76,60

Adapun tren capaian Indeks Rasa Aman dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.29

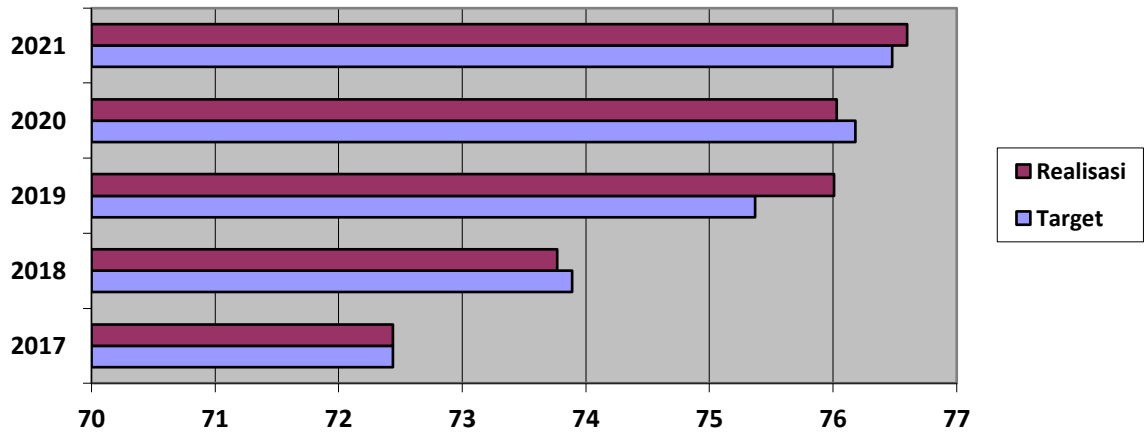

Sumber Data : Satpol PP Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Rasa Aman dapat tercapai optimal, yaitu : Faktor – Faktor yang mempengaruhi nilai capaian Indeks Rasa Aman berada diatas target yang telah ditentukan antara lain : Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Peristiwa Politik.

Rasio Jumlah anggota linmas terhadap RT

Kondisi ideal rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT sebagaimana Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

Rasio jumlah anggota linmas terhadap RT Tahun 2021 adalah 1 : 1,1 Hal ini menunjukkan dalam satu Rukun Tetangga terdapat satu atau lebih anggota Satlinmas. Pada tahun 2021 terdapat perekrutan anggota linmas sebanyak 8.512 personil.

Untuk keseluruhan data personil linmas sebagaimana table berikut :

REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA LINMAS YANG DIKUKUHKAN TH. 2021
SE - KABUPATEN SIDOARJO

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH			
			RW	RT	LINMAS	POS KAMLING
1	2	3	4	5	6	7
1	SIDOARJO	24	197	853	625	384
2	CANDI	24	159	700	684	450
3	BUDURAN	15	85	364	354	236
4	PORONG	15	64	324	345	145
5	JABON	15	87	253	303	91
6	KREMBUNG	19	135	295	412	247
8	TANGGULANGIN	19	82	358	401	189
9	TULANGAN	22	98	468	421	278
10	PRAMBON	20	74	351	277	168
10	WONOAYU	23	87	333	431	173
11	SUKODONO	19	142	549	466	280
12	KRIAN	22	112	501	501	149
13	TARIK	20	81	326	534	227
14	BALONGBENDO	20	88	350	306	188
15	TAMAN	24	169	788	659	271
16	WARU	17	150	792	594	341
17	SEDATI	16	118	400	349	135
18	GEDANGAN	15	102	491	389	177
	JUMLAH	349	2.030	8.496	8.512	4.129

Adapun upaya yang telah dilakukan agar dapat memenuhi rasio jumlah anggota linmas terhadap RT, yaitu :

- Optimalisasi fungsi pembinaan baik terhadap personil linmas dan masyarakat pada umumnya perihal fungsi linmas.
- Optimalisasi fungsi koordinator lapangan dalam pengaturan kegiatan sosialisasi dan mobilisasi linmas.

Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan

Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan di Tahun 2021 tercapai 100 % dari target 100% sehingga tercapai 100 %. Kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 1687 pelanggaran dan yang sudah tertangani melalui yustisi sebanyak 1687 pelanggaran.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 100 % maka terdapat persamaan capaian yakni pada angka 100 % atau sekitar 0 %. Hal tersebut menunjukkan semua pelanggaran dapat ditangani melalui sidang tipiring atau yustisi.

Adapun tren capaian Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.30

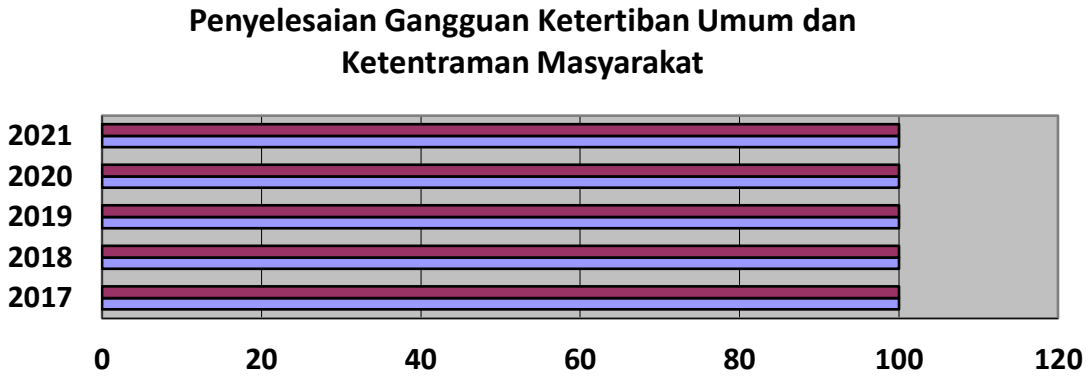

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	100	100	100	100	100
Target	100	100	100	100	100

Sumber Data : Satpol PP Kab. Sidoarjo

Rekapitulasi data pelanggaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagaimana tabel berikut :

REKAP DATA PELANGGAR PERDA 10 TAHUN 2013
TENTANG TIBUMTRANMAS 2021

No.	Tanggal Sidang	Jenis Pelanggaran			Total Pelanggar (Orang)	KET
		PKL	PMKS	Reklame Insidentil		
1.	Januari 2021	5	-	-	5	100%
2.	Pebruari 2021	7	-	-	7	100%
3.	Maret 2021	4	-	158	159	100%
4.	April 2021	5	-	34	39	100%
5.	Mei 2021	12	-	-	12	100%
6.	Juni 2021	15	-	272	287	100%
7.	Juli 2021	19	-	131	150	100%
8.	Agustus 2021	15	2	112	129	100%
9.	September 2021	11	1	152	164	100%
10.	Oktober 2021	17	29	225	271	100%
11.	November 2021	16	7	237	260	100%
12.	Desember 2021	13	4	184	205	100%
		TOTAL			**1.687**	100%

Upaya yang telah dilakukan agar gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat terselesaikan secara optimal, yaitu : Peningkatan intensitas dan optimalisasi penjagaan patrol dan penjagaan di titik – titik lokasi rawan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga tibumtranmas.

Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani

Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang tertangani di Tahun 2021 tercapai 100% dari target 100% sehingga tercapai 100 %. Kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 11.090 pelanggaran dan yang sudah tertangani melalui yustisi sebanyak 11.090 pelanggaran.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 100 % maka terdapat angka 10.808 atau sekitar 100 %. Penyelesaian pelanggaran perda ditangani secara tuntas secara yustisi melalui sidang tipiring.

Adapun tren capaian Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang tertangani dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.31

Penanganan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah

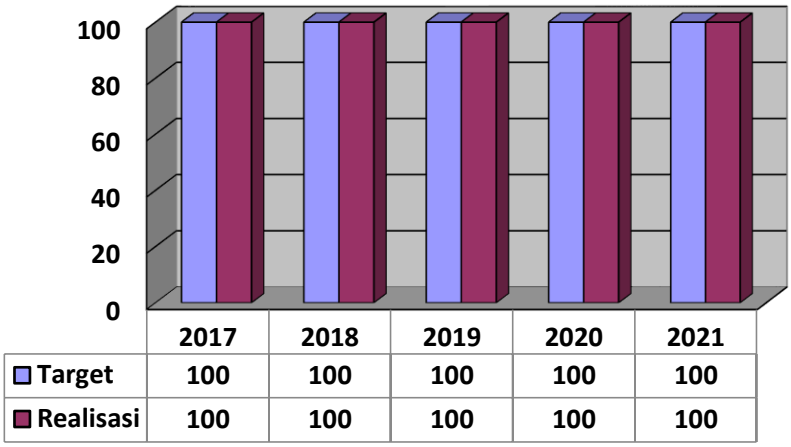

Sumber Data : Satpol PP Kab. Sidoarjo

Pada tahun 2021 pelanggaran perda difokuskan pada pelanggaran protokol Kesehatan. Rekapitulasi data pelanggaran protokol Kesehatan tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :

REKAP DATA TIPIRING PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN TAHUN 2021

No.	Tanggal Sidang	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggar (Orang)	Denda (Rp)
1.	Januari 2021	Perda 2 Tahun 2021 atas perubahan perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan tibumtrannas terkait protokol kesehatan	1.625	Rp. 183.300.000
2	Pebruari 2021	Perda 2 Tahun 2021 atas perubahan perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan tibumtrannas terkait protokol kesehatan	2.172	Rp. 338.250.000
3.	Maret 2021	Perda 2 Tahun 2021 atas perubahan perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan tibumtrannas terkait protokol kesehatan	1.633	Rp.292.502.000
4.	April 2021	Perda 2 Tahun 2021 atas perubahan perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan tibumtrannas terkait protokol kesehatan	1.495	Rp. 223.350.000
5.	Mei 2021	Perda 2 Tahun 2021 atas perubahan perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan tibumtrannas terkait protokol kesehatan	823	Rp.101.650.000
6.	Juni 2021	Perda 2 Tahun 2021 atas perubahan perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan tibumtrannas terkait protokol kesehatan	797	Rp.119.550.000
7.	Juli 2021	Perda 2 Tahun 2021 atas perubahan perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan tibumtrannas terkait protokol kesehatan	1.606	Rp.243.275.000
8.	Agustus 2021	Perda 2 Tahun 2021 atas perubahan perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan tibumtrannas terkait protokol kesehatan	508	Rp. 68.650.000
9	September 2021	Perda 2 Tahun 2021 atas perubahan perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan tibumtrannas terkait protokol kesehatan	371	Rp. 55.900.000
10	Oktober 2021	Perda 2 Tahun 2021 atas perubahan perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan tibumtrannas terkait protokol kesehatan	11	Rp. 950.000
10	Nopember 2021	Perda 2 Tahun 2021 atas perubahan perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan tibumtrannas terkait protokol kesehatan	49	Rp. 3.930.000
		TOTAL	11.090	Rp. 1.631.307.000

Upaya yang telah dilakukan agar kasus pelanggaran perda dapat cepat tertangani, yaitu :

- Optimalisasi fungsi pengawasan, upaya preventif dan pembinaan berkaitan dengan pencegahan potensi pelanggaran perda .
- Optimalisasi dan koordinasi dengan Instansi pendukung {Kejaksaan, Pengadilan Negeri (dalam penyelenggaraan sidang)}

Indeks Toleransi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengukur Indeks Toleransi karena menyadari pentingnya toleransi bagi pembangunan. Indeks toleransi digunakan untuk mengukur tingkat toleransi dalam pelaksanaan pembangunan dilihat dari variabel sebagai berikut :

1. Variable persepsi terhadap toleransi
2. variable sikap terhadap toleransi
3. variable Kerjasama antar suku agama
4. variable sikap Pemerintah Daerah terhadap hubungan antar suku agama yang berbeda
5. Variabel harapan terhadap pemerintah.

Indeks toleransi Tahun 2021 tercapai 80,18 dari target 77,61 sehingga tercapai 103,27%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 76,67 maka terdapat peningkatan angka 3,51 atau sekitar 7,52%. Dengan realisasi Indeks toleransi sebesar 80,18 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Toleransi Tinggi.

Adapun capaian masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

Variabel	Capaian
Persepsi terhadap toleransi	84,51
Sikap Terhadap Toleransi	80,01
Kerjasama Antar Suku dan Umat Beragama	75,81
Sikap Pemerintah Terhadap Toleransi	78,79
Harapan Terhadap Pemerintah	81,78

Bakesbangpol dan Forkopimda bekerjasama dalam membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah Kota Sidoarjo, membahas masalah aktual di Kota Sidoarjo yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasi oleh Komunitas Intelijen Daerah, Tim Terpadu Penangan Gangguan Konflik dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja di Kota Sidoarjo, memberikan masukan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan Sosial Masyarakat, Bangsa dan Negara di Kota Sidoarjo, memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kota Sidoarjo mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan pringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah Kota Sidoarjo

Adapun tren capaian Indeks Toleransi dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III. B. 32

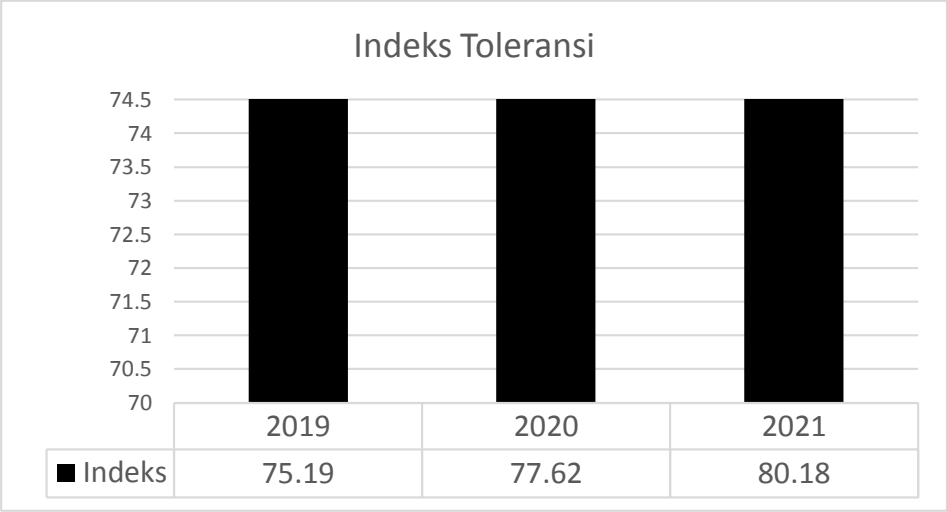

Sumber Data : Bakesbang Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan agar Indeks Toleransi dapat tercapai optimal, yaitu:

- Pemerintah bersikap tegas dalam memfasilitasi kasus kekerasan antar umat beragama dan antar suku, namun selain tegas sebagian masyrakat dalam menyikapi hal ini juga diperlukan sentuhan halus kemanusiaan, pendekatan kekeluargaan yang lebih humanis

- Mensosialisasikan toleransi dalam masyarakat sejak dini kepada kalangan pemuda, dan komunitas-komunitas sosial budaya

Indeks Resiko Bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Indeks resiko bencana Tahun 2021 tercapai 99,12 dari target 104,72 sehingga tercapai 105,65%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 100,77% maka terdapat peningkatan angka 13,7 atau sekitar 4,88%. Peningkatan tersebut

disebabkan oleh perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Penanggulangan Bencana kabupaten Sidoarjo juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Dengan realisasi Indeks resiko bencana sebesar 99,12 ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas daerah dalam upaya meminimalkan resiko bencana di Kabupaten Sidoarjo.

Adapun tren capaian Indeks Resiko Bencana dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik III.B.33

Sumber Data : BPBD Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Resiko Bencana dapat tercapai optimal, yaitu :

- Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik SDM, sarana prasarana ,penggunaan anggaran dan sumber daya informasi;
- Memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana;
- Memprioritaskan pelatihan / edukasi kebencanaan untuk masyarakat di kawasan rawan bencana;
- Alokasi anggaran untuk kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Pembentukan dan Penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana

Secara umum perhitungan Indeks Risiko Bencana seperti yang tertera dalam grafik diatas didasarkan pada rumus umum Risiko Bencana, yang terdiri dari tiga kompenen utama, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dari tiga komponen diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan representasi dari komponen kapasitas. Dengan asumsi bahwa jika kapasitasnya meningkat maka risiko bencana akan menurun.

Dengan kata lain bahwa semakin tinggi skor IKD yang mewakili komponen kapasitas, maka skor Indeks Risiko Bencana akan menurun. Secara grafis, rumus Indeks Risiko Bencana sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

$\boldsymbol{Disaster\ Risk} = \frac{\boldsymbol{Hazard\ (H) x\ Vulnerable\ (V)}}{\boldsymbol{Capacity\ (C)}}$	**Hazard / Ancaman : Ancaman / Potensi Bencana yang terjadi di sebuah daerah (sesuai UU 24/2007 ada 13 jenis ancaman bencana di Indonesia)**
$\boldsymbol{Resiko\ Bencana} = \frac{\boldsymbol{Ancaman\ x\ Kerentanan}}{\boldsymbol{Kapasitas}}$	**Vulnerable / Kerentanan** : kondisi atau kejadian yang dapat menimbulkan bahaya / ancaman bahkan bencana yang terdiri dari kerentanan fisik, sosial,ekonomi, lingkungan dan politik

	Capacity / Kapasitas : Intensitas Kemampuan Komunitas / Masyarakat dalam menghadapi ancaman dan atau bencana yang berwujud **Ketangguhan**

Indeks Kapasitas di peroleh berdasarkan tingkat ketahanan daerah pada suatu waktu. Tingkat Ketahanan Daerah bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian kapasitas ini. Oleh karenanya penghitungan Tingkat Ketahanan Daerah dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan Peta Ancaman Bencana pada daerah yang sama. Indeks Kapasitas diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada beberapa pelaku / *stakeholder* penanggulangan bencana pada suatu daerah.

Terdapat 7 (tujuh) fokus prioritas utama yang dikembangkan dalam penyusunan IKD antara lain :

a. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan

b. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu

c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik

d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana

f. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana

g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Hasil pengukuran IKD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH	SKOR
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,94	0,74	SEDANG	2,2835
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,97			
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,90			

4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,85			
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,68			
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,60			
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,80			

Dari hasil perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 mengambarkan bahwa perlu peningkatan pada Prioritas : Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dimana skor pada tahun 2021 adalah 0,60.

Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo) sesuai SPM

Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap di Tahun 2021 tercapai 42,29% dari target 55% sehingga tercapai 76,89%%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 41,54% maka terdapat peningkatan sekitar 0,75%.

Rata-rata Waktu tanggap yang ditentukan sesuai SPM adalah 17,49 menit.

Adapun tren capaian Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik III.B.34

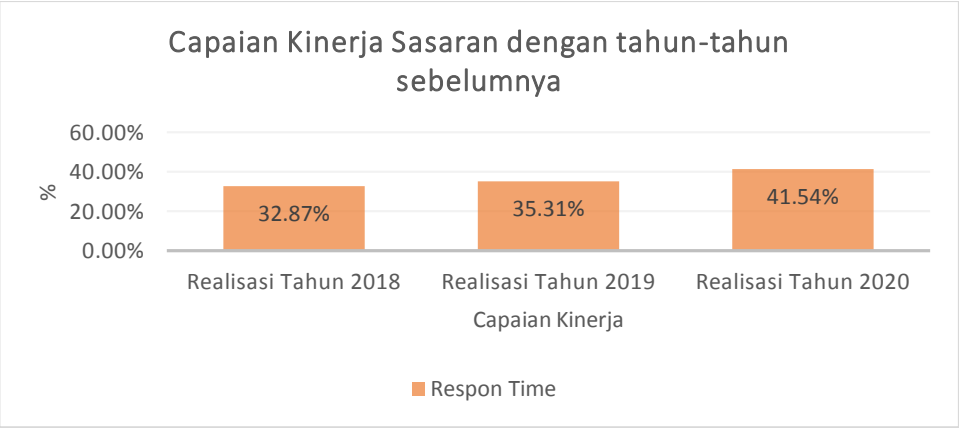

Sumber Data : BPBD Kab. Sidoarjo

Upaya yang telah dilakukan agar kejadian Kebakaran dapat ditangani dalam waktu tanggap, yaitu :

- Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik SDM, sarana prasarana , penggunaan anggaran dan sumber daya informasi;
- Penambahan aparatur dan sarana prasarana;
- Menjalin kerja sama dengan dunia usaha untuk penambahan pos damkar baru;
- Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran melalui Pendidikan dan pelatihan;
- Mengupayakan terbentuknya relawan kebakaran di desa/kecamatan;
- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Pencegahan Kebakaran

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan anggaran sebesar Rp.14.438.479.823 dan terealisasi sebesar Rp.14.290.606.427 atau 98,97%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Rasio anggota linmas terhadap jumlah RT	1 : 1,1	1 : 1,1	100 %
	Prosentase Poskamling Aktif	32 %	32 %	100 %
Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Prosentase penanganan gangguan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	100 %	100 %
	Prosentase Penanganan pelanggaran terhadap	100 %	100 %	100 %

Pembinaan Penyidik PPNS Kabupaten / Kota	pelanggaran perda yang diselesaikan			
	Prosentase titik – titik lokasi yang bebas pelanggaran perda	100 %	100 %	100 %
	Prosentase penanganan pelanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Rp.13.045.318.673	Rp. 13.045.318.673	99,16 %
Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 1.260.000.317	Rp. 1.260.000.317	97,13 %
Pembinaan Penyidik PPNS Kabupaten / Kota	Rp. 133.160.833	Rp. 130.864.804	98,28 %

2. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** dengan anggaran sebesar Rp.1.912.223.225 dan terealisasi sebesar Rp.1.889.250.500 atau 98,8 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase konflik yang terselesaikan	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	a. Jumlah laporan deteksi dini potensi konflik	a. 12 Laporan	a. 12 Laporan	100%
	b. persentase konflik yang tertangani	b. 100%	b. 100%	100%
	c. Jumlah Notulen Rapat yang dihasilkan	c. 12 laporan	c. 12 laporan	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.912.223.225	1.889.250.500	98,80%

3. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya** dengan anggaran sebesar Rp.130.596.201 dan terealisasi sebesar Rp.123.295.000 atau 94,41 % .

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	a. 3 kegiatan	a. 3 kegiatan	a. 100%
b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	b. 12 laporan	b. 12 laporan	b. 100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah buku pedoman fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 dokumen	3 dokumen	100 %

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	130.596.201	123.295.000	94,41%

4. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** dengan anggaran sebesar Rp.1.960.615.703 dan terealisasi sebesar Rp.1.731.819.326 atau 88,33 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
a. Jumlah Kader Wawasan Kebang saan	a. 100 orang	a. 100 orang	100%
b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	b. 100 peserta	b. 100 peserta	100%
c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	c. 100 orang	c. 100 orang	100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah buku panduan teknis sosialisasi ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	2 dokumen	2 dokumen	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.960.615.703	1.731.819.326	88,33%

5. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik** dengan anggaran sebesar Rp.5.183.509.061 dan terealisasi sebesar Rp.5.169.397.220 atau 99,73 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	0%	0%	0%
2. Persentase partisipasi peserta terhadap pendidikan politik dan etika budaya politik	80%	80%	100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	a. Jumlah buku pedoman teknis sosialisasi pendidikan politik, etika, budaya politik	2 dokumen	2 dokumen	100%
	b. Jumlah pedoman bantuan keuangan Partai Politik	2 dokumen	2 dokumen	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.183.509.061	5.169.397.220	99,73 %

6. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** dengan anggaran sebesar Rp.4.333.486.272 dan terealisasi sebesar Rp..4.261.063.220 atau 98,33 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
a. Jumlah Ormas yang didata	364 Ormas	364 Ormas	100%
b. Jumlah pembinaan / pemberdayaan dan pengawasan Ormas	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	12 proposal	12 proposal	100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah buku pedoman teknis pemberdayaan dan pengawasan Ormas	3 dokumen	3 dokumen	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.333.486.272	4.261.063.220	98,33%

7. **Program Penanggulangan Bencana** dengan anggaran sebesar Rp.2.372.985.271,- dan terealisasi sebesar Rp.2.168.705.447,- atau 91,39%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
a. Persentase pelayanan informasi rawan bencana;	80%	80%	100%
b. Jumlah peserta peningkatan kapasitas masyarakat/aparatur dalam bidang kebencanaan;	220 orang	220 orang	100%
c. Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%
d. Persentase korban bencana yang terehabilitasi	100%	100%	100%
e. Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi berdasarkan laporan Jitupasna	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 3 Kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warna negara di daerah rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	100%	100%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%
	Jumlah desa tangguh bencana di Kabupaten Sidoarjo	1 desa	1 desa	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan pencarian,penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada masa status siaga dan darurat bencana	100%	100%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	175.438.463,-	139.318.730,-	79,41%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.486.298.483,-	1.454.822.717,-	97,88%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	711.248.325,-	574.564.000,-	80,78%

8. **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran** dengan anggaran sebesar Rp.2.372.985.271,- dan terealisasi sebesar Rp.2.168.705.447,- atau 91,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase wilayah Kabupaten yang sudah mempunyai pos PMK	35%	28%	80%
Persentase satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi	40%	23%	58%
Persentase mobil PMK dengan kondisi layak fungsi	80%	80%	100%

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo	100%	100%	100%
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana proteksi kebakaran bangunan/gedung yang memenuhi standar	100%	100%	100%

Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi pasca kebakaran	100%	100%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.179.291.539,-	14.179.245.791,-	93,41%
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	147.803.685,-	75.200.000,-	50,88%
Investigasi Kejadian Kebakaran	5.000.000,-	190.000,-	3,8%

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Penambahan personel Pol PP untuk memaksimalkan tugas Pol PP dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.	Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan penambahan personil Satpol PP (Non PNS) sebanyak 50 orang untuk TA. 2022 dan pada tahun Anggaran 2020 sebanyak 50 orang . hal tersebut sudah sesuai dengan permendagri nomor 16 Tahun 2018 terkait jumlah ideal Satpol PP untuk tingkat kabupaten/kota.
2	Perlu adanya regulasi yang mengatur tugas Pol PP dalam pelaksanakan penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yakni Penegakan perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di dasarkan pada :

		1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP. 3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satpol PP. 4. Permendagri Nomor 26 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 5. Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3	Membangun pos DAMKAR disetiap kecamatan dengan disertai penambahan unit mobil DAMKAR dan personilnya. Jika dimungkinkan secara regulasi bisa bekerja sama dengan pihak swasta.	Telah dibangun Pos Damkar Unit Krian (Pos Damkar Krian yang lama sudah tidak layak pakai)
4	Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana	Telah dilaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana, dengan pendanaan dari APBD dan Non APBD
5	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui sosialisasi, edukasi dan pelatihan	Sosialisasi, edukasi dan pelatihan pencegahan penanggulangan kebakaran telah dilaksanakan pada instansi / stakeholder
6	Mengalokasikan anggaran/pendanaan untuk efektifitas penyelenggaran Penanggulangan Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana dan Kebakaran	Telah diusulkan anggaran / pendanaan untuk program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM tetapi terdapat efisiensi anggaran TA 2021 sehingga pelaksanaan kegiatan berbasis SPM belum maksimal

Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Sosial dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,38%	2,38%	100

Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebanyak 48.718 jiwa atau sekitar 2,38% dari jumlah penduduk. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan target 2,38% maka tercapai 100%, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 2,23% maka terdapat peningkatan angka 4.073 jiwa atau sekitar 0,07%. Peningkatan tersebut terjadi karena pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan juga peran aktif penelusuran dan pendataan yang terus dilakukan sebagai bentuk upaya penanganan terhadap PMKS di wilayah kabupaten sidoarjo.

Adapun data PMKS berdasarkan jenisnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.B.1

Data 26 jenis PMKS di Kabupaten Sidoarjo

No	Jenis PMKS/PPKS	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Keluarga Fakir Miskin	34.602	33.296	32.862	33.342	37.847	39.269
2	Anak Jalanan	145	145	145	19	43	45
3	Tuna Susila	20	20	20	26	91	16
4	Pengemis	125	125	125	31	86	85
5	Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	102	273	273	26	90	39

6	Anak Balita Terlantar	81	81	81	7	33	51
7	Anak Terlantar	243	243	243	86	67	176
8	Anak Berhadapan Dengan Hukum	100	70	70	9	25	70
9	Anak dengan Kedisabilitasan	-	-	-	-		-
	a. Tubuh	-	-	-	180	142	201
	b. Netra	-	-	-	35	16	25
	c. Cacat Wicara	-	-	-	66	61	146
	d. Mental	-	-	-	213	132	295
	e. Cacat Ganda	-	-	-	104	84	112
10	Anak yg menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah	-	23	23	17	11	3
11	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-	14	34	59
12	Lanjut Usia Terlantar	1.292	1.292	1.292	329	397	475
13	Penyandang Distabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	-	-	-	-		
	a. Tubuh	1.437	1.437	1.437	1.783	358	499
	b. Netra	488	488	488	932	114	192
	c. Cacat Wicara	387	387	387	253	164	235
	d. Mental	273	273	273	278	606	800
	e. Cacat Ganda	-	-	-	683	116	148
	f. Penderita Penyakit Kronis	-	-	-	305	355	938
	Pemulung	-	-	-	157	254	381
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	401	61	20
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLB)	40	40	40	81	143	172
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	464	968	968	1.477	1.699	1.546
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	38	68	68	27	42	77
18	Korban Trafficing	-	-	-	-	1	1
19	Korban Tindak Kekerasan/ yang diperlakukan salah	-	-	-	1	4	7
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-	81	2	3
21	Korban Bencana Alam	412	-	-	23	3	201
22	Korban Bencana Sosial	47	412	412	28	22	188
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2.325	2.325	2.325	640	997	1.394
24	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	355	355	355	228	433	700
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	66	66	66	26	88	127
26	Masyarakat Daerah Tertinggal danTerpencil	-	-	-	32	24	22
	TOTAL	**43.042**	**42.387**	**41.953**	**41.940**	**44.645**	**48.718**

Sumber Data : Dinsos Kab. Sidoarjo

Perkembangan persentase PMKS terhadap jumlah penduduk dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.35

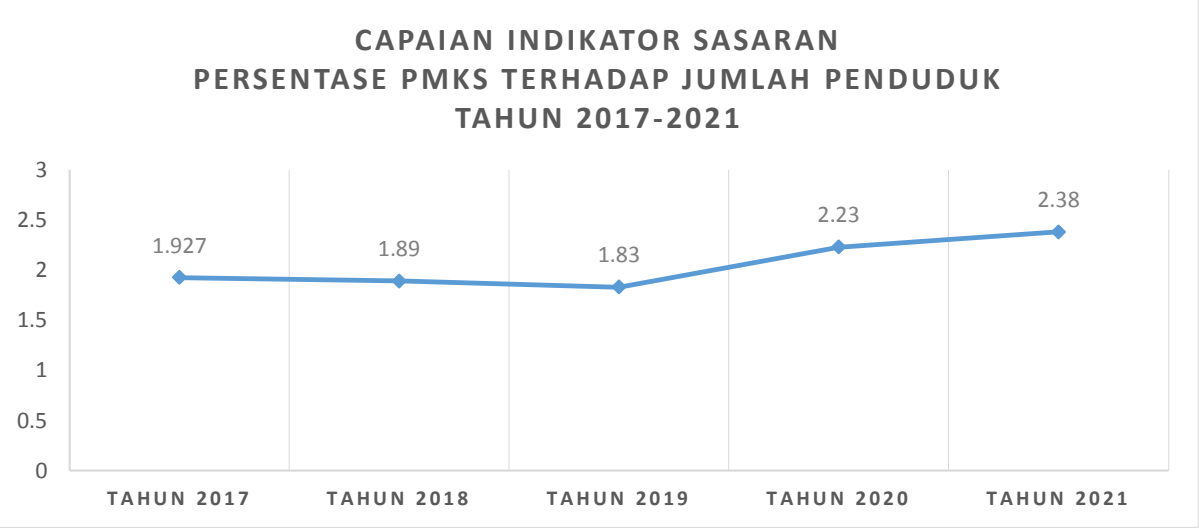

Sumber Data : Dinsos Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar jumlah PMKS di Kabupaten Sidoarjo semakin menurun pada tahun 2021, yaitu :

- Pemberian bantuan berupa alat bantu untuk penyandang disabilitas;
- Pengiriman pelatihan penyandang disabilitas ke UPT milik Provinsi;
- Pengiriman pelatihan remaja terlantar ke UPT milik Provinsi;
- Pengiriman lansia ke UPT Provinsi untuk mendapatkan rehabilitasi sosial;
- Pengiriman ODGJ/Disabilitas mental ke UPT Provinsi untuk mendapatkan bimbingan/pengobatan lanjutan serta di beri pelatihan;
- Reunifikasi keluarga/pemulangan ke daerah asal bagi PMKS terlantar/penghuni liponsos;
- Pendampingan korban tindak kekerasan terhadap anak dibawah umur;
- Bantuan terhadap korban bencana alam dan sosial;
- Pembentukan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga kurang mampu;
- Pemberian BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bagi warga miskin dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;
- Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan);
- Bantuan sosial bagi keluarga miskin, warga terdampak covid-19, dan warga isoman covid-19, baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun Pemerintah Pusat untuk perlindungan sosial.

Penyaluran Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin, Warga Terdampak Covid-19, dan Warga Isoman Covid-19

Pada tahun 2021 telah disalurkan bantuan bagi keluarga miskin, warga terdampak covid-19, dan warga isoman covid-19, baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun Pemerintah Pusat, sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Tunai (BST)

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	Kementerian Sosial RI
2.	Kuota/Pagu	1. Kuota Tahap 10 = 36.521 KPM (Rp. 10.956.300.000,-) 2. Kuota Tahap 11 = 36.520 KPM (Rp. 10.956.000.000,-) 3. Kuota Tahap 12 = 33.518 KPM (Rp. 10.055.400.000,-) 4. Kuota Tahap 13 = 33.518 KPM (Rp. 10.055.400.000,-) 5. Kuota Tahap 14 = 46.305 KPM (Rp. 13.891.500.000,-) 6. Kuota Tahap 15 = 46.305 KPM (Rp. 13.891.500.000,-) **Total kuota Tahap 10 s/d 15 = 232.687 KPM** **Total anggaran Tahap 10 s/d 15 = Rp. 69.806.100.000,-**
3.	Besar Bantuan	Rp. 300.000,- per bulan
4.	Realisasi Anggaran	1. Realisasi anggaran Tahap 10 = Rp. 10.854.300.000,- 2. Realisasi anggaran Tahap 11 = Rp. 10.902.600.000,- 3. Reliasasi anggaran Tahap 12 = Rp. 9.816.300.000,- 4. Realisasi anggaran Tahap 13 = Rp. 9.816.300.000,- 5. Realisasi anggaran Tahap 14 = Rp. 12.415.000.000,- 6. Realisasi anggaran Tahap 15 = Rp. 12.415.000.000,- **Total realisasi Tahap 10 s/d 15 = Rp. 66.221.100.000,-**
5.	Realisasi	1. Tahap 10 realisasi 36.181 KPM blm realisasi 340 KPM 2. Tahap 11 realisasi 36.342 KPM blm realisasi 750 KPM 3. Tahap 12 realisasi 32.721 KPM blm realisasi 788 KPM 4. Tahap 13 realisasi 32.721 KPM blm realisasi 788 KPM 5. Tahap 14 realisasi 41.386 KPM blm realisasi 4.919 KPM 6. Tahap 15 realisasi 41.386 KPM blm realisasi 4.919 KPM **Total realisasi kuota Tahap 10 s/d 15 = 220.737 KPM**
6.	Kendala	1. Penerima Bansos meninggal dunia tanpa ahli waris; 2. Penerima Bansos keluar Kota sedangkan ahliwaris tidak dalam 1 KK; 3. Penerima Bansos menerima program bantuan lain.
7.	Solusi	Dana dikembalikan pada Kementerian Sosial RI.
8.	Catatan	Terjadi penurunan kuota dari Kementerian Sosial RI pada tiap penyaluran Bansos dari: 1. Tahap 10 & 11 ke Tahap 12 & 13 **turun** 3.003 KPM 2. Tahap 12 & 13 ke Tahap 14 & 15 **naik** 12.787 KPM **Total penurunan kuota = 3.003 KPM** **Total kenaikan kuota = 12.787 KPM**

2. Bantuan Sosial Program Sembako (Bansos Sembako)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	Kementerian Sosial RI
2.	Kuota/Pagu	1. Kuota Jan 2021 = 70.354 KPM (Rp. 14.070.800.000,-) 2. Kuota Feb 2021 = 77.387 KPM (Rp. 15.477.400.000,-) 3. Kuota Maret 2021 = 58.185 KPM (Rp. 11.637.000.000,-) 4. Kuota April 2021 = 58.185 KPM (Rp. 11.637.000.000,-) 5. Kuota Mei 2021 = 61.705 KPM (Rp. 12.341.000.000,-) 6. Kuota Juni 2021 = 61.705 KPM (Rp. 12.341.000.000,-) 7. Kuota Juli 2021 = 66.262 KPM (Rp. 13.352.400.000,-) 8. Kuota Ags 2021 = 75.000 KPM (Rp. 15.000.000.000,-) 9. Kuota Sept 2021 = 75.000 KPM (Rp. 15.000.000.000,-) 10. Kuota Okt 2021 = 67.763 KPM (Rp. 13.552.600.000,-) 11. Kuota Nov 2021 = 56.059 KPM (Rp. 11.211.800.000,-) 12. Kuota Des 2021 = 56.059 KPM (Rp. 11.211.800.000,-) **Total kuota Jan s/d Des = 783.664 KPM** **Total anggaran Jan s/d Des = Rp. 156.732.800.000,-**
3.	Besar Bantuan	Rp. 200.000,- per bulan
4.	Realisasi Anggaran	1. Realisasi anggaran Januari = Rp. 13.758.400.000,- 2. Realisasi anggaran Februari = Rp. 15.158.200.000,- 3. Realisasi anggaran Maret = Rp. 10.254.400.000,- 4. Realisasi anggaran April = Rp. 11.600.400.000,- 5. Realisasi anggaran Mei = Rp. 12.304.400.000,- 6. Realisasi anggaran Juni = Rp. 12.302.800.000,- 7. Realisasi anggaran Juli = Rp. 13.195.000.000,- 8. Realisasi anggaran Ags = Rp. 14.942.000.000,- 9. Realisasi anggaran Sept = Rp. 14.937.200.000,- 10. Realisasi anggaran Okt = Rp. 13.462.200.000,- 11. Realisasi anggaran Nov = Rp. 9.876.400.000,- 12. Realisasi anggaran Des = Rp. 8.690.800.000,- **Total realisasi anggaran Jan-Des = Rp. 150.482.200.000,-**
5.	Realisasi	1. Januari realisasi 68.792 KPM blm realisasi 1.562 KPM 2. Februari realisasi 75.791 KPM blm realisasi 1.596 KPM 3. Maret realisasi 51.272 KPM blm realisasi 6.913 KPM 4. April realisasi 58.002 KPM blm realisasi 6.161 KPM 5. Mei realisasi 61.522 KPM blm realisasi 183 KPM 6. Juni realisasi 61.514 KPM blm realisasi 191 KPM 7. Juli realisasi 65.975 KPM blm realisasi 287 KPM 8. Ags realisasi 74.710 KPM blm realisasi 290 KPM 9. Sept realisasi 74.686 KPM blm realisasi 314 KPM 10. Okt realisasi 67.311 KPM blm realisasi 452 KPM 11. Nov realisasi 49.382 KPM blm realisasi 6.677 KPM 12. Des realisasi 43.454 KPM blm realisasi 12.605 KPM **Total realisasi kuota Jan s/d Des = 752.411 KPM**
6.	Kendala	1. Penerima Bansos meninggal dunia tanpa ahli waris; 2. Terdapat Data Ganda dan tdata tidak valid
7.	Solusi	Menghimbau Desa/Kelurahan untuk melakukan verifikasi dan validasi perbaikan NIK pada aplikasi SIKSNG online.

8.	Catatan	Terjadi penurunan dan kenaikan kuota dari Kementerian Sosial RI pada tiap penyaluran Bansos dari: 1. Januari ke Februari **naik** 7.033 KRT 2. Februari ke Maret-April **turun** 19.202 KRT 3. Maret-April ke Mei-Juni **naik** 3.520 KRT 4. Mei-Juni ke Juli **naik** 4.557 KRT 5. Juli ke Ags-Sept **naik** 8.738 KRT 6. Ags-Sept ke Okt **turun** 7.237 KRT 7. Okt ke Nov-Des **turun** 11.704 KRT **Total penurunan kuota = 38.143 KPM** **Total kenaikan kuota = 23.848 KPM**

3. BPNT PPKM Darurat

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	Kementerian Sosial RI
2.	Kuota/Pagu	14.667 + 9.099 = 23.766 KPM (Rp. 28.519.200.000,-)
3.	Besar Bantuan	Rp. 200.000,- per bulan
4.	Realisasi Anggaran	**Total realisasi anggaran Juli-Des = Rp. 21.231.600.000,-**
5.	Realisasi	**Total realisasi kuota Juli s/d Des = 17.693 KPM**
6.	Kendala	Saldo Nol
7.	Solusi	1. Perbaikan Data pada NIK dan nama oleh Desa/Kelurahan 2. Pelaporan pada Kementerian Sosial RI untuk dilakukan pengisian saldo data yang sudah diperbaiki

4. Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	Kementerian Sosial RI
2.	Kuota/Pagu	1. Kuota Thp 1 (Jan-Mar) = 39.274 KPM (Rp. 24.677.995.000,-) 2. Kuota Thp 2 (Apr-Juni) = 37.486 KPM (Rp. 23.694.250.000,-) 3. Kuota Thp 3 (Jul-Sept) = 36.590 KPM (Rp. 22.185.050.000,-) 4. Kuota Thp 4 (Okt-Des) = 37.418 KPM (Rp. 24.489.050.000,-) **Total kuota Jan s/d Des = 150.768 KPM** **Total anggaran Jan s/d Des = Rp. 95.276.305.000,-**
3.	Besar Bantuan	Ibu Hamil (250.000)/bln, Anak usia dini (250.000)/bln, Anak SD (75.000)/bln, Anak SMP (125.000)/bln, Anak SMA (166.000)/bln, Lanjut usia (200.000)/bln dan Disabilitas (200.000)/bln
4.	Realisasi Anggaran	1. Tahap 1 (Jan s/d Mar) = Rp. 24.632.450.000,- 2. Tahap 2 (April s/d Juni) = Rp. 23.629.050.000,- 3. Tahap 3 (Juli s/d Sept) = Rp. 22.372.775.000,- 4. Tahap 4 (Okt s/d Des) = Rp. 24.287.300.000,- **Total anggaran Jan s/d Des = Rp. 95.276.305.000,-**
5.	Realisasi	1. Thp 1 realisasi 39.190 KPM blm realisasi 84 KPM 2. Thp 2 realisasi 37.252 KPM blm realisasi 234 KPM 3. Thp 3 realisasi 36.398 KPM blm realisasi 192 KPM 4. Thp 4 realisasi 36.974 KPM blm realisasi 444 KPM **Total realisasi kuota Tahap 1 s/d 4 = 149.814 KPM**
6.	Kendala	1. Meninggal dunia tanpa ahli waris; 2. Terdeteksi meninggal atau nama berbeda dan belum divalidasi oleh pendamping PKH;

		3. Proses penggantian kepengurusan karena pengganti belum memiliki KTP.
7.	Solusi	1. Pendamping PKH melakukan validasi secara rutin terhadap penerima PKH setiap bulan; 2. Dinas Sosial memberikan surat rekomendasi kepada Bank penyalur untuk pencairan bantuan.
8.	Catatan	Terjadi penurunan kuota dari Kementerian Sosial RI pada tiap penyaluran Bansos dari: 1. Tahap 1 ke Tahap 2 **turun** 1.784 KRT 2. Tahap 2 ke Tahap 3 **turun** 1.293 KRT **Total penurunan kuota = 3.077 KPM**

5. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Daerah

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	APBD Kabupaten Sidoarjo
2.	Kuota/Pagu	72.000 KPM / 6.000 KPM per bulan (Rp. 10.800.000.000,-)
3.	Besar Bantuan	Rp. 150.000,- per bulan
4.	Realisasi Anggaran	Jumlah anggaran Rp. 900.000.000,- per bulan **Total anggaran Jan s/d Desember = Rp. 10.800.000.000,-**
5.	Realisasi	Total realisasi Januari s/d Desember = 72.000 KPM BPNT Daerah diberikan setiap bulan dengan capaian 100%
6.	Kendala	NIK tidak valid
7.	Solusi	Penggantian data penerima terkait NIK tidak valid oleh Desa/Kelurahan

6. Bantuan Sembako Warga terdampak Covid-19

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	BTT Kabupaten Sidoarjo
2.	Kuota/Pagu	9.480 KPM (Rp. 2.000.000.000,-)
3.	Besar Bantuan	Beras 20 Kg (@Rp. 10.500,-)
4.	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran Rp. 1.990.800.000,- **Total anggaran Tahap = Rp. 1.990.800.000,-**
5.	Realisasi	Bantuan sembako tersalurkan semua di 18 Kecamatan
6.	Kendala	Usulan penerima Bantuan Sembako dari Desa/Kelurahan terlambat mengirimkan ke Dinas Sosial.
7.	Solusi	Desa/Kelurahan berhak menentukan calon penerima sesuai dengan kondisi dilapangan dengan disetujui oleh 3 pilar (Babinsa, Bhabinkabtimnas dan Kepala Desa).

7. Bantuan Sembako Isoman & Warga terdampak Covid-19

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	APBD Kabupaten Sidoarjo
2.	Kuota/Pagu	100.000 KPM (Rp. 15.000.000.000,-)
3.	Besar Bantuan	Rp. 150.000,- per paket
4.	Realisasi Anggaran	1. Tahap 1 = Rp. 5.857.500.000,- 2. Tahap 2 = Rp. 6.585.000.000,- 3. Tahap 3 = Rp. 1.058.850.000,- 4. Tahap 4 = Rp. 1.124.700.000,- **Total Anggaran = Rp. 14.626.050.000,-**

5.	Realisasi	Realisasi tahap 1 = 39.050 KPM Realisasi tahap 2 = 43.900 KPM Realisasi tahap 3 = 7.059 KPM Realisasi tahap 4 = 7.250 KPM **Total Realisasi = 97.259 KPM** **Belum Realisasi = 2.741 KPM**
6.	Kendala	Usulan penerima Bantuan Sembako dari Desa/Kelurahan terlambat mengirimkan ke Dinas Sosial.
7.	Solusi	1. Desa/Kelurahan berhak menentukan calon penerima sesuai dengan kondisi dilapangan dengan disetujui oleh 3 pilar (Babinsa, Bhabinkabtimnas dan Kepala Desa). 2. Diutamakan yang ber KTP Sidoarjo

8. Dapur Umum

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	BTT Kabupaten Sidoarjo
2.	Kuota/Pagu	45.000 bungkus/ 1.500 bungkus per hari (Rp. 1.196.700.000,-)
3.	Besar Bantuan	Makan 3 kali berupa : 1. Nasi Kotak @Rp. 15.000,- 2. Air Mineral @Rp. 3.000,- 3. Buah @Rp. 3.000,-
4.	Realisasi Anggaran	Rp. 930.388.841,-
5.	Realisasi	Mulai Tanggal 21 Juli s/d 24 September 2021 = 35.140 PM
6.	Kendala	Daftar nama convirm covid-19 isoman dinamis sesuai laporan yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
7.	Solusi	Penyaluran diberikan sesuai dengan data yang dilaporkan setiap hari

9. JPS Prov. Jatim

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	Provinsi Jawa Timur
2.	Kuota/Pagu	7.500 KPM (Rp. 1.500.000.000,-)
3.	Besar Bantuan	Rp. 200.000,-
4.	Realisasi Anggaran	Jumlah anggaran Rp. 1.5.00.000.000,-
5.	Realisasi	Terealisasi 100%
6.	Kendala	-
7.	Solusi	-

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin**

  Dilaksanakan mulai tahun 2022

- **10.000 Beasiswa Kuliah**

  Dilaksanakan mulai tahun 2022

c. **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

1. **Program Pemberdayaan Sosial** dengan anggaran sebesar Rp.2.541.137.685,- dan terealisasi sebesar Rp.2.480.092.850,- atau 97,60%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina	6 PSKS	6 PSKS	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.541.137.685,-	Rp2.480.092.850,-	97,60

2. **Program Rehabilitasi Sosial** dengan anggaran sebesar Rp.9.684.952.671,- dan terealisasi sebesar Rp.9.639.793.635,- atau 99,53%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Tuna Sosial yang Terlayani	6,47 %	6,47 %	100
Persentase Penyandang Disabilitas yang terlayani	22 %	22 %	100
Persentase Anak dan Lansia Bermasalah Sosial yang Terlayani	42,7 %	42,7 %	100
Persentase PPKS/PMKS yang terlayani	100 %	100 %	100

Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan Pengemis yang Mendapat Permakanan	2.319 Orang	2.319 Orang	100
	Jumlah anak terlantar, lansia terlantar yang mendapat bantuan Sandang	125 Orang	125 Orang	100
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, di luar panti yang mendapat alat bantu	16 Orang	16 Orang	100
	Jumlah gepeng terlantar yang mendapat bimbingan	900 Orang	900 Orang	100
	Jumlah keluarga anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar yang mendapat bimbingan	137 Orang	137 Orang	100
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS lainnya di luar panti yang mendapat permakanan	20 Orang	20 Orang	100
	Jumlah PMKS lainnya yang mendapat bimbingan	100 Orang	100 Orang	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp9.624.915.551,-	Rp9.580.737.635,-	99,54

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp60.037.120,-	Rp59.056.000,-	98,37

3. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** dengan anggaran sebesar Rp.13.983.692.800,- dan terealisasi sebesar Rp.13.655.565.997,- atau 97,65%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Fakir Miskin yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	41,21%	41,21 %	100

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang diusulkan pada DTKS	31,97%	31,97%	100%
	Persentase Rekom JKMM yang dikeluarkan	100%	100%	100%
	Persentase fakir miskin yang dilatih	0	0	0

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp13.983.692.800,-	Rp13.655.565.997,-	97,65

4. **Program Penanganan Bencana** dengan anggaran sebesar Rp.329.082.678,- dan terealisasi sebesar Rp.318.678.000,- atau 96,84%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Tertangani	100%	100%	100

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TAGANA yang Dibina Tepat Waktu	50 Orang	50 Orang	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp329.082.678,-	Rp318.678.000,-	96,84

5. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** dengan anggaran sebesar Rp.104.997.233,- dan terealisasi sebesar Rp.98.123.050,- atau 93,45%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Sarpras dalam Kondisi yang Baik	1 TMP	1 TMP	100%

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Jumlah TMP yang Dipelihara	Jumlah TMP yang Dipelihara	1 TMP	1 TMP	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Jumlah TMP yang Dipelihara	104.997.233	98.123.050	93,45

g. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Sosial

h. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan sosial, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Verifikasi dan validasi DTKS sebagai acuan data untuk memberikan bantuan sosial	Sudah Dilaksanakan dengan Aplikasi SIKS-SDA untuk DTKS dan SIKS-NG Kementerian Sosial untuk Program Bantuan Sosial di Desa/Kelurahan
2	Agar segera dibangun Liponsos yang lebih layak dan representatif.	Diusulkan Pembangunan pada Tahun 2023
3	Agar Dinas Sosial koordinasi dengan OPD untuk melakukan penanganan PMKS diwilayah Kabupaten Sidoarjo	Sudah Dilaksanakan Koordinasi untuk Penangnan PMKS dengan Satpol PP, Dukcapil, Dinkes, BPJS
4	Menambah tenaga pendamping Desa menjadi 1 banding 1	Tahun 2021 Pendamping Desa 1 banding 3 dan masih perlu melaksanakan evaluasi lebih lanjut

2. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan dalam rangka menurunkan pengangguran terbuka melalui peningkatan angkatan kerja terlatih, penempatan tenaga kerja, dan menekan perselisihan hubungan industrial.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan tenaga kerja sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor	89,17%	89,13%	99,96%
2	Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja	55%	55,81%	101,47%
3	Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan	60%	63,48%	105,8%
4	Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselsaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB)	10%	18,1%	181%

Persentase Tenaga Kerja yang terserap di 9 sektor

Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor di tahun 2021 tercapai 89,13% dari target 89,17 % atau capaian 99,96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 89,03% maka terdapat peningkatan angka 0,10 atau sekitar 0,11%.

Sembilan sektor yang menyerap tenaga kerja dimaksud, yaitu :

1. Sektor Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan
2. Sektor Pertambangan dan penggalian
3. Sektor Industri pengolahan
4. Sektor Listrik, gas dan air

5. Sektor Bangunan
6. Sektor Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel
7. Sektor Angkutan, pergudangan dan komunikasi
8. Sektor Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan
9. Sektor Jasa kemasyarakatan

Adapun Perkembangan persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.36

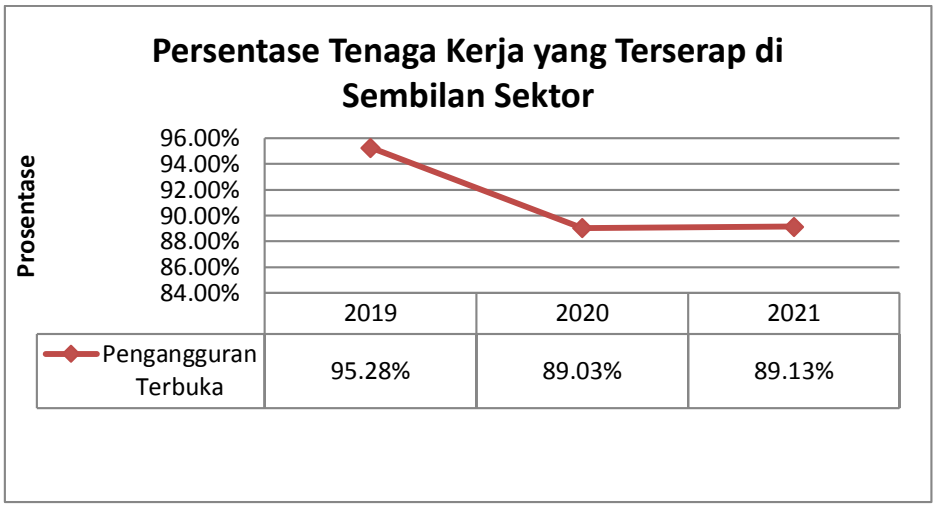

Sumber Data : Disnaker Kab. Sidoarjo

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor	94,44	95,28	93,70	89,03	89,17	89,13

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap di 9 sektor, yaitu :

- Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk mempermudah pencari kerja untuk terserap di dunia kerja.
- Penguatan Bursa Kerja Khusus dalam penempatan tenaga kerja lulusan SMK.
- Penguatan hubungan industrial dalam upaya menjaga kondusifitas hubungan kerja untuk mengurangi perselisihan yang berdampak PHK.

Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja

Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja di tahun 2021 tercapai 55,81% dari target 55% atau capaian 101,47%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 51,36% maka terdapat peningkatan angka 4,45 atau sekitar 8,67%.

Adapun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di tahun 2021 dan lulusannya telah mendapatkan pekerjaan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.B.2

Pelatihan Ketenagakerjaan

NO	URAIAN KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	TEMPAT	PESERTA	PESERTA YG SUDAH BEKERJA
1	Pelatihan Barista	TULANGAN	16	6
2	Pelatihan Barista	WONOAYU	16	5
3	Pelatihan Barista	PORONG	16	5
4	Pelatihan Barista	KRIAN	16	8
5	Pelatihan Barista	KREMBUNG	16	5
6	Pelatihan Barista	SUKODONO	16	5
7	Pelatihan Barista	JABON	16	5
8	Pelatihan Spa Reflesiologi	TULANGAN	16	5
9	Pelatihan Spa Reflesiologi	WONOAYU	16	3
10	Pelatihan Spa Reflesiologi	PORONG	16	7
11	Pelatihan Spa Reflesiologi	KRIAN	16	7
12	Pelatihan Spa Reflesiologi	KREMBUNG	16	3
13	Pelatihan Spa Reflesiologi	SUKODONO	16	7
14	Pelatihan Spa Reflesiologi	JABON	16	7
15	Pelatihan Menjahit Dasar	WONOAYU	16	15
16	Pelatihan Menjahit Dasar	PORONG	16	13
17	Pelatihan Menjahit Dasar	TULANGAN	16	7
18	Pel.Tata Rias Pengantin	TULANGAN	16	8
19	Pel.Tata Rias Pengantin	PORONG	16	12
20	Pel.Tata Rias Pengantin	KREMBUNG	20	18
21	Pel.Pendingin AC	KRIAN	20	10
22	Pelatihan Barista	CANDI	20	6
23	Pelatihan Barista	TANGGULANGIN	20	10
24	Pelatihan Barista	BALONGBENDO	20	8
25	Pelatihan Barista	WATESARI KEC. BALONGBENDO	20	7
26	Pelatihan Barista	PRAMBON	20	5
27	Pelatihan Barista	DS. KEMUNING KEC. TARIK	20	9
28	Pelatihan Barista	TARIK	20	5
29	Pelatihan Spa Reflesiologi	CANDI	20	5

30	Pelatihan Spa Reflesiologi	SIDOARJO	20	5
31	Pelatihan Spa Reflesiologi	TANGGULANGIN	20	5
32	Pel.Tata Rias Pengantin	SEDATI	16	10
33	Pel.Tata Rias Pengantin	WARU	16	10
34	Pel.Tata Rias Pengantin	BUDURAN	16	12
35	Pel.Tata Rias Pengantin	TANGGULANGIN	16	10
36	Pelatihan Barista	SEDATI	16	8
37	Pelatihan Barista	WARU	16	9
38	Pelatihan Barista	BUDURAN	16	11
39	Pelatihan Barista	TANGGULANGIN	16	8
40	Pelatihan Barista	DS. BECIRONGENGOR KECAMATAN WONOAYU	16	10
41	Pelatihan Spa Reflesiologi	GEDANGAN	16	10
42	Pelatihan Spa Reflesiologi	SEDATI	16	16
43	Pelatihan perawatan kulit	JABON	20	20
44	Pelatihan pemijatan bayi	JABON	20	20
45	Pelatihan Pastry	JABON	20	20
46	Pelatihan Spa Reflesiologi	JABON	20	20
47	Pelatihan pemijatan bayi	CANDI	20	20
48	Pelatihan Pastry	CANDI	20	20
49	Pelatihan Spa Reflesiologi	CANDI	20	20
		PESERTA PELATIHAN	**860**	
		PESERTA SUDAH BEKERJA		**480**

Perkembangan persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.37

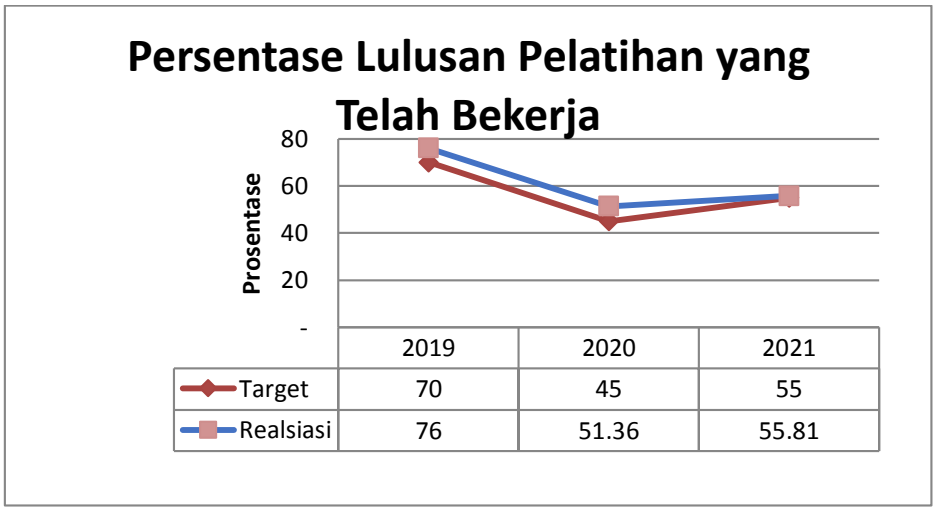

Sumber Data : Disnaker Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak lulusan pelatihan yang mendapatkan pekerjaan, yaitu :

- Sinergitas antara asesor dengan instruktur pelatihan.
- Kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha terkait jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja.

Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan

Jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan di tahun 2021 sebanyak 18.447 orang dari seluruh pencari kerja yang ada sebanyak 29.059 orang, sehingga persentase pencari kerja yang telah ditempatkan di tahun 2021 tercapai 63,48% dari target 60% atau capaian 105,8%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 51,61% maka terdapat peningkatan angka 11,87 atau sekitar 23%.

Perkembangan persentase pencari kerja yang telah ditempatkan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.38

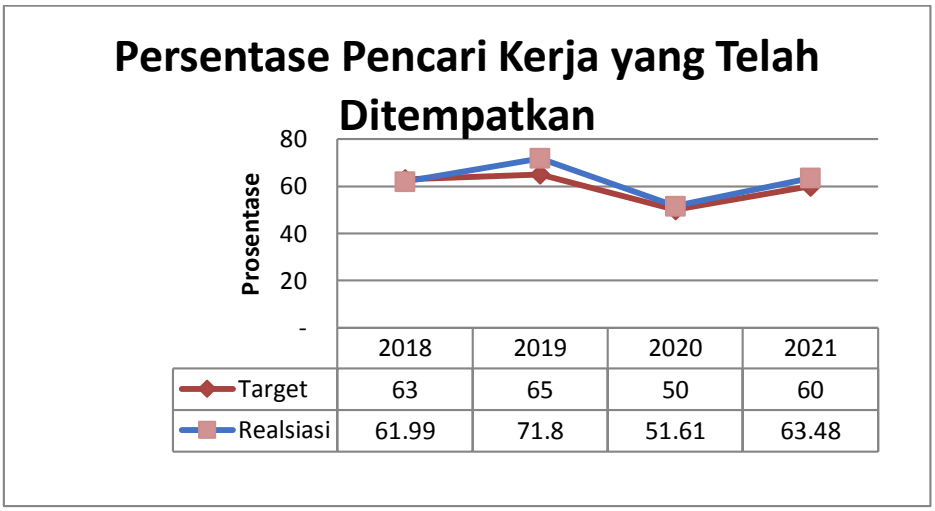

Sumber Data : Disnaker Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak pencari kerja yang ditempatkan, yaitu Optimalisasi fungsi perantaraan kerja dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan, job matching, job fair, konsultasi karir untuk mengetahui minat dan bakat disesuaikan dengan lowongan yang ada.

Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB)

Perjanjian Besama (PB) merupakan jalan keluar yang ditempuh dalam hubungan industrial agar hubungan kerja dapat berjalan harmonis antara pihak pengusaha / perusahaan dan pekerja. Sebagaimana penyelesaian Hubungan Industrial harus diselesaikan maksimal 30 hari kerja terhitung dari pelimpahan berkas penyelesaian hubungan industrial ke Mediator Hubungan Industrial.

Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang terlaporkan di tahun 2021 sebanyak 116 kasus dan yang telah terselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 21 kasus, sehingga persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselsaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) di tahun 2021 tercapai 18,10% dari target 10% atau capaian 181%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 25% maka terdapat penurunan angka 6,9 atau sekitar 27,6%. Penurunan dimaksud disebabkan karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial pihak-pihak lebih memilih diberikan anjuran tertulis oleh Mediator Hubungan Industrial untuk upaya hukum lebih lanjut.

Perkembangan persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselsaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.39

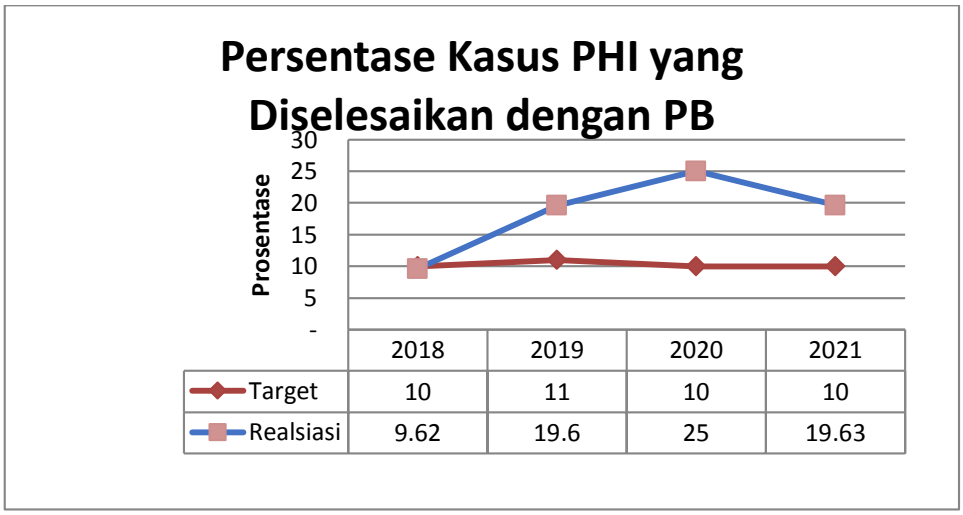

Sumber Data : Disnaker Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar perselisihan Hubungan Industrial dapat diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama, yaitu :

- Pihak yang berselisih di tingkat mediasi diharuskan untuk diberi kuasa penuh dalam pengambil keputusan.
- Memperketat proses pemanggilan mediasi agar tepat waktu sesuai ketentuan.

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **100.000 Lapangan Kerja Baru**

  - **Pelatihan Berbasis Kompetensi**

    Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 860 orang peserta dan terealisasi 860 orang peserta yang mengikuti. Adapun pelatihan-pelatihan dimaksud meliputi :

    1. Pelatihan Pendingin AC yang diikuti oleh 20 peserta
    2. Pelatihan Tata Rias Pengantin yang diikuti oleh 116 peserta
    3. Pelatihan Barista yang diikuti oleh 332 peserta
    4. Pelatihan Menjahit dasar yang diikuti 48 peserta
    5. Pelatihan Pastry yang diikuti 40 peserta
    6. Pelatihan Pemijatan Bayi yang diikuti 40 peserta
    7. Pelatihan Perawatan Kulit yang diikuti 20 peserta
    8. Pelatihan Spa Refleksiologi yang diikuti 244 peserta

  - **Penempatan Tenaga Kerja**

    Dari target 29,059 pencari kerja yang hendak ditempatkan di tahun 2021, telah terealiasi 18.447 orang yang ditempatkan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Adapun data penempatan kerja dimaksud, sebagaimana tabel berikut :

Penempatan Tenaga Kerja:		2021	
1	**Antar Kerja Lokal (AKL)**		
	a. Perekrutan di Perusahaan	541	orang
	b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Baru Bekerja	10.562	orang
	c. Bursa kerja Terbuka Disnaker Sidoarjo		Tidak ada Jobfair
	d. Bursa kerja Khusus (BKK)	5.631	orang
	e. BLK Pemerintah	128	orang
	f. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)		
	g. Lembaga Pelatihan kerja (LPK) Swasta	1.016	orang
	h. Pelatihan APBD	480	orang
2	**Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)**		

3	**Antar Kerja Antar Negara (AKAN)**		
	b. Pemberang-katan PMI	46	orang
	c. Jumlah PMI Kabupaten Sidoarjo	43	orang
	TOTAL	18.447	
Pencari kerja			
1	Data AK1	3.240	orang
2	Pekerja Terdampak PHI	3.132	orang
3	Peserta Pelatihan	840	orang
4	Peserta pelatihan BLK	544	orang
5	Peserta pelatihan LPK	7.997	orang
6	Lulusan SMK 2021	13.306	
	TOTAL	29.059	

c. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** dengan anggaran sebesar Rp.5.056.348.178,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.943.216.000 atau 97,76%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	83 persen	97,41 persen	117,36
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	21 persen	21 persen	100%

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	a. 860 orang	a. 860 orang	100%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan yang mendapatkan sosialisasi	40 orang/lembaga	40 orang/lembaga	100%
	Jumlah lembaga pelatihan yang di monev	40 orang/lembaga	40 orang/lembaga	100%

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti uji kompetensi	812 orang	812 orang	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3.845.279.900,00	3.735.657.500,00	97,15
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	141.158.370,00	141.102.500,00	99,96
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.069.909.908,00	1.066.456.000,00	99,68

2. **Program Penempatan Tenaga Kerja** dengan anggaran sebesar Rp.305.521.529 dan terealisasi sebesar Rp.304.204.200 atau 99,57%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
persentase pencari kerja yang telah difasilitasi penempatannya	60%	63,48%	105,8

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	500 orang	513 orang	102,6
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon PMI yang mendapatkan sosialisasi	30 orang	30 orang	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	284.286.274,00	283.120.000,00	99,59
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	21.235.255,00	21.084.200,00	99,29

3. **Program Hubungan Industrial** dengan anggaran sebesar Rp.1.098.282.633 dan terealisasi sebesar Rp.1.080.438.700 atau 98,38%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	10 Persen	18,10 Persen	181

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang melaksanakan syarat kerja sesuai ketentuan	75	81	108
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diproses	100	100	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	849.619.705,00	832.512.600,00	97,99%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	248.662.928,00	247.926.100,00	99,70%

4. **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** dengan anggaran sebesar Rp 842.000 dan terealisasi sebesar Rp 800.000 atau 95,01%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase transmigran yang berhasil (bekerja sendiri/membuka lapangan usaha atau ke orang lain)	20%	20%	100

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lokasi transmigran yang dimonev	1 Lokasi	1 Lokasi	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	842.000,00	800.000,00	95,01%

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan sosial, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Dinas Tenaga Kerja agar lebih banyak mengalokasikan anggaran/dana untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten sidoarjo telah mengalokasikan anggaran untuk jobfair, jobmatching, serta bimtek fbkk dan bimtek penempatan untuk bisa meningkatkan penempatan bagi tenaga kerja

2	Dinas tenaga kerja agar membuat Roadmap untuk menindaklanjuti Big Data yang dibuat oleh BAPPEDA	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tengah mempersiapkan aplikasi yang nantinya akan memfasilitasi berbagai layanan disnaker, informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta database ketenagakerjaan sesuai dengan peta proses bisnis yang telah disususn

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Status Desa di Kabupaten Sidoarjo menjadi Desa Mandiri.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase Desa Mandiri	10,25%	10,25%	100%
2	Persentase Desa Maju	36,65%	48,76%	133,04%

Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Pengukuran status desa diformulasikan melalui Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu sebuah indeks komposit (kombinasi) yang dibentuk dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi.

Desa di Kabuaten Sidoarjo yang berstatus Desa Mandiri di Tahun 2021 sebanyak 33 Desa dari 322 Desa yang ada atau tercapai 10,25% dari target 10,25% sehingga capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 0,62% maka terdapat peningkatan angka 31 atau sekitar 9,63%. Desa yang berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun 2021, antara lain:

1. Desa JENGGOT Kecamatan KREMBUNG
2. Desa PLOSO Kecamatan KREMBUNG

3. Desa KREMBUNG Kecamatan KREMBUNG
4. Desa LEMUJUT Kecamatan KREMBUNG
5. Desa KEDUNGSOLO Kecamatan PORONG
6. Desa KALISAMPURNO Kecamatan TANGGULANGIN
7. Desa SUGIHWARAS Kecamatan CANDI
8. Desa SIMOKETAWANG Kecamatan WONOAYU
9. Desa SEDENGANMIJEN Kecamatan KRIAN
10. Desa JATIKALANG Kecamatan KRIAN
11. Desa PONOKAWAN Kecamatan KRIAN
12. Desa WAGE Kecamatan TAMAN
13. Desa KEDUNGTURI Kecamatan TAMAN
14. Desa TAWANGSARI Kecamatan TAMAN
15. Desa WILAYUT Kecamatan SUKODONO
16. Desa KEBONAGUNG Kecamatan SUKODONO
17. Desa ANGGASWANGI Kecamatan SUKODONO
18. Desa PEKARUNGAN Kecamatan SUKODONO
19. Desa SUKODONO Kecamatan SUKODONO
20. Desa KLOPOSEPULUH Kecamatan SUKODONO
21. Desa MASANGANWETAN Kecamatan SUKODONO
22. Desa MASANGANKULON Kecamatan SUKODONO
23. Desa PANJUNAN Kecamatan SUKODONO
24. Desa BANGAH Kecamatan GEDANGAN
25. Desa PEPELEGI Kecamatan WARU
26. Desa TROPODO Kecamatan WARU
27. Desa TAMBAKSAWAH Kecamatan WARU
28. Desa TAMBAKREJO Kecamatan WARU
29. Desa KEPUHKIRIMAN Kecamatan WARU
30. Desa BERBEK Kecamatan WARU
31. Desa JANTI Kecamatan WARU
32. Desa MEDAENG Kecamatan WARU
33. Desa BUNGURASIH Kecamatan WARU

Perkembangan status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.B.3
Capaian Indeks Desa Membangun Tahun 2020
Kabupaten Sidoarjo

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	IDM 2020				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	TARIK	20	0	1	19	0	0
2	PRAMBON	20	0	7	13	0	0
3	KREMBUNG	19	0	10	9	0	0
4	PORONG	13	0	1	11	1	0
5	JABON	15	0	3	11	1	0
6	TANGGULANGIN	19	0	7	11	0	1
7	CANDI	24	0	17	7	0	0
8	SIDOARJO	10	0	2	8	0	0
9	TULANGAN	22	0	9	13	0	0
10	WONOAYU	23	0	13	10	0	0
11	KRIAN	19	0	15	4	0	0
12	BALONGBENDO	20	0	2	18	0	0
13	TAMAN	16	0	4	12	0	0
14	SUKODONO	19	0	13	6	0	0
15	BUDURAN	15	0	11	4	0	0
16	GEDANGAN	15	1	6	8	0	0
17	SEDATI	16	0	6	10	0	0
18	WARU	17	1	10	6	0	0
JUMLAH		**322**	**2**	**137**	**180**	**2**	**1**

Sumber Data : Dinas PMD Kab. Sidoarjo

Tabel III.B.4
Capaian Indeks Desa Membangun Tahun 2021
Kabupaten Sidoarjo

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	IDM 2021				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	TARIK	20	0	1	19	0	0
2	PRAMBON	20	0	7	13	0	0
3	KREMBUNG	19	4	10	5	0	0
4	PORONG	13	1	11	0	1	0
5	JABON	15	0	3	12	0	0
6	TANGGULANGIN	19	1	6	11	0	1
7	CANDI	24	1	19	4	0	0
8	SIDOARJO	10	0	8	2	0	0

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	IDM 2021				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
9	TULANGAN	22	0	11	11	0	0
10	WONOAYU	23	1	19	3	0	0
11	KRIAN	19	3	12	4	0	0
12	BALONGBENDO	20	0	5	15	0	0
13	TAMAN	16	3	6	7	0	0
14	SUKODONO	19	9	4	6	0	0
15	BUDURAN	15	0	13	2	0	0
16	GEDANGAN	15	1	8	6	0	0
17	SEDATI	16	0	7	9	0	0
18	WARU	17	9	7	1	0	0
JUMLAH		**322**	**33**	**157**	**130**	**1**	**1**

Sumber Data : Dinas PMD Kab. Sidoarjo

Adapun tren capaian persentase desa mandiri dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.40

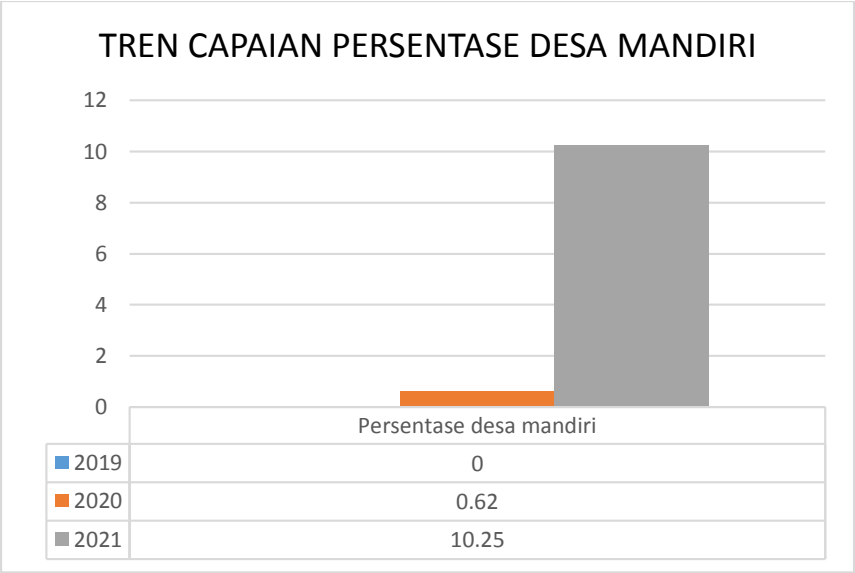

Sumber Data : Dinas PMD Kab. Sidoarjo

Upaya yang telah dilakukan agar semakin banyak Desa yang berstatus menjadi Desa Mandiri, yaitu : Mendorong Desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa, diarahkan antara lain untuk :

- Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas BUMDesa / BUMDesa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa.

- Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa / BUMDesa Bersama.
- Pengembangan Desa Wisata yang dikelola BUMDesa / BUMDesa Bersama.
- Pengembangan usaha ekonomi produktif Desa melalui pemanfaatan TTG yang ramah lingkungan.
- Mendorong eks-PNPM Mandiri Perdesaan dalam rangka pelestarian dan keberlanjutan program yang inti dari program eks-PNPM Mandiri Perdesaan adalah pemberdayaan masyarakat dan pengentasan segera menyesuaikan regulasi PP No. 11 Th. 2021.

Persentase Desa Maju

Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa di Kabuaten Sidoarjo yang berstatus Desa Maju di Tahun 2021 sebanyak 157 Desa dari 322 Desa yang ada atau tercapai 48,76% dari target 36,65% sehingga capaian 133,04%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 42,55% maka terdapat peningkatan angka 20 atau sekitar 6,21%.

Adapun tren capaian persentase desa maju dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.41

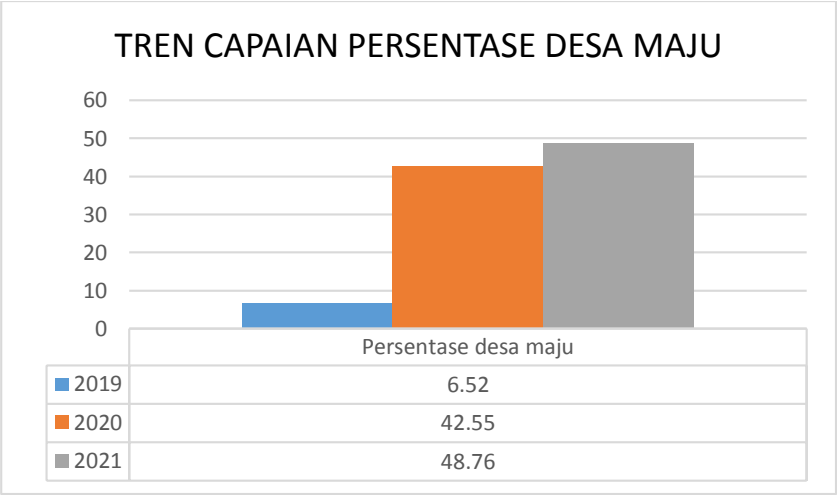

Sumber Data : Dinas PMD Kab. Sidoarjo

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera**

  Telah dilakukan fasilitasi pengelolaan keungan desa dalam bentuk Workshop pengelola keuangan desa untuk seluruh Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan sasaran peserta Kecamatan 18 peserta dan Kepala Desa sejumlah 322 peserta dengan total 340 peserta yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 April 2021 bertempat di Hotel The Singhasari Resort Batu.

c. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Program Administrasi Pemerintahan Desa** dengan anggaran sebesar Rp.6.788.100.583 dan terealisasi sebesar Rp.6.645.495.221 atau 97,90%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal kategori berkembang	72,05%	99,38%	137,93%
Persentase Lembaga Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan BUMDES Mandiri	28%	28,57%	102,04%
Persentase Desa yang melaksanakan Tata kelola Pemerintahan Desa sesuai ketentuan	95%	95,03%	100,03%

   Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi pemerintah Desa sesuai ketentuan	95%	95%	100%

	Persentase desa yang menyusun tatakelola keuangan, aset dan kekayaan sesuai ketentuan	95%	100%	105,26 %
	Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan BUMDes Berkembang	16%	16,33%	102,06 %

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	6.788.100.583	6.645.495.221	97,90%

2. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** dengan anggaran sebesar Rp.1.776.018.084 dan terealisasi sebesar Rp.1.670.857.656 atau 94,08%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Lembaga Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan UPPKS Mandiri	33%	39,3%	119,09%
Persentase Lembaga Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan UED-SP Mandiri	29%	34,35%	118,45%
Persentase Lembaga Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan P3EL Mandiri	26%	32,54%	125,15%

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat	Persentase Lembaga/organisasi masyarakat Desa/Kelurahan yang mempunyai peran aktif	95%	95%	100%

Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	dalam pembangunan Desa/Kelurahan			
	Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan P3EL Berkembang	43%	43,25%	100,58%
	Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan UED-SP Berkembang	48%	48,09%	100,19%
	Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan UPPKS Berkembang	43%	43,23%	100,53%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.776.018.084	1.670.857.656	94,08%

d. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

No.	Perda / Perbup	Tentang
1	Perda Nomor 07 Tahun 2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
2	Perbup Nomor 007 Tahun 2021	Tata Cara Penghitungan Dan Pembagian Besaran Dana Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021
3	Perbup Nomor 008 Tahun 2021	Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021
4	Perbup Nomor 010 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa

		Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo
5	Perbup Nomor 011 Tahun 2021	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
6	Perbup Nomor 013 Tahun 2021	Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa
7	Perbup Nomor 020 Tahun 2021	Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021
8	Perbup Nomor 069 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
9	Perbup Nomor 071 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
10	Perbup Nomor 075 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021
11	Perbup Nomor 091 Tahun 2021	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
12	Perbup Nomor 096 Tahun 2021	Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022

e. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan dan anak.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Pembangunan Gender	94,32	94,13 *	99,80
2	Indeks Pemberdayaan Gender	64,85 poin	67,13* poin	103,52
3	Persentase kasus kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	100%	100%	100

*Ket : * Capaian Sementara*

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.

Pada tahun 2021 capaian sementara Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo adalah 94,13 apabila dibandingkan dengan target yaitu 94,32 maka tercapai 99,80%. Capaian sementara tersebut adalah realisasi tahun 2020 dikarenakan untuk capaian pada tahun 2021 masih dalam proses penghitungan BPS.

Adapun perhitungan masing-masing komponen Indeks Pembangunan Gender, adalah sebagai berikut :

Indikator	2020	2021
Angka Harapan Hidup (tahun)	74,04	74,06
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,93	14,94
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,50	10,72
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Rp.)	14 458,00	14 578,00

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Indeks Pembangunan Gender dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.42

Indeks Pembangunan Gender

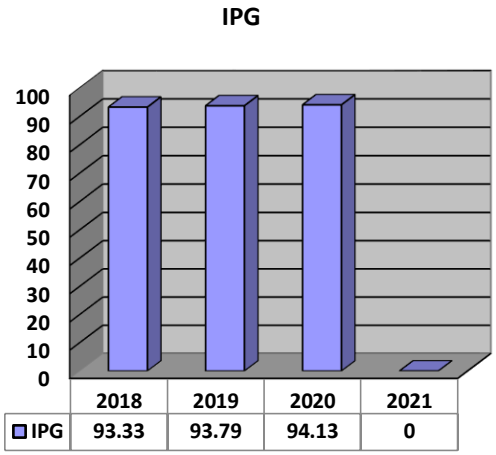

Sumber Data : Dinas P3AKB Kab.Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender, antara lain :

- Melaksanakan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
- Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi

Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan

Pada tahun 2021 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sidoarjo adalah N/A dikarenakan masih dalam proses penghitungan BPS dalam apabila dibandingkan

dengan target yaitu 94,32 maka tercapai N/A%. Sedangkan realisasi tahun 2020 yaitu 94,13 maka belum dapat dilakukan perbandingan apapun.

Adapun perhitungan masing-masing komponen Indeks Pemberdayaan Gender, adalah sebagai berikut :

Indikator	Laki-Laki	Perempuan
Keterwakilan Perempuan di Parlemen	34	16
Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi	-	-
Perkiraan Pendapatan	-	-

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.43

Indeks Pemberdayaan Gender

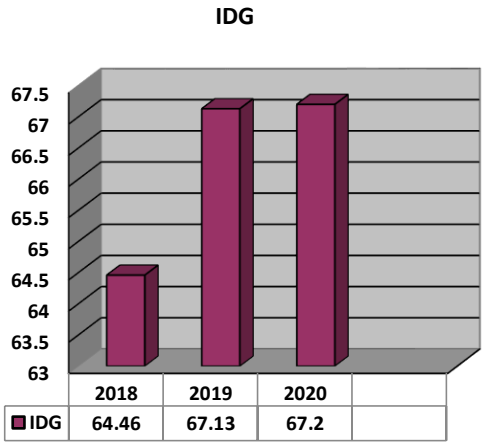

Sumber Data : Dinas P3AKB Kab.Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender, antara lain :

- Melaksanakan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
- Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi

Persentase kasus kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan

Pada tahun 2021 jumlah kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan sebanyak 52 kasus dan sebanyak 52 kasus telah terselesaikan, atau sekitar 100%. Apabila dibandingkan dengan target 40 % maka tercapai 100%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 100% maka tidak terdapat perubahan capaian.

Berikut data rinciaan kasus kekerasan dan traficking beserta penyelesaiannya yang dilaporkan pada tahun 2021 :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang dihasilkan	160	163	101.88

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan penyelesaian kasus kekerasan dan traficking pada perempuan dan anak dapat dilihat sebagaimana grafik berikut:

No	Kegiatan	2019	2020	2021
1	Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	154	140	163

Adapun upaya yang dilakukan agar kasus kekerasan dan traficking pada perempuan dan anak tidak terjadi, antara lain :

- Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi
- Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi
- Melaksanakan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** dengan anggaran sebesar Rp.303.017.950,00 dan terealisasi sebesar Rp.282.000.980,00 atau 93,06%.

   Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Lembaga/instansi yang di bina 2. Jumlah program/kegiatan yang dievaluasi PUG nya	1.60 lembaga 2.60 lembaga	1.60 lembaga 2.60 lembaga	1.100% 2.100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dalam partisipasi bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	64%	64%	100%

   Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	216.282.039,00	198.498.127,00	91,78
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.447.761,00	44.447.703,00	100

2. **Program Perlindungan Perempuan** dengan anggaran sebesar Rp.1.144.549.970,00 dan terealisasi sebesar Rp.835.312.499,00 atau 72,98%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Prosentase Kasus Kekerasan dan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100%	100%	100%
Jumlah rekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan	40	53	100%

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan dan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100%	100%	100%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan	40 Rekomendasi	53 Rekomendasi	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan dan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100%	100%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	159.168.950,00	158.303.896,00	99,46
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	978.631.020,00	670.258.603,00	68,49

3. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)** dengan anggaran sebesar Rp.296.810.458,00 dan terealisasi sebesar Rp.270.047.169,00 atau 90,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	364 Lembaga	364 Lembaga	100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	364 Lembaga	364 Lembaga	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	296.810.458,00	270.047.169,00	90,98

4. **Program Perlindungan Khusus Anak** dengan anggaran sebesar Rp.296.810.458,00 dan terealisasi sebesar Rp.270.047.169,00 atau 90,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Prosentase Kasus Kekerasan dan Trafficking Anak yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Prosentase Kasus Kekerasan dan Trafficking Anak yang diselesaikan 2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100% 100%	100% 100%	100% 100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Prosentase Kasus Kekerasan dan Trafficking Anak yang diselesaikan 2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100% 100%	100% 100%	100% 100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	195.821.500,00	22.230.000,00	11,35
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.844.825,00	79.229.055,00	91,23

e. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

f. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Dinas P3AKB bekerjasama dengan OPD terkait agar mengalokasikan anggaran untuk program responsif gender serta meningkatkan koordinasi antar OPD agar mempunyai pemahaman dan komitmen terkait pengarusutamaan gender	• Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender • Pengembangan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) • Peningkatan Kapasitas perempuan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik • Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Sidoarjo

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui Keluarga Berencana (KB) dan menekan pengendalian penduduk.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase PUS yang ikut KB	81.61%	80%	97,92%
2	Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan	0.60%	1,48%	40%
3	CBR (Crude Birth Rate)	16/1000 Penduduk	12,94/1000* Penduduk	100%

Persentase PUS yang ikut KB

Sasaran utama pelayanan Keluarga Berencana adalah pasangan usia subur (PUS) yang berusia 15 s.d 49 tahun.

Jumlah Pasangan Usia Subur yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah sebanyak 2955 pasangan sedangkan yang aktif mengikuti program Keluarga Berencana sebanyak 2364 pasangan atau sekitar 97,92%. Apabila dibandingkan dengan target yaitu 81,61% maka tercapai 80%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 79% maka terdapat peningkatan sekitar 1%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk ikut KB

Adapun alasan yang masih ditemukan pada Pasangan Usia Subur yang tidak aktif mengikuti Program Keluarga Berencana, yaitu :

1. Kurang informasi mengenai KB
2. Salah informasi mengenai KB
3. Pemahaman nilai agama yang masih diartikan lain

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Pasangan Usia Subur yang aktif mengikuti Program Keluarga Berencana dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.44

Perkembangan Pasangan Usia Subur

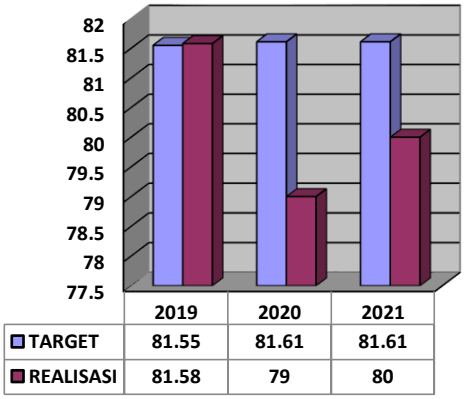

Sumber Data : Dinas P3AKB Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan agar semaki banyak Pasangan Usia Subur yang aktif mengikuti Program Keluarga Berencana, antara lain :

- Aktif melaksanakan promosi KB
- Melakukan pembinaan terhadap petugas KB di lapangan
- Memberikan pelayanan yang semakin mendekat ke masyarakat

Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dimana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional.

Pada tahun 2021 jumlah perempuan di Kabupaten Sidoarjo yang pada perkawinan pertamanya masih berusia dibawah 21 tahun sebanyak 39 orang, sehingga persentase pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Sidoarjo adalah 1,48% dari target 0.60% sehingga tercapai 40%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 0,69 % maka terdapat penurunan sekitar 0,79%. penurunan tersebut disebabkan oleh Pandemi Covid19 yang menyebabkan edukasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan sedikit terkendala.

Adapun perkawinan yang masih di bawah usia dimaksud, paling banyak dilatarbelakangi oleh alasan, sebagai berikut :

1. Latar belakang pendidikan
2. Edukasi yang kurang mengenai PUP
3. Menghindari zina (latar belakang agama)

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.45

Perkembangan Pendewasaan Usia Perkawinan

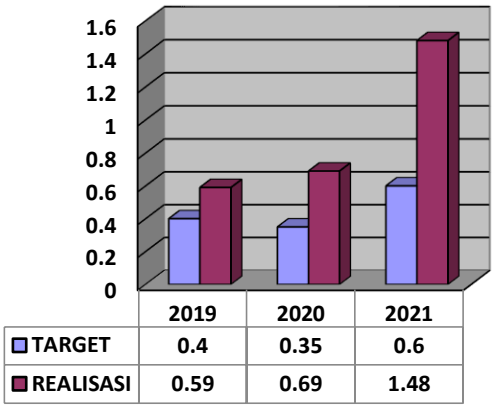

Sumber Data : Dinas P3AKB Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan agar tidak ada lagi perkawinan yang masih berada di bawah umur, antara lain :

- Menggiatkan Edukasi mengenai PUP
- Kegiatan sosialisasi mengenai PUP digiatkan lagi.

Crude Birth Rate

Crude Birth Rate (CBR) adalah Angka Kelahiran Kasar, yaitu yaitu banyaknya bayi yang lahir hidup setiap 1.000 penduduk selama 1 tahun. Tujuan dari pengukuran Crude Birth Rate adalah untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu.

Pada tahun 2021 Angka Kelahiran Kasar di Kabupaten Sidoarjo adalah 12,94 dari target 16 sehingga tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 12,98 maka terdapat peningkatan angka 0,04 atau sekitar 99,69%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki aanak yang tidak terlalu banyak.

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Angka Kelahiran Kasar di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.46

Perkembangan Angka Kelahiran Kasar

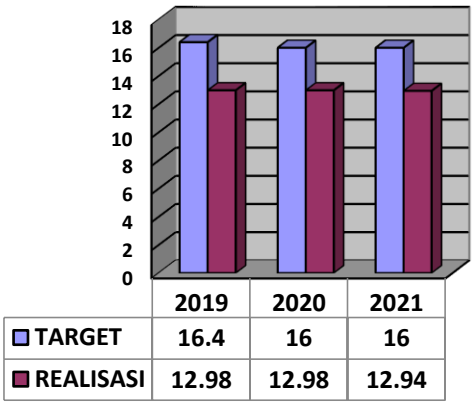

Sumber Data : Dinas P3AKB Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penduduk, antara lain :

- Memberikan edukasi mengenai pentingnya kontrasepsi
- Pembinaan lini lapangan secara terus menerus

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Pengendalian Penduduk** dengan anggaran sebesar Rp.1.145.870.193,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.091.168.528,00 atau 95,23%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan	7%	7%	100%

Program tersebut didukung oleh 5 (lima) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS,	Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang diadvokasi	100 Orang	100 Orang	100%

Jalur Nonformal dan Informal				
Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki profil kependudukan	355 Desa	355 Desa	100%
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah kajian yang disusun berdasarkan isu-isu strategis kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data kependudukan percontohan yang dibentuk	42 Rumah data	42 Rumah data	100%
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah petugas dan kader yang dibina	353 Orang	353 Orang	100%
	Jumlah petugas Pokja rumah data kependudukan	210 Orang	210 Orang	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	52.921.600,00	52.921.600,00	100,00
Perumusan Parameter Kependudukan	36.030.725,00	35.449.725,00	98,39
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	200.853.875,00	200.287.585,00	99,72
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	210.940.955,00	208.961.009,00	99,06
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	645.123.038,00	593.548.609,00	92,01

2. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** dengan anggaran sebesar Rp.14.374.300.401,00 dan terealisasi sebesar Rp.12.932.298.988,00 atau 89,97%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Pencapaian Peserta KB Baru	90	67,6	75,56
Persentase Pencapaian KB Aktif	100	79,8	79,8

Program tersebut didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang diadvokasi	100 Orang	100 Orang	100%
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta yang mendapat KIE	300 orang	300 orang	100%
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah sarana KIE yang tersedia dan didistribusikan	100 Buah	100 Buah	100%
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Peserta yang Hadir	200 Orang	200 Orang	100%
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD yang dibina	349 Orang	349 Orang	100%
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah peserta kegiatan	80 orang	80 orang	100%
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Pencapaian Peserta KB Aktif	100%	100%	100%
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah peserta kegiatan	300 Orang	300 Orang	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	19.775.000,00	18.015.000,00	91,10
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	73.116.453,00	69.346.500,00	94,84
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	22.848.869,00	13.216.000,00	57,84
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	8.085.000.000,00	8.085.000.000,00	100,00
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	415.731.280,00	361.649.500,00	86,99

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5.726.027.799,00	4.359.276.988,00	76,13
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	31.801.000,00	25.795.000,00	81,11

3. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** dengan anggaran sebesar Rp.479.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.448.400.500,00 atau 93,54%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Kelompok Bina Keluarga Yang Mandiri	75	75,78	100%

Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilatih	500 orang	500 orang	100%
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta bina keluarga yang dibina	500 orang	500 orang	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	428.500.000,00	401.700.500,00	93,75
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	50.850.000,00	46.700.000,00	91,84

BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Urusan Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Pangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan daerah.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan Pangan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		% Capaian
		TARGET	REALISASI	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,40	89,80	101,58%
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89,67	89,89	100,24%

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi merupakan indicator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya konsumsi masyarakat. Pada tahun 2021 skor PPH konsumsi pangan Kabupaten Sidoarjo adalah 89,80 atau melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 88,40. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 89,70 maka terdapat peningkatan angka 0,10. Hal ini menunjukan bahwa konsumsi pangan masyarakat tahun 2021 semakin beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Skor PPH Konsumsi Pangan dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.47

Perkembangan Skor PPH Konsumsi

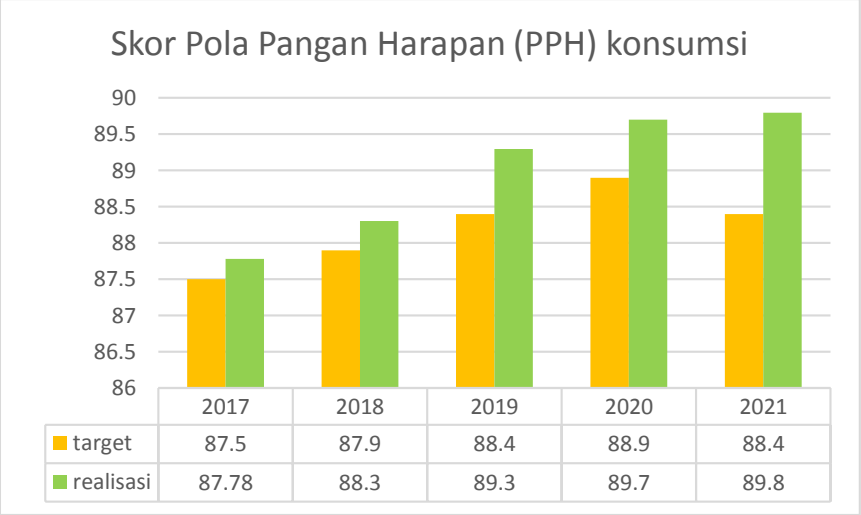

	2017	2018	2019	2020	2021
target	87.5	87.9	88.4	88.9	88.4
realisasi	87.78	88.3	89.3	89.7	89.8

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Untuk meningkatkan skor PPH pada tahun-tahun yang akan datang, maka perlu upaya untuk meningkatkan konsumsi kelompok pangan yang mempunyai capaian skor PPH kelompok pangan yang lebih rendah dari skor AKE maksimum dalam perhitungan skor PPH. Kelompok pangan yang harus ditingkatkan konsumsinya tersebut adalah:

1. Kelompok padi-padian
2. Kelompok umbi-umbian
3. Kelompok sayur dan buah
4. Kelompok kacang-kacangan
5. Kelompok gula
6. Kelompok buah/biji berlemak

Berdasarkan uraian tersebut, rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pengembangan pangan wilayah untuk meningkatkan skor PPH berbasis konsumsi pangan aktual tahun 2021 adalah dengan bersinergi pada pelaksanaan program P2KP sebagai berikut:

1. Program Internalisasi
2. Pengembangan Bisnis Pangan Lokal
3. Pemberdayaan Kelompok Wanita

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Ketersediaan dimaksud adalah ketersediaan Energi / Kalori, protein dan lemak yang dihasilkan dari 11 kelompok bahan pangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat.

Pada tahun 2021 Skor PPH Ketersediaan Pangan Kabupaten Sidoarjo adalah 89,89 apabila dibandingkan dengan target yaitu 89,67. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 89,87 maka terdapat peningkatan angka 0,02 atau sekitar 0,3%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh skor AKE (Angka Kecukupan Energi) yang melebihi skor PPH (Pola Pangan Harapan) maximal. Dengan skor PPH Ketesediaan sebesar 89,89 dimaksud, menggambarkan bahwa Kabupaten Sidoarjo mempunyai kelebihan ketersediaan dalam kelompok bahan pangan tertentu yaitu kelompok padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah / biji berminyak serta gula.

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Skor PPH Ketersediaan Pangan dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.48

Perkembangan Skor PPH Ketersediaan

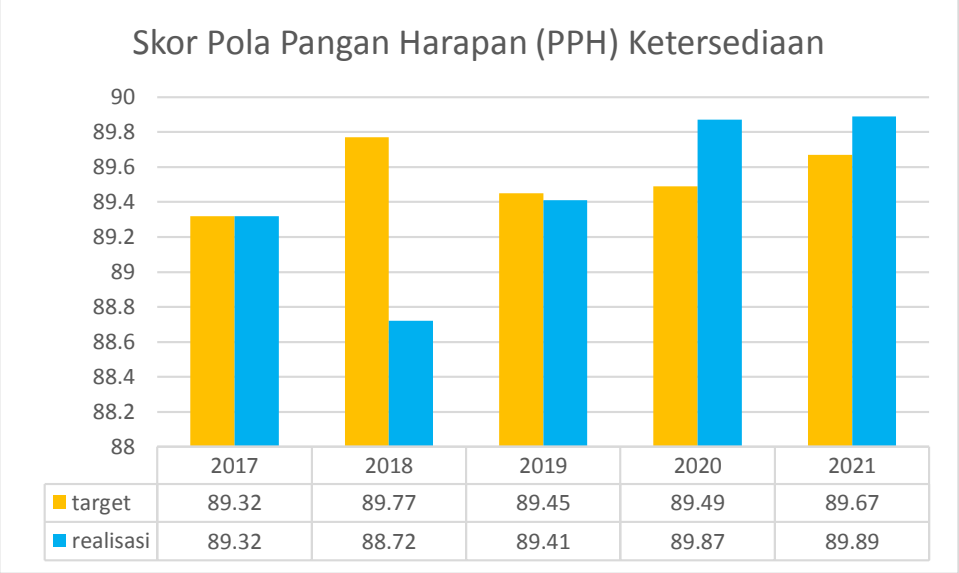

	2017	2018	2019	2020	2021
target	89.32	89.77	89.45	89.49	89.67
realisasi	89.32	88.72	89.41	89.87	89.89

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Adapun data ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2021, sebagaimana table berikut :

Tabel III.B.5

PPH (Pola Pangan Harapan) Ketersediaan Kabupaten Sidoarjo

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% aktual	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks (Ideal)	GAP SKOR AKE	Ket
1.	Padi-padian	1.327	51,7	53,3	0,5	27,7	25,0	25,0	(2,7)	+
2.	Umbi-umbian	38	1,5	1,6	0,5	0,8	0,8	2,5	(1,7)	_
3.	Pangan Hewani	325	13,2	13,5	2,0	27,1	24,0	24,0	3,1	+
4.	Minyak dan Lemak	423	17,3	17,6	0,5	8,8	5,0	5,0	3,8	+
5.	Buah/biji berminyak	98	4,0	4,1	0,5	2,0	1,0	1,0	1,0	+
6.	Kacang-kacangan	86	3,5	3,6	2,0	7,2	7,2	10,0	(2,8)	_
7.	Gula	155	6,3	6,5	0,5	3,2	2,5	2,5	0,7	+
8.	Sayuran dan buah	117	4,8	4,9	5,0	24,4	24,4	30,0	(5,6)	_
9	Lain-Lain	-	-	-		-	-	-	-	
	Jumlah	**2.569**	**100,0**	**102,1**		**101,2**	**89,89**	**100,0**		

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan Skor PPH Ketersediaan, antara lain :

Kelompok pangan yang menunjukkan kekurangan produksi adalah kelompok padi-padian, makanan berpati, buah/biji berminyak, daging, telur, serta lemak dan minyak. Kelompok pangan ini harus ditingkatkan produksinya untuk mencapai kemandirian pangan di Kabupaten Sidoarjo.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian skor PPH Ketersediaan dan meningkatkan produksi kelompok pangan yang masih tergantung dari luar Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Perlu upaya peningkatan ketersediaan kelompok pangan yaitu kelompok padi-padian, umbi-umbian serta sayur dan buah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas dan lahan untuk budidaya umbi-umbian. Juga perlu upaya budidaya sayur dan buah di lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan secara yang intensif seperti pekarangan dan lahan tidur untuk meningkatkan ketersediaan sayur dan buah.

2. Sebagian besar ketersediaan pangan di Kabupaten Sidoarjo bukan berasal dari produksi pangan di Kabupaten Sidoarjo sendiri tetapi berasal dari luar wilayah, Kelompok pangan yang secara mandiri produksinya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi adalah gula dan ikan. Kelompok padi-padian walaupun ketersediaan mencukup tetapi sebagian berasal dari stok dan dari luar seperti terigu yang semuanya impor dan sebagian padi. Kelompok umbi-umbian sama sekali tidak menunjukkan data produksi di Kabupaten Sidoarjo sehingga semua berasal dari luar wilayah. Kelompok pangan hewani sebagian pemenuhan kebutuhan konsumsi masih berasal dari luar wilayah seperti telur dan daging ruminansia. Ikan menunjukkan produksi yang tinggi walaupun sebagian komoditasnya berasal dari luar wilayah Sidoarjo. Kelompok kacang-kacangan, lemak dan minyak, buah/biji berminyak, serta sayur dan buah sebagian pemenuhan kebutuhan konsumsi berasal dari luar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo perlu berupaya meningkatkan produksi jenis-jenis komoditas pangan dengan tujuan kemandirian pangan sehingga tidak tergantung dari pihak luar. Peningkatan luas lahan dan intensifikasi budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan diperlukan untuk menunjang kemandirian pangan tersebut.
3. Perlu upaya meningkatkan ketersediaan sayuran dan buah-buahan. Ketersediaan sayuran dan buah-buahan lebih rendah dari tingkat konsumsi sehingga pemenuhan kebutuhan sayuran dan buah-buahan berasal dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo. Produksi sayuran dan buah-buahan harus diupayakan untuk ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan dan budidaya secara intensif, termasuk pengembangan kawasan rumah pangan berkelanjutan.
4. Telah dilakukan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog tentang Pengadaan dan Pendistribusian Sandang Pangan di Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 Nomor : 415.4/10/438.1.1.1/2021, Nomor : MoU - 14/DM000/KB.03.01/06/2021. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah mewujudkan ketahanan pangan dalam hal ketersediaan, keterjangkauan dan dan stabilitas harga sandang pangan di Kabupaten Sidoarjo, serta membantu

petani di Sidoarjo dalam pemasaran pangan dengan harga pangan yang sesuai harga pasar. Objek kesepakatan bersama ini adalah pengadaan dan pendistribusian sandang pangan.

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp.501.439.120,- dan terealisasi sebesar Rp.480.686.282,- atau 95,86%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Indikator Fluktuasi harga (constant of variant);	10	10	100%
Prosentase Peningkatan Cadangan Pangan;	0,25	0,25	100%
Tingkat Konsumsi Beras	275	239,89	100%

   Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase bahan pokok/pangan lainnya yang tersedia dan tersalurkan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan	0,25	0,25	100%
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan yang dikelola (ton)	0	0	0
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penurunan tingkat konsumsi beras	275	239,89	114%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 121.541.810,00	Rp 120.828.400,00	99%
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0	0	0
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 342.606.509,80	Rp 322.613.114,00	94%

2. **Program Pengawasan Keamanan Pangan** dengan anggaran sebesar Rp.162.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp.160.927.500,- atau 98,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Prosentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	80	86	107,5%

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan yang diuji	53	53	100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	1	1	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp162.700.000,-	Rp160.927.500,-	98,91%.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp162.700.000,-	Rp160.927.500,-	98,91%.

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Pangan

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk Urusan Pangan

Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		% Capaian
		TARGET	REALISASI	
1	Indeks Kualitas Air	51,52	54,05	105
2	Indeks Kualitas Udara	85,14	84,67	99
3	Indeks Kualitas Lahan	27,1	23,72	88
4	Persentase sampah yang terkelola	76,28 %	93 %	122
5	Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi	84 %	84 %	100

Indeks Kualitas Air

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami peningkatan. Nilai IKA tidak dapat diprediksi terkait peningkatan maupun penurunan nilai. Hal ini dikarenakan Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama pencemar tinggi dari sumber tidak tentu yakni aktivitas domestik masyarakat) sehingga kualitas air badan air tidak dapat

diprediksi dan tiap tahunnya menunjukkan nilai Indeks Kualitas Air yang fluktuatif. Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Air dari Tahun 2019-2021 yaitu :

Grafik III.B.49

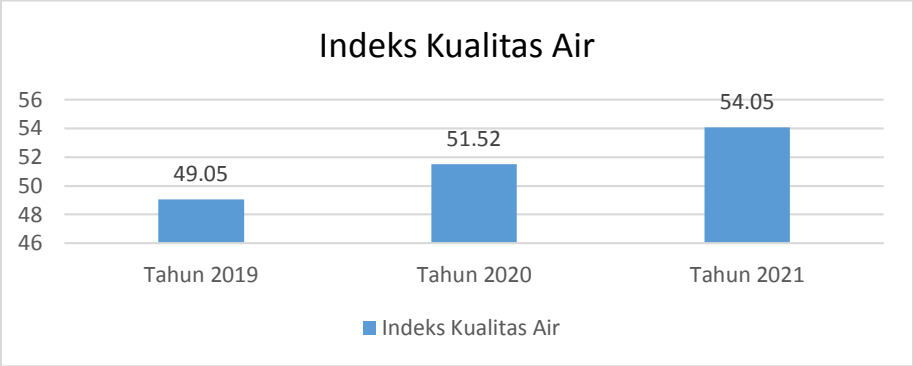

Sumber Data : DLHK Kabupaten Sidoarjo

Penjelasan kualitatif per kategori indeks dapat dijelaskan untuk nilai indeks tahun 2021 saja sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, karena penjelasan kualitatif indeks dibawah Tahun 2020 hanya pada nilai akhir Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai Pedoman IKLH Tahun 2013. Adapun nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2021 diatas (sebesar 54,05) masuk dalam **kategori sedang** (yakni dalam rentang $50 \leq x < 70$).

Indeks Kualitas Udara

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara tidak mencapai target tahun 2021 dan mengalami penurunan dibanding tahun 2020 diperkirakan karena adanya pergeseran lokasi untuk Kawasan Industri yang mana pada tahun 2020 dilakukan pengukuran di Komplek PT. Japfa Comfeed dan sementara pada tahun 2021 dilakukan pengukuran kembali di Komplek PT. Avia Avian seperti tahun-tahun dibawah tahun 2020. Pergeseran lokasi tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya nilai parameter SO_2 dan NO_2 baik pada semester I maupun pada semester II.

Selain itu, rata-rata nilai mengalami peningkatan pada parameter NO_2 di Kawasan Transportasi, Kawasan Industri, dan Kawasan Permukiman. Perlu diketahui sumber pencemar utama NO_2 adalah dari emisi kendaraan bermotor, pembakaran sampah, pembakaran batubara dan industri. Sehingga peningkatan nilai tersebut

dimungkinkan ada peningkatan aktivitas pembakaran sampah (terutama di permukiman) karena adanya peningkatan jumlah timbulan sampah akibat Covid-19 dan terjadi peningkatan aktivitas kendaraan bermotor kembali setelah pandemi Covid-19. Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Udara dari Tahun 2019-2021 yaitu :

Grafik III.B.50

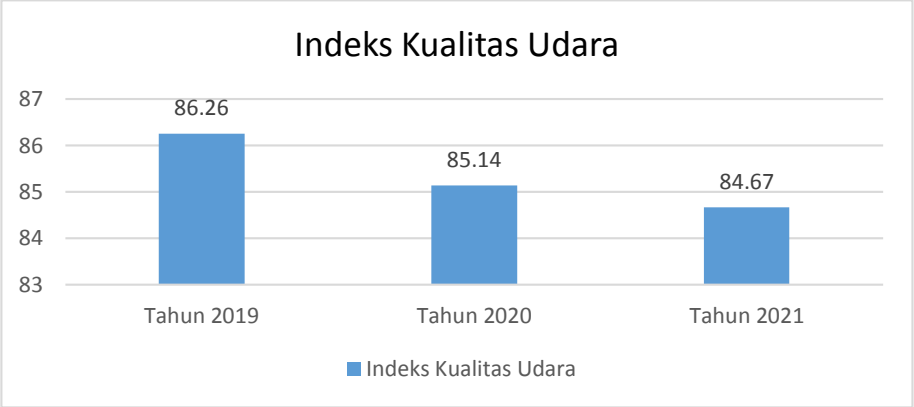

Sumber Data : DLHK Kabupaten Sidoarjo

Adapun nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2021 diatas (sebesar 84,67) masuk dalam **kategori baik** (yakni dalam rentang 70 ≤ x < 90).

Indeks Kualitas Lahan

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Lahan tidak mencapai target tahun 2021 dan mengalami penurunan secara signifikan dibanding tahun 2020 dikarenakan metode inventarisasi tutupan lahan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah menggunakan **analisis citra satelit** tutupan lahan secara menyeluruh di Kabupaten Sidoarjo. Namun, di tahun 2021 terdapat perubahan kebijakan dan regulasi yang mana perhitungan dilakukan secara otomatis melalui website https://ppkl.menlhk.go.id/ dan melalui proses verifikasi oleh DLH Provinsi Jawa Timur dilanjutkan oleh KLHK dengan rincian nilai Indeks Kualitas Lahan diperoleh dari luas tutupan hutan inputan dari KLHK dan luas tutupan non hutan (dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau dengan tanaman yang bertajuk) inputan dari masing-masing daerah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan tabel data RTH dan peta deliniasi RTH. Perubahan kebijakan tersebut menyebabkan berkurangnya tutupan lahan yang diperoleh oleh Kabupaten Sidoarjo karena keterbatasan SDM dan

sarana prasarana pendukung dalam melakukan deliniasi RTH tersebut serta rendahnya tanaman bertajuk di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, nilai Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2020 masih memasukkan luas tutupan lahan dari pekarangan, pertanian, perkebunan, dan makam yang secara regulasi tidak masuk dalam kategori tutupan lahan yang diperhitungkan dalam Indeks Kualitas Lahan. Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Lahan dari Tahun 2019-2021 yaitu :

Grafik III.B.51

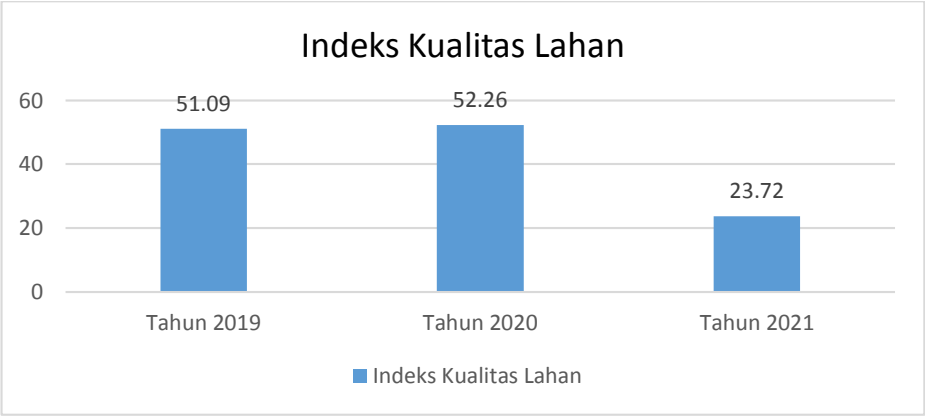

Sumber Data : DLHK Kabupaten Sidoarjo

Adapun nilai Indeks Kualitas Lahan Tahun 2021 diatas (sebesar 23,72) masuk dalam **kategori sangat kurang** (yakni dalam rentang 0 ≤ x < 25).

Permasalahan :

<u>Indeks Kualitas Lahan</u>

1. Pada tahun 2021 terdapat perubahan kebijakan dan regulasi dalam perhitungan Indeks Kualitas Lahan melalui website https://ppkl.menlhk.go.id/;
2. Perubahan fungsi lahan di area pesisir yang kurang terkendali yang menyebabkan berkurangnya luas hutan mangrove;
3. Legalitas lahan dari proses fasum perumahan yang masih belum diserahkan;
4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam menyediakan RTH sesuai ketentuan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo lainnya yang belum memperhatikan aspek penghijauan atau belum mempertahankan fungsi RTH nya;

5. Tidak tertatanya pemanfaatan/pefungsian di bantaran sungai menyebabkan fungsi konservasi penghijauan di bantaran atau sempadan sungai belum maksimal.

Solusi :

Indeks Kualitas Lahan

1. Menambah SDM atau memanfaatkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk melakukan deliniasi RTH dengan terus berkoordinasi dengan DLH Provinsi ataupun KLHK dan turut serta aktif mengikuti bimbingan teknis yang berkaitan dengan pemetaan atau deliniasi RTH dan Indeks Kualitas Lahan;
2. Pemerintah dapat membeli / membebaskan lahan terutama di permukiman padat untuk dibangun menjadi taman atau RTH (Taman Kota, Hutan Kota, Taman Lingkungan) dan bekerjasama meningkatkan penghijauan yang dikembangkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan stakeholder terkait;
3. Mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota/taman lingkungan, ikut aktif menjaga keindahan, keserasian, serta kebersihan taman kota/taman lingkungan;
4. Menertibkan permukiman atau komersial jasa yang berada di bantaran sungai dan memanfaatkan area bantaran atau sempadan sungai sebagai Ruang Terbuka Hijau secara optimal sehingga dapat berfungsi sebagai penahan erosi dan resapan air;
5. Mempertahankan area hijau (*green belt*) yang sudah ada, termasuk keberadaan hutan mangrove di daerah pesisir, meningkatkan kawasan penyangga (*buffer zone*) antara kawasan industri dengan kawasan permukiman dan mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk turut serta menyediakan RTH di lokasi kegiatan, terutama tanaman pelindung yang bertajuk.

Persentase sampah yang terkelola

Target yang ditetapkan di Tahun 2021 dalam RPJMD sebesar 76,28 % sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar 93 % sehingga capaian kinerja di Tahun 2021 sebesar 122 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 92 % maka realisasi di Tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya. Dari jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo dilakukan pengelolaan oleh DLHK yaitu antara lain di TPST, TPST 3R dan TPST Kawasan serta TPA. Selain pengelolaan yang dilakukan DLHK, 25 % dari jumlah timbulan sampah dilakukan pengelolaan sampah oleh masyarakat secara mandiri seperti penimbunan di pekarangan rumah dan dikelola menjadi pupuk anorganik. Perkembangan persentase sampah yang terkelola Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

URAIAN	SATUAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah sampah yang terkelola (TPST 3R + TPST Kawasan + TPST)	ton / hari	266	282	292	308	307	306
a. TPST 3R	ton / hari	63	68	72	77	76	37
b. TPST Kawasan	ton / hari	109	114	117	122	122	97
c. TPST	ton / hari	94	100	103	109	109	172
Sampah Masuk TPA	ton / hari	420	442	465	520	514	532
Jumlah sampah yang terkelola masyarakat secara mandiri	ton / hari	266	282	292	308	307	306
Jumlah sampah yang terkelola di TPST dan TPA	**ton / hari**	**952**	**1006**	**1049**	**1136**	**1128**	**1144**
Jumlah timbulan sampah	**ton / hari**	**1168**	**1192**	**1216**	**1240**	**1224**	**1224**
Persentase sampah yang terkelola ((Jumlah sampah yang terkelola / Jumlah timbulan sampah) x 100 %)	%	82	84	86	92	92	93

Berikut capaian kinerja Persentase Sampah yang terkelola dari Tahun 2019-2021 yaitu :

Grafik III.B.52

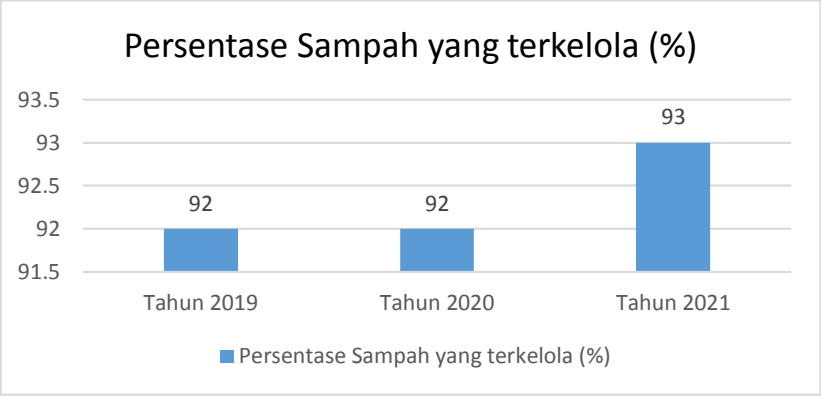

Sumber Data : DLHK Kabupaten Sidoarjo

Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi

Untuk mendukung keindahan dan dekorasi kota, dipenuhi pula ketersediaan penerangan jalan dan lingkungan, dengan jumlah titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun sampai Tahun 2021 sebanyak 33769 titik. Pada Tahun 2022, Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) beralih ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah**

  Pada tahun 2021 telah diadakan sarana dan prasarana TPA/TPST dan sarpras angkutan sampah sebanyak 123 unit.

c. **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

1. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup** dengan anggaran sebesar Rp.265.985.728,00 dan terealisasi sebesar Rp.214.771.700,00 atau 81%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100%	100%	100

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS Kabupaten yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	265.985.728	214.771.700	81

2. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** dengan anggaran sebesar Rp.2.339.086.993,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.012.783.955,00 atau 86%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase pemantauan air badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD	42%	43%	102
Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO_2 dan NO_2	45%	88%	196

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan	80 %	83%	104
	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	80%	89%	111

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.339.086.993	2.012.783.955	86

3. **Program Pengendalian Bahan Berbajaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)** dengan anggaran sebesar Rp.1.806.906.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.751.652.651,00 atau 42%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Pengendalian Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan	100%	100%	100

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah surat rincian teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang dikeluarkan/disetujui	85 Rincian Teknis	93 Rincian Teknis	109
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 (pengumpulan limbah B3 skala kabupaten)	1 Laporan	1 Laporan	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyimpanan Sementara Limbah B3	100.806.400	72.240.113	72
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.706.100.000	679.412.538	40

4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup (PPLH)** dengan anggaran sebesar Rp.166.345.127,00 dan terealisasi sebesar Rp.150.666.432,00 atau 91%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	3,7%	3,62%	98

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang–undangan lingkungan hidup	99%	99,09%	100
	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,03%	0,03%	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	166.345.127	150.666.432	91

5. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp.377.290.640,00 dan terealisasi sebesar Rp.357.239.524,00 atau 95%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase desa / kelurahan peduli lingkungan hidup	5%	5,94%	119
Persentase sekolah peduli lingkungan hidup	0,80%	1,27%	159

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	1,7 %	2,3 %	135

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	377.290.640	357.239.524	95

6. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup** dengan anggaran sebesar Rp.152.704.773,00 dan terealisasi sebesar Rp.136.778.067,00 atau 90%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	152.704.773	136.778.067	90

7. **Program Pengelolaan Sampah** dengan anggaran sebesar Rp.32.170.062.892,00 dan terealisasi sebesar Rp.27.249.510.332,00 atau 85%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase penanganan sampah	45 %	41,2 %	92
Persentase pengurangan sampah	28 %	23,69 %	85

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Sampah	Jumlah berat sampah yang terkelola	850 Ton / hari	837,33 Ton / hari	99

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Sampah	32.170.062.892	27.249.510.332	85

8. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)** dengan anggaran sebesar Rp.12.775.005.824,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.150.500.046,00 atau 87%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase luasan RTH yang terkelola	2,17%	2,2%	101

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Persentase RTH Taman Aktif	56 %	56 %	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	12.775.005.824	11.150.500.046	87

9. **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** dengan anggaran sebesar Rp.102.031.799.305,00 dan terealisasi sebesar Rp.97.664.979.053,00 atau 96%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik	84%	84%	100

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah PJU dalam kondisi baik	32347 Titik	32347 Titik	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	102.031.799.305	97.664.979.053	96

d. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup

e. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan Lingkungan Hidup, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Pengadaan mobil operasional PJU serta teknisi untuk mengatasi permasalahan PJU yang mati	Pelaksanaan pengadaan mobil operasional PJU dilakukan berdasarkan DPPA Tahun 2020 Nomor 910/181/438.6.2/2020
2	Memberi sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait pencemaran lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan	Pemberian sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait pencemaran lingkungan dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/74/438.1.1.3/2018
3	Membuat masterplan RTH dan membangun RTH di setiap kecamatan disesuaikan dengan wilayah kecamatan masing - masing.	Kabupaten Sidoarjo telah memiliki Masterplan RTH yang disusun oleh Bappeda Sidoarjo pada tahun 2010 dan Pelaksanaan pembangunan RTH dilakukan berdasarkan DPPA Tahun 2021 Nomor 910/12/438.6.2/2021

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dalam rangka tertib kepemilikan dan validitas dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase penduduk yang ber-KTP Elektronik	100 %	97,08 %	97,08 %
2	Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga (KK)	100 %	100 %	100 %
3	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun yang ber-Akta Kelahiran	100 %	95,19 %	95,19 %

Persentase Penduduk yang ber-KTP Elektronik

Kepemilikan KTP bukan saja merupakan pemenuhan hak perorangan tetapi juga untuk keperluan tertib administrasi kependudukan. Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut grafik perkembangan kepemilikan KTP-el di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik IIII.B.53
Perkembangan Kepemilikan KTP Elektronik

Sumber data : Dispendukcapil Kab. Sidoarjo

Jumlah penduduk yang ber-KTP Elektronik di tahun 2021 sebanyak 1.520.673. jiwa dari yang wajib memiliki KTP sebanyak 1.566.459 jiwa atau tercapai 97,08.% dari target 100.% dengan capaian 97,08 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 97,80 % maka terdapat penurunan angka 072 % atau sekitar 0,74.%. Penurunan dimaksud disebabkan karena

1) Kondisi Pandemi Covit-19 mengakibatkan kegiatan Rekam KTP-el dihentikan sampai dengan TW III
2) Bertambahnya jumlah penduduk wajib KTP el.

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak penduduk yang memiliki KTP Elektronik serta peningkatan kualitas pelayanan KTP Elektronik, yaitu :

- Penambahan personal/pegawai non PNS sebagai operator dan *customer service* optimalisasi layanan masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
- Penyuluhan/sosialisasi tentang prosedur, kegunaan syarat-syarat pengurusan Akta Kelahiran lebih ditingkatkan serta dilaksanakan secara berkesinambungan melalui WEB Dukcapil dan Medsos.
- Layanan Administrasi Kependudukan selama pandemi Covit-19 dengan “PLAVON DUKCAPIL”, yaitu pelayanan VIA Hotline/WA Dukcapil (layanan tanpa tatap muka).

- Menambah sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitasnya, serta pengembangan teknologi informasi.
- Meningkakan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dengan cara sosialisasi administrasi kependudukan dan kerjasama dengan *stakeholter*.

Persentase Penduduk yang ber-Kartu Keluarga

Masing-masing keluarga perlu memiliki Kartu Keluarga untuk mendukung data kependudukan terutama bagi anggota keluarga yang belum wajib ber-KTP-elektronik. Perkembangan keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik III.B.54

Perkembangan Kepemilikan Kartu Keluarga

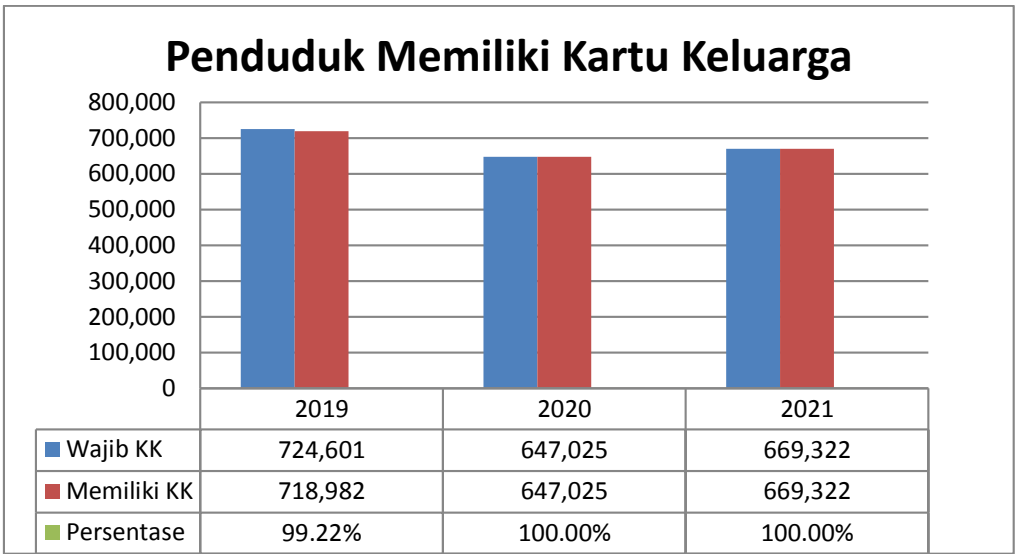

	2019	2020	2021
Wajib KK	724,601	647,025	669,322
Memiliki KK	718,982	647,025	669,322
Persentase	99.22%	100.00%	100.00%

Sumber data : Dispendukcapil Kab. Sidoarjo

Jumlah penduduk yang ber-Kartu Keluarga di tahun 2021 sebanyak 669.322 KK dari seluruh keluarga yang ada sebanyak 669.322 KK atau tercapai 100.% dari target 100% dengan capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 100% maka terdapat peningkatan angka 22.297 atau sekitar 3,45%. Kenaikan dimaksud disebabkan karena :

1) Penyuluhan/sosialisasi tentang prosedur, kegunaan syarat-syarat pengurusan Akta Kelahiran lebih ditingkatkan serta dilaksanakan secara berkesinambungan melalui WEB Dukcapil dan Medsos.

2) Layanan Administrasi Kependudukan selama pandemi Covit-19 dengan "PLAVON DUKCAPIL", yaitu pelayanan VIA Hotline/WA Dukcapil (layanan tanpa tatap muka).

Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun yang ber-Akta Kelahiran

Untuk meregistrasi penduduk yang baru lahir maka perlu diterbitkan Akta Kelahiran bagi seluruh penduduk di Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 505.551 Jiwa atau 95,19% dari jumlah penduduk yang ada. Apabila dibandingkan dengan target 100% maka tercapai 95,19%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 502.718 maka terdapat kenaikan angka 2.833 atau sekitar 0,56%.

Perkembangan kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0 s.d 18 tahun dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut ini :

1. Penyuluhan/sosialisasi tentang prosedur, kegunaan syarat-syarat pengurusan Akta Kelahiran lebih ditingkatkan serta dilaksanakan secara berkesinambungan melalui WEB Dukcapil dan Medsos.
2. Layanan Administrasi Kependudukan selama pandemi Covit-19 dengan "PLAVON DUKCAPIL", yaitu pelayanan VIA Hotline/WA Dukcapil (layanan tanpa tatap muka).

Grafik III.B.55

Perkembangan Persentase Penduduk Usia 0-18 Th Yang Ber Akta Kelahiran

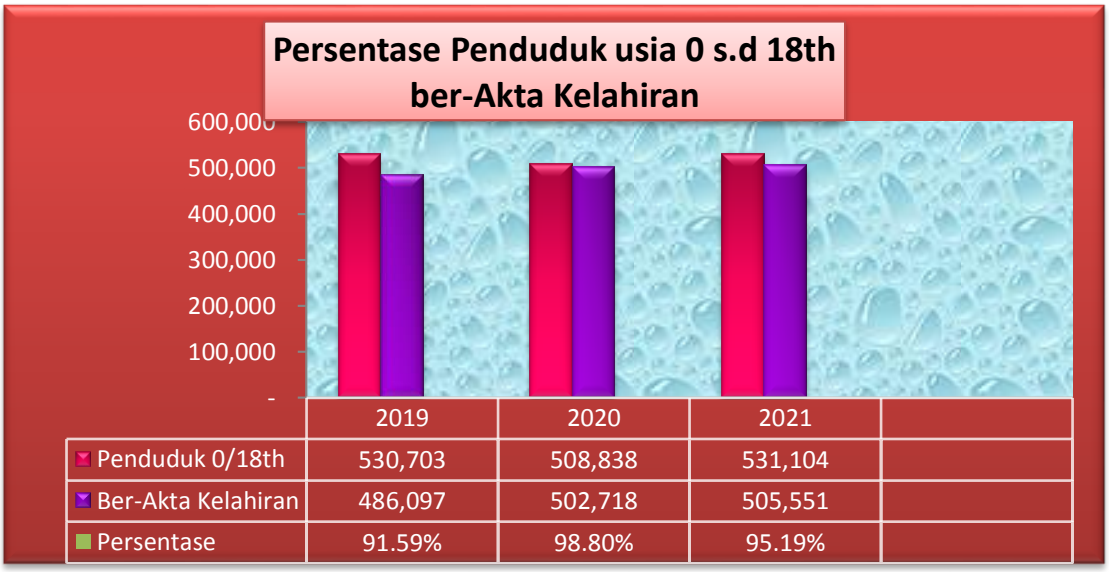

	2019	2020	2021
Penduduk 0/18th	530,703	508,838	531,104
Ber-Akta Kelahiran	486,097	502,718	505,551
Persentase	91.59%	98.80%	95.19%

Sumber data : Dispendukcapil Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan agar semakin banyak penduduk usia 0 s.d 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran serta peningkatan kualitas pelayanan Akta Kelahiran, yaitu :

1. Optimalisasi system antrian online dan upaya stabilisasi jaringan SIAK serta memperluas jangkauan dan frekuensi sosialiasi pengurusan dokumenadmindukcapil pada masyarakat.
2. Membuka kemudahan akses informasi kepada masyarakat mengenai pengurusan dokumen admindukcapil.
3. Meminimalisir terganggunya jatringan SIAK antar Kecamatan sehingga layanan kependudukan kepada masyarakat dapat lebih optimal
4. Kurang luasnya jangkauan dan frekuensi sosialiasi pengurusan dokumenvadmindukcapil pada masyarakat
5. Memberantas/menghilangkan adanya biro jasa/calo yang justru memberikan info yang keliru padamasyarakat.
6. Era Pandemi Covid 19 bulan Maret 2020, semua layanan Dukcapil tetap dilakukan secara optimal melaluiPlavon Dukcapil Online dan Antrian Online (SAE CAPIL), dengan 520 noantrian/hari, baik di Kantor Dukcapil maupun di Mini MPP KecamatanSukodono (beroperasional tmt 6 Juli 2020)

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Pendaftaran Penduduk** dengan anggaran sebesar Rp.283.518.364,- dan terealisasi sebesar Rp.235.167.294,- atau 83%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. Jumlah Desa/Kelurahan lokasi Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	7 Desa	7 Desa	100
2. Persentase Permohonan KTP dan KK yang terselesaikan	100 %	100 %	100
3. Persentase KTP dan KK yang tercetak	100 %	100 %	100
4. Jumlah Permohonan Pelayanan KTP dan KK yang dapat diproses	35.000 layanan	35.000 layanan	100

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. Pelayanan Penaftaran Penduduk	1. Jumlah Desa/Kelurahan lokasi Pendaftaran Penduduk Rentan Administtrasi Kependudukan.	7 Desa	7 Desa	100
	2. Persentase Permohonan KTP dan KK yang terselesaikan	100 %	100 %	100
	3. Persentase KTP dan KK yang tercetak	100 %	100 %	100
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Permohonan Pelayanan KTP dan KK yang dapat diproses	35.000 layanan	35.000 layanan	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp) Tahun 2021	REALISASI (Rp) Tahun 2021	%
1.Pelayanan Penaftaran Penduduk	232.818.200	184.467.144	79
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	50.700.154	50.700.1`50	100

2. Program Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp.396.186.400,- dan terealisasi sebesar Rp.340.957.124 atau 96%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. Persentase Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan.	100 %	100 %	100
2. Persentase Akta Pencatatan Sipil yang terselesaikan.	100 %	100 %	100
3. Persentase Pelayanan Akta Kematian yang dapat diproses	100 %	100 %	100

Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. Pelayanan Pencatatan Sipil.	1. Persentase Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan.	100 %	100 %	100
	2. Persentase Akta Pencatatan Sipil yang terselesaikan.	100 %	100 %	100
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1. Persentase Pelayanan Akta Kematian yang dapat diproses	100 %	100 %	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.) Tahun 2021	RESLISASI (Rp) Tahun 2021	%
1. Pelayanan Pencatatan Sipil.	204.386.400	149.931.204	86 %
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.	191.800.000	191.023.920	100

3. **Program Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan** dengan anggaran sebesar Rp.1.779.663.503,- dan terealisasi sebesar Rp.1730.066.997,- atau 97 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. Jumlah peserta Bimbingan Teknis terkait pengelolaan informasi adminduk	50 orang	50 orang	100
2. Prosentase Pelaporan Data Kependudukan yang tepat waktu	100 %	100 %	100
3. Jumlah Kerjasama (Mou) administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihasilkan	8 Mou	8 Mou	100
4. Prosentase sarpras SIAK yang disediakan	100 %	100 %	100
5. Jumlah institusi yang memanfaatkan Data Kependudukan	7 institusi	7 institusi	100
6. Frekuensi sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	25 kali	25 kali	100

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis terkait pengelolaan informasi adminduk	50 orang	50 orang	100
2. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan.	1. Prosentase Pelaporan Data Kependudukan yang tepat waktu	100 %	100 %	100
	2. Jumlah Kerjasama (Mou) administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihasilkan	8 Mou	8 Mou	100
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	1. Prosentase sarpras SIAK yang disediakan	100 %	100 %	100
	2. Jumlah institusi yang memanfaatkan Data Kependudukan	7 institusi	7 institusi	100
	3. Frekuensi sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.	25 kali	25 kali	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.) Tahun 2021	REALISASI (Rp) Tahun 2021	%
1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	74.713.488	70.935.000	95
2. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan.	64.500.000	49.396.360	77
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.639.450.015	1.609.735.637	98

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perlu sosialisasi segala jenis program pelayanan yang lebih masif dan pembuatan call center serta menintegrasikan aplikasi terkait pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	langganan call senter akan diusulkan pada Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Tahun 2021
2	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan bisa dilakukan di Desa/Kelurahan dengan menggunakan online system	rapat koordinasi dengan petugas Desa/ kelurahan tekait penggunaan layanan Online dengan Aplikasi "PLAVON DUKCAPIL

Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Perhubungan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	60,5	60,39	99,82%

Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyediakan/mendukung Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak sebagai bentuk upaya peningkatan keselamatan dan kenyamanan pelayanan jalan kepada masyarakat. Adapun definisi Sarana adalah segala sesuatu yang di

pakai sebagai alat untuk mewujudkan keselamatan jalan sedangkan prasarana (infrastruktur) adalah penunjang terlaksananya keselamatan jalan.

Kecukupan Jumlah alat kelengkapan Jalan yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat Sidoarjo dalam berlalulintas dan mengurang titik - titik kemacetan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Adapun alat perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi :

1) Alat pemberi isyarat ;
2) Rambu lalu lintas;
3) Marka jalan;
4) Alat pengendali pemakai jalan,terdiri dari alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

Sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik pada tahun 2021 tercapai 60,39% dari target 60,5% dengan capaian 99,82%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu capaian 89%, maka di tahun 2021 sudah mengalami peningkatan. Adapun perkembangan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik, sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.B.5

Sarana dan Prasarana Perhubungan

No	Alat Perlengkapan Jalan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
1.	**Pengadaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas)**						
a.	Traffic Light	3 Lokasi	-	2 Lokasi		-	5 Lokasi
	Traffic light Over Pass	-	-	-	6 Lokasi	-	6 Lokasi
	Traffic light ATCS	-	-	4 lokasi	6 Lokasi	-	10 Lokasi
b.	Pengadaan Paku Jalan	283 Unit	-	-	-	-	283 Lokasi
c.	Warning Light/ Flashing Light	4 Lokasi	4 Lokasi	28 Lokasi	29 lokasi	6	71 Lokasi
d.	Pelican Crossing	-	2 Lokasi	3 Lokasi	3 lokasi	2	10 Lokasi

2.	**Pengadaan RPPJ / Rambu Jalan**		-	-	-	-	-
a.	Rambu Peringatan Larangan dan Perintah	102 Unit	19 Unit	-	-	50	171 Lokasi
b.	Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan	33 Unit	-	-	-	-	33 Unit
	- RPPJ elektronik	-	-	3 Unit	-	-	3 unit
	- Rambu lalulintas tiang F	-	-	-		-	-
	- Rambu Tiang biasa	-	100 Unit	150 Unit	100 Unit	-	350 Unit
3.	**Pengecatan marka Jalan**		-	-	-	-	-
a.	Dana APBD	1,175 m2	1,175 m2	12.203 m2	492,78 m2	-	507.333 m2
b.1	Dana DAK	260,75 m2	260,75 m2	-	-	-	521.5 m2
b.2	Speed Trap (pita kejut)	221,70 m2	221,70 m2	-	127,50 m	-	570.9 m2
4.	**Revitalisasi Guardrill**	3 titik	3 titik	-	-	-	6 Titik
5.	**Cermin tikung**	-	20 Unit	10 Unit	15 Unit	6	51 Unit
6.	**Rambu papan himbauan parker**	-	20 Unit	-	-	-	20 Unit
7.	**Pengadaan Mobil Sky walker**	-	-	1 Unit	-	-	1 Unit
8.	**Pengadaan moil derek**	-	-	1 Unit	-	-	-
9.	**Pengadaan mobil Uji keliling**	-	-	1 Unit	-	-	-
10.	**EWS perlintasan KA**	-	-	-	6 lokasi	-	-

Sumber Data : Dishub Kab. Sidoarjo

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan**

  Pada tahun 2021 telah dilakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan sebagai berikut :

  1. Komponen-Komponen Rambu-Rambu Pemeliharaan CCTV (ATCS);
  2. Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Tidak Bersuar (Pengecatan Marka Jalan, Pemeliharaan APILL, Pemeliharaan Palang Pintu Perlintasan Kerata Api)
  3. Pengadaan Rambu Bersuar (Warning Lamp Sky Cont)
  4. Pengadaan Rambu Tidak Bersuar (Daun Rambu Tabel, Road Barrier Plastik / HDPE, Cermin Tikungan Outdoor, Rambu Lalu Lintas 90 cm, RPPJ Tiang Biasa)
  5. Tenaga Operator ATCS
  6. Tenaga Work Shop Sarpras

c. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan anggaran sebesar Rp.30.838.112.712,00 dan terealisasi sebesar Rp.26.405.604.699,00 atau 85,63%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Peningkatan kinerja lalu lintas angkutan jalan	0,28/B	0,28/B	100%

Program tersebut didukung oleh 14 kegiatan dengan realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	910.758.858,00	884.439.079,00	97,11
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	100.000.000,00	97.251.000,00	97,25
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	154.040.090,00	151.610.796,00	98,42
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan	7.301.285.364,00	6.752.536.536,00	92,48

dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	186.454.000,00	186.223.840,00	99,88
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	910.800.000,00	800.000.000,00	87,83
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	148.020.400,00	98,68
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	125.000.000,00	123.269.300,00	98,62
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	17.766.033.921,00	14.147.753.516,00	79,63
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	49.010.411,00	16.921.000,00	34,53
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	3.087.947.508,00	3.015.238.232,00	97,65
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	69.954.867,00	56.946.000,00	81,40
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.827.693,00	25.395.000,00	94,66

2. **Program Pengelolaan Pelayaran** dengan anggaran sebesar Rp.22.689.263,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.450.000,00 atau 98,95%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase jumlah perahu angkutan sungai yang memiliki dokumen lengkap	50%	87,50%	175%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan dengan realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	22.689.263,00	22.450.000,00	98,95

3. **Program Pengelolaan Perkeratapian** dengan anggaran sebesar Rp.3.593.760.722,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.422.735.984,00 atau 95,24%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase jumlah perlintasan yang dikendalikan	50%	100%	200%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan dengan realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	3.593.760.722,00	3.422.735.984,00	95,24

d. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Perhubungan

e. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan perhubungan, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Realisasi jumlah titik potensi parkir yang dikelola di tahun 2020 hanya sebesar 83% dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan jalan yang menimbulkan kecelakaan.	1) Memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perbup No 53 tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perparkiran dalam rangka memenuhi target di tahun 2021 2) Mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor parkir yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberlakukan karcis parkir sebagai penganti parkir berlanggaran sambil menunggu Kerjasama dengan pihak ketiga. 3) Memasang rambu-rambu lalu lintas sesuai hasil kajian dari dinas terkait dan telah di laksanakan pemasangan 8 EWS di perlintasan kerata api yang tidak berpalang pintu di tahun 2021

Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketersediaan teknologi informasi publik menuju Sidoarjo Smartcity dengan sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo	2,7	2,37	88

Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, Kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Dari tabel tersebut diatas Nampak bahwa pada tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai

2,37 kategori Cukup atau 88 % dari target 2,7 dan apabila dibandingkan dengan capain tahun 2020 sebesar 3,13 terjadi penurunan nilai sebesar 0,76.
Capaian kinetrja SPBE tahaun 2021 berdasarkan Penilaian Mandiri:
Indeks SPBE: 3,22 dengan Predikat SPBE: Baik dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 terjadi peningkatan dengan nilai 3,13.
Tidak tecapainya target tersebut karena hal-hal sebagai berikut :
Evaluasi SPBE pada tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan baru yang sebelumnya tidak ada (Pemen PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE).
Ketentuan baru tersebut antara lain:

a. Penambahan domain baru dimana sebelumnya terdapat 3 (tiga) domain menjadi 4 (empat) domain yaitu domain Manajemen SPBE.
b. Penambahan dan pengurarangan aspek dimana sebelumnya terdapat 7 (tujuh) aspek sekarang menjadi 8 (delapan) aspek dengan penambahan 2 (dua) aspek baru yaitu aspek Penerapan Manajemen dan Audit TIK serta pengurangan 1 (satu) aspek yaitu aspek Kebijakan Layanan SPBE.
c. Penambahan jumlah indikator dimana sebelumnya terdapat 35 (tiga puluh lima) indikator sekarang menjadi 47 (empat puluh tujuh indikator). Adapun penambahan sejumlah indikator tersebut dikarenakan penambahan domain dan aspek.
d. Penilaian Mandiri Evaluasi SPBE Tahun 2021 dilaksanakan dengan metode unggah dokumen pendukung dan penjelasan terhadap tingkat kematangan yang terdapat pada 47 (empat puluh tujuh) indikator melalui aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Kementerian PANRB pada alamat monev.spbe.go.id.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengumpulkan seluruh data dukung pada 47 indikator dan mengunggahnya ke aplikasi pada tanggal 23 Juni 2021. Selanjutnya seluruh data dukung dan jawaban masing-masing indikator tersebut diperiksa dan diverifikasi oleh Kementerian PANRB pada saat Penilaian Interviu yang dilaksanakan melalui daring pada tanggal 24 Agustus 2021 untuk penentuan nilai akhir SPBE. Di dalam 47 indikator tersebut banyak indikator baru yang sebelumnya tidak ada, serta kegiatan teknis terkait pendukung indikator baru yang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo baru dilaksanakan pada tribulan IV tahun 2021 setelah pelaksanaan evaluasi SPBE, seperti kegiatan penerapan SMKI pada bidang TKI Dinas Kominfo untuk standarisasi pengelolaan Data Center dan lain sebagainya.

Hal – hal tersebut di atas juga mengakibatkan capaian Indek SPBE tahun 2021 sebesar 2,37 menurun dari capaian tahun 2020 sebesar 3,13.

Rencana perbaikan Nilai Indeks SPBE tahun 2022 :

a. Inventaris nilai indikator yang masih rendah (nilai 1)
b. Rencana aksi perbaikan dengan optimalisasi data dukung tiap indikator (sinkronisasi dengan OPD terkait)
c. Menggunakan jasa pendampingan tenaga ahli

Selama tahun 2021 Aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

No	Nama Aplikasi	Keterangan	Jenis Aplikasi (Internal/eksternal)	Platform (we/desktop /android)	Instansi	penempatan server
1	Aplikasi SKM Bag Organisasi	Baru	ekternal	web	Bagian Organisasi	kominfo
2	Aplikasi PSC	Baru	ekternal	web+android	Dinkes	kominfo (server dummy)
3	Aplikasi Pendataan media	Baru	internal	web	Dinas Kominfo	kominfo
4	Aplikasi E-Rebon	Baru	ekternal	web	dinas perikanan	kominfo
5	E-PAK Jabfung Guru - Dinas Pendidikan	Baru	internal	web	dispendik	kominfo
6	WIS & FM WIS - DLHK	Baru	internal	web	DLHK	kominfo (server dummy)
7	Plavon	Baru	ekternal	web	dispendukcapil	dispendukcapil
8	Pengembangan Aplikasi LB Simpus	Beru	internal	web	dinkes	belum ngasih sourccode
9	layanan ketenagakerjaan Disnaker (SIHUBIN)	baru	eksternal	web	disnaker	kominfo
10	si cerdas	baru	eksternal	web	dispendikbud	kominfo (server dummy)
11	eterajana	baru	ekternal	web	Disperindag	kominfo (server dummy)
12	SIMRS	baru	internal	web android	RSUD	RSUD
13	Sipanda	Baru	internal	web	Dispendukcapil	kominfo (server dummy)
14	SITASDESA	baru	internal	web	PMD	belum ngasih sourccode
15	Data Desa Pelaporan desa/aplikasi Simpel	ru	internal	web	PMD	kominfo
16	Simanis PBJ	baru	ekternal	web	PBJ	PBJ sendiri/ redirect
17	E-lelang	baru	ekternal	web	PBJ	pbj

18	E-Linmas	baru	internal	web	Pol PP	belum ngasih sourccode
19	Ketenagakerjaan	baru	ekternal	web	Disnaker	belum ngasih sourccode
20	simlitbang	baru	internal	web	Bappeda	kominfo (server dummy)

Berikut Peta FO Connection Delta Ring Kabupaten Sidoarjo :

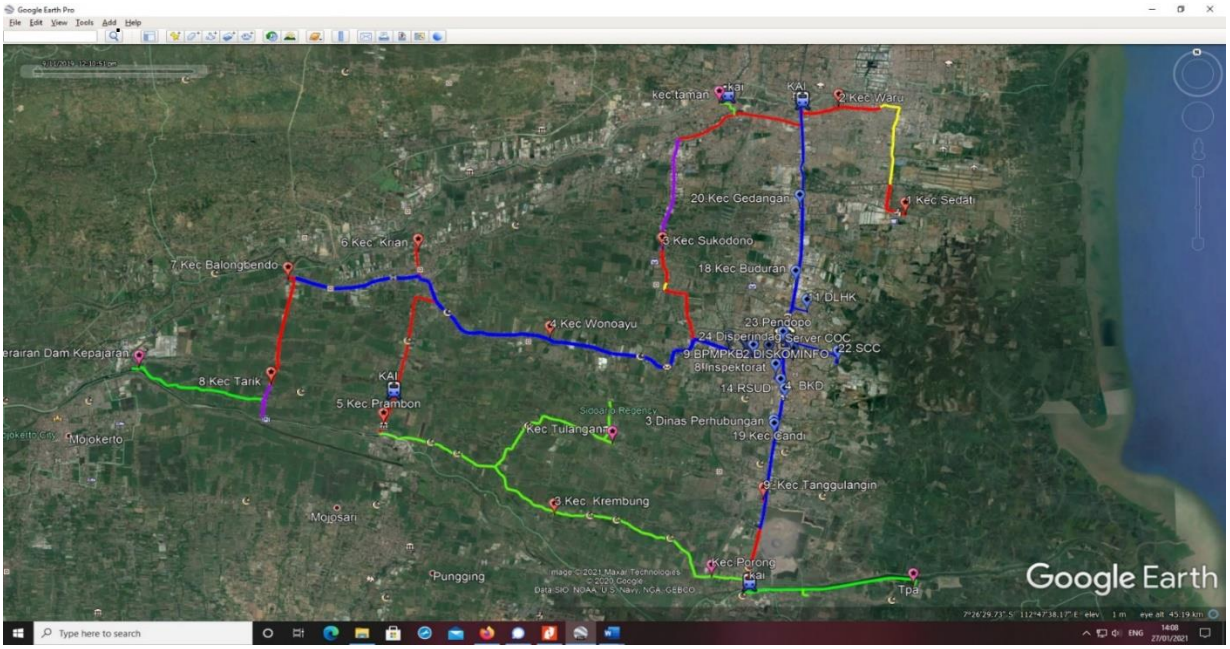

Penggelaran FO sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan sepanjang 155 km baik menggunakan Kabel Udara maupun Kabel Tanam, dari data center di Pendopo Kabupaten Sidoarjo ke seluruh Perangkat Daerah termasuk seluruh Kecamatan, Puskesmas , Mall layanan Publik, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon,Pintu Air Kepajaran Mlirip Tarik,SMP Negeri 4 Sidoarjo,SMP Negeri 5 Sidoarjo, SD Negeri Kupang 4 Kalialo Jabon, Balai Desa Lebo Sidoarjo, Balai Desa Pabean Sedati, Taman Abhirama Sidoarjo dan beberapa tempat penting lainnya.

Setelah menyelesaikan penggelaran kabel fiber optik diseluruh OPD sampai dengan Kecamatan di tahun 2020, maka ditahun 2021 lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan bandwith di semua OPD. Selain itu juga dilakukan penggelaran fiber optik Km di beberapa lokasi sepanjang ± 5 Km, selain itu juga dilakukan pemasangan koneksi internet menggunakan radio wireless untuk menjangkau lokasi yang masih belum terjangkau dengan jaringan fiber optik.

Adapun lokasi dimaksud adalah :

1) Mapolres Sidoarjo Baru (Raya Cemengkalang)
2) Pujasera Gajah Mada (Binaan Disperindag)
3) Balai Desa Lebo Sidoarjo
4) Balai Desa Pabean Sedati
5) Taman Abhirama Sidoarjo
6) *Wisata Bahari Tlocor (Menggunakan Radio Wireless)*

BALAI DESA PABEAN

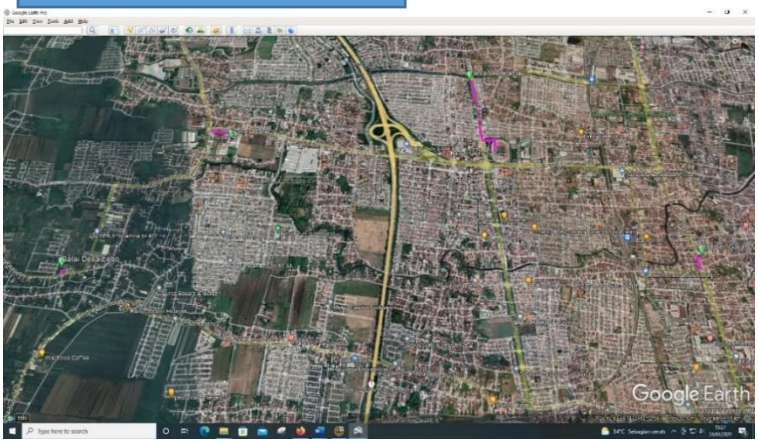

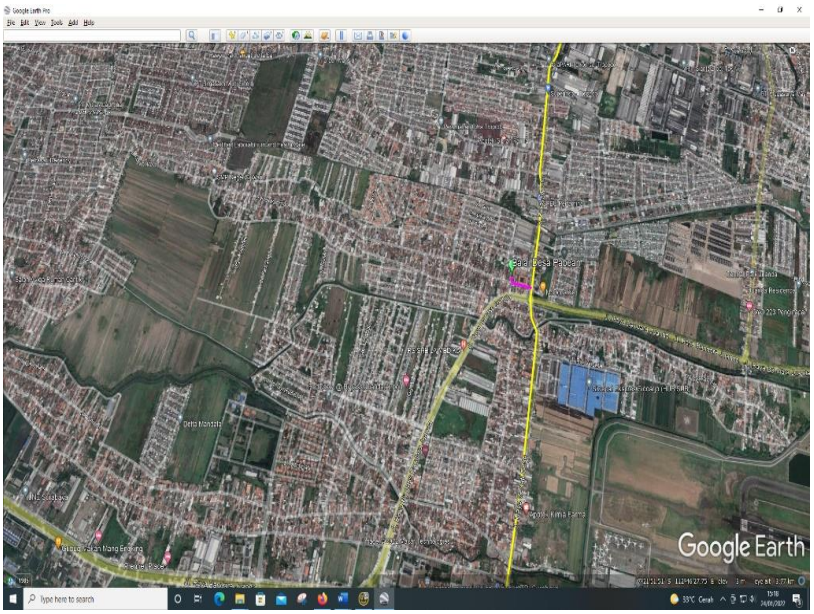

WISATA BAHARI

Dari Pembangunan Jaringan FO yang ditetapkan dalam RENSTRA selama 5 tahun yang berakhir tahun 2021 ±155 Km, DISKOMINFO melakukan percepatan diakhir tahun 2020 Semua OPD dan kecamatan telah terhubung jaringan FO DISKOMINFO, pada tahun 2021 karena masih adanya Pandemi COVID-19 kami juga memfasilitasi sekolah, agar pembelajaran daring dapat berjalan dengan lancar dan juga kami memfasilitasi internet untuk memantau Pintu Air untuk dapat pengendalian banjir. Pada tahun 2021 ini kami menghubungkan balai desa pabean dan desa lebo merujuk RENSTRA-KEMENKOMINFO bahwa jaringan internet harus dapat dinikmati sampai desa-desa, akan tetapi kami masih melakukan koordinasi lebih lanjut. Disamping kami juga memasang jaringan Mapolres Sidoarjo Baru, Pujasera Gajah Mada, Taman Abhirama dan Wisata Bahari Tlocor (Menggunakan Radio Wireless)

Untuk penyusunan blueprint 1 Platform dan Pembangunan Sidoarjo Call Center 112 baru dilaksanakan pada tahun 2022.

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat**

  Pada tahun 2021 untuk mewujudkan media pengaduan yang respon cepat di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan manajemen SDM untuk tenaga pengaduan LAPOR SP4N dan P3M.

- **Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif**

  Untuk mendukung pelayanan publim khususnya pelayanan perijinan, maka telah difasilitasi sarana informatika, sebagai berikut :

  - Bandwith Internet (9M)
  - Ijin Crossing Rel KAI
  - Tenaga programmer dan teknisi jaringan
  - Pemeliharaan genset, internet, dan tower
  - Pengadaan kabel fiber optic dan router

c. **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

1. **Program Aplikasi Informatika** dengan anggaran sebesar Rp.11.669.109.902,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.341.073.252,00 atau 97,19%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase jaringan FO yang dibangun	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama dan Sub Domain perangkat daerah yang ditetapkan	150	150	100
	Jumlah up-time dalam 1 tahun	98	100	102
Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kematangan pada kapabilitas proses	Rintisan	Terkelola	102
	Tingkat kematangan pada kapabilitas layanan	Transaksi	Transakasi	100
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	2	2	100
	Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindak lanjuti	3	3	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	15.892.500,00	15.892.500,00	100,00
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.130.361,00	60.345.000,00	92,65
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10.117.300.043,00	9.903.524.345,00	97,89
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	789.741.404,00	726.125.980,00	91,94

Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	66.000.000,00	34.135.784,00	51,72
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	463.845.594,00	456.481.843,00	98,41
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	600.000,00	398.400,00	66,40
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	600.000,00	399.400,00	66,57
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	150.000.000,00	143.770.000,00	95,85

2. **Program Informasi dan Komunikasi Publik** dengan anggaran sebesar Rp.6.380.855.950,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.140.676.107,00 atau 80,56%.

   Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan, dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	131.270.936,00	107.166.500,00	81,64
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	286.933.750,00	247.050.000,00	86,10
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	932.675.200,00	927.595.112,00	99,46
Pelayanan Informasi Publik	93.828.400,00	87.742.324,00	93,51
Layanan Hubungan Media	4.024.868.814,00	3.232.525.500,00	80,31
Manajemen Komunikasi Krisis	44.537.600,00	44.497.556,00	99,91
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	771.781.250,00	476.348.115,00	61,72
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	94.960.000,00	17.751.000,00	18,69

d. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika

e. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan komunikasi dan informatika, dengan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar sidoarjo bisa menjadi kota yang cerdas/pintar dan inovatif dalam bidang teknologi informasi	~ Pengembangan aplikasi ~ Perluasan jaringan FO
2	Pelayanan publik harus semakin mudah, efektif dan efesien dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan lebih optimal.	~ Penyusunan blueprint 1 platform ~ Pembangunan Sidoarjo Call Center 112

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan dalam rangka peningkatan koperasi yang berkualitas dan usaha mikro yang mandiri di Kabupaten Sidoarjo.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	21,84%	21,84%	100%
2	Persentase usaha mikro yang mandiri	1,87%	1,87%	100%

Persentase Koperasi yang berkualitas

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

Parameter yang menjadi dasar koperasi berkualitas adalah apabila memenuhi 5 (lima) aspek yang terdiri dari :

1. Aspek Kelembagaan Koperasi, meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.
2. Aspek Usaha Koperasi, ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi dalam hal rasa tanggungrenteng atau kemauan untuk berbagi resiko (risk sharing), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan keuntungan.
3. Aspek Keuangan Koperasi, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya seperti prosentase pelunasan simpanan wajib dan prosentase besaran simpanan sukarela.
4. Aspek Manfaat Koperasi terhadap Anggota, ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka.
5. Aspek Manfaat Koperasi terhadap Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

Pada tahun 2021 jumlah koperasi yag berkualitas di Kabupaten Sidoarjo ditargetkan sebesar 21,84% atau sebanyak 321 koperasi dari total keseluruhan koperasi 1.470. Realisasi jumlah koperasi berkualitas tahun 2021 sebesar 21,84% atau 321 koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa capaian jumlah koperasi berkualitas tercapai 100%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 20,70% atau sebanyak 305 koperasi, maka terdapat peningkatan

angka sebesar 16 koperasi atau sekitar 1,14%. Upaya untuk meningkatkan koperasi berkualitas adalah :

- Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas, manajer dan karyawan koperasi;
- Peningkatan kinerja usaha koperasi melalui pelatihan manajemen usaha koperasi;
- Memfasilitasi pemasaran produk koperasi;
- Penyediaan klinik konsultasi koperasi;
- Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

Adapun perkembangan jumlah koperasi yang berkualitas dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.56

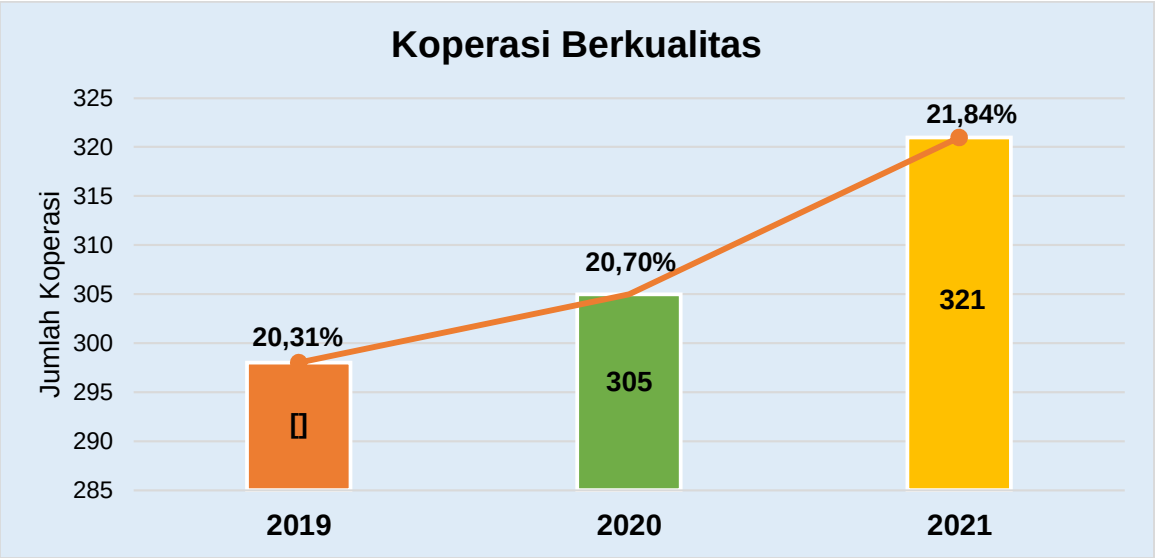

Sumber Data : Diskop Kab. Sidoarjo

Koperasi Sehat

Koperasi yang sehat dapat dilihat dari berbagai segi. Selain telah memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah tentunya koperasi yang sehat juga mengupayakan sehat secara organisasi, mental dan usaha. Sehat organisasi dilihat dari rapat anggota dan badan pengurus yang optimal, sehat mental dilihat dari tanggung jawab para anggota dan badan pengurus serta adanya aktivitas maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat, sedangkan sehat usaha dilihat

dari pengelolaan koperasi yang berlandaskan azas serta prinsip-prinsip dasar koperasi.

Berdasarkan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi maka koperasi wajib dinilai kesehatannya setiap tahunnya. Adapun penilaian kesehatan koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut :

1. Permodalan
2. Kualitas Aktiva Produktif
3. Manajemen
4. Efisiensi
5. Likuiditas
6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Koperasi sehat mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek usaha koperasi, aspek keuangan koperasi, aspek manfaat koperasi terhadap anggota, aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.

Pada tahun 2021 jumlah koperasi sehat di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 505 koperasi dari total keseluruhan 1.470 koperasi atau 34,35%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu sebanyak 485 koperasi atau sebesar 32,99% maka terdapat peningkatan angka 20 koperasi sehat atau sekitar 1,36%.

Adapun perkembangan jumlah koperasi sehat dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.57

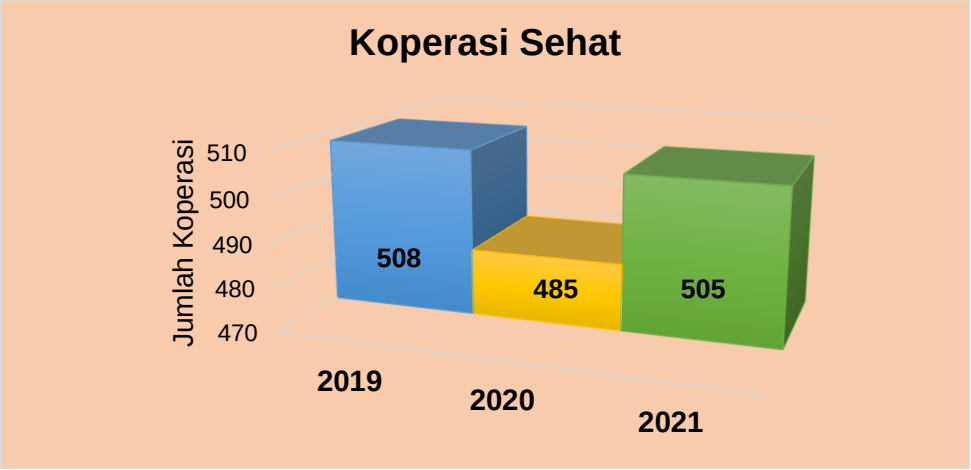

Sumber Data : Diskop Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak koperasi sehat, yaitu :

- Melakukan Pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan langsung datang ke koperasi ataupun dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan langsung dengan aspek manajemen dan pengelolaan keuangan koperasi.
- Melakukan Pengawasan Koperasi. Pengawasan koperasi bertujuan agar koperasi tidak keluar dari koridor jati diri koperasi dan akan menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi serta mengurangi resiko dari investasi ilegal yang merugikan masyarakat.
- Penyediaan Informasi Pasar. Dalam penyediaan informasi pasar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengajak koperasi untuk mengikuti ajang promosi baik didalam maupun diluar daerah sehingga dapat meningkatkan laba usaha dari anggota koperasi dan secara otomatis juga akan berdampak positif terhadap permodalan.

Koperasi Aktif

Koperasi yang aktif tentunya telah memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah seperti memiliki nomor induk koperasi (NIK), Surat Keputusan Anggaran Dasar oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Koperasi aktif mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek badan usaha aktif.

Koperasi sehat mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek usaha koperasi, aspek keuangan koperasi, aspek manfaat koperasi terhadap anggota, aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.

Pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.213 koperasi dari total keseluruhan 1.470 koperasi atau 82,5%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu sebanyak 1.205 koperasi atau 81,97% maka terdapat peningkatan angka 8 koperasi atau sekitar 0,56%.

Adapun perkembangan jumlah koperasi aktif dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.58

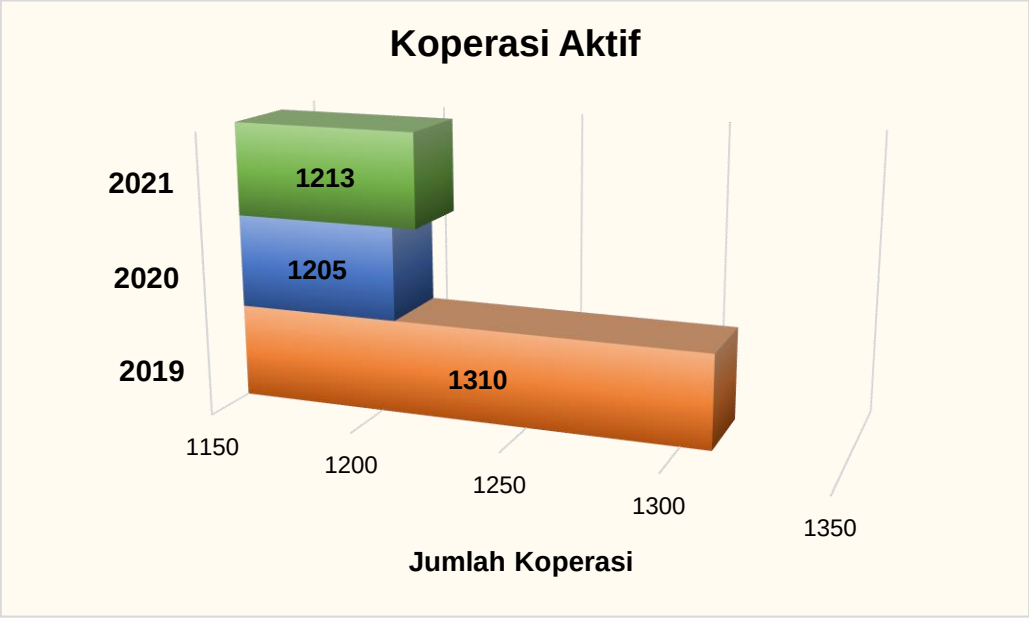

Sumber Data : Diskop Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak koperasi aktif, yaitu :

- Revitalisasi Koperasi;
- Melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen koperasi dalam bentuk bimbingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian;
- Memberikan bantuan/layanan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi koperasi dalam bentuk Klinik Koperasi;

Persentase usaha mikro yang mandiri

Usaha Mandiri merupakan usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal, menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri.

Pada tahun 2021 jumlah usaha mikro yang mandiri di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3.299 usaha mikro dari total keseluruhan 176.425 usaha mikro atau

1,87%. Apabila dibandingkan dengan target yaitu sebesar 1,87% maka tercapai 100%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 3.228 atau 1,83% maka terdapat peningkatan angka 71 usaha mikro mandiri atau sekitar 0,04%.

Adapun perkembangan jumlah usaha mikro yang mandiri dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.59

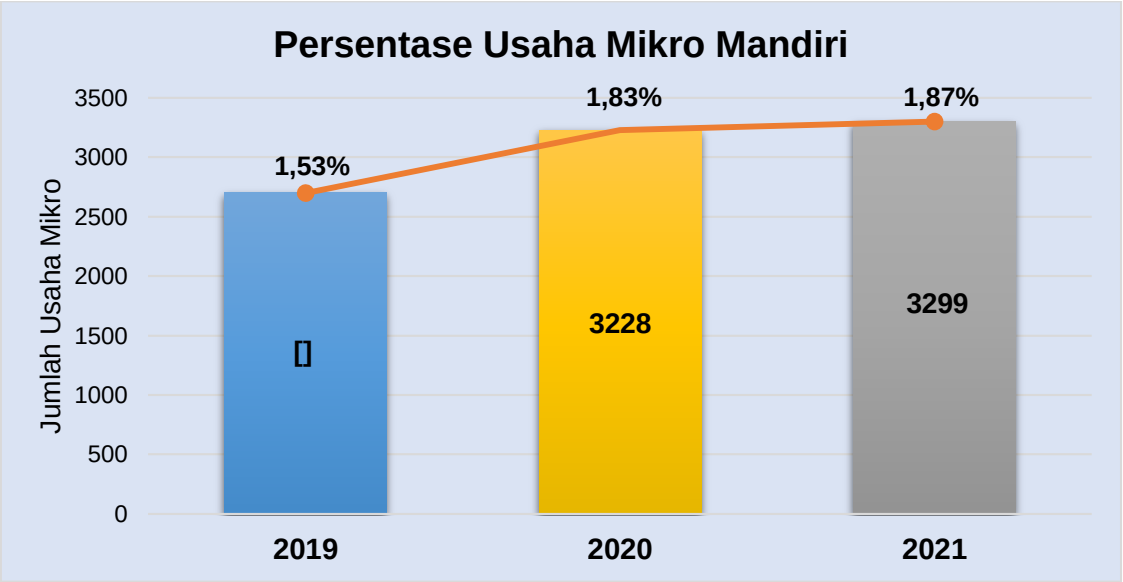

Sumber Data : Diskop Kab. Sidoarjo

Usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2021, terbanyak dari kelompok usaha mikro sebagai berikut :

1. Usaha Mikro Kelompok Makanan dan Minuman
2. Usaha Mikro Kelompok Minuman
3. Usaha Mikro Kelompok Jasa

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak usaha mikro yang masuk kategori usaha mikro yang mandiri, yaitu :

- Melaksanakan pelatihan dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan keterampilan berwirausaha, hingga pembekalan sistem pelaporan keuangan usaha mikro

- Pendampingan (*coaching dan/atau mentoring*), baik melalui program-program yang disertai pemberdayaan reguler oleh pendamping maupun melalui klinik usaha mikro
- Perluasan akses pasar dalam berbagai bentuk pameran, fasilitasi kemitraan dan jaringan usaha
- Fasilitasi Perizinan Usaha
- Fasilitasi Pembiayaan

Pencetakan Wirausaha Baru

Wirausaha Baru merupakan upaya untuk menumbuhkan kewirausahaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ketrampilan berusaha.

Pencetakan wirausaha baru sampai dengan 2021 sebanyak 689 WUB dengan target sasarannya adalah masyarakat baik pemuda, ibu rumah tangga maupun masyarakat yang sudah mempunyai usaha (minimal 1 tahun).

Perkembangan pencetakan wirausaha baru dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik III.B.60

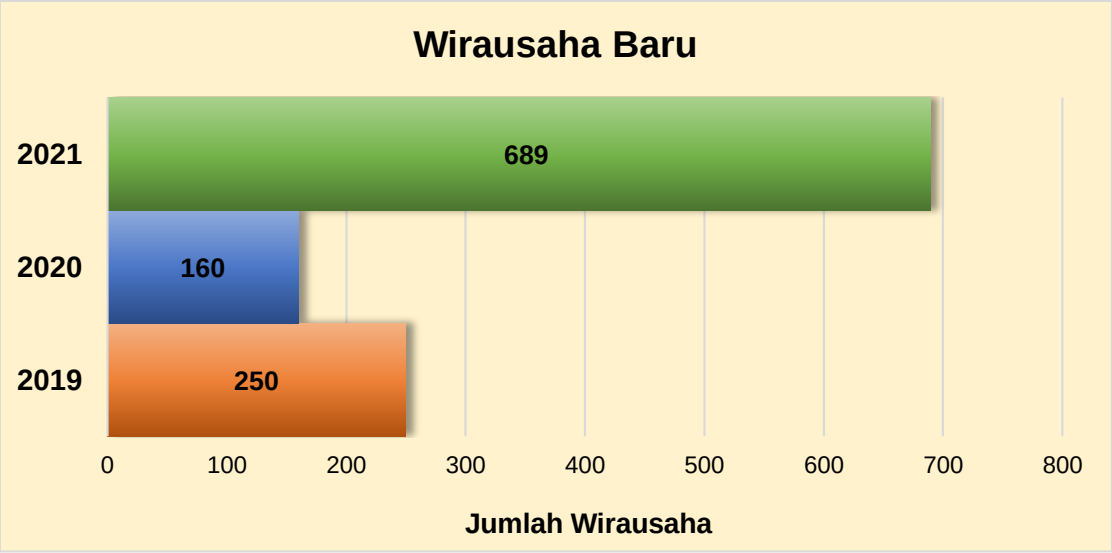

Sumber Data : Diskop Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan agar semakin banyak wirausaha baru yang bermunculan, yaitu melalui sosialisasi kewirausahaan dan inkubasi usaha berupa pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha.

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan**

  Penyusunan Draft Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Pemberdayaan Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan

- **2.000 Warung Rakyat Direnovasi**

  Penyusunan Draft Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Renovasi Warung Rakyat

- **20.000 UMKM Naik Kelas**

  Usaha Mikro Naik Kelas sesuai dengan SK Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Nomor 188/14/438.5.15/2022 sebagai berikut:

  a. Pelaku usaha mikro telah terdaftar pada sistem perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS/Izin Edar P-IRT/Sertifikat Halal/BPOM/SNI/Merk.
  b. Pelaku usaha telah memanfaatkan teknologi informasi melalui marketplace/e_commerce.
  c. Pelaku usaha telah mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta yang dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan lainnya.
  d. Pelaku usaha mikro dalam melakukan proses produksi menggunakan sarana prasarana yang bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi.
  e. Pelaku usaha mikro mampu mengakses pembiayaan/ permodalan melalui perbankan dan atau lembaga keuangan lainnya atau usahanya menunjukan ada peningkatan omset.

  Pada tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa pelatihan dan sosialisasi untuk mendukung UMKM Naik Kelas, antara lain sebagai berikut :

  1. Pelatihan Desain Produk, yang diikuti oleh 50 peserta
  2. Sosialisasi Bahan Makanan Tambahan, yang diikuti oleh 50 peserta
  3. Sosialisasi bahan pengawet makanan, yang diikuti oleh 50 peserta
  4. Workshop digital marketing, yang diikuti oleh 60 peserta
  5. Bimtek Pengembangan Usaha Mamin, yang diikuti oleh 100 peserta

6. Bimtek Kurasi Produk, yang diikuti oleh 100 peserta
7. Bimtek peningkatan volume usaha, yang diikuti oleh 100 peserta
8. Pameran Dalam Daerah yang diikuti oleh 100 peserta
9. Pameran Virtual, yang diikuti oleh 100 peserta
10. SKKNI Manajemen Pelaksana Pemasaran, yang diikuti oleh 15 peserta
11. SKKNI Penjamah Makanan, yang diikuti oleh 20 peserta
12. Sosialisasi Promosi Jitu Usaha, yang diikuti oleh 100 peserta

c. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** dengan anggaran sebesar Rp.186.752.395 dan terealisasi sebesar Rp.184.329.900 atau 98,70%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Persentase Koperasi Berkualitas	82,50% (1.213)	82,50% (1.213)	100%
Persentase Koperasi Yang Memiliki Derajat Kepatuhan Berkoperasi	27,70% (407)	27,70% (407)	100%

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi	17,40% (200)	17,40% (200)	100%

Realisasi anggaran sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 186.752.395	Rp. 184.329.900	98,70%

2. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi** dengan anggaran sebesar Rp.138.825.146 dan terealisasi sebesar Rp.138.624.400 atau 99,86%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Persentase Koperasi Sehat	41,62% (505)	41,62 (505)	100%

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/USP yang Dinilai Kesehatannya	12,50% (152)	12,50% (152)	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 138.825.146	Rp. 138.624.400	99,86%

3. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** dengan anggaran sebesar Rp.904.153.394 dan terealisasi sebesar Rp.865.948.400 atau 95,77%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Persentase Koperasi yang Didiklat	52,28% (771)	52,28% (771)	100%

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Koperasi yang Terlatih	15,48% (405)	15,48% (405)	100%

Realisasi anggaran sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 904.153.394	Rp. 865.948.400	95,77%

4. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** dengan anggaran sebesar Rp.63.272.205 dan terealisasi sebesar Rp.59.657.900 atau 94,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Persentase Koperasi yang Direvitalisasi	3,01% (3)	3,01% (3)	100%

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi permasalahannya	1.470	1.470	100%

Realisasi anggaran sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	63.272.205	59.657.900	94,29%

5. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)** dengan anggaran sebesar Rp 1.011.035.171 dan terealisasi sebesar Rp 897.897.350 atau 88,81%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	4,75% (3299)	4,75% (3299)	100%

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang terupdate	200	200	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.011.035.171	897.897.350	88,81%

6. **Program Pengembangan UMKM** dengan anggaran sebesar Rp 643.404.482 dan terealisasi sebesar Rp 632.000.500 atau 98,23%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,64%	1,64%	100%

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Pengembangan Usaha Mikro dengan orentasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	100	100	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2021	REALISASI TH. 2021	%
Pengembangan Usaha Mikro dengan orentasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	643.404.482	632.000.500	98,23%

d. **Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup**

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

e. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan Koperasi dan Usaha Mikro dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Pemerintah daerah agar melakukan pendataan terhadap UMKM yang terdampak Covid-19 serta memberikan bantuan modal dan pendampingan agar bisa bangkit kembali	Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/550/438.1.1.3/2020 tentang Relaksasi Kredit Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Penurunan Suku Bunga Dagulir dari 6% menjadi 4% per tahun sampai Oktober 2020, Penundaan Pembayaran selama 4 bulan di Tahun 2020

Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut:

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka peningkatan nilai investasi daerah.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET (Rp)	REALISASI	%
1	Nilai Investasi Daerah	7.037.752.693.895	9.773.158.275.830	138,87

Nilai Investasi Daerah

Investasi yang ada di Pemerintah Daerah meliputi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). PMA adalah kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pada tahun 2021 Nilai Investasi Daerah di Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.9.773.158.275.830 dari target Rp.7.037.752.693.895 maka tercapai 138,87 %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu senilai Rp.7.037.752.693.895 maka terdapat peningkatan senilai Rp.2.735.405.581.935 atau sekitar 38,87 %.

Apabila ditampilkan per unit usaha, maka nilai investasi di tahun 2021 dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

Uraian	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Investasi	17.131.662.000.000	23.832.676.777.188	8.648.955.650.000	7.037.752.693.895	7.037.752.693.895	9.773.158.275.830
Unit Usaha	8.165	6.367	6.367	7.025	7.025	8.200

Upaya yang dilakukan agar nilai investasi semakin meningkat, yaitu antara lain :

- Workshop Kemudahan Berusaha
- Sosialisasi OSS untuk Pengusaha
- Sosialisasi OSS untuk UMKM
- Pendampingan LKPM secara intens kepada pelaku usaha

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Pelayanan Penanaman Modal** dengan anggaran sebesar Rp.1.559.199.808 dan terealisasi sebesar Rp.1.520.790.800 atau 97,54 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
- Prosentase perizinan yang tepat waktu sesuai SOP	100 %	100 %	100 %
- Prosentase perizinan yang diterbitkan	100 %	100 %	100 %

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Prosentase perizinan yang tepat waktu sesuai SOP	- 100 %	- 100 %	100 %
	- Prosentase perizinan yang diterbitkan	- 100 %	- 100 %	100 %

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.559.199.808,00	1.520.790.800,00	97,54

2. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** dengan anggaran sebesar Rp.163.966.192 dan terealisasi sebesar Rp.163.629.900 atau 99,79%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. Prosentase permasalahan penanaman modal yang diselesaikan	44, 75 %	44, 75 %	100 %
2. Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	7.037.752.693.895	9.773.158.275.830	138,38 %

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan data dan monev penanaman modal	Jumlah perusahaan PMA & PMDN yang dimonev	39 perusahaan	31 perusahaan	79,49 %
	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	50 perusahaan	73 perusahaan	146 %
	Jumlah penagihan piutang dan denda retribusi yang dilakukan	50 WR	18 WR	36 %
	Jumlah laporan pembinaan dan monitoring penanaman modal yang disusun	10 laporan	10 laporan	100 %

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan data dan monev penanaman modal	Rp. 163.966.192	Rp. 163.629.900	97,79 %

d. **Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup**

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Penanaman Modal

e. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan Penanaman Modal, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan sosialisasi secara masif terkait prosedur pelayanan perizinan secara online	Melaksanakan workshop kemudahan berusaha
		Sosialisasi OSS untuk pengusaha
		Sosialisasi OSS untuk UMKM
		Pendampingan LKPM secara online
2	Melakukan penyederhanan proses perizinan secara online	Pendampingan alur proses

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan dalam rangka mendorong peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan, melalui prestasi baik dalam bidang kepemudaan maupun olahraga.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh	50	135	270
2	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh	75	329	438,66

Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh

Secara kumulatif jumlah prestasi pemuda yang diperoleh untuk semua tingkat sebanyak 135 prestasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 19 prestasi maka terdapat peningkatan.

Adapun tren capaian Prestasi di bidang Kepemudaan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.61

Sumber Data : Disporapar Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan agar prestasi di bidang Kepemudaan terus meningkat, yaitu : Melaksanakan kegiatan dengan konsisten dan melakukan evaluasi kegiatan berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya agar pelaksanaan kegiatan berjalan lebih baik.

Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh

Pada tahun 2021 terdapat prestasi di bidang olahraga sebagaimana tabel berikut:

1	Tingkat Regional	295 prestasi
2	Tingkat Nasional	34 prestasi
3	Tingkat Internasional	- prestasi

Secara kumulatif jumlah prestasi olahraga yang diperoleh untuk semua tingkat sebanyak 329 prestasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 73 prestasi maka terdapat peningkatan.

Adapun tren capaian Prestasi di bidang Olahraga dapat digamarkan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.62

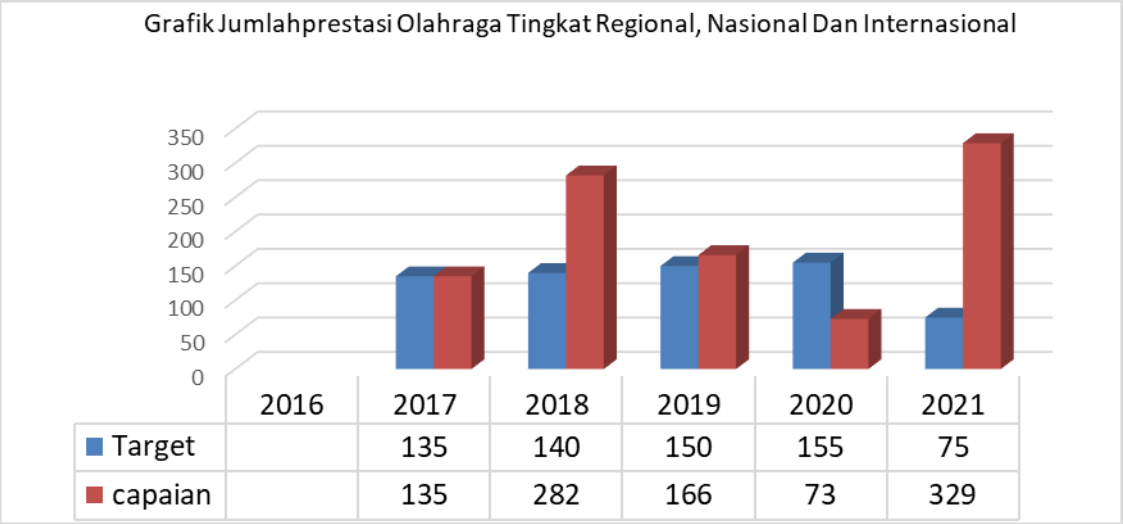

Sumber Data : Disporapar Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan agar prestasi di bidang Olahraga terus meningkat, yaitu :

- Tetap mempersiapkan kondisi atlet tetap prima di tengah kondisi pandemi covid-19
- Lebih banyak mengikuti kompetisi Olahraga di tingkat Regional, Nasional, dan Internasional
- Menyiapkan penghargaaan lebih baik lagi

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **10.000 Beasiswa Kuliah**

  Dilaksanakan mulai tahun 2022.

- **Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda**

  Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kapasitas dan daya saing untuk 200 orang pemuda di Kabupaten Sidoarjo dengan, sebagai berikut :

  1. Pelatihan pembuatan pacul gowang, yang diikuti oleh 150 peserta
  2. Pelatihan costume carnival, yang diikuti oleh 150 peserta

  Tujuan dari pelatihan dimaksud adalah untuk lebih mengenalkan budaya lokal sidoarjo khususnya pemuda.

c. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan** dengan anggaran sebesar Rp.2.832.258.494,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.616.337.455,00 atau 92,38%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Regional / Nasional / Internasional	50	135	270

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang aktif dalam kegiatan/event Kepemudaan	400 Orang	400 Orang	100
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi yang aktif dalam kegiatan Kepemudaan	20 Organisasi	20 Organisasi	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.176.666.573,00	2.044.117.985,00	93,91
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	655.591.921,00	572.219.470,00	87,28

2. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan** dengan anggaran sebesar Rp.20.568.321.504,00 dan terealisasi sebesar Rp.19.383.514.639,00 atau 94,24%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Jumlah Prestasi yang Diraih di Tingkat Regional / Nasional / Internasional	75 Prestasi	329 Prestasi	438,66

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga Prestasi dan Olahraga Lainnya yang Diselenggarakan	3	3	100
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan Kepada Pelaku Keolahragaan	3	3	100
	Jumlah Pelaku Olahraga yang mendapat Penghargaan	20 Orang	42 Orang	210
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Even olahraga rekreasi dan olahraga lainnya yang diselenggarakan	10 Even	10 Even	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.304.988.997,00	1.131.171.433,00	86,68
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	10.481.892.150,00	10.475.610.970,00	99,94
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	8.781.440.357,00	7.776.732.236,00	88,56

d. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan urusan bidang kepemudaan dan olahraga, sebagai berikut :

No.	Perda / Perbup	Tentang
1	Perbup Nomor 085 Tahun 2021	Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat

e. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan kepemudaan dan olahraga, dengan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mempercepat pembangunan sirkuit di Kecamatan Tulangan yang FS sudah jadi	Kami masih fokus pada kegiatan yang bersifat prioritas dikarenakan anggaran yang terbatas, akan tetapi kami tetap akan melanjutkan rencana pembangunan tersebut
2	Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait untuk mengelola parkir di GOR agar lebih tertib, rapi dan potensi pendapatannya tinggi	Kami sudah melakukan koordinasi dengan skpd lain , khususnya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo terkait pengelolaan parkir dan informasinya sekarang sudah pada tahap Lelang untuk menentukan pemenangnya
3	KONI agar memantapkan program, baik program tertib organisasi maupun tertib cabang olahraga dalam rangka pembinaan atlet	Dalam rangka pembinaan dan pengembangan atlet Kabupaten Sidoarjo selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan melaksanakan program sesuai perencanaan .

URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelestarian seni dan budaya daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah seni dan budaya daerah yang dilestarikan	4 Kelompok	4 Kelompok	100 %

Jumlah Seni dan Budaya Daerah yang dilestarikan

Pada tahun 2021 seni dan budaya yang dilestarikan sebanyak 4 kelompok atau meningkat 1 kelompok dari tahun 2020.

Adapun seni dan budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2021, antara lain:

1. Mocopat
2. Karawitan
3. Seni Tari
4. Seni Musik

Pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) budaya Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu :

1. Kupang Lontong
2. Tari Banjarkemuning
3. Musik Patrol
4. Udeng Pacul Gowang

Surat pencatatan inventaris Kekayaan Intelektual Komunal Dirjen Kekayaaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual Ir. Razilu M.Si kepada 4 orang

komunitas usaha yang didampingi oleh Bupati Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, pada tanggal 14 Januari 2022.

Adapun upaya yang dilakukan agar semakin banyak seni dan budaya yang dilestarikan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

- Sosialisasi pemajuan kebudayaan
- Penyuluhan bahasa indonesia (ejaan bahasa indonesia, bentuk dan pilihan kata)
- Lomba cerita budaya desaku
- Pembinaan seni budaya di masyarakat (mengemas seni budaya tradisional diera digital)
- Pembinaan seni budaya di sekolah (kreatifitas dimasa pandemi, peluang dan tantangan)

b. Pelaksanaan Program Prioritas Bupati di Tahun 2021

- **Program ke – 12 : Youth Center, Bangun Pusat Kreatifitas Anak Muda**

  Telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka membina kreatifitas anak muda, diantaranya :

  1. Sosialisasi pemajuan kebudayaan, yang diikuti oleh 106 orang
  2. Penyuluhan Bahasa Indonesia, yang diikuti oleh 150 orang
  3. Lomba Cerita Budaya Desaku, yang diikuti oleh 98 kelompok peserta lomba

  Selain itu sebenarnya akan dilaksanakan Pagelaran Seni FKPU (Festival Kesenian Pesisir Utara), namun karena pandemi covid-19 maka dilakukan pembatalan kegiatan sesuai dengan Surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tanggal 3 September 2021 Nomor : 430/3070/118.2/2021.

c. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Dari alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.216.124.608 terealisasi sebesar Rp.190.429.176 atau 88,11%., dengan capaian indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase budaya lokal yang dilestarikan	67%	67%	100.00%

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	65%	65%	100.00%
Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok seni yang dibina	55%	55%	100.00%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	144.621.292,00	129.179.176,00	89,32
Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	71.503.316,00	61.250.000,00	85,66

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Dari alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.452.785.395,00 terealisasi sebesar Rp.340.472.500,00 atau 75,19%. dengan capaian indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Seni Tradisional yang Dilestarikan	75%	75%	100.00%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah seniman dan guru seni yang dibina	250 orang	328 orang	131,20%
	Jumlah kelompok seni yang mengikuti pergelaran, festival, lomba	2 Kelompok	2 Kelompok	100,00%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	452.785.395,00	340.472.500,00	75,19

d. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Kebudayaan

e. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk Urusan Kebudayaan.

Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan pertanahan dilaksanakan dalam rangka terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah sesuai prosedur sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan yaitu penyelesaian permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah secara keseluruhan dengan realisasi penyusunan 1 dokumen Database Pertanahan dan 15 pensertifikasian pengadaan tanah sesuai target pada tahun berkenaan. Untuk pengajuan mediasi sengketa tanah belum ada pada tahun 2021, sehingga dapat dikatakan tercapai 100%.

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan** dengan anggaran sebesar Rp.62.512.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.49.556.000,00 atau 79%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah sesuai prosedur	100	100	100

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah yang terfasilitasi sesuai prosedur	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 62.512.500,00	Rp 49.556.000,00	79

2. **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan** dengan anggaran sebesar Rp.104.375.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.71.874.128,00 atau 68%

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah sesuai prosedur	100	100	100

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah yang terfasilitasi sesuai prosedur	15 Dokumen	15 Dokumen	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 104.375.600	Rp 71.874.128	68

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan urusan pertanahan.

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk urusan pertanahan

Urusan Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan persandian dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengembangan implementasi teknologi informatika dalam kondisi aman.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan persandian, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
	TARGET	REALISASI	%
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	400	537	134

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di organisasi, sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi yang dirancang untuk dapat digunakan oleh setiap organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat

kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya bisnis proses yang ada.

Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013, dan dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area di bawah ini:

~ Kategori Sistem Elektronik yang digunakan Instansi
~ Tata Kelola Keamanan Informasi
~ Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
~ Kerangka Kerja Keamanan Informasi
~ Pengelolaan Aset Informasi, dan
~ Teknologi dan Keamanan Informasi

Hasil yang diraih oleh Kabupaten Sidoarjo untuk INDEKS KAMI Tahun 2021 dengan Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO 27001 adalah 537 atau 134% dari target yang ditetapkan dengan kategori Cukup Baik, dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 dengan nilai 494, tahun 2021 meningkat 109%

Grafik III.B.63

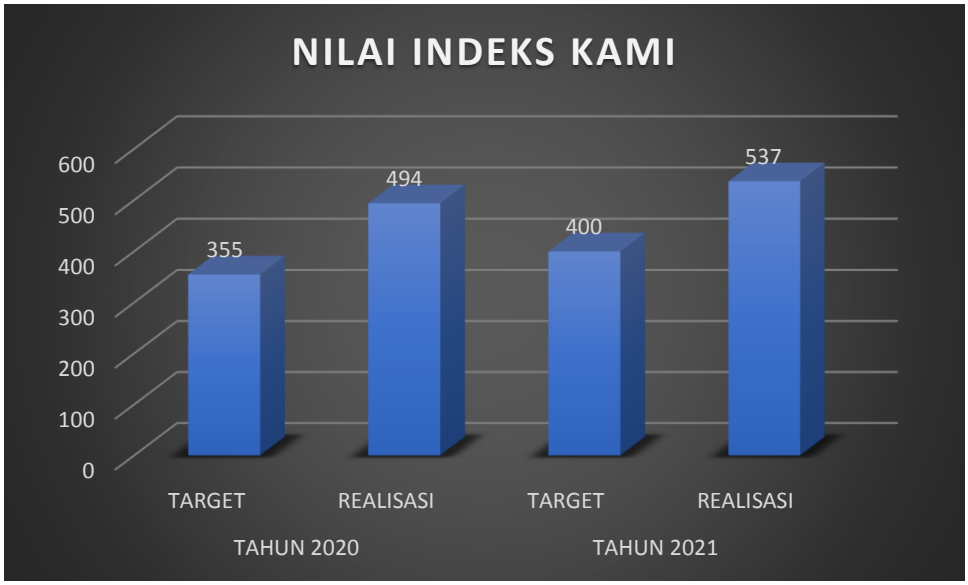

Sumber Data : Diskominfo Kab. Sidoarjo

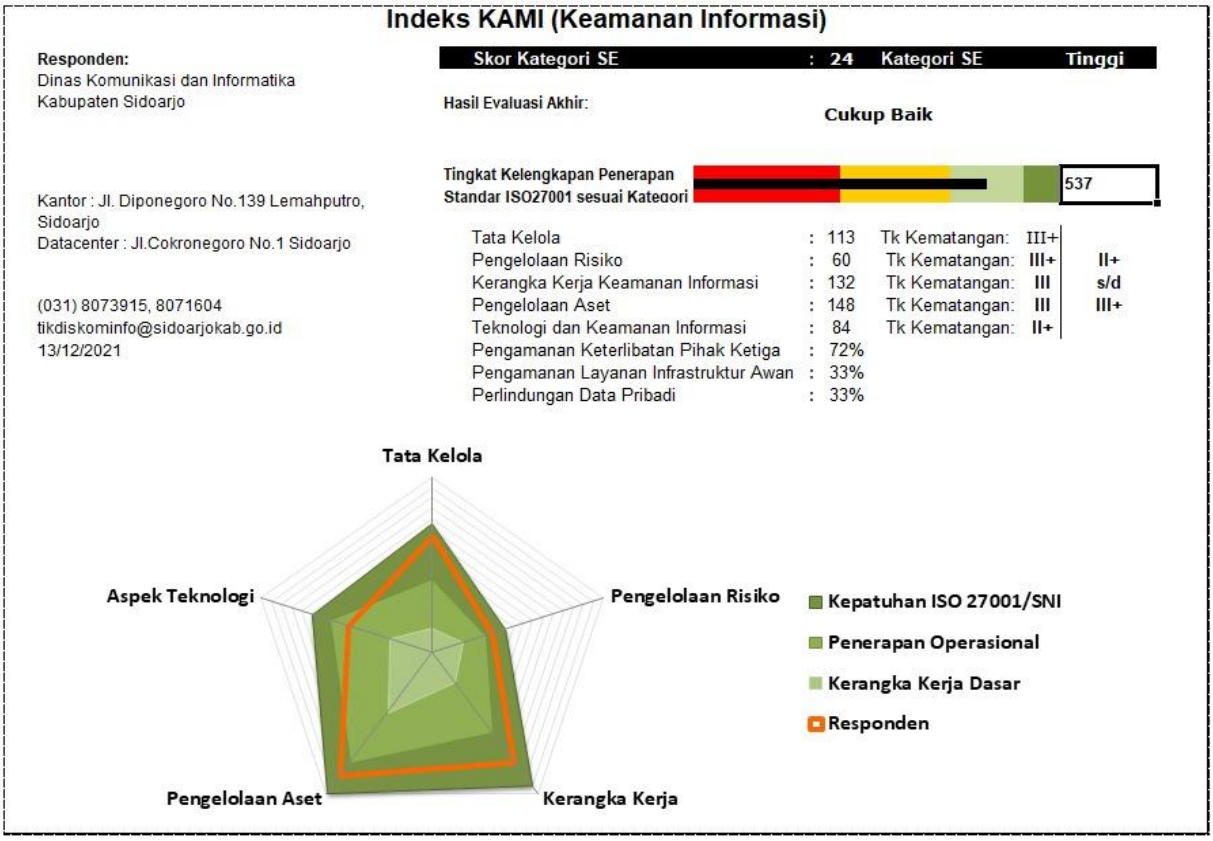

Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Responden:
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

Kantor : Jl. Diponegoro No.139 Lemahputro, Sidoarjo
Datacenter : Jl.Cokronegoro No.1 Sidoarjo

(031) 8073915, 8071604
tikdiskominfo@sidoarjokab.go.id
13/12/2021

Skor Kategori SE : 24 Kategori SE Tinggi

Hasil Evaluasi Akhir: **Cukup Baik**

Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori 537

Tata Kelola	: 113	Tk Kematangan:	III+	
Pengelolaan Risiko	: 60	Tk Kematangan:	III+	II+
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 132	Tk Kematangan:	III	s/d
Pengelolaan Aset	: 148	Tk Kematangan:	III	III+
Teknologi dan Keamanan Informasi	: 84	Tk Kematangan:	II+	
Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	: 72%			
Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan	: 33%			
Perlindungan Data Pribadi	: 33%			

Setelah menyelesaikan penggelaran kabel fiber optik diseluruh OPD sampai dengan Kecamatan di tahun 2020, maka ditahun 2021 lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan bandwith di semua OPD. Selain itu juga dilakukan penggelaran fiber optik Km di beberapa lokasi sepanjang ± 5 Km, selain itu juga dilakukan pemasangan koneksi internet menggunakan radio wireless untuk menjangkau lokasi yang masih belum terjangkau dengan jaringan fiber optik. Adapun lokasi dimaksud adalah :

1. Mapolres Sidoarjo Baru (Raya Cemengkalang)
2. Pujasera Gajah Mada (Binaan Disperindag)
3. Balai Desa Lebo Sidoarjo
4. Balai Desa Pabean Sedati
5. Taman Abhirama Sidoarjo
6. *Wisata Bahari Tlocor (Menggunakan Radio Wireless)*

Dari Pembangunan Jaringan FO yang ditetapkan dalam RENSTRA selama 5 tahun DISKOMINFO melakukan percepatan diakhir tahun 2021 Semua OPD dan kecamatan telah terhubung jaringan FO DISKOMINFO, pada tahun 2020 karena adanya Pandemi COVID-19 kami juga membantu memfasilitasi sekolah, agar pembelajaran daring dapat berjalan dengan lancar dan juga kami memfasilitasi internet untuk memantau Pintu Air untuk dapat pengendalian banjir.

Sesuai dengan fungsi seksi keamanan informasi dan telekomunikasi terkait layanan keamanan informasi e-government, diperlukan kebijakan keamanan informasi yang mengatur norma, standard, prosedur dan kriteria pelaksanaan/inplementasi keamanan e-government di pemerintah kabupaten Sidoarjo agar implementasi keamanan informasi e-government dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp.260.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.246.395.670,00 atau 94,77%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Jaringan OPD dan Kecamatan yang terintegrasi	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah area kontrol keamanan informasi yang terpenuhi berdasar ISO 27001:2013	6	6	100
	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	7	7	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	260.000.000	246.395.670	94,77

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan urusan persandian.

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk urusan persandian

Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan sttaistik dilaksanakan dalam rangka meningkatnya kualitas data statistik. Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan persandian, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase data statistik yang diolah dan dianalisa	100	100	100

Realisasi capaian kinerja daerah penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Statistik pada tahun 2021 mampu mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menggambarkan bahwa data yang ada atau tersedia dalam Dokumen Statistik telah digunakan oleh OPD/Instansi terkait serta masyarakat di Kabupaten Sidoarjo baik untuk perencanaan pembangunan maupun untuk keperluan lainnya.

Dalam hal penyusunan dan pengumpulan dokumen statistik ini selain dilakukan secara mandiri oleh bidang statistik juga dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo dan pihak terkait.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan dokumen statistik daerah untuk mendukung informasi pembangunan. Berikut Dokumen- dokumen yang disusun diantaranya:

1. Indikator Ekonomi;
2. Analisa Dana Bantuan Sosial;
3. Indeks Harga Konsumen;
4. Indikator Tenaga Kerja;
5. Analisa Gender;
6. PDRB Menurut Pengeluaran;
7. Sidoarjo Dalam Angka;
8. PDRB Menurut Lapangan Usaha;
9. Indeks Pembangunan Manusia;
10. Kecamatan Dalam Angka;
11. Statistik Daerah;
12. Statistik Kesejahteraan Rakyat;
13. Data Statistik Sektoral;
14. Profil Desa;
15. Profil Kesehatan;
16. Profil Pendidikan;
17. Profil Perikanan;
18. Proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU);
19. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bidang Pendidikan;
20. Buku Saku;
21. Indikator Kesejahteraan Rakyat;
22. Buku Direktori Perusahaan;
23. Metadata Kegiatan OPD;
24. Metadata Variabel OPD;
25. Metadata Indikator OPD.

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** dengan anggaran sebesar Rp.542.222.354,00 dan terealisasi sebesar Rp.513.571.670,00 atau 94,72%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase data statistik yang diolah dan di analisa	100%	100%	100

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik yang diolah dan di analisa	100%	100%	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	542.222.354	513.571.670	94,72

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan urusan bidang statistik, sebagai berikut :

No.	Perda / Perbup	Tentang
1	Perbup Nomor 041 Tahun 2021	Satu data Kabupaten Sidoarjo

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk urusan statistik

Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan kearsipan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kearsipan.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan kearsipan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	27,78%	27,78%	100%

Persentase lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku

Untuk mengetahui Prosentase Lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku yaitu dengan mengetahui jumlah Lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku dibanding dengan jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang dimaksud lembaga antara lain Lembaga terdiri dari OPD, Desa/ Kelurahan, BUMD, KPU Sidoarjo adalah dengan melihat kualitas tata kelola kearsipan di OPD sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis sebagai berikut :

- Tata naskah
- Klasifikasi arsip
- Sarana prasarana
- SDM

Jumlah Lembaga yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku di tahun 2021 sebanyak 115 Lembaga dari total jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 414 Lembaga sehingga Prosentase Lembaga yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku tahun 2021 sebesar 27,78% dari target 27,78% atau capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 105 lembaga, maka tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 10 lembaga atau 8,69%.

Adapun tren capaian Lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.64

Perkembangan Lembaga Yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku

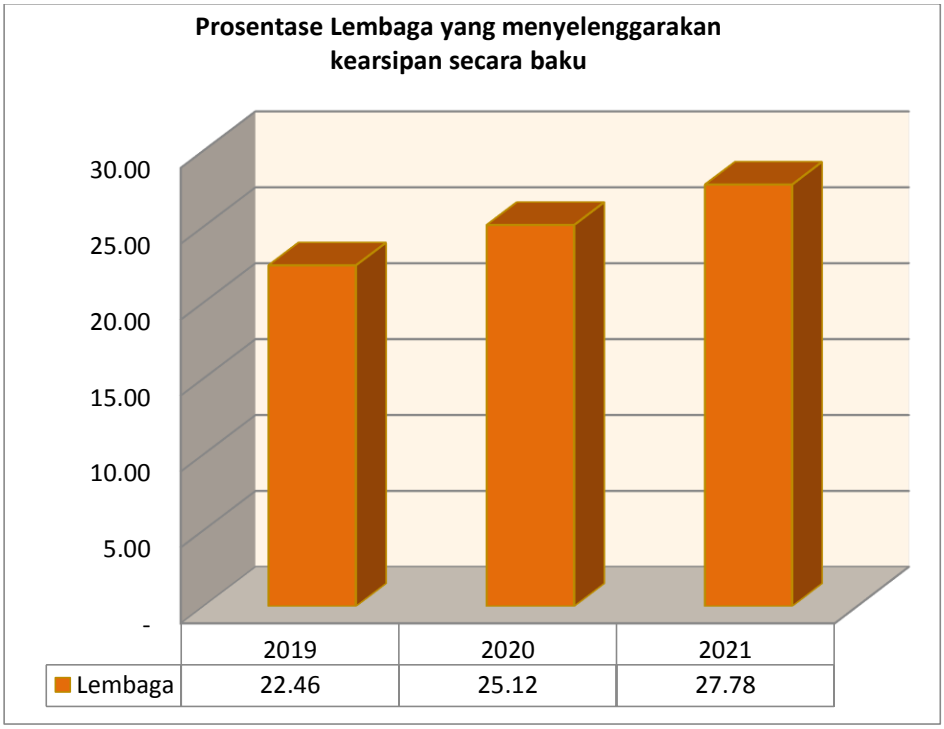

Sumber Data : Disperpusarsip Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan agar semakin banyak lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku, yaitu :

- meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip
- pendampingan dan monitoring secara berkala mengenai arsip di Lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo
- Mengadakan bintek kearsipan secara terus-menerus
- Mengadakan sosialisasi/ penyuluhan kearsipan
- Mengadakan Workshop Kearsipan
- Mengusulkan untuk lokasi pendirian Depot Arsip
- Mengusulkan anggaran ke OPD
- Mengusulkan anggaran untuk alih media ke OPD terkait sesuai kebutuhan
- Memberikan sosialisasi/workshop ke OPD secara rutin dan berkala terkait pentingnya Record Center
- Mengusulkan kepada Bupati Sidoarjo melalui Kepala BKD untuk penambahan tenaga arsiparis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Pengelolaan Kearsipan** dengan anggaran sebesar Rp.391.662.025,- dan terealisasi sebesar Rp.389.287.694,- atau 99,39 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Jumlah lembaga yang telah menyelengarakan sistem kearsipan dengan standart yang di tentukan	115 Lembaga	115 Lembaga	100%
Presentase pelayanan kearsipan yang terpenuhi	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah arsip dinamis yang dikelola	a. 50 Berkas	a. 50 Berkas	100%
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah arsip statis yang dikelola	a. 500 Berkas	a. 519 berkas	103,8%
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	a. Jumlah Pengguna Layanan arsip b. Jumlah Lembaga arsip yang dibina	a. 65 Orang b. 111 Lembaga	a. 65 Orang b. 111 Lembaga	a. 100% b. 100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.300.000,00	Rp 2.915.000,00	88,33%
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 215.961.600,00	Rp 214.392.148,00	99,27%
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 172.400.425,00	Rp 171.980.546,00	99,76%

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan urusan kearsipan, sebagai berikut :

No.	Perda / Perbup	Tentang
1	Perbup Nomor 066 Tahun 2021	Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan kearsipan, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mengkaji ulang untuk pendirian Depo Kearsipan yang rencananya ditempatkan di Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan	Telah disampaikan melalui surat kepada Bapak Bupati Sidoarjo tanggal 8 November 2021 Nomor 011/532/438.5.18/2021 terkait rencana pembangunan depot arsip yang ditindaklanjuti koordinasi dengan BPKAD dan Bagian Administrasi Pembangunan bahwa lokasi pembangunan Depot Arsip dibangun pada eks Kantor BPN di Jalan Jaksa Agung Soeprapto no 7a Sidoarjo
2	Agar basis data yang ada di Depo Arsip/Kearsipan konversi menjadi data digital	Telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 jasa pengelolaan arsip digital

Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan perpustakaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan gemar dan budaya baca masyarakat.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan perpustakaan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Minat Baca	71	73,04	102,87%
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	156,5225	156,5225	100%

Indeks Minat Baca

Gemar membaca dapat diartikan sebagai kesukaan akan membaca, ada kecenderungan hati ingin membaca. Menurut Suhaenah Suparno **minat baca** seseorang diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah bacaan yang dibaca selain buku pelajaran (dalam Abdul Rahman, 2005:122). Dengan demikian minat baca seseorang berimbas kepada jumlah koleksi yang pernah dibaca yang bersangkutan (bukan buku pelajaran/modul/buku paket sekolah). Adapun koleksi bacaan yang dibaca bisa diperoleh dari mana pun juga.

Indeks minat baca masyarakat di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebesar 73,04 dari target 71 sehingga capaian 102,87% dan masuk pada kategori tinggi. Indeks ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu 71,79 maka dengan angka peningkatan 1,25 atau sekitar 1,76%.

Mayoritas kecamatan telah memiliki indeks minat baca yang tinggi, hanya 2 kecamatan saja yang indeks minat baca nya masuk pada kategori sedang, yaitu : Kecamatan Tarik dan Kecamatan Prambon. Indikator minat baca yang perlu mendapat perhatian karena indeksnya masuk pada kategori sedang adalah ketertarikan membaca dibandingkan bermain gadget/ bermedia sosial.

Selain Indeks Gemar Membaca diukur pula Indeks kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 yaitu sebesar 60,06 dan masuk pada kategori sedang. Pengukuran Indeks kegemaran membaca adalah Rutinitas untuk mendapatkan informasi secara online melalui membaca dan Rutinitas untuk mendapatkan informasi secara online melalui mengunduh.

Secara segmen demografi (kelompok usia, pendidikan terakhir yang ditamatkan, dan pekerjaan), terdapat perbedaan yang signifikan pada indeks minat baca maupun Indeks kegemaran membaca sebagai berikut :

- Masyarakat yang usianya lebih muda, cenderung memiliki indeks minat baca maupun Indeks kegemaran membaca yang lebih tinggi
- Masyarakat dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi (diploma/ sarjana) dan pascasarjana cenderung memiliki indeks minat baca maupun Indeks kegemaran membaca yang lebih tinggi
- Masyarakat dengan pekerjaan mahasiswa, pelajar, wirausaha/ UMKM cenderung memiliki indeks minat baca maupun Indeks kegemaran membaca yang lebih tinggi.

Jenis bacaan yang digemari oleh masyarakat Sidoarjo adalah :

- Bacaan cetak : Koran dan Majalah
- Bacaan online : Berita/ koran online dan komik

3 (tiga) genre bacaan fisik yang disukai masyarakat baik bacaan cetak maupun bacaan online, yaitu Agama, Hiburan, dan Kesehatan.

Mayoritas masyarakat Sidoarjo cenderung tidak pernah berkunjung ke tempat-tempat yang menyediakan bahan bacaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Namun diantara tempat-tempat yang menyediakan bahan bacaan, tempat yang paling sering dikunjungi berikut aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Toko Buku (2,74%)
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)/ co-working place (2,24%)
- Café/ warung/ restoran yang terdapat pojok baca (2%)

Adapun tren capaian Indeks Minat Baca dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.B.65
Perkembangan Indeks Minat Baca

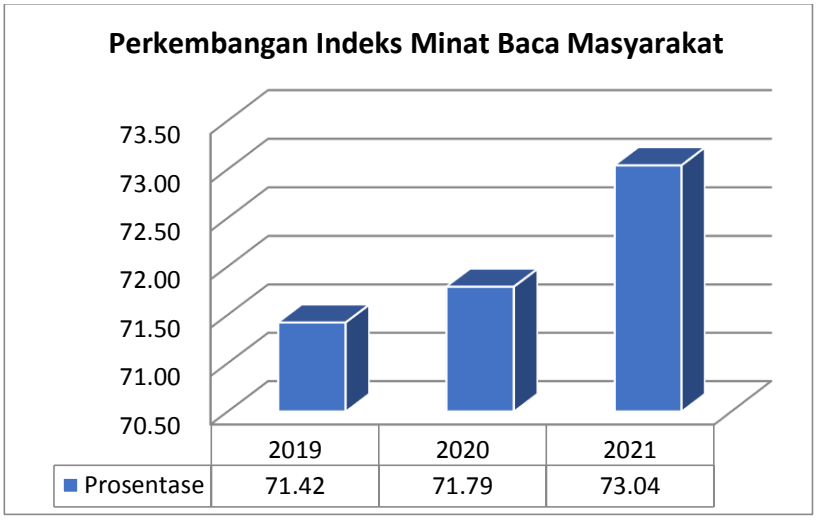

Sumber Data : Disperpusarsip Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Minat Baca dapat tercapai optimal, yaitu :

- Dilaksanakannya promosi/ sosialisasi melalui gerakan gemar membaca dengan mengadakan lomba mendongeng, lomba perpustakaan sekolah/desa/kelurahan
- membentuk perpustakaan percontohan di Desa/ Kelurahan
- sosialisasi pengelolaan perpustakaan di Desa/ Kelurahan maupun di masyarakat
- peningkatan kualitas SDM perpustakaan baik melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan
- Mensosialisasikan Permendes No. 16 tahun 2018 tentang pemanfaatan dana desa untuk perpustakaan.
- Mensosialisikan UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan utamanya untuk pembudayaan literasi di sekolah
- Pembinaan dan memotivasi Kades/Kakel dan Kepala Sekolah untuk mengembangkan perpustakaan
- Mengadakan Bimtek/pelatihan untuk petugas pengelola perpustakaan desa dan sekolah

- Disahkannya Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang dapat mendorong semua stakeholder dalam pengembangan perpustakaan
- Mengadakan kegiatan - kegiatan yang melibatkan masyarakat dan mitra perpustakaan seperti :
  - Lomba mendongeng
  - Lomba perpustakaan sekolah/desa

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah untuk mengetahui kondisi perpustakaan baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, pemustaka dan anggota perpustakaan yang ada di kabupaten Sidoarjo.

Adapun tujuan dilakukannya pekerjaan ini adalah untuk :

a. Mengetahui **Pemerataan Layanan Perpustakaan** sebaran perpustakaan.
b. Mengetahui **Ketercukupan Koleksi Perpustakaan,** diantaranya: Jumlah koleksi (judul dan eksemplar buku), Judul koleksi digital/e-resources, berkala yang dilanggan, sirkulasi perbulan dalam 1 tahun, dan anggaran pengadaan koleksi. Sehingga tergambar rasio perpustakaan dengan penduduk perkapita dan rasio penduduk: Koleksi bahan perpustakaan berbasis wilayah.
c. Mengetahui **SDM/ Tenaga Perpustakaan**. Sehingga tergambar rasio Rasio penduduk dengan tenaga berbasis wilayah dan rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan berbasis lembaga.
d. Mengetahui **Pengunjung** perpustakaan, diantaranya; jumlah anggota perpustakaan, profil pemustaka, jumlah kunjungan tahun. Sehingga tergambar rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan berbasis wilayah dan rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan berbasis lembaga. Sehingga tergambar rasio penduduk: pemanfaatan perpustakaan berbasis wilayah, rasio penduduk: pemanfaatan perpustakaan basis lembaga.
e. Mengetahui jumlah Perpustakaan Ber-SNP
f. Mengetahui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dibidang perpustakaan
g. Mengetahui jumlah Anggota Perpustakaan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2021 tercapai 156,5225 dari target 156,5225 sehingga tercapai 100%. Kecamatan dengan indeks literasi paling rendah adalah Kecamatan Waru sedangkan yang tertinggi adalah Kecamatan Tarik.

Unsur – unsur yang masih rendah/ belum memenuhi kondisi idelal, yaitu :

1. Ketersediaan perpustakaan
2. Ketersediaan koleksi
3. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan promosi
4. Kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat tercapai optimal, yaitu :

- Mengaktifkan kembali perpustakaan desa yang “mati suri”
- Melakukan pembinaan tenaga perpustakaan agar dapat mengelola perpustakaan dengan baik dalam hal : penataan koleksi dan ruangan yang layak pakai.
- Bekerjasama dengan mahasiswa jurusan perpustakaan untuk magang sebagai tenaga perpustakaan di desa/ kelurahan
- melibatkan masyarakat dalam lomba-lomba, mendongeng, dan sebagainya dengan sarana perpustakaan desa/kelurahan
- Meningkatkan frekuensi dan pemerataan kehadiran perpustakaan keliling ke desa/kelurahan
- Memperbaiki sarana dan prasarana Perpustakaan
- Meningkatkan jumlah dan jenis koleksi
- Menyelenggarakan dan aktif mempromosikan adanya kegiatan secara rutin, misalnya berupa lomba-lomba, pelatihan gratis, dongeng, dan sebagainya

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Pembinaan Perpustakaan** dengan anggaran sebesar Rp.1.570.967.875.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.518.533.887.000,- atau 96,66%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Jumlah koleksi perpustakaan	103.000 Eksemplar	144.707 Eksemplar	140,49%
Jumlah pengunjung perpustakaan	165.000 Orang	165.320 Orang	100,19%
Jumlah perpustakaan di Kabupaten Sidoarjo	944 Perpustakaan	945 Perpustakaan	100%

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	8000 Eks.	8118 Eks	101,47 %
	Jumlah perpustakaan di Kabupaten yang dikelola secara administratif	928 Perpus	928 Perpus	100 %
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks minat baca masyarakat Sidoarjo	71	73,04	102,87%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.422.792.072,00	Rp 1.396.088.637,00	98,12%
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 148.175.803,00	Rp 122.445.250,00	82,64%

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan urusan perpustakaan, sebagai berikut :

No.	Perda / Perbup	Tentang
1	Perbup Nomor 068 Tahun 2021	Gerakan Budaya Literasi Di Kabupaten Sidoarjo

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan perpustakaan, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak desa untuk pembentukan perpustakaan di setiap desa	Pembentukan Perpustakaan Percontohan di desa/ kelurahan yaitu di Desa Kedungkembar Kec. Prambon (2020), Desa Sidorejo Kec. Krian (2021)
2	Di masa pandemi ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus bisa melihat peluang dalam penyediaan buku baca dan meningkatkan budaya baca masyarakat	Meningkatkan Layanan elektronik melalui pengembangan aplikasi SIDIRA dengan menyajikan koleksi e-book agar bisa diakses dimana saja dan kapan saja tanpa datang ke perpustakaan

3. URUSAN PILIHAN

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan pilihan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Urusan Perikanan dan Kelautan

Urusan Perikanan dan Kelautan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Perikanan dan Kelautan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan produksi dan produktifitas hasil olahan perikanan.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Perikanan dan Kelautan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Produksi Perikanan Tangkap Laut	15.800.000 Kg	15.818.400 Kg	100,12%
2	Produksi Perikanan PUD (Perairan Umum Daratan)	560.000 Kg	561.900 Kg	100,34%
3	Produksi Perikanan Budidaya :			
	- Budidaya Air Payau	78.691.317 Kg	79.825.238 Kg	101,44%
	- Budidaya Air Tawar	22.822.191 Kg	22.833.258 Kg	100,05%
4	Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan			
	- Kerupuk Udang	60.500/Kg	60.750/Kg	100,41%
	- Bandeng Asap	127.000/Kg	127.255/Kg	100,20%
5	Tingkat Konsumsi Ikan			

Produksi Perikanan Tangkap Laut

Pada tahun 2021 hasil produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 15.818.400 kilogram dari target 15.800.000 kilogram atau tercapai 100,12%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 15.540.300 kilogram maka terdapat peningkatan 278.100 kilogram atau sekitar 1,79%.

Perkembangan hasil produksi perikanan tangkap laut, sebagaimana tabel berikut:

Hasil Produksi Perikanan Laut					
No	**Tahun**	**Target**	**Realisasi**	**Kenaikan**	**Persentase**
1.	2019	15.400.000 Kg	15.416.200 Kg	196.400 kg	1,29%
2.	2020	15.600.000 Kg	15.540.300 Kg	124.100 kg	0,80%
3.	2021	15.800.000 Kg	15.818.400 Kg	278.100 kg	1,79%

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan tangkap laut dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik III.C.1

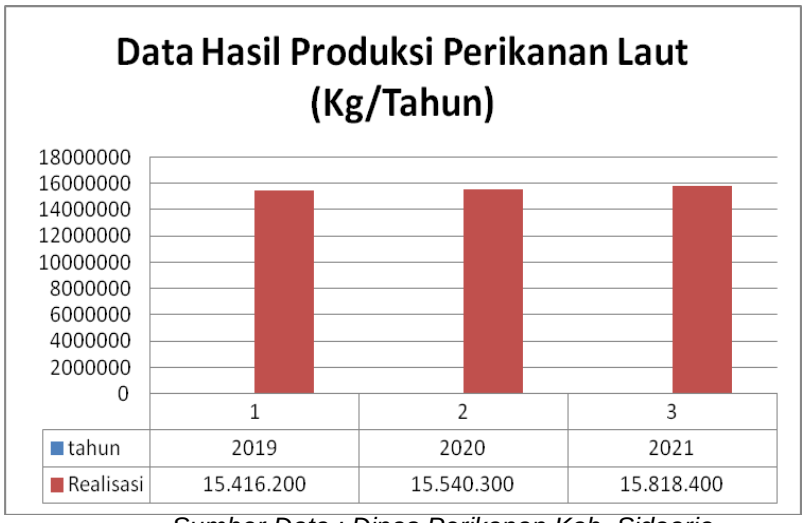

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan tangkap laut semakin meningkat, yaitu:

- Kegiatan-kegiatan seperti pelatihan nelayan, pembinaan nelayan, rembug nelayan tetap dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas serta menerapkan protokol kesehatan yang berlaku;
- Memberikan *logbook* kepada nelayan agar selalu mencatat hasil tangkapannya serta mengadakan pertemuan rutin dengan nelayan.
- Melaksanakan kegiatan diversifikasi usaha nelayan guna memberikan wawasan atau ketrampilan baru yang bisa menambah penghasilan
- Melakukan pendataan, perbaikan dan pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap sehingga nantinya nelayan dapat terbantu dan optimal dalam melakukan aktifitasnya mencari ikan.

Produksi Perikanan PUD (Perairan Umum Daratan)

Pada tahun 2021 hasil produksi perikanan PUD di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 561.900 kilogram dari target 560.000 kilogram atau tercapai 100,34%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 553.200 kilogram maka terdapat peningkatan 8.700 kilogram atau sekitar 1,57%.

Perkembangan hasil produksi perikanan PUD, sebagaimana tabel berikut :

Perairan Umum Daratan (PUD)					
No	**Tahun**	**Target**	**Realisasi**	**Kenaikan**	**Persentase**
1.	2019	543.000 Kg	547.800 Kg	11.700 Kg	2,18%
2.	2020	550.000 Kg	553.200 kg	5.400 kg	0,98%
3.	2021	560.000 Kg	561.900 kg	8.700 kg	1,57%

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan PUD dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik III.C.2

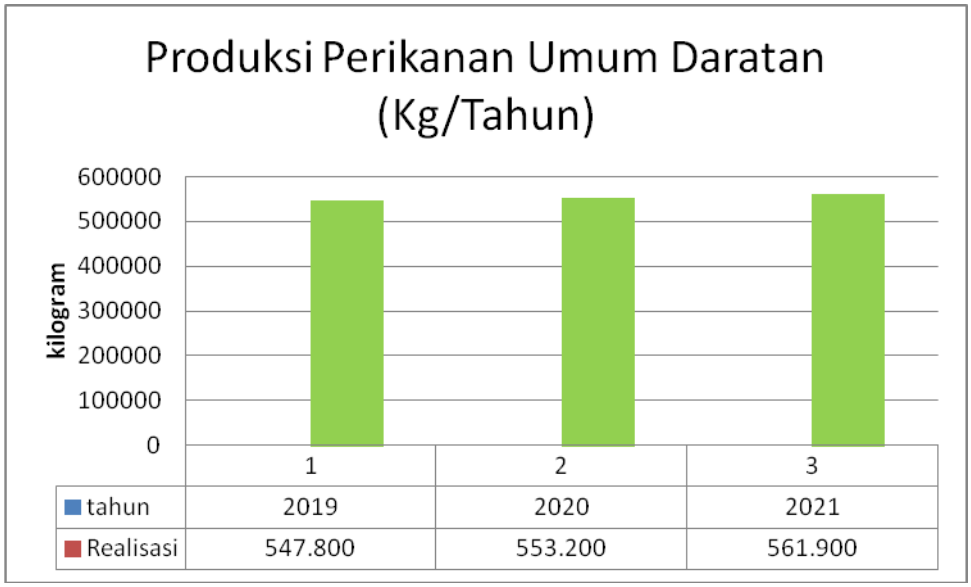

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan PUD semakin meningkat, yaitu:

- Melakukan penebaran benih ikan di perairan umum daratan (PUD) (*restoking*);
- Memasang papan larangan menangkap ikan dengan alat tangkap dilarang di wilayah yang rawan terjadi pelanggaran;
- Melakukan pengawasan perairan secara rutin / patrol perairan;

Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Pada tahun 2021 hasil produksi perikanan budidaya air payau di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 79.825.238 kilogram dari target 78.691.317 kilogram atau tercapai 101,44%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 79.388.600 kilogram maka terdapat peningkatan 436.638 kilogram atau sekitar 1,38%.

Perkembangan hasil produksi perikanan Budidaya air payau, sebagaimana tabel berikut :

Perikanan Budidaya Air Payau						
No	**Tahun**	**Target**	**Presentase**	**Realisasi**	**Kenaikan**	**Persentase**
1.	2019	76.236.179 Kg	0,47	76.568.500 Kg	636.050 Kg	0,83%
2.	2020	76.617.359 Kg	0,50	79.388.600 Kg	2.182.300 kg	2,85%
3.	2021	78.691.317 kg	0,55	79.825.238 kg	436.638 kg	1,38 %
Rata – rata			0,46	77.928.697	860.528	1,29%

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan budidaya air payau dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik III.C.3

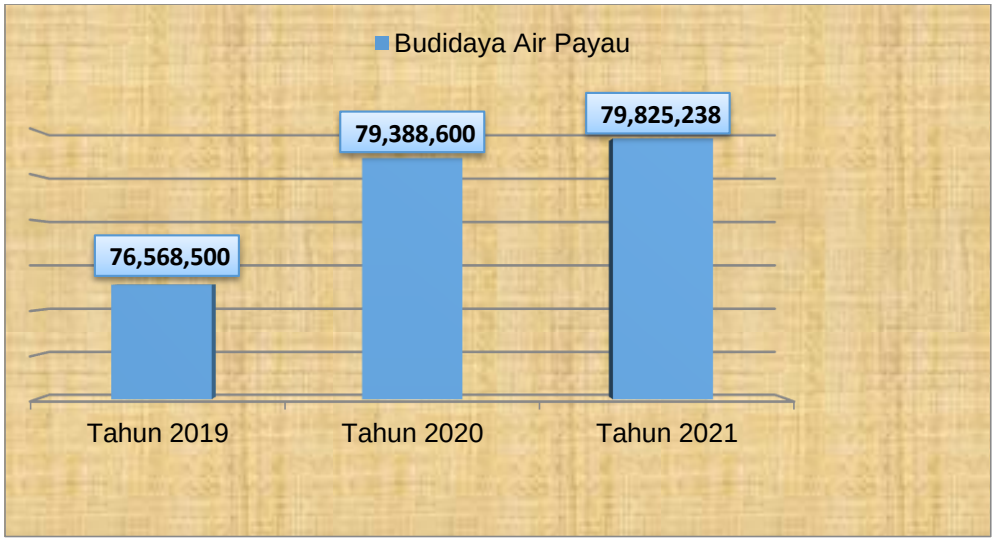

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan budidaya air payau semakin meningkat, yaitu:

- Penyediaan sarana prasarana budidaya
- Pemberian hibah kepada pembudidaya berupa kolam, benih, pakan dan pupuk
- Pengawasan pemakaian OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi)

- Penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik)
- Penggunaan probiotik
- Pembinaan / pelatihan terhadap pembudidaya air payau
- Pelayanan Posikandu (Pos kesehatan ikan terpadu) dalam membantu pembudidaya untuk mengatasi permasalahan terhadap kesehatan ikan, pengambilan sampel residu (ikan / udang dan tanah), pelayanan vaksinasi, jasa konsultasi, maupun pusat informasi baik yang sifatnya aktif maupun pasif.

Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Pada tahun 2021 hasil produksi perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 22.833.258 kilogram dari target 22.822.191 kilogram atau tercapai 100,05%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 22.135.975 kilogram maka terdapat peningkatan 697.283 kilogram atau sekitar 3,15%.

Perkembangan hasil produksi perikanan Budidaya air tawar, sebagaimana tabel berikut :

Perikanan Budidaya Air Tawar						
No	**Tahun**	**Target**	**Prosentase**	**Realisasi**	**Kenaikan**	**Prosentase**
1.	2019	21.479.883 Kg	5,35	21.493.180 Kg	839.446 Kg	4,06%
2.	2020	21.479.900 Kg	0,01	22.135.975 Kg	642.795 Kg	3%
3.	2021	22.822.191 Kg	5	22.833.258 Kg	697.283 Kg	3,15 %
Rata – rata			4,44	21.724.066	750.422	3,57

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan budidaya air tawar dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik III.C.4

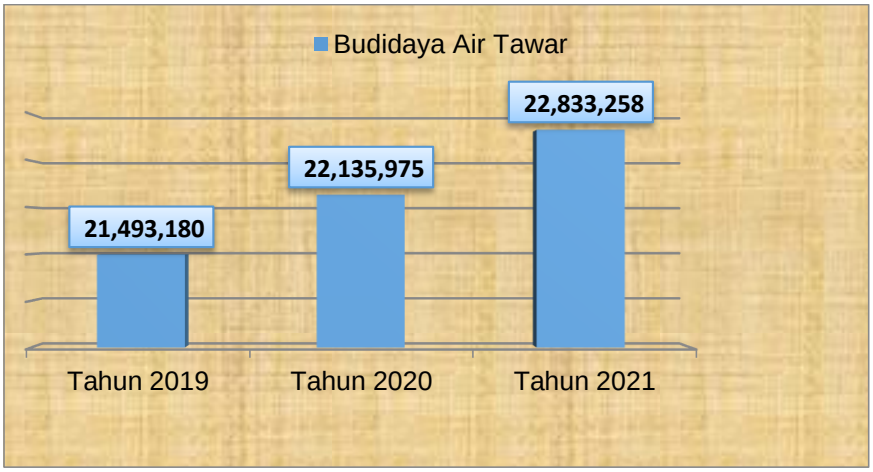

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan budidaya air tawar semakin meningkat, yaitu:

- Penyediaan sarana prasarana budidaya
- Pemberian hibah kepada pembudidaya berupa kolam, benih, pakan dan pupuk
- Pengawasan pemakaian OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi)
- Penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik)
- Penggunaan probiotik
- Pembinaan / pelatihan terhadap pembudidaya air tawar
- Pelayanan Posikandu (Pos kesehatan ikan terpadu) dalam membantu pembudidaya untuk mengatasi permasalahan terhadap kesehatan ikan, pengambilan sampel residu (ikan / udang dan tanah), pelayanan vaksinasi, jasa konsultasi, maupun pusat informasi baik yang sifatnya aktif maupun pasif.

Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers

Produk olahan hasil perikanan sudah beragam dari yang menggunakan nama lokal dengan bentuk yang spesifik sampai yang modern dengan formulasi khusus. Peluang usaha yang semakin terbuka untuk pasar produk olahan hasil perikanan memungkinkan setiap istri pembudidaya ikan atau istri nelayan terjun langsung menjadi pengolah dan pemasar produk olahan hasil perikanan. Di Kabupaten Sidoarjo salah satu komoditi unggulan budidaya adalah udang. Komoditi udang yang melimpah mendorong pelaku utama perikanan / pengolah hasil perikanan untuk menciptakan produk olahan perikanan yang bernilai ekonomis, salah satu produk unggulan berbahan baku udang adalah Kerupuk Udang / Prawn Crackers. Selain itu produk olahan hasil perikanan yang dapat dihasilkan / diproduksi dari bahan baku udang antara lain : nugget udang, bakso udang, petis, terasi, dan lain – lain. Oleh karena itu udang menjadi salah satu indikator strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

Nilai tambah (value added) merupakan pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya termasuk tenaga kerja.

Pada tahun 2021 Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers senilai Rp. 60.750/Kg dari target Rp. 60.500/Kg atau tercapai

100,41%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu Rp. 60.000/Kg maka terdapat peningkatan Rp. 750/Kg atau sekitar 1,25%. Perkembangan Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers, sebagaimana tabel berikut :

	Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang					
No	**Tahun**	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Kenaikan (Rp)**	**Penurunan**	**Persentase**
1.	2019	60.000 / Kg	62.500 / Kg	2.500 / Kg	-	4,16 %
2.	2020	60.500/ Kg	60.000/Kg	-	500 / Kg	-0,83 %
3.	2021	60.500/ Kg	60.750/Kg	250 / kg	-	0,41 %

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik III.C.5

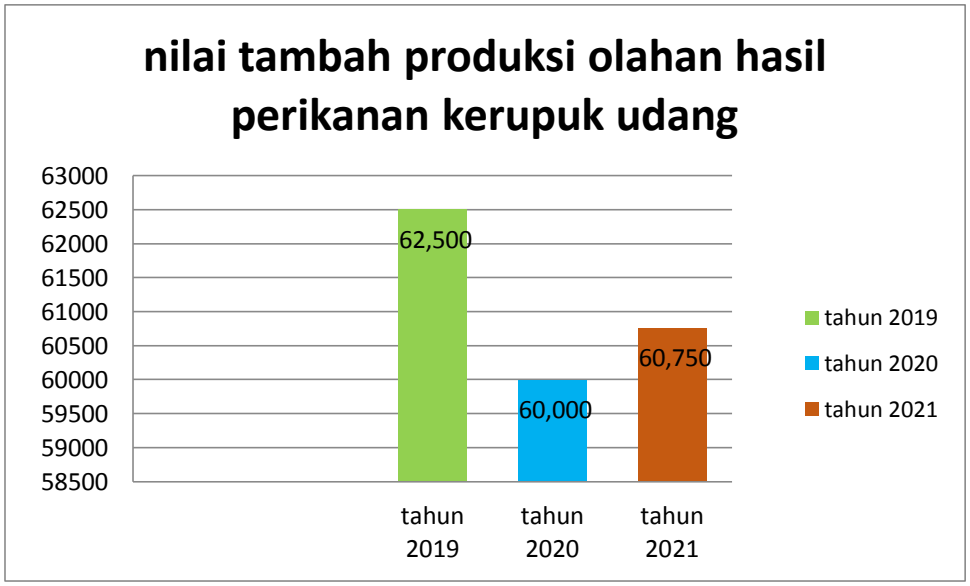

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers semakin meningkat, yaitu:

- Melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif pada pengolah dan pemasar hasil perikanan mulai dari pengolahan sampai dengan pasca pengolahan;
- Memberikan motivasi kepada pengolah dan pemasar agar tidak menyerah dengan kondisi ini dan tetap semangat berinovasi meningkatkan produksinya;

- Menjalin kemitraan dan temu bisnis dengan stakeholder;
- Menjaga Keamanan Produk Olahan Perikanan

Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish

Peluang usaha yang semakin terbuka untuk pasar produk olahan hasil perikanan memungkinkan setiap istri pembudidaya ikan atau nelayan terjun langsung menjadi pengolah dan pemasar produk olahan hasil perikanan. Di Kabupaten Sidoarjo selain memiliki komoditi unggulan yaitu Udang, juga terdapat komoditi produk unggulan berupa Bandeng. Produk olahan hasil perikanan unggulan berbahan baku bandeng yaitu bandeng asap, selain itu bandeng dapat diolah menjadi produk olahan hasil perikanan lainnya yaitu : otak – otak, bandeng presto, bandeng tanpa duri, siomay bandeng, nugget bandeng, bandeng tanpa duri frozen, bandeng sapit, bandeng bakar dan lain – lain. Di Kabupaten Sidoarjo hasil olahan perikanan yang menjadi produk unggulan adalah krupuk udang dan bandeng asap, krupuk udang Sidoarjo rasanya gurih dan tidak berbau karena bahannya dari udang segar dengan sentra produksi di wilayah Sidoarjo, Buduran, Candi.

Nilai tambah (value added) merupakan pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya termasuk tenaga kerja.

Pada tahun 2021 Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish senilai Rp. 127.255/Kg dari target Rp. 127.000/Kg atau tercapai 100,20%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu Rp. 127.000/Kg maka terdapat peningkatan Rp. 255/Kg atau sekitar 0,2%.

Perkembangan Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish, sebagaimana tabel berikut :

	Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap					
No	**Tahun**	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Kenaikan (Rp)**	**Penurunan (Rp)**	**Persentase**
1.	2019	128.000 /Kg	132.500/ Kg	2.500/ Kg	-	1,95%
2.	2020	127.500/ Kg	127.000/ Kg	-	500 /Kg	-0,39%
3.	2021	127.000 / kg	127.255 / kg	255 / kg	-	0,20 %

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik III.C.6

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Mikfish semakin meningkat, yaitu :

- Melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif pada pengolah dan pemasar hasil perikanan mulai dari pengolahan sampai dengan pasca pengolahan
- Memberikan motivasi kepada pengolah dan pemasar agar tidak menyerah dengan kondisi ini dan tetap semangat berinovasi meningkatkan produksinya
- Menjalin kemitraan dan temu bisnis dengan stakeholder
- Menjaga Keamanan Produk Olahan Perikanan

Tingkat Konsumsi Ikan

Tingkat Konsumsi Ikan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mencapai 47,93 kg/kapita/tahun dari target 47,25 kg/kapita/tahun atau mencapai 101,44 %. Dengan peningkatan konsumsi ikan, maka menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan semakin meningkat.

Perkembangan Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Sidoarjo dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.C.7

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang gemar makan ikan, yaitu :

- Melaksanakan sosialisasi Gemarikan di Sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo;
- Melakukan kegiatan Roadshow Gebyar Gemarikan;
- Penjuala bandeng murah;
- Gelar produk atau bazaar komoditas hasil perikanan;

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **100.000 Lapangan Kerja Baru**

  Pada tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa pelatihan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja baru, antara lain sebagai berikut :

  1. Pelatihan Budidaya Air Tawar / Payau, yang diikuti oleh 175 orang peserta
  2. Pelatihan Diversifikasi Nelayan, yang diikuti oleh 19 orang peserta
  3. Pelatihan Teknik Pengolahan Hasil Perikanan, yang diikuti oleh 15 orang peserta

c. **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

1. **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** dengan anggaran sebesar Rp.567.632.547,00 dan terealisasi sebesar Rp.555.889.200,00 atau 97,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Jumlah produksi perikanan tangkap laut	15.800.000 kg	15.818.400 kg	100,12
Jumlah produksi perikanan perairan umum daratan (PUD)	560.00 kg	561.900 kg	100,34

Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan penaangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakandalam 1 daerah kabupaten	Jumlah fasilitasi pengelolaan penangkapan ikan yang disediakan / layak fungsi	2 unit	2 unit	100 %
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan	5 kelompok	5 kelompok	100 %

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan penaangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakandalam 1 daerah kabupaten	414.952.763,00	404.114.100,00	97,39
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	152.679.784,00	151.775.100,00	99,41

2. **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan** dengan anggaran sebesar Rp.78.299.870,00 dan terealisasi sebesar Rp.72.337.726,00 atau 92,39 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Jumlah sungai yang diawasi	2 sungai	2 sungai	100

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten / kota	Jumlah pengawasan Perairan Umum Darat yang dilakukan	8 kali	8 kali	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten / kota Kabupaten/Kota	78.299.870,00	72.337.726,00	92,39

3. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** dengan anggaran sebesar Rp.28.390.541.995,00 dan terealisasi sebesar Rp.28.279.552.728,00 atau 99,61 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Produktivitas Perikanan Budidaya berupa:			
- Bandeng	1.134 kg/ha/th	2.267kg/ha/th	199
- Udang	118 kg/ha/th	383,6 kg/ha/th	325
Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	3,65 %	4,53%	124

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompoko pembudidaya ikan yang menerapkan pelatihan	5 kelompok	7 kelompok	140 %
Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah penerbitan TDPIK yang dihasilkan	30 Dokumen	38 Dokumen	126 %
Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang dibangun	70 paket	120 paket	171 %

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	383.702.903,00	382.606.864,00	99,71
Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	81.862.500,00	80.782.500,00	98,68
Pengelolaa Pembudidaya Ikan	27.924.976.592,00	27.816.163.364,00	99,61

4. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** dengan anggaran sebesar Rp.931.333.686,00 dan terealisasi sebesar Rp.908.650.876,00 atau 97,56%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Jumlah produksi olahan hasil perikanan	8.621.911 kg	8.655.075 kg	99,62
Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang mempunyai sertifikasi jaminan mutu	1 SKP	3 SKP	100

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah legalitas usaha yang dikeluarkan	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	100%
	Jenis olahan ikan yang memenuhi jaminan mutu	1 jenis olahan	1 jenis olahan	100%
	Jumlah Produk yang telah teruji di laboratorium	44 uji	44 uji	100%
	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	100%
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pegolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah surat SKAI yang dikeluarkan	31 SKAI	31 SKAI	100%
	Jumlah UPI yang terdata	100%	100%	100%
	Jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat	100%	100%	100%
	Jumlah kegiatan bandeng murah yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	100%
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran dan bazar promosi produk perikanan	1 kali	1 kali	100%
	Prosentase Retribusi yang didapat dan kebersihan serta kenyamanan depo psasr ikan dan pasar ikan hias	100 %	100%	100%
	Jumlah stand depo ikan dan pasar ikan hias yang disewa	3 Stand	3 Stand	100%
	Jumlah sapras yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	**ANGGARAN Tahun 2021**	**REALISASI Tahun 2021**	**%**
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	21.309.428,00	21.274.250,00	99,83
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	301.174.301,00	288.250.596,00	95,71
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	608.849.957,00	599.126.030,00	98,40

d. **Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup**

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Perikanan dan Kelautan

e. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan Perikanan dan Kelautan, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perlu inovasi dalam upaya peningkatan budidaya tambak dengan keterbatasan lahan yang ada	Menerapkan teknologi busmetik (Budidaya udang vanamei sistem kolam plastik) dengan luasan 500-1000 m2) dengan padat tebar 100 ekor/m2
2	Membangun Depo Ikan yang memadai dan representatif	Pembangunan depo pasar ikan lingkar timur Sidoarjo yang representative perencanaannya sudah direncanakan oleh DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 dengan pembangunan fisik sebesar 60 M yang terbagi atas 3 (tiga) segmen pembangunan yaitu : 1. Area pelelangan 2. Area kuliner 3. Sarana dan Prasarana Penunjang
3	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan seperti normalisasi sungai, pembangunan bronjong, pembangunan jembatan dan pembangunan jalan produksi	Perbup No.13 tahun 2015 sudah direvisi dengan Perbup No 72 tahun 2018 tentang kewenangan desa yang intinya kegiatan jalan produksi itu menjadi tanggung jawab Dinas, jika tidak diatur di peraturan Desa dan status tanah merupakan tanah negara hanya saja merupakan fasilitas umum di tambak dan didukung PERDA Perlindungan pembudidaya, Nelayan dan pengolah , infrastruktur jadi kewenangan dinas.
4	Pembangunan sarana dan prasarana serta pendampingan budi daya air tawar di wilayah Sidoarjo Barat.	Mengakomodir rekomendasi dengan melaksanakan kolam percontohan
5	Memaksimalkan peran Dinas Perikanan dalam hal mewujudkan Sidoarjo menjadi basis atau sentra pembenihan ikan air tawar maupun air payau	Mengupayakan lahan balai benih ikan yang representative di daerah barat dimana menghasilkan tiga komoditas budidaya meliputi : ikan konsumsi, ikan lokal dan ikan hias serta menerapkan teknologi terkait dengan penyediaan pembenihan ikan air payau

Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Pertanian dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Produksi Pertanian :			
	- Padi	1.875.640 Kw	2.004.826 Kw	106,9%
	- Jagung	11.804 Kw	19.151 Kw	162,2%
	- Kacang Hijau	15.800 Kw	18.868 Kw	119,4%
	- Kedelai	1.913 Kw	1.929 Kw	100,8%
	- Sawi	52.088 Kw	56.461 Kw	108,4%
	- Bayam	43.373 Kw	43.540 Kw	100,4%
	- Kangkung	42.628 Kw	56.952 Kw	133,6%
2	Produktivitas Pertanian :			
	- Padi	68,90	68,12	100%
	- Jagung	64,03	64,05	100%
	- Kacang Hijau	19,03	19,07	100%
	- Kedelai	16,54	20	100%
	- Sawi	105,12	106,7	100%
	- Bayam	91,24	95,56	100%
	- Kangkung	61,31	62,15	100%
3	Produksi Tebu	2.969.436 Kw	3.431.367,99 Kw	115,6%
4	Produktivitas Tebu	749,75	749,42	99,95%
5	Produksi Peternakan :			
	- Daging	24.395.131 Kg	39.414.426 Kg	161,6%
	- Susu	2.689.717 Liter	2.749.932 Liter	102,2%
	- Telur	7.988.131 Kg	11.842.957 Kg	148,3%

Produksi Pertanian

Perkembangan produksi pertanian sampai dengan tahun 2021, dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :

No.	Tanaman Pangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Padi	1.982.761 Kw	1.944.938 Kw	2.004.826 Kw
2	Jagung	21.475 Kw	25.848 Kw	19.151 Kw
3	Kacang Hijau	26.912 Kw	14.341 Kw	18.868 Kw
4	Kedelai	6.157 Kw	1.713 Kw	1.929 Kw
5	Sawi	73.379 Kw	62.334 Kw	56.461 Kw
6	Bayam	51.619 Kw	43.792 Kw	43.540 Kw
7	Kangkung	54.184 Kw	50.392 Kw	56.952 Kw

Sebagaimana tabel dimaksud, maka untuk tanaman padi, kacang hijau, kedelai dan kangkung mengalami peningkatan produksi dari tahun 2020. Sedangkan untuk tanaman pangan jagung, sawi dan bayam mengalami penurunan.

Produksi komoditas jagung mengalami penurunan dikarenakan luas tanam dan panen yang menurun karena alih fungsi lahan dan kondisi di lapangan pemanenan jagung dilakukan saat masih muda lebih menguntungkan untuk kebutuhan sayur. Sehingga pemenuhan produksi jagung berupa pipil kering tidak maksimal. Produksi Sawi pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya peralihan komoditas, kebanyakan ada yang beralih ke kacang hijau dan komoditas sayur lainnya seperti bawang merah. Hal yang sama juga terjadi pada komoditas Bayam.

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan produksi pertanian dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.C.8

Perkembangan Produksi Pertanian Padi

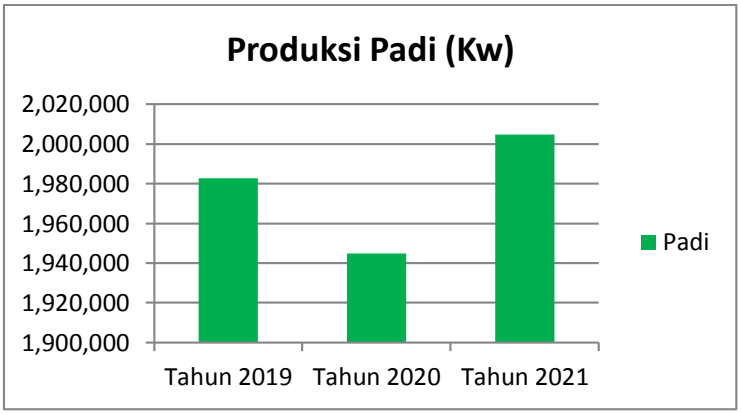

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Grafik III.C.9
Perkembangan Produksi Pertanian Jagung, Kacang Hijau, Kedelai

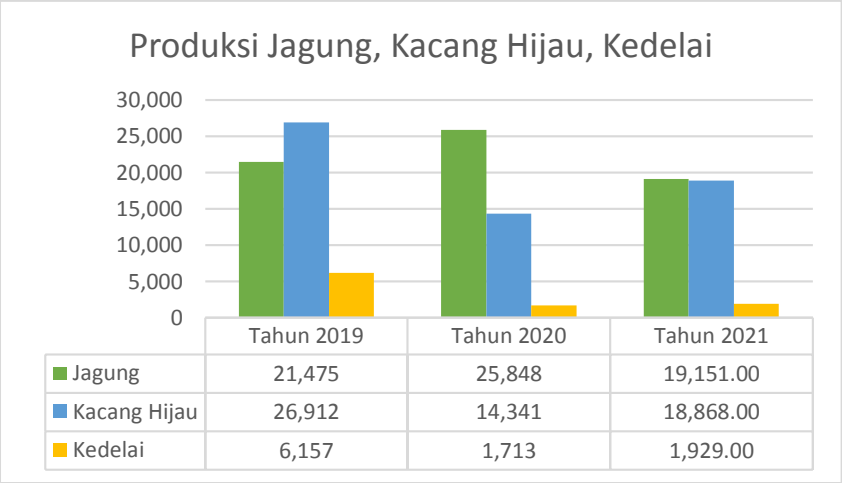

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Grafik III.C.10
Perkembangan Produksi Pertanian Sawi, Bayam, Kangkung

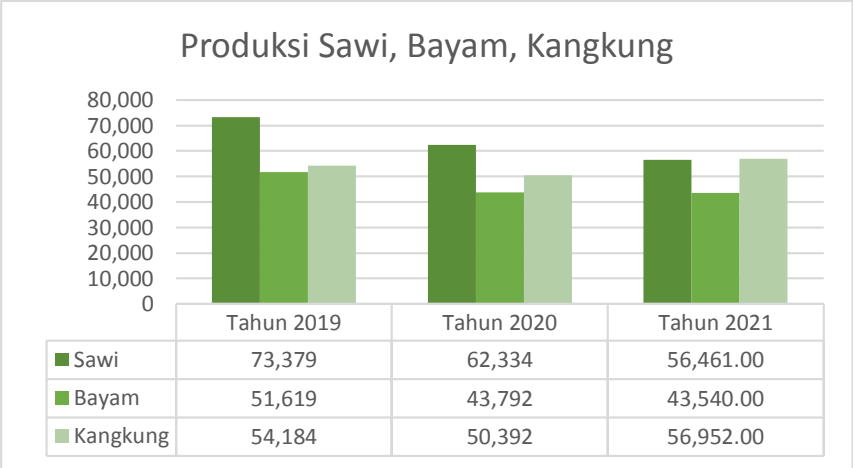

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan produksi pertanian, antara lain :

- Peningkatan penerapan teknologi budidaya dan penggunaan benih/bibit unggul melalui anggaran APBD II dan APBN Pusat berupa bantuan pemerintah sarana produksi untuk komoditas padi, padi dengan spesifikasi khusus(biofortifikasi) dan Kacang hijau.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) petani/kelompoktani melalui pelaksanaan sosialisasi.

- Peningkatan kesejahteraan petani dan mengurangi kehilangan hasil pada saat panen dengan mengalokasikan bantuan sarana pasca panen berupa Combine Harvester, Power Thresher.

Nilai lebih yang didapat dari peningkatan produksi hasil pertanian, yaitu :

- Peningkatan kesejahteraan Petani
- Memutus rantai OPT karena adanya pergiliran dan perubahan varietas tanaman
- Berkurangnya prosentase kehilangan hasil menjadi 12,3 % dan penggunaan alsintan pasca panen lebih menyeluruh yaitu sekitar 44 %.

Produktivitas Pertanian

Perkembangan produktivitas pertanian sampai dengan tahun 2021, dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :

No.	Tanaman Pangan	Tahun 2019 (Kw/Ha)	Tahun 2020 (Kw/Ha)	Tahun 2021 (Kw/Ha)
1	Padi	68,86	68,90	69,12
2	Jagung	65,69	64,00	64,05
3	Kacang Hijau	15	18,96	19,7
4	Kedelai	17,2	16,47	20
5	Sawi	101,07	105,11	106,7
6	Bayam	88,08	91,23	95,56
7	Kangkung	63,6	61,30	62,15
8	Tebu	741	749	749,42

Sebagaimana tabel dimaksud, maka untuk tanaman padi, jagung, kacang hijau, kedelai, sawi, bayam dan kangkung mengalami peningkatan produktivitas dari tahun 2020.

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan produktivitas pertanian dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.C.11

Perkembangan Produktivitas Pertanian Padi, Jagung, Kacang Hijau

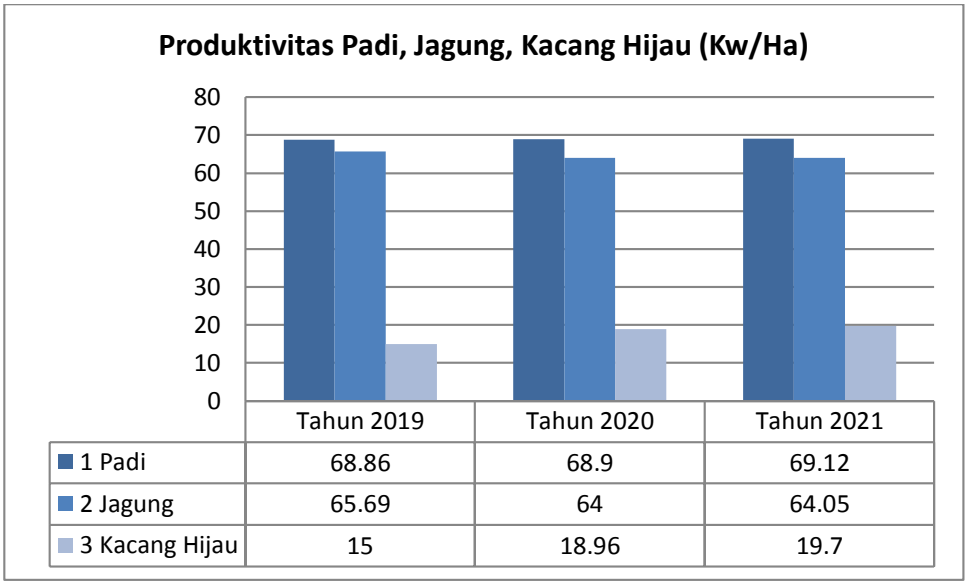

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1 Padi	68.86	68.9	69.12
2 Jagung	65.69	64	64.05
3 Kacang Hijau	15	18.96	19.7

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Grafik III.C.12

Perkembangan Produktivitas Pertanian Kedelai, Sawi, Bayam, Kangkung

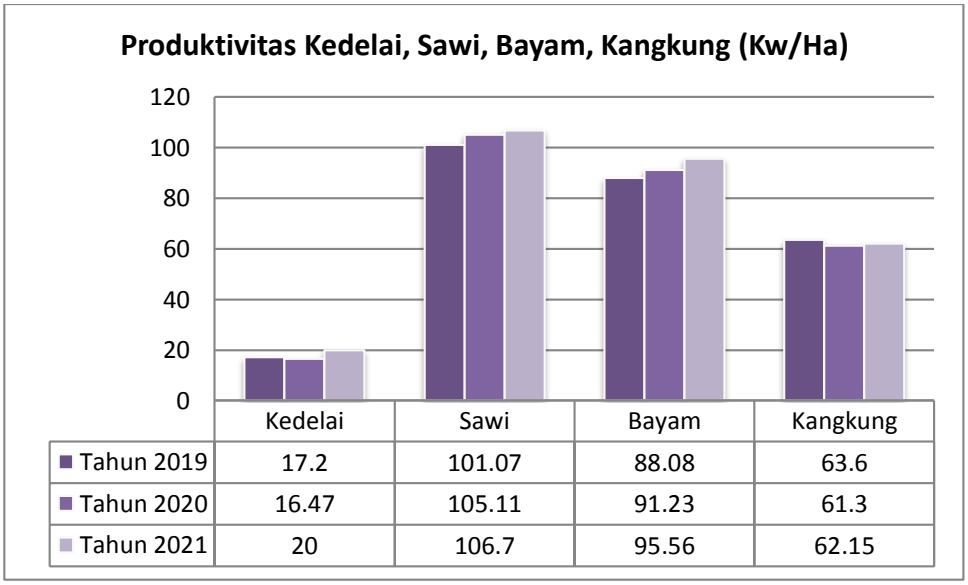

	Kedelai	Sawi	Bayam	Kangkung
Tahun 2019	17.2	101.07	88.08	63.6
Tahun 2020	16.47	105.11	91.23	61.3
Tahun 2021	20	106.7	95.56	62.15

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan produktivitas pertanian, antara lain :

- Penggunaan varietas unggul dan benih bersertifikat
- Pemenuhan sarana produksi yang memadai baik alat mesin pertanian pra tanam sampai dengan pasca panen
- Penerapan teknologi budidaya
- Optimalisasi penggunaan lahan

Produksi dan Produktivitas Tebu

Pada tahun 2021 produksi tanaman tebu di Kabupaten Sidoarjo adalah 3.431.367,99 kw apabila dibandingkan dengan target yaitu 2.969.436,00 kw maka tercapai 115,6%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 3.563.845 kw maka terdapat penurunan angka 132.478 kw atau sekitar 4,72 %. penurunan tersebut disebabkan oleh adanya lahan tebu seluas 158 Ha yang beralih tanam ke komoditas lainnya.

Sedangkan untuk produktivitas tanaman tebu di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 tercapai 749,42 apabila dibandingkan dengan target yaitu 749,75 maka capaian 99,95%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 749 maka terdapat peningkatan angka 0,42 atau sekitar 0,4 %. Peningkatan tersebut disebabkan oleh petani tebu sudah banyak melakukan budidaya sesuai petunjuk teknis yang dianjurkan.

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan produksi dan produktivitas tebu dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.C.13

Perkembangan Produktivitas Tebu

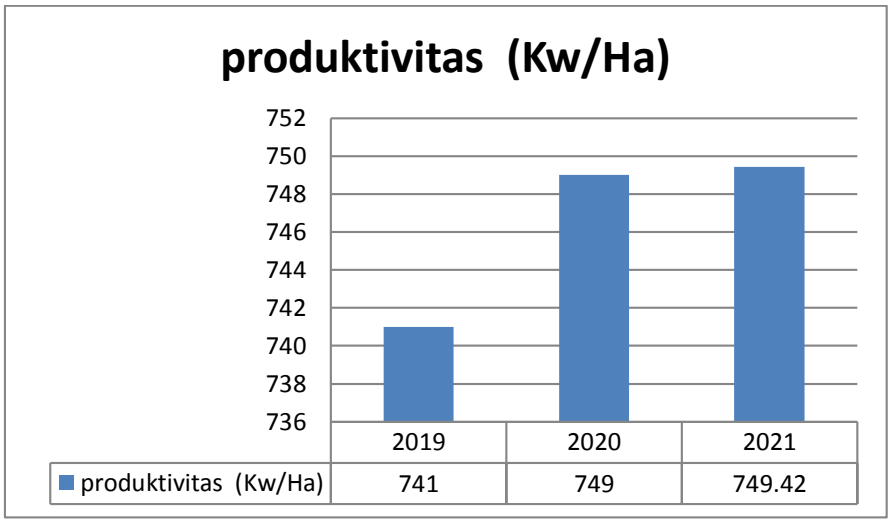

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Grafik III.C.14
Perkembangan Produksi Tebu

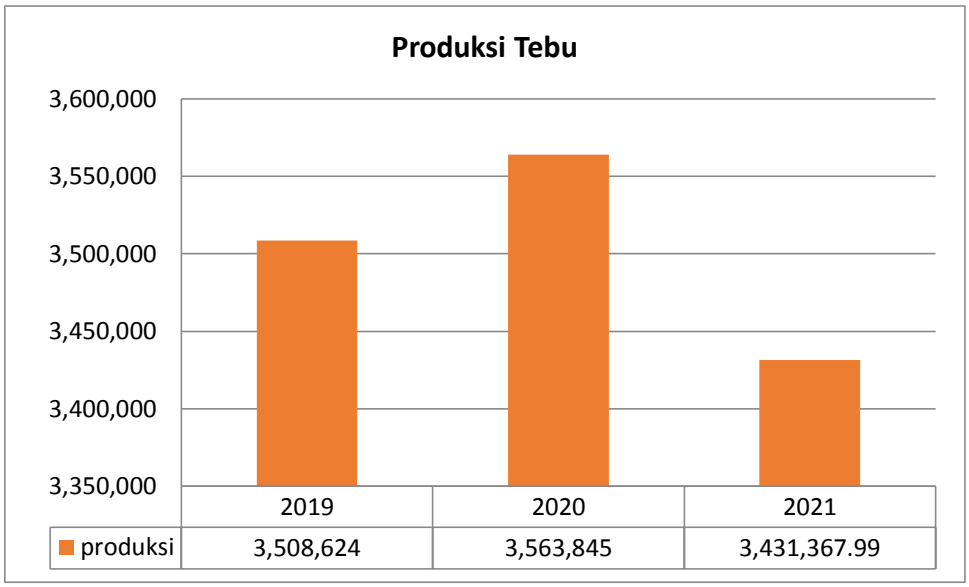

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tebu, antara lain :

- Penggunaan benih unggul dan bermutu
- Melakukan kegiatan bongkar ratoon
- Pengelolaan lahan dengan baik
- Pelaksanaan tanam tepat waktu
- Pemupukan dan pengairan yang cukup
- Hama dan penyakit tanaman yang terkendali

Produksi Perternakan

Perkembangan produksi pertanian sampai dengan tahun 2021, dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :

No.	Hasil Ternak	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Daging	29.611.672 Kg	35.351.442 Kg	39.414.426 Kg
2	Susu	2.699.702 Kg	2.729.155 Kg	2.749.932 Kg
3	Telur	9.754.309 Kg	11.325.983 Kg	11.842.957 Kg

Sebagaimana tabel dimaksud, maka untuk produksi daging, susu dan telur mengalami peningkatan produksi dari tahun 2020. Daging meningkat 4.062.984 Kg, untuk susu meningkat 20.777 Kg sedangkan telur meningkat 516.974 Kg. Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan produksi perternakan dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.C.15
Perkembangan Produksi Perternakan

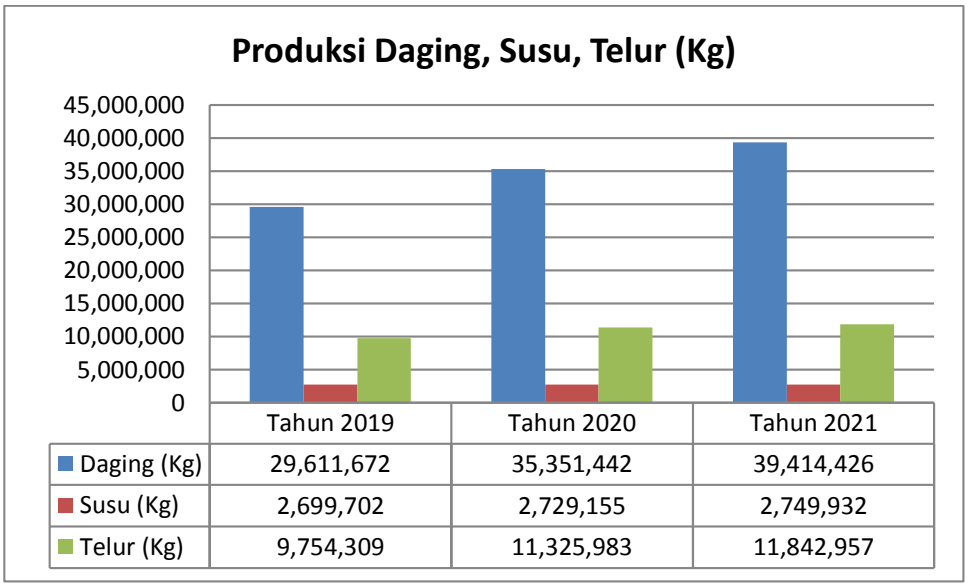

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Daging (Kg)	29,611,672	35,351,442	39,414,426
Susu (Kg)	2,699,702	2,729,155	2,749,932
Telur (Kg)	9,754,309	11,325,983	11,842,957

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Adapaun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan produksi peternakan, antara lain :

- Memberikan pelayanan IB dan PKB ternak.
- Melaksanakan pelatihan budidaya ternak baik ternak besar maupun ternak kecil dan unggas.
- Melakukan pembinaan terhadap kelompok peternak.
- Memfasilitasi terhadap kebutuhan peternak melalui hibah.

Nilai lebih yang didapat dari peningkatan produksi hasil perternakan, yaitu :

- Ketersediaan bahan pangan asal hewani melalui peningkatan populasi.
- Kualitas bahan pangan asal hewani yang lebih baik
- Terbentuknya kelompok peternak yang lebih terampil dan meningkat pengetahuannya dalam melakukan budidaya ternak
- Tersedianya ternak yang berkualitas

Upaya yang dilakukan Urusan Pangan dan Pertanian :

- Pelaksanaan Corporate Farming dikembangkan dengan sasaran mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan dalam menjalankan roda ekonomi pedesaan dan membantu peningkatan produksi;

- Pelaksanaan Urban Farming dengan kegiatan penanaman tanaman hortikultura sebagai alternatif budidaya untuk lahan-lahan yang kurang produktif.
- Telah dilakukan kesepakatan bersama Penyerapan Gula Petani Tebu di Kabupaten Sidoarjo pada periode giling tahun 2021 oleh PT.Indomarco Prismatama (Indomaret) sesuai dengan kesepakatan para pihak, dalam hal kualitas, kuantitas dan harga. Realisasi penjualan gula dengan PT Indomarco Prismatama sebesar 150 Ton.

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **100.000 Lapangan Kerja Baru**

  Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, sebagai berikut :

  1. Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dengan sasaran peserta sejumlah 40 orang yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2021 bertempat di Desa Jemundo Kecamatan Taman dan Desa Kalipecabean Kecamatan Candi
  2. Sosialisasi Budidaya Bawang Merah dengan sasaran peserta sejumlah 50 orang yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2021 bertempat di BPP Krian
  3. Budidaya ternak domba dengan sasaran peserta sejumlah 50 orang yang diselenggarakan pada tanggal 9 november 2021 bertempat di Desa Terungwetan Kecamatan Krian

c. **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

1. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** dengan anggaran sebesar Rp.2.229.154.466,- dan terealisasi sebesar Rp.1.691.303.837,- atau 75,87%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Prosentase lahan yang terkendali dari serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan	10	10	100%
	7	7	100%
Prosentase peningkatan produktifitas perkebunan	0,1	0,12	120%
Prosentase peningkatan produktivitas peternakan	0,75	0,98	130%
Prosentase peningkatan kecukupan pemanfaatan sarana prasarana pertanian dan perkebunan	0,1	0,26	100%
Prosentase peningkatan populasi ternak	0,75	0,78	104%

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Penurunan susut hasil	12,3	12,3	100%
	Prosentase penyaluran pupuk bersubsidi	90	83,81	93,12%
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase kebuntingan hasil IB	40	36	90%
	Prosentase kelahiran hasil IB	25	23	92%
	Prosentase peternak yang mengikuti kontes ternak	0	0	0
	Prosentase kenaikan rata - rata skor ternak yang dikonteskan	0	0	0

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 1.989.279.464,50	Rp 1.453.427.450,00	73%
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 239.875.000,00	Rp 237.876.387,00	99%

2. **Program Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian** dengan anggaran sebesar Rp.5.051.959.308,- dan terealisasi sebesar Rp.3.802.837.893,- atau 75,27%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Prosentase peningkatan kecukupan pemanfaatan prasarana pertanian dan perkebunan	0,1	0,26	100%

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang dikembangkan	48,26	48,26	100%
Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diadakan	0	0	0

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1.196.419.107,80	Rp 1.120.033.400,00	93%
Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 3.855.540.195,75	Rp 2.682.804.493,00	75,27%

3. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** dengan anggaran sebesar Rp.1.122.573.008,51,- dan terealisasi sebesar Rp.1.112.749.589,00,- atau 99,12 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Prosentase penurunan angka kejadian penyakit hewan	1	1	100%
Prosentase produk pangan dan non pangan asal hewan yang asuh	20	20	100%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesmavet	90	90	100%

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase hewan dan ternak yang diberi tindakan pencegahan	25	25	100%
	Prosentase hewan/ternak sakit yang ditangani	50	50	100%
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggan yang terlayani untuk pemeriksaan laboratorium dan jasa medik veteriner	200	298	149%
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase tempat usaha yang menerapkan sanitasi lingkungan sesuai SNI	10	10	100%
	Prosentase penerapan standar kesejahteraan hewan yang dipotong di RPH/RPU/TPU (kesmavet)	10	10	100%
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	prosentase penurunaan pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan	1	1	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 274.850.602,70	Rp 272.521.700,00	99%
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 271.199.599,05	Rp 265.532.339,00	97%
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 484.202.126,76	Rp 482.634.050,00	99%
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Rp 92.320.680,00	Rp 92.061.500,00	99%

4. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** dengan anggaran sebesar Rp.79.852.625,00,- dan terealisasi sebesar Rp.78.606.556,00,- atau 98,44%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Prosentase lahan yang terkendali dari serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan dan hortikultura	10	28,54	285%
Prosentase lahan tanaman yang terkendali dari serangan hama dan penyakit pada perkebunan	7	29,77	425%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Prosentase lahan yang terkendali dari serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan dan hortikultura;	10	28,54	285,44%
	Prosentase lahan tanaman yang terkendali dari serangan hama dan penyakit pada perkebunan	7	29,77	425,27%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp 79.852.625,00	Rp 78.606.556,00	98%

5. **Program Penyuluhan Pertanian** dengan anggaran sebesar Rp.943.786.914,80,- dan terealisasi sebesar Rp.794.824.054,00,- atau 84%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase kelompok tani yang naik kelasnya	2,3	2,3	100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Prosentase luas lahan yang dikembangkan melalui metode penyuluhan	0	0	0

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp 943.786.914,80	Rp 794.824.054,00	84%

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Pertanian

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan pertanian, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Lebih memperhatikan pertanian holtikultura karena sebagian masyarakat Kabupaten Sidoarjo sudah bergeser menjadi petani holtikultura	DEM Bawang Merah pada 7 (Tujuh) Kelompoktani masing-masing seluas 0.5 Ha
2	RPH Krian agar dioperasionalkan di tahun 2021	1. Penjajakan ke perusahaan/ distributor daging untuk menggunakan RPH Modern. 2. Sosialisasi ke pengguna RPH lama untuk beralih memotong ke RPH Modern agar daging yang dihasilkan lebih ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
3	Membuat saluran tersier untuk saluran persawahan sendiri	Pengadaan Exavator Mini
4	Menyediakan pupuk yang bersubsidi ke para petani	Pendampingan penyusunan eRDKK bagi petani untuk mendapatkan kebutuhan pupuk bersubsidi dari Pemerintah Pusat.

Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Pariwisata dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kunjungan yang didukung dengan pertumbuhan industri kreatif.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Pariwisata sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah kunjungan wisatawan	877.461 Orang	1.045.825 orang	117,84
2	Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan	1 Hari	2 Hari	200

Jumlah kunjngan wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebanyak 1.045.825 orang dari target 887.461 orang atau capaian 117,84%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 844.072 orang maka terdapat peningkatan angka 158.364 atau sekitar 15 %.

Adapun tren jumlah kunjungan wisatawan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.C.16

Perkembangan Kunjungan Wisatawan

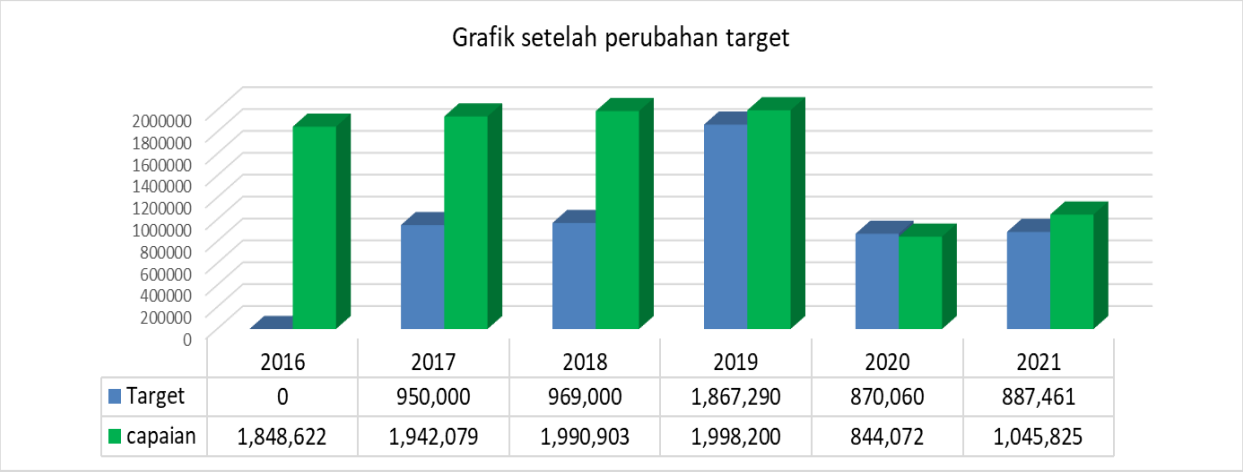

Sumber Data : Disporapar Kab. Sidoarjo

Berikut data kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 :

Tabel III.C.1

Kunjungan Wisatawan

NO	DAYA TARIK WISATA	JUMLAH	
		Wisnus	Wisman
1	Candi Dermo	1758	0
2	Candi Pari	5265	0
3	Candi Sumur	1959	0
4	Museum Mpu Tantular	6434	0
5	Candi Pamotan	195	0
6	Makam adipati terung kulon	368	0
7	Prasasti Kemlagen	0	0
8	Situs Watu Tulis	645	0
9	Candi Medalem	38	0
10	Candi Wangkal	119	0
11	*Kolam Renang Ketegan Waterpark*	2485	0
12	*Kolam Renang Candi Pari*	5529	0
13	Kolam Renang Waterpark Suncity		
14	*Kolam Renang Jedong Cangkring*	19790	0
15	Kolam Pancing Delta Fishing	60890	0
16	*Kolam Renang Puri Surya Jaya*	2999	0
17	*Permata waterpark Tanggulangin*	235	0
18	Kolam Renang Suko Asri	0	0
19	Kolam Renang Golden Aquatic	0	0
20	Kolam Genang Sendang Delta GOR	3791	0
21	Candi Tawangalun	1191	0
22	Makam Mbah Ud	19743	0
23	Makan dewi Ayu Sekardadu	1728	0
24	Kampung batik jetis	1403	0
25	Intako Tanggulangin	2039	0
26	Permata Tas dan Koper Tanggulangin	1727	0
27	Kolam Renang Citra Garden		
28	Alas Outbond Prambon		
29	Batik Al.Huda	1387	0
30	Wisata Bahari Telocor/P. Lusi	15779	0

31	Kusuma Tirta Minapolitan	5469	0
32	*Kolam Renang Citra Harmoni*	0	0
33	Keraton Waterpark Krian		
34	Situs Candi Lemah Duwur	225	0
35	*Legoksari Outbond*	13304	0
	Jumlah	**176495**	**0**

Sumber Data : Disporapar Kab. Sidoarjo

Tabel III.C.2

Kunjungan Hotel di Kabupaten Sidoarjo

No	Nama Usaha	Alamat Usaha	Klasifikasi	TOTAL JUMLAH		
				Kamar terjual	Wisnus	Wisman
1	Hotel Global INN	Jl. Raya Juanda No. 22, Sidoarjo	Melati	9785	9785	0
2	Luminor Hotel Sidoarjo	Jl. Pahlawan Sidoarjo		22675	22439	236
3	Swiss Berlin Airport Surabaya	Jl. Raya Juanda KM 1.88	Bintang 3	47415	46783	632
4	Hotel Sinar 1	Jl. Raya Bandara Juanda, No. 30036	Hotel	11340	11340	0
5	Hotel Sinar 2	Jl. Raya Pabean No. 30036 Sedati, Sidoarjo		1094	1094	0
6	Sinar Hotel 3	Jl. Raya Juanda No. 81, Sidoarjo		1092	1092	0
7	Hotel Halogen	Jl Raya Bypass Juanda No, 18, Sidoarjo	Bintang 3	38512	38408	104
8	Cordela Inn Sidoarjo	Jl. KH Ali Mas'ud, Tiara Town Square Kav.32, Pagerwojo, Sidoarjo	Hotel	70960	70960	0
9	Hotel Kemuning	Jl. Raya Bypass Juanda KM 18	Melati	28260	28260	0
10	Ale Homestay	Perum. Pondok Jati AJ 102 Pagerwojo	Homestay	3132	3132	0
11	Homestay Bahari Tlocor	Jl. Wisata Bahari Tlocor, Jabon, Sidoarjo	Homestay	0	0	0
12	Hotel Utami	Jl. Raya Juanda Selatan 36	Bintang 3	12006	12006	0
13	Hotel Green SA Inn	Jl.Raya Juanda No. 85086 Sedati		1380	1338	42
14	Wsma Thamrin	Jl. Thamrin No. 13 Sidoarjo	Melati	2272	2272	0
15	Hotel Kartini	Jl. Kartini No.15 Sidoarjo	Melati	8231	8231	0
16	Wisma Kartini 2	Jl. Kartini No.15 Sidoarjo		333	333	0
17	Hotel Chairo	Jl. Terunojoyo 17 Sidoarjo	Melati	3449	3430	19
18	Hotel Front One INN	Jl. Monginsidi No. 50, Sidoklumpuk Sidoarjo		6580	6580	0
19	Hotel Aston Sidoarjo	Jl. Kahuripan Raya No. 14	Bintang 4	58810	57881	929
20	GreenSA Inn Find Trainning Centre	Jl.Raya Juanda No. 85086 Sedati		690	669	21
21	Penginapan Wisma Asri	Jl. Letjen Sutoyo No. 98	Penginapan	3278	3278	0
22	Penginapan Wahyu Jaya	Jl. letjen Sutoyo No. 2730B Medaeng Wetan, Waru	Penginapan	616	616	0
23	Salina Hotel Syariah	Sidolumpuk Jl. Yosudarso No. 37	Penginapan	697	697	0

24	Bumi Airlangga Hotel	Perum Wisma Sarinadi, Jl. Tenis VI, Gajah Timur, Magersari, Sidoarjo	Hotel	214	214	0
25	Hotel Sofie Syariah	Pondok Mutiara meh06 SDA		376	376	0
26	Nuansa Hotel	Jl. Letjen Sutoyo No. 59, Metaen Waru	Penginapan	3954	3954	0
27	Homestay Ganeta	Jl. Mandala IV No.451, Semambnung Gedangan	Homestay	446	446	0
28	Pondok Nirwana Guest House	Jl Yosudarso no 28 Pucang Sidoarjo		6755	6755	0
29	Fave hotel	Jl. Jenggolo No. 15 Pucang Sidoarjo	Bintang 3	48291	47963	328
30	Homestay Herizon's	Jl. Mustang No. 60 Sidoarjo	Homestay	1621	1621	0
31	Hotel Delta Sinar Mayang	Jl. Diponegoro Graha Mutiara Delta		10697	10697	0
32	Hotel Laurent	Jl. Haliet Hendra No. 305 Waru	Melati	313	313	0
33	Diaman Hotel	Jl. letjen Sutoyo, Waru		639	639	0
34	Trans Hotel	Jl. Letjan Sutuyo No. 140		3151	3151	0
35	Losmen Familly	Jl. Letjan Wahono By Pass Juanda Sidoarjo		657	657	0
36	Hotel Arwana	Jl. Letjan Sutoyo No. 58 Mdaeng	Penginapan	1749	1749	0
37	Hotel Cahaya 3	Jl. By Pass Juanda No. 4		804	804	0
38	Losmen Bangkit Hidayah	Jl. By Pass Juanda Sedati Gede, Sidoarjo	losmen	1529	1529	0
39	Hotel Pandan Wangi	Jl. Kombes Pol M. Duryat No. 27	melati	3351	3351	0
40	Wisma Buduran Sidoarjo	Jl. Jawa 203 Wadungasih Buduran	Wisma	364	364	0
41	Lobby Longue The Sun Hotel	Jl. Pahlawan No. 1 Sidokumpul,Sidoarjo	Bintang 2	0	0	0
42	Hotel Tilamas	Jl. Raya Bandara Juanda, No. 88, Walan Sedati Agung		1848	1848	0
43	Hotel Halmen			0	0	0
44	Penginapan Pondok Rizqi	Bypass Juanda	Penginapan	10965	10965	0
45	Pondok Inap Shofwa	Jl. By Pass No. 26, Juanda, Sedati Gede		537	537	0
46	MM Homestay	Jln Bluru Kidul RT 02 / RW 03 No 105, Sidoarjo	Homestay	0	0	0
47	Hotel New Cahaya	Jl. Raya Sedati Gede, No. 70, Sedati, Sidoarjo		4773	4773	0
48	Hotel Mega Mulya			0	0	0
49	Hotel Sofia	Jl. Raya Bandara Juanda, No. 20, Sidoarjo		6749	6749	0
50	Penginapan Yuddys Syariah	Sedati Agung I, No. 8, Bypass Juanda		529	529	0
51	Yuddys Hotel Syariah	Sedati Agung I, No. 8, Bypass Juanda		529	529	0
52	Hotel Benteng Portugis	Jl. Sedati Agung, No. 1 Sidoarjo		0	0	0
53	Shafwa Hotel	Jl. Jendral S. Parman V, No. 14 A, Waru		815	815	0
54	OYO TEBEL 19	Jl. Raya Tebel No. 1, Tebel tengah, Sidoarjo		1484	1484	0
55	News Hotel	Jl. Pd Maspion, No. 1 Pepelegi Waru, Sidoarjo		3808	3808	0

56	OYO Mama Anak Guesthouse	Jl. Brigjend Katamso, No. 170, Waru		1151	1151	0
57	Hotel Istana Juanda	Jl. Raya Bandara Juanda, No. KM1, Sidoarjo		3109	3109	0
58	Pondok Nirwana Hotel	Jl. Yos Sudarso No.28, Sidokumpul, Sidoarjo	Homestay	2987	2987	0
59	Hotel Neo+	Jl. Jendral S. Parman V, No. 52054, Waru		5127	5127	0
60	Hotel Lumba lumba	Jl. Raya Waru, No. 1, Kedungrejo Waru		1787	1787	0
61	Hotel Wiston	Jl. Bandilan 242 Waru Sidoarjo		891	891	0
62	Laurent Hotel	Jl. Raya Waru, No. 15, Kedungrejo, Waru		311	311	0
63	Hotel Bungurasih	Jl. Letjend Sutoyo, No. 114, Medaeng Waru		951	951	0
64	Prisma Hotel	Jl. Letjend Sutoyo No. 309, Medaeng Waru		897	897	0
65	Hotel Medaeng	Jl. Letjend Sutoyo No. 8, Medaeng Waru		962	962	0
66	Hotel Trans	Jl. Letjan Sutuyo No. 140		3151	3151	0
67	Wisma Raja Mulya	Jl. Letjan Sutuyo No.59		371	371	0
68	Penginapan Diaman 1	Jl. letjen Sutoyo, Waru		639	639	0
69	Penginapan Arwana	Jl. Letjan Sutoyo No. 58 Medaeng	Penginapan	1749	1749	0
70	Wisma Prambanan 1	Jl. Letjan Sutoyo No. 58 Medaeng		406	406	0
71	Erysa Hotel	Jl. Pesawon Semampir, No. 43 Sedati		860	860	0
72	Hotel Walan	Jl. Sedati Agung No. 1, Sedati Sidoarjo		625	625	0
73	Losmen Bangkit H. Syariah	Jl. Raya Bypass Juanda No. 26, Sedati Sidoarjo		258	258	0
74	Habibie Homestay Syariah	Jl. Raya Bypass Juanda No. 29, Sedati Sidoarjo		381	381	0
75	Hotel Premier Place	Jl. Raya Bandara Juanda, No. 73 Gedangan Sidoarjo		4276	4276	0
76	Hotel Mandiri	Jl. Raya Pabean No 71 B, Sedati Sidoarjo		774	774	0
77	Hotel Permata	Jl. Bypass Juanda No 38, Sedati Sidoarjo		311	311	0
78	Losmen Family	Jl. Letjan Wahono By Pass Juanda Sidoarjo		657	657	0
79	Swiss Berlin Airport	Jl. Raya Juanda KM 1.88	Bintang 3	47415	46783	632
80	Reddoor 2 Pondok Mutiara	Jl. Raya Mutiara No.3, Banjarbendo, Sidoarjo	Homestay	0	0	0
81	Reddoor 2 Near Gor Taman Pinang	Jl. Taman Pinang Indah A5 No. 15, Banjarbendo, Sidoarjo	Homestay	0	0	0
82	OYO D'luck Pagerwojo	BQ1 Perumahan Magersari Permai, Gajah Timur, Magersari, Sidoarjo	Homestay	0	0	0
83	OYO Pondok Nusa Indah	Jl. Nusa Indah No. 101, Koreksari Waru		0	0	0
84	Griya Noumi Hotel	Jl. Brigjend Katamso, No. 1460148, Waru		0	0	0
85	De Capsule	Jl. Letjend Sutoyo, No. 88, Medaeng Waru		0	0	0

86	Reddorz Near Gor Taman Pinang	Jl. Raya Mutiara No.3, Banjarbendo, Sidoarjo	Homestay	0	0	0
87	D'luck oyo Pagerwojo	BQ1 Perumahan Magersari Permai, Gajah Timur, Magersari, Sidoarjo	Homestay	0	0	0
88	OYO Sofie Syariah	Pondok Mutiara MEH No. 6 , Sidoarjo		0	0	0
89	Graha Sakinah 4			0	0	0
90	Reddoor 2 Near Pahlawan			0	0	0
91	Red Doorz Juanda Near Sedati	Jl. Bypass Juanda No. 26, Sedati Sidoarjo		0	0	0
92	Amira Homestay			0	0	0
93	Wisma Buduran Reddoorz			0	0	0
94	Hotel Plaza Baru			0	0	0
95	e dotel sidoarjo			0	0	0
96	Salina Hotel			0	0	0
97	OYO Near Jenggolo			0	0	0
98	Herizon Homestay			0	0	0
99	Penginapan Las Vegas	Jl. letjen Sutoyo No. 2730B Medaeng Wetan, Waru		0	0	0
100	Pondok Nirwana Homestay			0	0	0
101	Azzahra Guesthouse Syariah	Perum Grand Juanda City, Bypass Juanda		0	0	0
102	Oyo Hotel Pandan Wangi			0	0	0
	JUMLAH			**529.601**	**526.658**	**2.943**

Sumber Data : Disporapar Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan agar kunjungan wisatawan dapat terus meningkat, yaitu :

- Pengembangan obyek wisata dan destinasi agar lebih menarik
- Meningkatkan promosi pariwisata dengan membuat even lomba vlog serta pembuatan video promosi pariwisata
- Menyelenggarakan event pariwisata dengan melibatkan UMKM sektor pariwisata.

Salah satu upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata adalah dengan meningkatkan pertumbuhan industri kreatif. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 30 industri kreatif yang ada di Kabupaten Sidoarjo

Adapun tren rata – rata lama tinggal wisatawan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.C.17

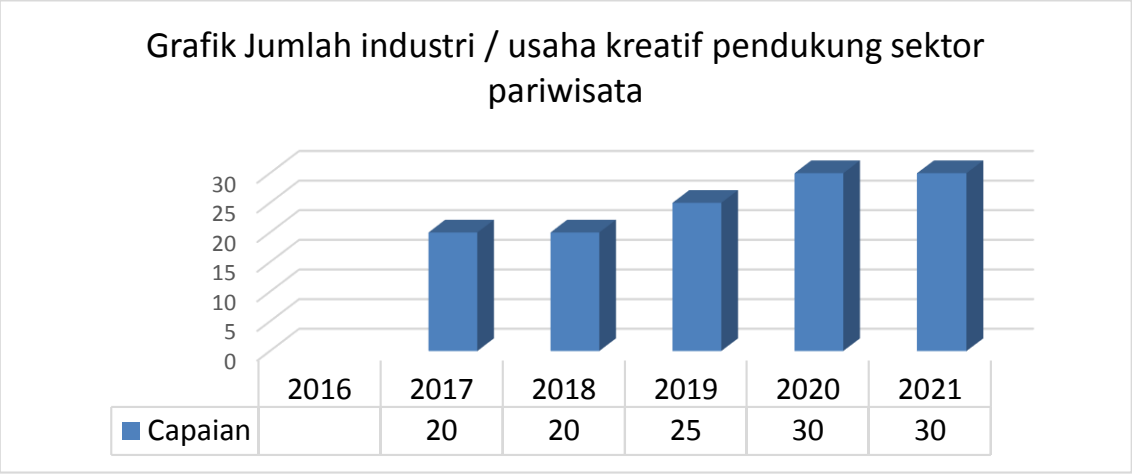

Sumber Data : Disporapar Kab. Sidoarjo

Berikut data industri kreatif di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2021 :

No	Nama Produk	Nama Pemilik	Alamat
1	Batik HI	Yusri	Jetis Gg. 2 No. 70 Lemahputro Sidoarjo
2	Adillah Collection	Malina Yulia Pratiwi	Griya Candi Pratama C3 No. 17 Durung Bedug Candi Sidoarjo
3	Kain Ecoprint	Rinda	Perum Citra / Omah Pesona Buduran D1/16
4	Merrycraft	Evy Suryani	Graha Tirta Bromelia 12 Waru Sidoarjo
5	Rumah Mimosa	Rinda	Perum Green Park Regency Block S 22 Sekardangan
6	Rahadies	Dian Raheti	Perum Green Residence Blok Ac3 No. 18 Kendal Pecabehan Candi Sidoarjo
7	Hans Collection	Sumarsih	Sungon Rt. 022 Rw.006 Suko Sidoarjo
8	Fay Handmade	Ayu Sulistiani	Ds. Kedungboto (kaligebang) Rt. 08 rw. 03 Porong Sidoarjo
9	Safira Collection	Evi Rahmawati	Perum TNI AL Blok G. 20 No. 7 Candi Sidoarjo
10	Masker Sulam Rajut	Yuni Suwanti Asih	Wisma Bungurasih 2 No. 42 Waru Sidoarjo
11	Mas Kali Collection	Adimas kaji	Ds. Banjarkemantren Rt. 06 Rw. 02 Dsn Jambe buduran
12	Galeri Raditajaya	Maria Novita S.Pd	Jl. Brigjen Katamso 1 No. 149 Waru Sidoarjo
13	Jay Way Handicraft	Sri Indah Widiyanti	Grand Aloha Regency Great Cluster Blok A 8/10 Wage
14	Anfies Rajut	Dewi Kusumawati	Perum Citra Garden Blok D8/14 Entalsewu Buduran Sidoarjo

15	Whatyshae	Rawang Kriswati	Jl. Semeru No. 16 Rt. 02 Rw. 01 Betro Sedati Sidoarjo
16	Rahadies	Dian Raheti	Perum Green Residence Blok Ac3 No. 18 Kendal Pecabehan Candi Sidoarjo
17	Hans Collection	Sumarsih	Sungon Rt. 022 Rw.006 Suko Sidoarjo
18	Fay Handmade	Ayu Sulistiani	Ds. Kedungboto (kaligebang) Rt. 08 rw. 03 Porong Sidoarjo
19	Safira Collection	Evi Rahmawati	Perum TNI AL Blok G. 20 No. 7 Candi Sidoarjo
20	Masker Sulam Rajut	Yuni Suwanti Asih	Wisma Bungurasih 2 No. 42 Waru Sidoarjo
21	Mas Kali Collection	Adimas kaji	Ds. Banjarkemantren Rt. 06 Rw. 02 Dsn Jambe buduran
22	Galeri Raditajaya	Maria Novita S.Pd	Jl. Brigjen Katamso 1 No. 149 Waru Sidoarjo
23	Jay Way Handicraft	Sri Indah Widiyanti	Grand Aloha Regency Great Cluster Blok A 8/10 Wage
24	Anfies Rajut	Dewi Kusumawati	Perum Citra Garden Blok D8/14 Entalsewu Buduran Sidoarjo
25	Whatyshae	Rawang Kriswati	Jl. Semeru No. 16 Rt. 02 Rw. 01 Betro Sedati Sidoarjo

Sumber Data : Disporapar Kab. Sidoarjo

Rata – Rata Lama Tinggal Wisatawan

Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 adalah 2 hari dari target 1 hari atau capaian 200%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 selama 2 hari maka terdapat tidak ada peningkatan/penurunan, disebabkan masih adanya pandemi covid-19

Adapun tren rata – rata lama tinggal wisatawan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.C.18

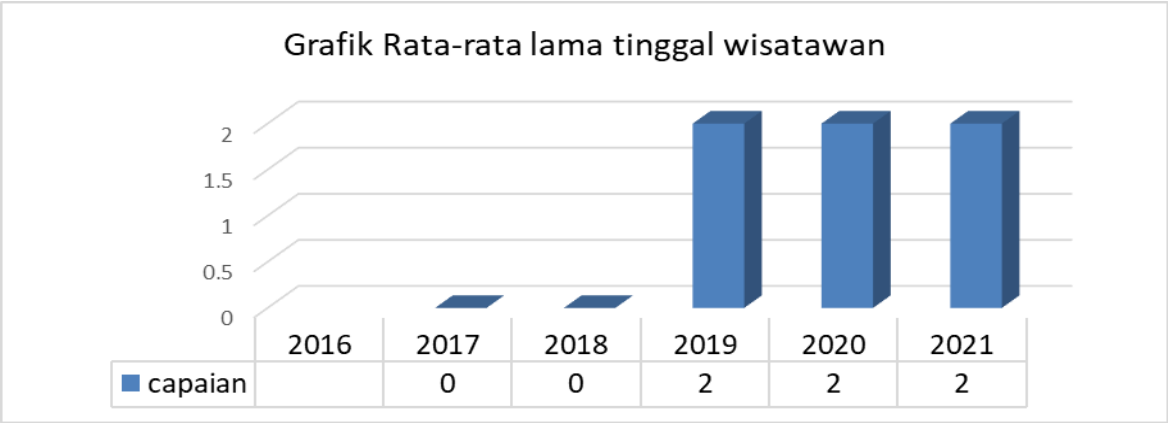

Sumber Data : Disporapar Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan agar rata-rata lama tinggal wisatawan dapat terus meningkat, yaitu : Penyelenggaraan even budaya di malam hari serta melakukan pembinaan serta pelatihan kepada pelaku pariwisata guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pengembangan Wisata Pulau Lusi

Upaya Pemerintah kabupaten Sidoarjo mengembangkan wisata bahari Tlocor dengan destinasi ke pulau Lusi (lumpur Sidoarjo) dan pulau Sarinah ditindaklanjuti dengan pelibatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan wisata pulau lusi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengelolaan wisata bahari Tlocor pulau Lusi dilakukan dengan swadaya masyarakat sejak tahun 2019. Lewat Pokdarwis (kelompok sadar wisata), Terdapat 3 speed boat dengan kapasitas 4 orang dan 4 bis air dengan kapasitas 24 orang yang disediakan Pokdarwis untuk mengangkut wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau Lusi. Setiap hari libur 1 perahu dapat mengantar wisatawan sampai 3 kali ke pulau Lusi. Jumlah kunjungan wisatawan ke pulau lusi pada tahun 2021 sebanyak 16.826 orang.

Sebagaimana masterplan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 9 program pengembangan Pulau Lusi, antara lain :

1. Pembangunan Serambi
2. Taman Utama
3. Taman Lumpur
4. Infratsruktur (listrik, air bersih, sampah, dan menara BTS)
5. Perairan Buatan
6. Taman Wanamina
7. Taman Botani
8. Taman Konvensi
9. Eco-Sport Resort

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda**

  Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kapasitas dan daya saing pariwisata untuk 200 pelaku industri kreatif di Kabupaten Sidoarjo dengan, sebagai berikut :

  1. Pelatihan design produk kreatif, yang diikuti oleh 50 peserta
  2. Pelatihan videografi, yang diikuti oleh 50 peserta
  3. Pembinaan pelaku pariwisata, yang diikuti oleh 50 peserta
  4. Pelatihan peningkatan nilai tambah produk, yang diikuti oleh 50 peserta

  Tujuan dari pelatihan dimaksud adalah untuk meningkatkan industri kreatif dan SDM pelaku pariwisata.

c. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** dengan anggaran sebesar Rp.699.733.444,00 dan terealisasi sebesar Rp.687.569.77,00 atau 98,26 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Jumlah Kunjungan Wisata	887.461	1.045.825	117,84

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata yang dimonitor	23	23	100
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan	1 Obyek Wisata	1 Obyek Wisata	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	55.000.000,00	54.772.700,00	99,59
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	644.733.444,00	632.797.077,00	98,15

2. **Program Pemasaran Pariwisata** dengan anggaran sebesar Rp.693.114.975,00 dan terealisasi sebesar Rp.645.077.300,00 atau 93,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	1 Hari	2 Hari	200

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jenis media promosi wisata	6 Jenis	6 Jenis	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	693.114.975,00	645.077.300,00	93.07

3. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** dengan anggaran sebesar Rp.769.194.565,00 dan terealisasi sebesar Rp.736.078.399,00 atau 95,69%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Jumlah industri / usaha kreatif pendukung sektor pariwisata	25 Unit	25 Unit	100

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pameran ekonomi kreatif dalam dan luar negeri	3 Pameran	3 Pameran	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	769.194.565,00	736.078.399,00	95.69

d. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Pariwisata

e. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan pariwisata, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Pengembangan pariwisata dan budaya yang ada di Sidoarjo supaya dikembangkan antara lain kesenian rakyat Ludruk, Campursari, Kentrong, Patrol dan lain-lain.	Pengembangan wisata yang berbasis budaya selalu kami kembangkan dan selalu kami ikut sertakan ketika ada pegelaran dan festival. Perlu kami sampaikan juga bahwa baru baru ini ada 5 yaitu Tari Banjar Kemuning, Udeng Pacul Gowang, Musik Patrol< Kupang Lontong, dan Baju Daerah.
2	Melakukan promosi wisata Kabupaten Sidoarjo salah satunya dengan menggelar festival yang bertempat di lokasi wisata	Pada tahun 2022 ini kami berencana melakukan kegiatan promosi di lokasi wisata

Urusan Industri

Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Perindustrian dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing sektor industri.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Industri sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian	46,15%	51,17%	110,88%
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	1,52%	1,98%	131%
3	Persentase IKM yag terstandarisasi	0,58%	0,588%	101%

Persentase Konstribusi PDRB Sektor Perindustrian

Apabila dibandingkan dengan target tujuan tahun 2021, maka target kinerja tujuanPersentase Konstribusi PDRB sektor Perindustrian telahtercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2021 mengalami ***peningkatan***, hal ini dikarenakanseluruh Kegiatan/Sub Kegiatantelah terlaksana dengan cukup baik sehingga realisasi keuangan dapat mencapai diatas 80% yaitu sebesar 94,31%.

Grafik III.C.19

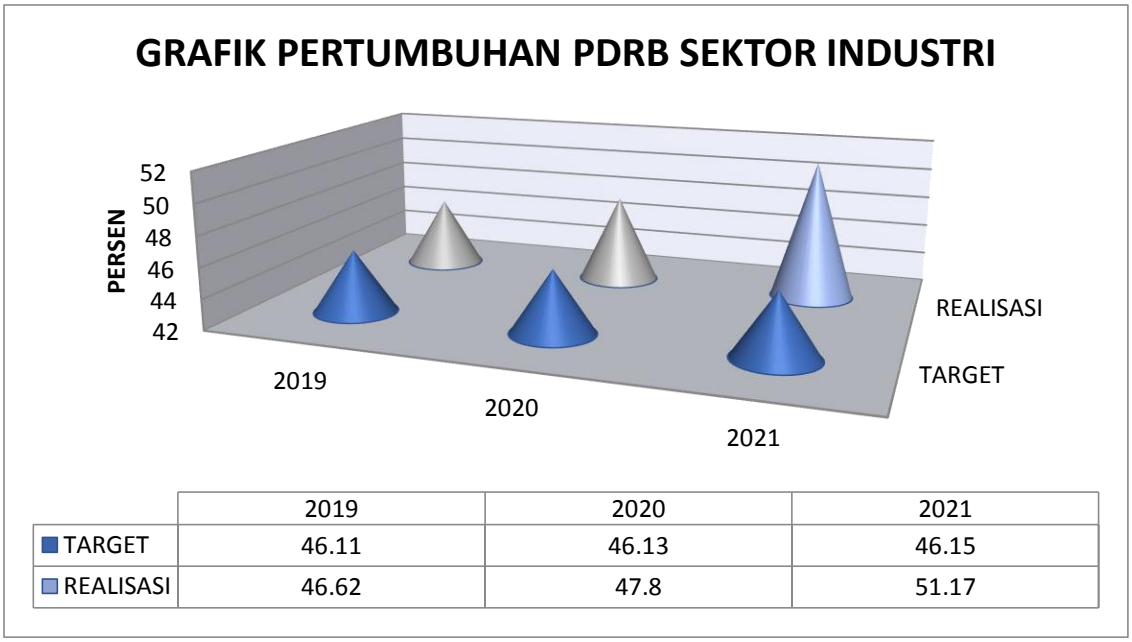

	2019	2020	2021
TARGET	46.11	46.13	46.15
REALISASI	46.62	47.8	51.17

Sumber Data : Disperindag Kab. Sidoarjo

Persentase Pertumbuhan Usaha Industri

Persentase Pertumbuhan Usaha Industri, *a*pabila dibandingkan dengan target indikator sasaran tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2021untuk Pertumbuhan Usaha Industri telah mencapai target yaitu sebesar 340 IKM dari target 260 IKM, atau sebesar 1.98 persen dari target 1.52 persen, hal ini dikarenakan beberapa paket pekerjaan mampu terlaksana dengan baik, sehingga mampu menunjang realisasi sasaran di tahun 2021.

Jumlah Industri Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 sebanyak 17.499 unit/usaha. Jumlah ini meningkat 340 unit/usaha atau meningkat sebesar 1,99

persen dibandingkan dengan jumlah industri pada tahun 2020 yang sebanyak 17.159 unit.

Jenis Industri yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Sidoarjo utamanya adalah:

1. Kerupuk
2. Kulit dan Turunannya
3. Batik Tulis, Bordir & Aksesoris
4. Pengolahan Ikan, Produk Mamin lainnya
5. Industri logam

Grafik III.C.20

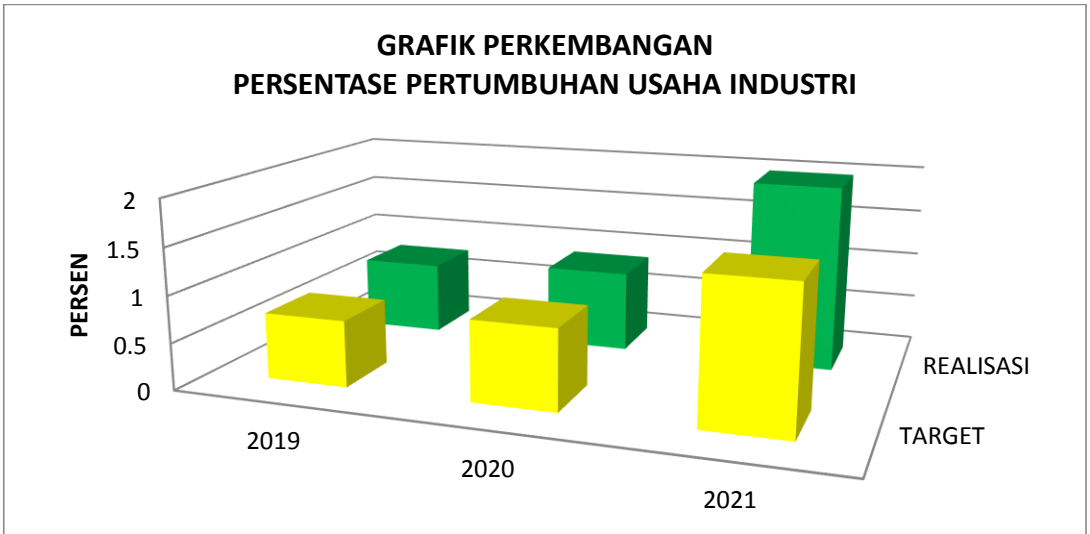

	2019	2020	2021
TARGET	0.71	0.86	1.52
REALISASI	0.78	0.87	1.98

Sumber Data : Disperindag Kab. Sidoarjo

Upaya peningkatan PDRB sektor Industri dan pertumbuhan industri:

- Melakukan fasilitasi pertumbuhan industri kecil dan menegah dalam rangka peningkatan kualitas produk;
- Memetakan pembanguan/pembentukkan *cluster* baru IKM dengan pendampingan dan pembinaan secara memadai serta memfasilitasi

promosi/pameran dagang dalam rangka klestarian produk dan menaikkan omzet;

- pendekatan program fasilitasi pemerintah dalam standardisasi produk dan peningkatan kompetensi pelaku usaha agar memiliki daya saing yang cukup besar.

Persentase IKM yang terstandarisasi

Menurut PP nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing IKM juga agar mampu menembus pasar global serta dapat memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan kosumen.

Pada Tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan fasilitasi Standarisasi bagi Industri Kecil dan Menengah sebanyak 101 IKM dari target 100 IKM, atau sebesar 0,588 persen dari target 0,58 persen dari Jumlah 17.499 IKM.

Grafik III.C.21

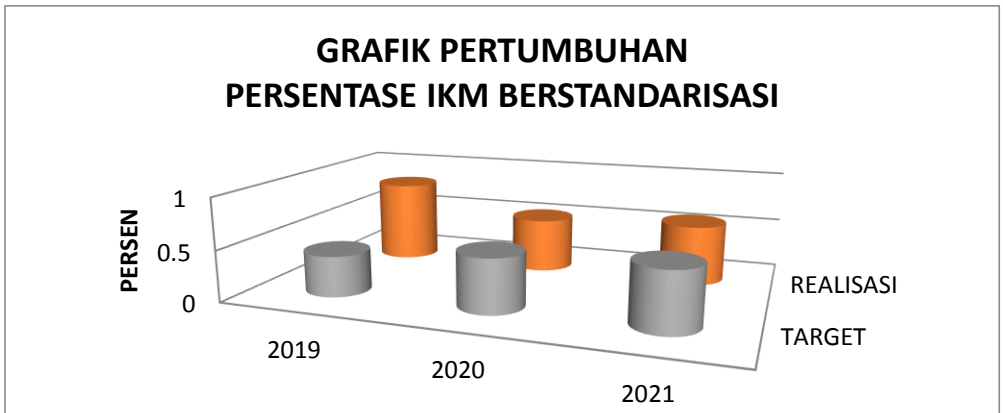

	2019	2020	2021
TARGET	0.4	0.53	0.58
REALISASI	0.81	0.533	0.588

Sumber Data : Disperindag Kab. Sidoarjo

Sampai dengan tahun 2021 jumlah Industri Kecil dan Mikro di Kabupaten Sidoarjo yang telah terstandardisasi adalah sebagai berikut :

Jenis Standarisasi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SNI		2	1				
Barcode			5				
ISO 9001 : 2015			2				
Halal			6	4	23	20	46
Bimbingan Sertifikasi ISO			3				
Merk	25		81	22	50	52	32
PIRT	50						
Uji Nutrisi			6		2	16	23
Uji Produk sesuai parameter SNI			1				
HACCP			1		1		
Batik Mark			1				
Uji Tar & Nikotin				45			
HKI					67		
Manajemen Mutu						3	
TOTAL	**75**	**2**	**107**	**71**	**143**	**91**	**101**
AKUMULASI	**75**	**77**	**184**	**255**	**398**	**489**	**590**

Data IKM Berstandarisasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 :

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Fasilitasi Standardisasi IKM	184	255	398	489	590
Total Jumlah IKM	16.891	16.966	17.073	17.159	17.499
Persentase IKM yang telah terstandardisasi	1,09%	1,50%	2,33%	2,85%	3,37%

Dari daftar IKM diatas yang telah mendapatkan fasilitasi standardisasi melalui APBD Kabupaten Sidoarjo, data tersebut didokumentasikan dalam *database* industri berdasarkan nama perusahaan dan alamat.

Aspek – aspek yang mempengaruhi standarisasi IKM, diantaranya :

1. Regulasi pemerintah
2. Kebutuhan pasar
3. Kebijakan perusahaan

Jumlah IKM yang telah terstandardisasi masih relatif kecil disebabkan :

1. Kurangnya kesadaran IKM terhadap pentingnya standarisasi;
2. Persyaratan yang diwajibkan memberatkan IKM dan kondisi di lapangan sulit menyesuaikan dengan kondisi yang ada;
3. Tidak adanya dukungan anggaran.

Upaya untuk meningkatkan standarisasi IKM dalam rangka IKM naik kelas dan beroreantasi eksport diantaranya :

1. Meningkatkan kesadaran IKM mengenai pentingnya standardisasi
2. Pemberian insentif bagi IKM yang menerapkan standardisasi
3. Memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam pengurusan standardisasi
4. Pendampingan pembinaan kepada IKM secara khusus yang beroreantasi eksport

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan:

a. Persentase Pertumbuhan Usaha Industrimengalami peningkatan sebesar 1,99 persen dibandingkan tahun 2020, dan pencapain tingkat pertumbuhan Industri telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2021.
b. IKM terstandardisasi mengalami peningkatan sebesar 0.52 persen dibandingkan tahun 2020, dan pencapain tingkat IKM Berstandarisasi telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2021
c. IKM naik kelas pada tingkat yang lebih tinggi menjadi indikator sasaran utama pada Tahun 2022

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **20.000 UMKM Naik Kelas**

  Pada tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa pelatihan untuk mendukung UMKM Naik Kelas, antara lain sebagai berikut :

Aktivitas	Jumlah Peserta
Bantuan Modal Usaha (Alat Pemijatan Bayi, Alat Pastry, Alat Perawatan Kulit, dan Alat Spa) kepada Buruh Tidak Tetap Pabrik Rokok yang akan beralih untuk menjalankan usaha;	445 IKM
Sosialisasi KIHT	
Bimtek Sistem Manajemen Mutu Kecamatan Taman	
Seminar IKM Go Global	
Sosialiasi Halal	294 IKM
Bimtek Standarisasi Produk	
HKI dan Legalitas Usaha	
Sertifikasi Merek	
Uji Nutrisi	
Sosialisasi IUI melalui SINAS	70 IKM

c. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Perencanaan Pembangunan Industri** dengan anggaran sebesar Rp.6.414.075.667,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.381.577.568,00 atau 83,90%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0,9%	0,9%	100%
Persentase IKM yang dibina/dikembangkan Persentase IKM yang dibina/dikembangkan	-	-	

   Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah indikator pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	6.414.075.663,21	5,381,577,568.00	83,90

2. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri** dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.47.575.000,00 atau 95,15%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0.17%	0.17%	100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri yang mengajukan verifikasi teknis dalam rangka pengajuan Izin Usaha Industri (IUI)	10 Industri	24 Industri	240%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	47.575.000,00	95,15

3. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional** dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.247.372.070,00 atau 98,95%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase data base IKM yang terupdate	1.17%	1.17%	100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang diupdate datanya	197 IKM	197 IKM	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	250,000,000.00	247.372.070,00	98,95

d. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Urusan Perindustrian

e. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk Urusan Perindustrian

Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Urusan Perdagangan dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing sektor perdagangan dan pasar rakyat.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16.32	16.37	100.31
2	Pertumbuhan ekspor non migas	$1.200.000.000	$1.279.666.753,17	107%
3	SKM Layanan Pasar	76	77	101%

Persentase Konstribusi PDRB Sektor Perdagangan

Apabila dibandingkan dengan target tujuan tahun 2021, maka target kinerja tujuanPersentase Kontribusi PDRB sektor Perdagangan **telah**tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2021 mengalami ***peningkatan***, hal ini dikarenakan seluruh Kegiatan/Sub Kegiatan telah terlaksana dengan cukup baik sehingga realisasi keuangan dapat mencapai diatas 80% yaitu sebesar 94,31%.

Grafik III.C.22

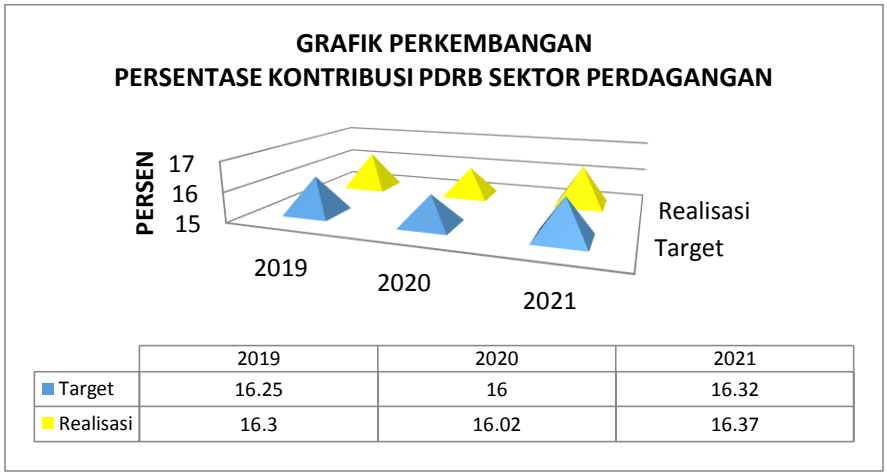

Sumber Data : Disperindag Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan untuk optumalisasi PDRB sektor pedagangan:

- Upaya meningkatkan Eksport
- Meningkatkan arus distribusi barang dan jasa melalui optimalisasi fungsi pasar;
- Meningkatkan sentra perdagangan dan menumbuhkan/membangun sentra perdagangan baru sebagai uapaya pengembangan sebagai pusat industri dan perdagangan.
- Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pasca pandemi

Pertumbuhan ekspor non migas:

Pertumbuhan Eksport Non MigasRealisasi Nilai Ekspor Non Migas Daerah Tahun 2021 sebesar US$1.279.666.753,17Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2021, maka capaian kinerja Tahun 2021 mencapai 107% dari target yang telah ditetapkan sebesar US$1.200.000.000. Namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun2020, maka capaian kinerja Tahun 2021 mengalami **peningkatan** sebesar 3,40 persen dibandingkan dengan Nilai Ekspor Non Migas Daerah tahun 2020 sebesar US$1.237.624.295.

Grafik III.C.23

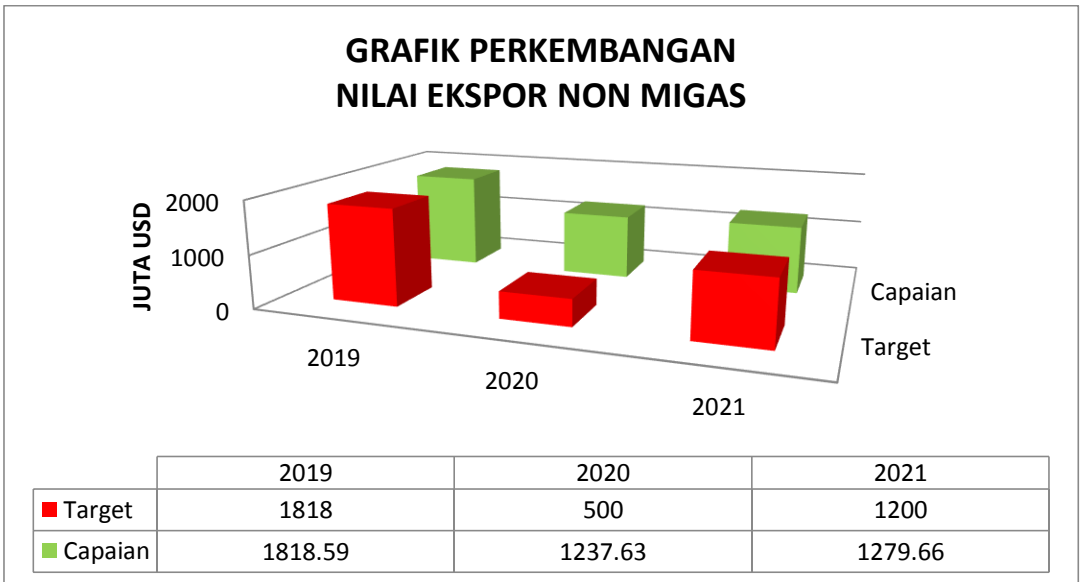

	2019	2020	2021
Target	1818	500	1200
Capaian	1818.59	1237.63	1279.66

Sumber Data : Disperindag Kab. Sidoarjo

Hal–hal yang mengakibatkan dampak peningkatan Eksport Non Migas adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya permintaan dari negara-negara tujuan
b. Meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor
c. Melaksanakan/program promosi produk-produk IKM dalam rangka peningkatan ekspor daerah
d. Pendampingan IKM dalam memperoleh KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) IKM

Upaya optimalisasi pencapain target kinerja meningkatkan eksport:

- Melakukan Pameran dagang ditingkat Nasional Internasional terhadap produk unggulan Sidoarjo;
- Melakukan pembinaan/pemberdayaan UMKM yang beroreantasi Eksport;
- Meningkatkan citra produk dalam rangka meningkatkan kualitas produk unggulan eksport;
- Memberikan pelatihan ekspor bagi UKM/IKM untuk meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor

Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pasar

Jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 19 Pasar. Dinamakan dengan UPTD Pasar Daerah yang terbagi atas 4 (empat) Wilayah, antara lain :

1. Wilayah Sidoarjo
2. Wilayah Porong
3. Wilayah Taman
4. Wilayah Krian

Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan pasar dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan baik dari pengelola pasar maupun pedagang pasar.

Salah satu aspek yang dijadikan tolak ukur adalah perbaikan sarana dan prasaran pasar rakyat yang masuk dalam 44 kriteria pasar SNI, yaitu :

1	Ukuran luas ruang dagang	23	Tinggi meja tempat berjualan
2	Jumlahpos	24	Akses untuk kursi roda
3	Zonasi	25	Jalur evakuasi
4	Area parkir	26	Tabung pemadam kebakaran
5	Area bongkar muat barang	27	Hidran air
6	Akses keluar masuk kendaraan	28	Pengujian kualitas air bersih
7	Lebar koridor	29	Pengujian limbah cair
8	Kantor pengelola	30	Ketersediaan tempat sampah
9	Lokasi toilet dan kamar madi (terpisah antara laki2 dan perempuan)	31	Alat angkut sampah
10	Jumlah toilet pada satu lokasi	32	TPS sementara
11	Tempat menyimpan bahan pangan basah	33	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R
12	Tempat cuci tangan	34	Sarana telekomunikasi
13	Ruang menyusui	35	Informasi identitas pedagang
14	CCTV	36	Informasi kisaran harga
15	Ruang peribadatan	37	Informasi zonasi pasar
16	Ruang bersama	38	Prosedur kerja / sop
17	Pos kesehatan	39	Struktur pengelola
18	Pos keamanan	40	Jumlah pengelola
19	Area merokok	41	Pelaksanaan sidang tera/tera ulang
20	Ruang disenfektan	42	Program pengembangan pasar
21	Area penghijauan	43	Program pemberdayaan komunitas pasar
22	Tinggi anak tangga		

Dari 44 parameter kriteria Pasar SNI untuk Kabupaten Sidoarjo pada 19 Pasar Rakyat di Tahun 2020 terdapat 1 pasar yang ditetapkan sebagai Pasar SNI yaitu Pasar Sukodono, dan 2 pasar lainnya yang berparameter sangat tinggi adalah Pasar Porong, dan Pasar Gedangan.

Upaya pembenahan pasar kearah pasar dengan para meter tinggi dan sangat tinggi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna pasar.

Tabel III.C.1

Pemenuhan Kriteria Pasar SNI

No	Kriteria Pemenuhan Target SNI Tahun	Jumlah Pasar	Rendah (10 Indikator)	Sedang (11-20 Indikator)	Tinggi (21-30 Indikator)	Potensi Sangat Tinggi (31-44 Indikator)
1	2019	19	0	10	6	3
2	2020	19	0	10	6	3
3	2021	19	0	10	6	3

Sumber Data : Disperindag Kab. Sidoarjo

Pasar rakyat dengan parameter rendah adalah pasar rakyat yang memenuhi Kriteria Pasar SNI 1-10 indikator. Pasar Rakyat dengan Parameter sedang adalah pasar yang memenuhi 11-20 Kriteria Pasar SNI. Pada Tahun 2021 terdapat 10 Pasar yang berada pada parameter sedang. Pasar Rakyat dengan Parameter tinggi adalah pasar yang memenuhi 21-30 Kriteria Pasar SNI, pada Tahun 2021 terdapat 6 pasar yang berparameter tinggi. Sedangkan pasar yang berpotensi sangat tinggi adalah pasar rakyat yang memenuhi kriteria Pasar SNI sebanyak 31-44 Kriteria Pasar SNI, dan pada Tahun 2021 terdapat 3 pasar yang berparameter sangat tinggi yaitu Pasar Sukodono, Pasar Porong, dan Pasar Gedangan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka SKM layanan pasar meningkat:

- Optimalisasi tertib pasar, keamanan dan kebersihan pasar dalam rangka memberikan kenyaman pasar bagi para penjual dan pembeli;
- Peningkatan atau perbaikan kualitas pelayanan
- Melakukan inovasi-inovasi pelayanan atas masalah yang disampaikan masyarakat dan konsumen

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **2.000 Warung Rakyat Di Renovasi**

  Pada tahun 2021 telah dilaksanakan bedah warung untuk 150 warung berupa konsep minimart.

c. **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

1. **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** dengan anggaran sebesar Rp.443.746.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.434.359.000,00 atau 97,88%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang telah diupdate harganya	50%	50%	100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang telah diupdate harganya	100%	100%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	443.746.500,00	434.359.000,00	97,88

2. **Program Pengembangan Eksport** dengan anggaran sebesar Rp.879.001.088,00 dan terealisasi sebesar Rp.873.998.356,00 atau 99,43%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Nilai Ekspor Non Migas	$1.200.000.000	$1.279.666.753,17	106,64%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Ekspor Non Migas	$1.200.000.000	$1.279.666.753,17	106,64%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	879.001.088,00	873.998.356,00	99,43

3. **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen** dengan anggaran sebesar Rp.132.537.280,00 dan terealisasi sebesar Rp.125.683.420,00 atau 94,83%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase UTTP yang terstandarisasi	95%	95%	100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	9.400 UTTP	10.292 UTTP	109,49%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	132.537.280,00	125.683.420,00	94,83

4. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** dengan anggaran sebesar Rp.18.519.608.931,00 dan terealisasi sebesar Rp.17.249.558.037,00 atau 93,14%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase pasar SNI	5,26%	5,26%	100%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Representatif	19 Pasar	19 Pasar	100%
Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Pengelola Pasar dan Pedagang Pasar yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17.948.558.931,00	16.710.963.277,00	93%
Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	571.050.000,00	538.594.760,00	94%

4. UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN

Hasil kinerja penyelenggaraan unsur penunjang pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Unsur Penunjang Sekretariat Daerah

Unsur Penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Unsur Penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Unsur Penunjang Sekretariat Daerah sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Nilai SAKIP Kabupaten	A	*)	*)
2	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi	*)	*)
3	Indeks Pelayanan Publik			
	- DPMPTSP	A (Pelayanan Prima)	A (Pelayanan Prima)	100%
	- Dispendukcapil	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)	100%
4	Rata-Rata Nilai SKM Kabupaten	90 (Sangat Baik)	90,74 (Sangat Baik)	100,82%

Nilai SAKIP Kabupaten

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2021 masih belum direlease.

Namun jika melihat hasil evaluasi di tahun 2020 maka Kabupaten Sidoarjo memperoleh kategori **BB** (**Sangat Baik**). Hasil tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu kategori **A (Memuaskan)**.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan implementasi SAKIP, antara lain :

- Menyempurnakan Aplikasi e-Kinerja sebagai mekanisme manajemen kinerja untuk mengukur kinerja individu, dan menjadi tools untuk keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
- Meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan menyusun register resiko sampai dengan level Kegiatan dan membentuk Satgas SPIP ke seluruh OPD
- Peningkatan kualitas implementasi SAKIP OPD dengan merubah struktur penilaian SAKIP OPD, menjadi 95% komponen LKE SAKIP dan 5% komponen LKE SPIP
- Penguatan pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD melalui pengendalian secara elektronik melalui Aplikasi e-Kenda
- Optimalisasi Aplikasi e-Monev untuk evaluasi capaian kinerja Program dan Kegiatan

Perkembangan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.D.1

Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo

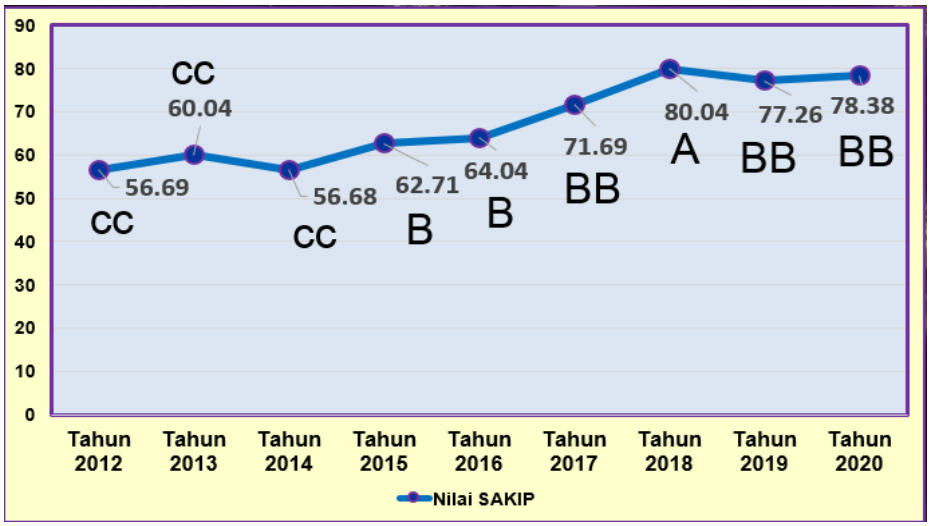

Sumber Data : LHE SAKIP Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebenarnya telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata Nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, maka dapat disampaikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.D.2

Rata – Rata Nilai SAKIP Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur

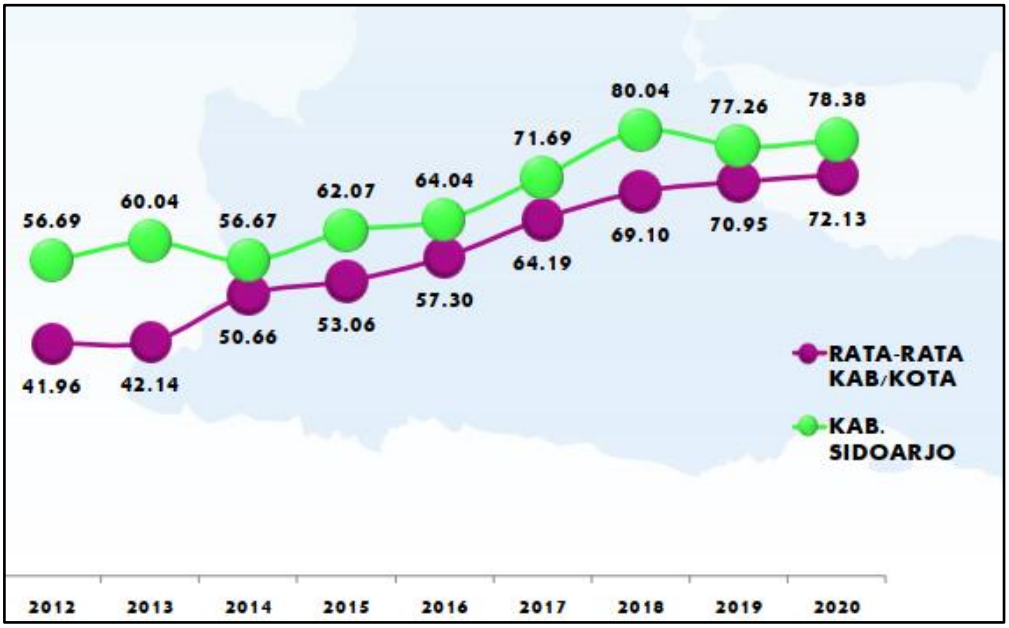

Sumber Data : LHE SAKIP Kabupaten Sidoarjo

Sebagaimana grafik dapat disampaikan bahwa secara umum capaian SAKIP masih berada di atas rata-rata Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur, namun tren SAKIP Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan setelah tahun 2018

Status Kinerja LPPD

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 masih belum direlease oleh Kementerian Dalam Negeri, namun jika melihat hasil terakhir yang dikeluarkan di tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai (score) 3,4866 dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) dan menempati peringat ke-**2 (kedua)** tingkat Nasional. Hasil evaluasi di tahun 2019 memang mengalami penurunan secara peringkat, namun untuk secara nilai agregasi meningkat dan masih bertahan dengan status kinerja yang Sangat Tinggi (ST).

Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik :

Grafik III.D.3

Perkembangan Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo

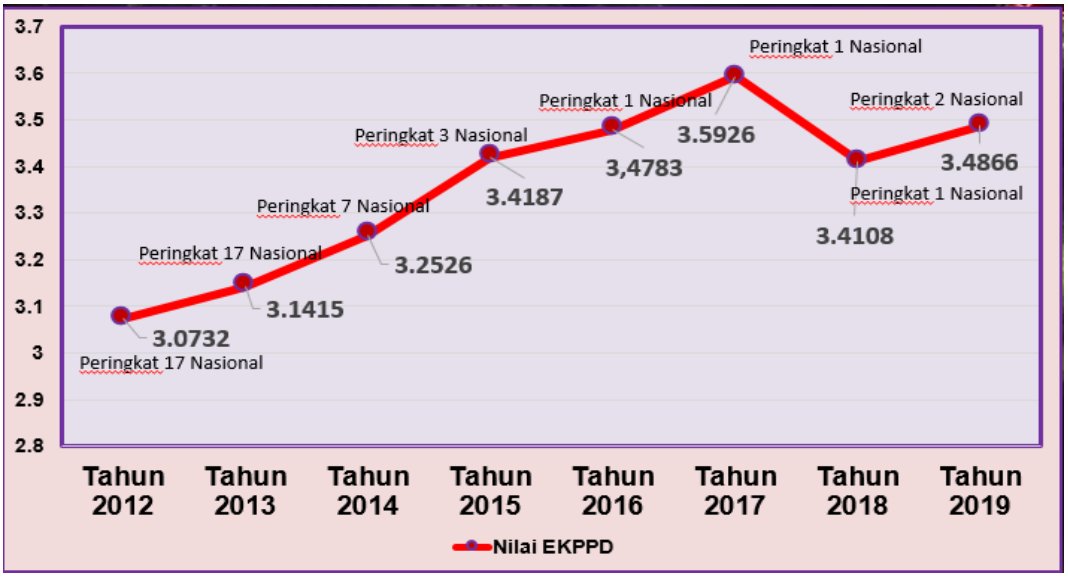

Sumber Data : Hasil EKPPD Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan grafik tersebut diatas, Nilai Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 walaupun secara peringkat turun, namun mengalami peningkatan dari 3.4108 menjadi 3.4866, namun masih berada pada kategori Sangat Tinggi (ST).

Peningkatan tersebut terutama dikarenakan angka capaian kinerja pada urusan pelayanan dasar yang mampu bersaing di Tingkat Nasional.

Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Setiap tahunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diupayakan selalu meningkat, hal ini sesuai dengan kebijakan satu OPD satu Inovasi yang ditetapkan oleh Kabupaten Sidoarjo. Selain itu banyak pula inovasi di Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan penghargaan Kompetisi Regional maupun Nasional, dimana pada tahun 2021 Aplikasi SIPRAJA mendapatkan Penghargaan Top 30 Kovablik (Ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2021 mendapatkan nilai sebagai berikut :

Unit Pelayanan Yang di Sampling	Nilai (Indeks)	Konversi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	Pelayanan Prima (A)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A-	Baik (B)

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB

Rata – Rata Nilai SKM Kabupaten

Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sidoarjo dengan nilai konversi **90,74 Kategori A (Sangat Baik)**. Nilai IKM tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan MPP Sidoarjo.

Rekapitulasi Nilai SKM Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.D.1

Nilai SKM Kabupaten Sidoarjo

No	Unit Pelayanan	IKM		
		Indeks	Konversi	Kategori
	PERANGKAT DAERAH			
1	Sekretariat Daerah	3.67	91.72	SANGAT BAIK
2	Inspektorat	3.60	89.9	SANGAT BAIK
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.74	93.62	SANGAT BAIK
4	Dinas Kesehatan	3.67	91.69	SANGAT BAIK
5	Dinas Tenaga Kerja	3.64	90.94	SANGAT BAIK

6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.47	86.76	BAIK
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.51	87.64	BAIK
8	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	3.54	88.56	SANGAT BAIK
9	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	3.75	93.85	SANGAT BAIK
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.74	93.61	SANGAT BAIK
11	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.81	95.15	SANGAT BAIK
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.39	84.65	BAIK
13	Badan Pelayanan Pajak Daerah	3.78	94.42	SANGAT BAIK
14	Badan Kepegawaian Daerah	3.73	93.29	SANGAT BAIK
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.89	97.25	SANGAT BAIK
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.87	96.66	SANGAT BAIK
17	Rumah Sakit Umum Daerah	3.63	90.87	SANGAT BAIK
	KECAMATAN			
1	Kecamatan Sidoarjo	3.89	97.36	SANGAT BAIK
2	Kecamatan Candi	3.55	88.67	SANGAT BAIK
3	Kecamatan Buduran	3.64	91.12	SANGAT BAIK
4	Kecamatan Gedangan	3.54	88.48	SANGAT BAIK
5	Kecamatan Sedati	3.81	95.18	SANGAT BAIK
6	Kecamatan Waru	3.64	90.89	SANGAT BAIK
7	Kecamatan Taman	3.58	89.62	SANGAT BAIK
8	Kecamatan Krian	3.90	97.59	SANGAT BAIK
9	Kecamatan Sukodono	3.92	97.89	SANGAT BAIK
10	Kecamatan Balongbendo	3.49	87.15	BAIK
11	Kecamatan Tulangan	3.93	98.13	SANGAT BAIK
12	Kecamatan Prambon	3.83	95.63	SANGAT BAIK
13	Kecamatan Tanggulangin	3.51	87.68	BAIK
14	Kecamatan Jabon	3.89	97.19	SANGAT BAIK
15	Kecamatan Porong	3.93	98.15	SANGAT BAIK
	PUSKESMAS			
1	Puskesmas Sidoarjo	3.72	93.04	SANGAT BAIK
2	Puskesmas Sekardangan	3.75	93.66	SANGAT BAIK
3	Puskesmas Urangagung	3.52	88.08	BAIK
4	Puskesmas Candi	3.67	91.83	SANGAT BAIK
5	Puskesmas Porong	3.50	87.44	BAIK
6	Puskesmas Kedungsolo	3.45	86.37	BAIK
7	Puskesmas Tulangan	3.67	91.81	SANGAT BAIK
8	Puskesmas Kepadangan	3.50	87.61	BAIK
9	Puskesmas Jabon	3.37	84.18	BAIK
10	Puskesmas Krembung	3.63	90.68	SANGAT BAIK
11	Puskesmas Krian	3.11	77.79	BAIK
12	Puskesmas Prambon	3.51	87.85	SANGAT BAIK

13	Puskesmas Tarik	3.52	87.99	BAIK
14	Puskesmas Balongbendo	3.34	83.43	BAIK
15	Puskesmas Sedati	3.56	89	SANGAT BAIK
16	Puskesmas Wonoayu	3.57	89.16	SANGAT BAIK
17	Puskesmas Taman	3.52	88.04	BAIK
18	Puskesmas Waru	3.58	89.43	SANGAT BAIK
19	Puskesmas Medaeng	3.64	91.08	SANGAT BAIK
20	Puskesmas Gedangan	3.59	89.7	SANGAT BAIK
21	Puskesmas Sukodono	3.85	96.22	SANGAT BAIK
22	Puskesmas Barengkrajan	3.58	89.46	SANGAT BAIK
23	Puskesmas Ganting	3.73	93.25	SANGAT BAIK
24	Puskesmas Sidodadi	3.61	90.26	SANGAT BAIK
	KELURAHAN			
1	Kelurahan Bulusidokare	3.34	83.46	BAIK
2	Kelurahan Sidokare	3.75	93.73	SANGAT BAIK
3	Kelurahan Kemasan	3.12	77.88	BAIK
	IKM KABUPATEN SIDOARJO	**3.63**	**90.74**	**SANGAT BAIK**

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kab. Sidoarjo

b. Capaian Pelaksanaan Program Prioritas di Tahun 2021

- **10.000 Beasiswa Kuliah**

  Dilaksanakan mulai tahun 2022

- **24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat**

  Pada tahun 2021 dilakukan peningkatan / optimalisasi pemanfaatan Aplikasi SIPRAJA dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat Sidoarjo yang cepat dan memuaskan.

c. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota** dengan anggaran sebesar Rp.57.905.621.353,00 dan terealisasi sebesar Rp.52.805.635.532,00 atau 91,19%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase implementasi produk hukum daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum	100%	100%	100%
Persentase implementasi kebijakan daerah di Bidang Organisasi	100%	100%	100%

Persentase IKU OPD di bawah kooridnasi Asisten Administrasi Umum yang mencapai target	100%	79%	79%
Persentase OPD Pelayanan di bawah koordinasi Asisten Administasi Umum dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Tahapan perencanaan yang dilaksanakan	7 tahapan	7 tahapan	100%
	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	80%	80%	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	100%	100%	100%
	Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	80	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang diadakan	13 jenis	13 jenis	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	100%	100%	100%
	Nilai SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah	75	75	100%

Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang SKMnya berkategori baik	100%	100%	100%
	Prosentase perangkat daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase implementasi kebijakan daerah bidang organisasi	100%	100%	100%
	Persentase OPD Pelayanan dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik	100%	100%	100%
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah	75	75	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

SUB KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.000.000,00	43.672.600,00	83,99
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.350.000,00	1.306.500,00	96,78
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	450.000,00	256.500,00	57,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	900.000,00	456.606,00	50,73
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	900.000,00	548.000,00	60,89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	900.000,00	477.000,00	53,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000,00	115.500,00	77,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.624.136.131,00	25.453.372.951,00	99,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.126.188,00	3.315.000,00	54,11
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	504.930,00	361.800,00	71,65
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	960.000,00	831.000,00	86,56
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	112.759.691,00	99.333.400,00	88,09
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301.421.636,00	209.877.070,00	69,63
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.265.494,00	51.249.000,00	83,65
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	712.233.528,00	638.641.786,00	89,67
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.900.000,00	840.000,00	14,24
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	108.105.544,00	50.710.000,00	46,91
Penyediaan Bahan/Material	366.180.990,00	332.057.785,00	90,68
Fasilitasi Kunjungan Tamu	353.462.500,00	343.907.576,00	97,30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	446.919.141,00	443.250.533,00	99,18
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	813.686.202,00	739.154.000,00	90,84
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.707.750,00	8.690.000,00	89,52

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.778.500.000,00	1.605.676.729,00	90,28
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.000.000,00	168.676.813,00	98,07
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.545.643.200,00	3.160.076.232,00	89,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000,00	160.697.576,00	89,28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.000.000,00	164.754.222,00	95,23
Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	19.875.000,00	99,38
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	774.155.000,00	709.425.480,00	91,64
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000,00	48.389.000,00	96,78
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.206.438.000,00	439.716.236,00	36,45
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	182.265.151,00	154.965.220,00	85,02
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.000.000,00	198.904.500,00	90,41
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000,00	19.910.200,00	49,78
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.493.757.155,00	2.348.934.490,00	94,19
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	10.897.925.902,00	9.807.842.065,00	90,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.343.299.121,00	1.630.030.216,00	69,56
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	145.875.000,00	145.060.900,00	99,44
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250.645.000,00	246.222.000,00	98,24
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	224.640.480,00	219.557.080,00	97,74
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	286.768.100,00	284.320.585,00	99,15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	190.981.460,00	181.110.460,00	94,83
Fasilitasi Keprotokolan	2.611.107.014,00	2.126.360.545,00	81,44
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	916.000.000,00	361.560.376,00	39,47
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	222.601.045,00	181.145.000,00	81,38

2. **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** dengan anggaran sebesar Rp.13.139.118.065,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.701.524.394,00 atau 89,06%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase implementasi produk hukum daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%
Persentase implementasi kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan, dan Bidang Kesra	100%	100%	100%

Persentase IKU OPD di bawah kooridnasi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mencapai target	100%	64%	64%
Persentase OPD Pelayanan di bawah koordinasi Asisten Administasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Administasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang diterapkan	100%	100%	100%
	Persentase implementasi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan	100%	100%	100%
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang diterapkan	100%	100%	100%
	Persentase implementasi kebijakan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%
	Persentase doktasi informasi hukum yang dipublikasikan	100%	100%	100%
	Prosentase rancangan peraturan perundang-undangan yang terbentuk	100%	100%	100%
	Persentase implementasi produk hukum daerah	100%	100%	100%
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditindaklajuti ke dalam Naskah Kerja Sama	100%	100%	100%
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti ke dalam Naskah Kerja Sama	100%	100%	100%
	Persentase Kerja Sama yang Dievaluasi	100%	100%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

SUB KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penataan Administrasi Pemerintahan	74.704.813,00	70.935.630,00	94,95
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	549.816.509,00	544.969.387,00	99,12
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	287.056.827,00	276.990.472,00	96,49
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.017.799.478,00	4.668.973.205,00	93,05
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	324.295.570,00	259.901.800,00	80,14
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.209.259.000,00	4.190.791.000,00	99,56
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	355.346.186,00	275.259.200,00	77,46
Fasilitasi Bantuan Hukum	1.356.295.000,00	719.547.500,00	53,05
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	458.302.091,00	329.127.300,00	71,81
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	378.545.091,00	272.415.800,00	71,96
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	99.676.500,00	68.222.300,00	68,44
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	28.021.000,00	24.390.800,00	87,04

3. **Program Perekonomian dan Pembangunan** dengan anggaran sebesar Rp.12.561.906.641,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.271.492.740,00 atau 89,73%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase implementasi produk hukum daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%
Persentase implementasi kebijakan daerah di Bidang Pembangunan, Bidang Perekonomian, dan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%
Persentase IKU OPD di bawah kooridnasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan yang mencapai target	100%	67%	67%
Persentase OPD Pelayanan di bawah koordinasi Asisten Administasi Perekonomian dan Pembangunan dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian yang diterapkan	100%	100%	100%
	Persentase implementasi kebijakan daerah bidang perekonomian	100%	100%	100%
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase policy brief yang digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah bidang administrasi dan pengendalian pembangunan	100%	100%	100%
	Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan standarisasi / juknis	100%	100%	100%
	Persentase Permasalahan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase Program Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	80%	80%	100%
	Persentase implementasi kebijakan daerah Bidang Pembangunan	100%	100%	100%
	Persentase IKU OPD yang mencapai target	100%	80%	80%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Implementasi Kebijakan Daerah Bidang PBJ	100%	100%	100%
	Level Kematangan Organisasi PBJ	Level 3	Level 3	100%
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang sumber daya alam, pangan dan pertanian serta perikanan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, energi dan air yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Persentase implementasi kebijakan daerah bidang perekonomian	100%	100%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

SUB KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	132.520.017,00	96.357.915,00	72,71
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	112.500.000,00	6.565.000,00	5,84
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	276.306.000,00	199.542.500,00	72,22
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	534.875.900,00	528.252.496,00	98,76
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	226.487.600,00	226.072.063,00	99,82
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	665.423.145,00	637.931.064,00	95,87
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	570.753.242,00	551.269.715,00	96,59
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1.158.948.419,00	1.000.581.596,00	86,34
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.142.658.318,00	2.035.488.141,00	95,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6.665.305.000,00	5.930.988.250,00	88,98
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	76.129.000,00	58.444.000,00	76,77

d. **Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup**

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan unsur penunjang Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

No.	Perda / Perbup	Tentang
1	Perda Nomor 04 Tahun 2021	Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo
2	Perbup Nomor 73 Tahun 2021	Harga Satuan Pokok Kegiatan Fisik Dan Analisis Standar Belanja Fisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3	Perbup Nomor 84 Tahun 2021	Tata Cara Perizinan Pendirian Rumah Ibadat

e. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk urusan Perikanan dan Kelautan, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada takmir masjid dan mushollah terkait proses pengajuan hibah di alplikasi SIPD dan menaikkan anggaran dana hibah untuk masjid dan mushola serta	Bekerjasama dengan Kecamatan untuk menghadirkan Kasi Kessos Desa / Kelurahan untuk merumuskan usulan kenaikan anggaran melalui P-APBD

	penambahan anggaran untuk acara keagamaan.	
2	Melakukan evaluasi/mengkaji terkait harga satuan, harga bahan dan upah pekerja konstruksi yang jadi acuan oleh pemenang lelang.	Menyusun tim yang bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap HPS yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
3	Melakukan Balck List kepada kontraktor atau rekanan yang pekerjaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Melakukan penilaian kinerja penyedia yang melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo
4	Lebih mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya sebagai Dewan Pengawas pada BUMD dan proaktif dalam mencari inovasi, terobosan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah.	• Rapat kerja dengan semua BUMD, Dewan Pengawas dan TAPD (2 kali dalam setahun) • Rapat koordinasi dengan BUMD • Monev kinerja BUMD
5	Mempercepat penyelesaian RAPERDA tentang PT BPR Delta Arta, RAPERDA tentang Perumda Aneka Usaha dan RAPERDA tentang Perumda Delta Tirta Sidoarjo, melakukan kajian mengenai potensi pembentukan BUMD baru dan penambahan penyertaan modal pada perusahaan daerah	• Rapat dengan DPRD membahas perubahan bentuk hukum BUMD • Penyusunan kajian investasi penyertaan modal pada BUMD

Unsur Penunjang Sekretariat DPRD

Unsur penunjang sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Unsur penunjang Sekretariat DPRD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif dengan meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan unsur penunjang Sekretariat DPRD sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Survey Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	76	86,19	113,41%
2	Prosentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam Prolegda	74	72	97,29%

Indeks Kepuasan Anggota DPRD

Indeks Kepuasan Anggota DPRD Tahun 2021 tercapai angka 86,19 dari target angka 76 sehingga tercapai 113,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu pada angka 82,44 maka terdapat peningkatan angka 3,75 atau sekitar 4,55%. Adapun tren capaian Indeks Kepuasan Anggota DPRD dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.D.4

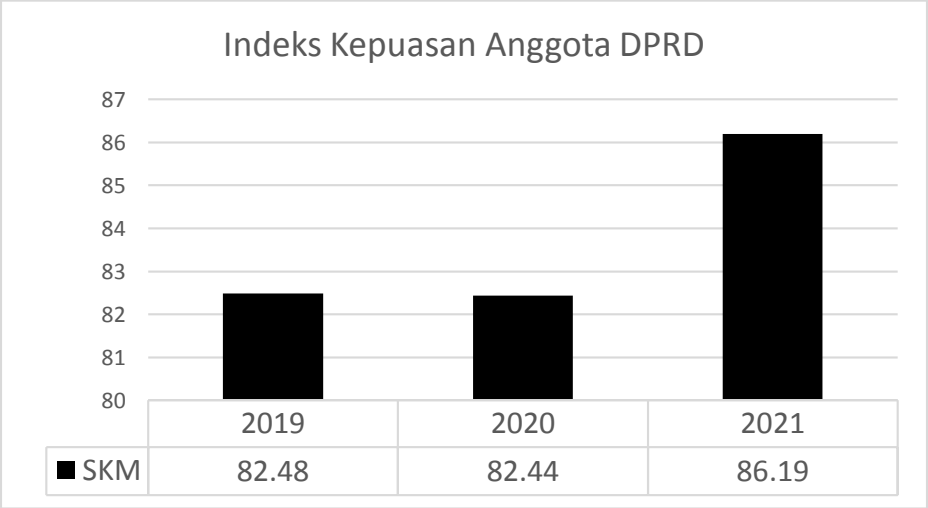

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo

Persentase Penyelesaian Produk Hukum Yang Masuk Dalam Prolegda

Penyelesaia produk hukum yang masuk dalam prolegda Tahun 2021 tercapai 72% dari target 74% sehingga capaian 97,29%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu 36,11% maka terdapat peningkatan 61,18%. Adapun tren capaian penyelesaian prosuk hukum yang masuk dalam prolegda dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.D.5

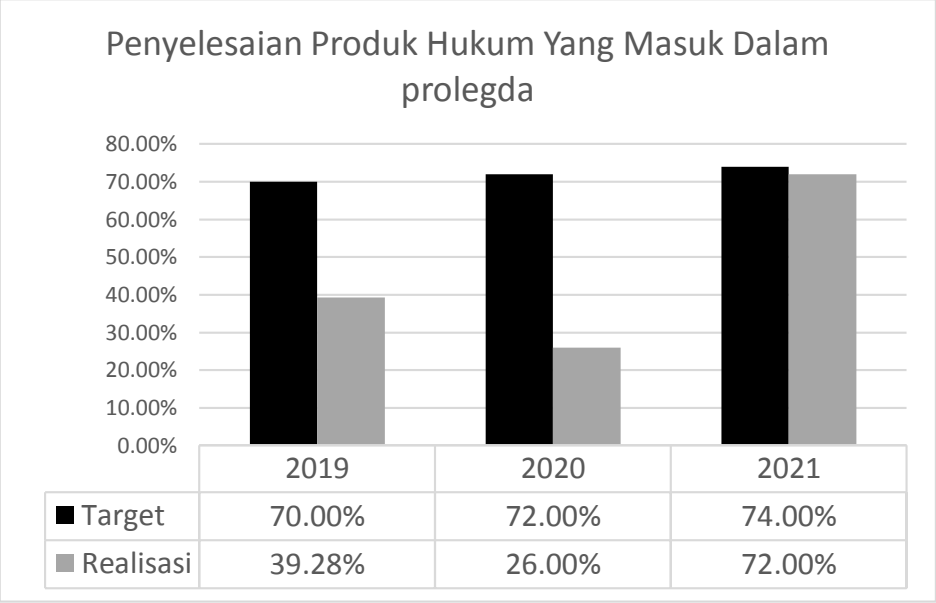

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo

Untuk penyelesaian Produk Hukum yang masuk dalam Prolegda, Sekretariat DPRD menargetkan 14 Raperda di Tahun 2021 yang dapat ditetapkan, namun pada kenyataannya Raperda yang dapat ditetapkan menjadi Perda di Tahun 2021 yaitu sebanyak 10 Raperda, sehingga menyisakan 4 Raperda yang masih dalam proses pembahasan oleh Anggota Pansus DPRD. Raperda yang belum ditetapkan di Tahun 2021 yaitu :

1. Raperda Penggabungan Wilayah Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo, penanggungjawab Pansus 9 yang dibentuk pada tanggal 3 Nopember 2021
2. Raperda Perubahan atas Penyertaan Modal Perumda Delta Tirta Sidoarjo, penanggungjawab Pansus 10 dibentuk pada tanggal 3 Nopember 2021
3. Raperda Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, penanggungjawab Pansus 10 dibentuk pada tanggal 11 Nopember 2021

4. Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, penanggungjawab Pansus 12 dibentuk pada tanggal 11 Nopember 2021

Adapun permasalahan yang menyebabkan keempat Raperda tersebut diatas tidak dapat ditetapkan, adalah sebagai berikut :

- Pansus pembahasan Raperda tersebut baru ditetapkan pada awal bulan Nopember 2021. Pelaksanaan pembahasan Raperda sampai dengan ditetapkannya Perda biasanya membutuhkan waktu sekitar 4 bulan, sehingga target ditetapkannya keempat Raperda tersebut yaitu akhir Februari 2022.
- Pelaksanaan pembahasan keempat Raperda sudah berlangsung sejak awal Nopember 2021. Pembahasan tahap I dengan agenda Pansus DPRD dengan OPD terkait diperkiran sudah mencapai progress pembahasan sebesar 60% untuk selanjutnya dilakukan pembahasan tahap II yaitu hasil keputusan Gubernur baru setelah itu dilakukan penetapan Perda.

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.61.778.865.689 dan terealisasi sebesar Rp.50.741.781.827 atau 82,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	88 %	88 %	100 %

Program tersebut didukung oleh 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan evaluasi perangkat daerah daerah yang disusun dan didokumentasikan	a. 3 dokumen perencanaan b. 4 dokumen penganggaran c. 1 dokumen data evaluasi kinerja	a. 3 dokumen perencanaan b. 4 dokumen penganggaran c. 1 dokumen data evaluasi kinerja	a. 100% b. 100% c. 100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adminitrasi keuangan yang diselenggarakan	12 laporan	12 laporan	100 %

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang diselenggarakan	12 bulan	12 bulan	100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	1 tahun	1 tahun	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	79 unit	79 unit	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	4 jenis	4 jenis	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	51 unit	51 unit	100%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Survey kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan administrasi keuangan	87%	87%	100 %
Layanan Administrasi DPRD	Survey kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan administrasi	87%	87%	100 %

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 162.298.600	Rp 59.780.000	36,83 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.695.329.145	Rp 7.595.329.146	98,70 %
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 250.000.000	Rp 175.318.000	70,13 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2.888.153.923	Rp 1.940.596.659	67,19 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.862.902.294	Rp 2.490.002.490	86,97 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 5.142.645.476	Rp 3.905.562.198	75,94 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.535.750.000	Rp 2.009.048.884	79,22 %
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 32.211.192.264	Rp 30.395.091.862	94,36 %
Layanan Administrasi DPRD	Rp 7.030.593.986	Rp 3.613.469.100	51,39 %

2. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** dengan anggaran sebesar Rp.38.968.167.882,- dan terealisasi sebesar Rp.28.456.072.580,- atau 73,02%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Presentase dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %

Program tersebut didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase pembentukan, pembahasan dan penetapan Perda dan Produk hukum DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase kebutuhan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase Jumlah aspirasi masyarakat yang diserap dan dihimpun difasilitasi	100 %	100 %	100 %
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difaslitasi	100 %	100 %	100 %
Pembahasan Kerjasama Daerah	Prosentase Jumlah Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 631.605.033	Rp 26.250.000	4,15 %
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 3.162.100.000	Rp 2.645.689.113	83,66 %
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 530.000.000	Rp 426.052.000	80,38 %
Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 8.251.832.545	Rp 4.664.118.549	56,52 %
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 2.898.948.390	Rp 447.374.000	15,43 %
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 83.062.250	Rp 522.500	0,62 %
Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 23.376.878.114	Rp 20.246.066.418	86,60 %

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan unsur penunjang Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

No.	Perda / Perbup	Tentang
1	Perbup Nomor 2 Tahun 2021	Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
2	Perbup Nomor 3 Tahun 2021	Pemberian Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3	Perbup Nomor 4 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
4	Perbup Nomor 14 Tahun 2021	Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5	Perbup Nomor 24 Tahun 2021	Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk unsur penunjang Sekretariat DPRD.

Unsur Penunjang Pengawasan

Unsur penunjang pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Unsur penunjang pengawasan dilaksanakan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengawasan melalui pengendalian internal.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan unsur penunjang pengawasan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			Keterangan
		TARGET	REALISASI	%	
1	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	100%	LKPD tahun 2020
2	Maturitas SPIP	Terdefinisi	Terdefinisi	100%	
3	Kapabilitas APIP	Level 2 plus	Level 2 plus	100%	
4	Survey Penilaian Integritas (SPI)	-	75,5	100%	
5	Monitoring Center for Prevention (MCP)	80	85	106,25%	

Opini Atas Audit BPK

Opini atas audit BPK untuk Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2021 atas Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dalam kurun waktu 8 tahun Kabupaten Sidoarjo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukan konsistensi dan komitmen dalam mengelola keuangan yaitu Laporan Keuangan (LK) telah tersaji secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Adapun tren capaian Opini atas Audit BPK 3 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Opini atas Audit BPK
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Adapun upaya yang dilakukan agar dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu :

- Bimtek dan asistensi pengelolaan dan penatausahaan laporan keuangan secara berkala kepada seluruh pengelola keuangan pada seluruh OPD dan Desa/Kelurahan
- Bimtek dan asistensi penatausahaan aset daerah secara berkala
- Kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi lainnya terhadap pengelolaan keuangan

Maturitas SPIP

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*. Fokus penilaian SPIP ada 5 (lima) unsur yaitu :

1. Unsur Lingkungan Pengendalian
2. Unsur Penilaian Resiko
3. Unsur Aktivitas pengendalian
4. Unsur informasi dan komunikasi
5. Unsur pemantauan pengendalian internal

Berdasarkan *Quality Assurance* (QA) BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : SP-1354/D3/04/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 3,0909 dengan kategori level 3 (terdefinisi). Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan.

Tren capaian Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Level Maturitas SPIP
2019	Level 3 (Terdefinisi)
2020	Level 3 (Terdefinisi)
2021	Level 3 (Terdefinisi)

Walaupun penetapan atas maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diusulkan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur belum ditetapkan oleh BPKP Pusat Jakarta, upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan maturitas SPIP terus dilakukan, Pemerintah kabupaten Sidoarjo terus memotivasi agar antusias OPD meningkat dalam memitigasi risiko baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Upaya membangkitkan semangat OPD dalam memitigasi risiko dilakukan dengan jalan asistensi, konsulting, dan monitoring berkaitan dengan penyusunan daftar risiko, analisa risiko, dan rencana tindak pengendalian.

Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Penilaian atas penerapan tata kelola APIP mengacu kepada *Internal Audit Capability Model* mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan Layanan APIP *(Services and Role of Internal Auditing)*
2. Pengelolaan SDM *(People Management)*
3. Praktik Profesional *(Professional Practices)*
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja *(Performance Management and Accountability)*
5. Budaya dan Hubungan Organisasi *(Organizational Relationship and Culture)*
6. Struktur Tata Kelola *(Governance Structures)*

Tahun 2021 hasil capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo adalah Level 2 plus *(Infrastructure)* ini mencerminkan bahwa **APIP** kabupaten Sidoarjo sudah mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Adapun tren capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :

Grafik III.D.6

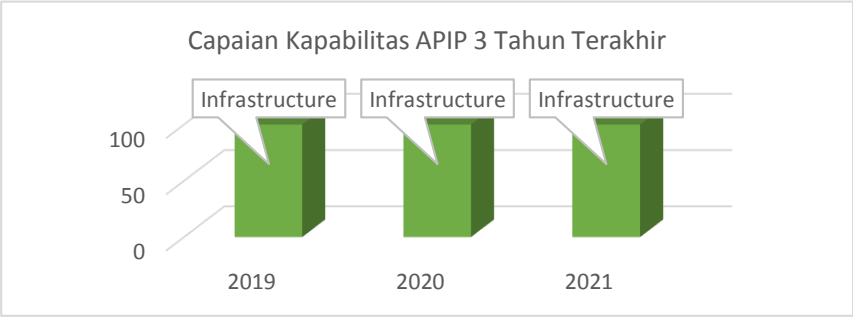

Sumber Data : Inspektorat Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan agar Kapabilitas APIP optimal, yaitu :

- Memuatkhirkan peta auditan dan menggunakan *risk register* yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko (PPBR)
- Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang berkaitan pengawasan berbasis risiko

Survey Penilaian Integritas (SPI)

Survey Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan tujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi yang dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Tahun 2021 adalah tahun pertama kabupaten Sidoarjo menjadi obyek survey penilaian integritas yang selanjutnya direncanakan akan dilaksanakan setiap tahun, adapun hasil penilaian Survey Penilaian Integritas Kabupaten Sidoarjo tahun ini adalah 75,49 dari rentang nilai 0 s.d. 100 dengan nilai masing-masing variabel sebagai berikut :

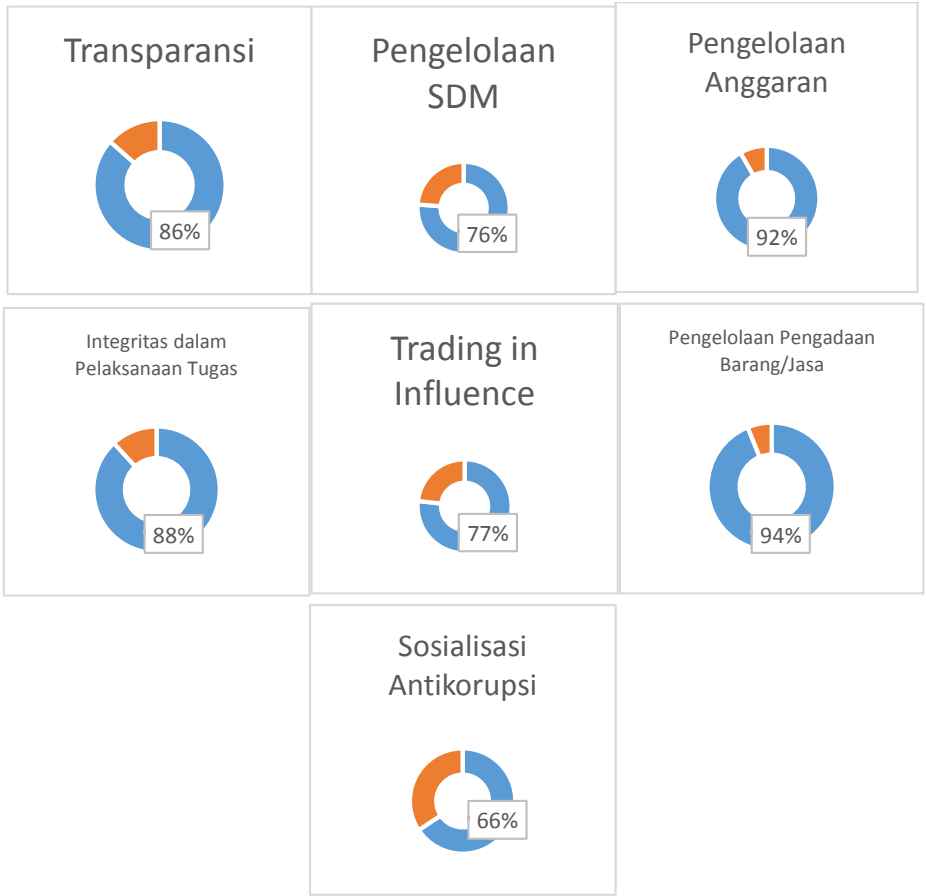

Rata-rata nilai 7 variabel tersebut diatas sebesar 82,71 sedangkan nilai yang diberikan sebesar 75,49 hal ini dikarenakan ada faktor koreksi sebagai berikut :

1. Jumlah pengaduan yang masuk ke KPK dan ditindaklanjuti
2. Jumlah kasus yang masuk ke SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) online yang belum selesai ditindaklanjuti
3. Adanya pengarahan dalam pelaksanaan survey

Adapun upaya yang dilakukan agar capaian Survey Penilaian Integritas optimal, yaitu : Meningkatkan sosialisasi anti korupsi ke seluruh stake holder mulai dari OPD sampai dengan pemerintah desa/kelurahan

***Monitoring Center for Prevention* (MCP)**

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring, upaya koordinasi, dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

Tahun 2021 hasil penilaian MCP Kabupaten Sidoarjo adalah 85 dari rentang nilai 0 s.d. 100 dengan nilai masing-masing variabel sebagai berikut :

No.	Variabel	Nilai
1	Perencanaan dan penganggaran	81,1
2	Pengadaan barang dan jasa	84,5
3	Perizinan	100,0
4	Pengawasan APIP	94,4
5	Manajemen ASN	95,1
6	Optimalisasi pajak daerah	97,9
7	Manajemen aset daerah	65,1
8	Tata kelola keuangan desa	92,0

Capaian sebesar 106,25% dari nilai 80 yang ditargetkan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih baik secara administrasi maupun secara regulasi.

Berikut tren hasil penilaian MCP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana grafik di bawah ini :

Grafik III.D.7

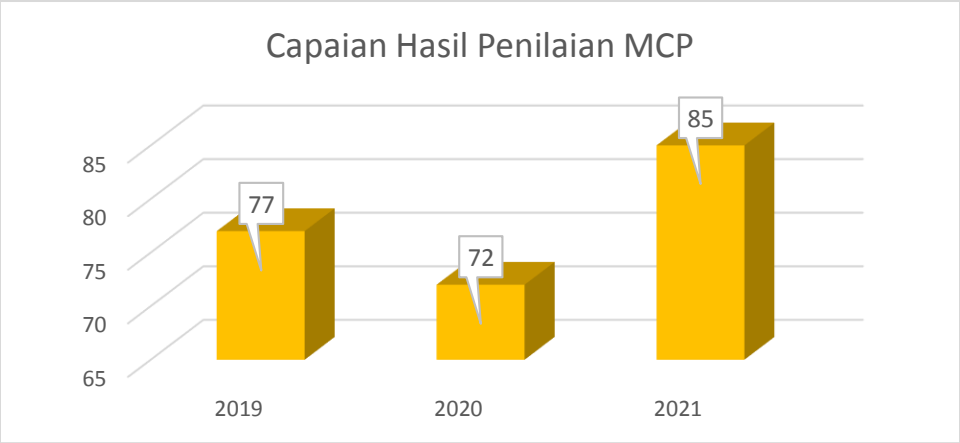

Sumber Data : Inspektorat Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan agar capaian MCP optimal, yaitu :

- Asistensi dan monitoring terhadap 8 area intervensi yang difokuskan pada area intervensi yang nilainya rendah yaitu pengelolaan aset daerah melalui:
  a. Memotivasi sertifikasi atas aset daerah
  b. Memotivasi dan mendorong persetujuan DPRD atas Perda tentang pengelolaan aset daerah

c. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp.302.182.425,- dan terealisasi sebesar Rp.267.633.800,- atau 88,57%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	98%	100%	102,04%
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	78%	88,76%	113,79%
Persentase Perangkat Daerah Yang Nilai SAKIP Minimal B	100%	100%	100%
Persentase Kasus/Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Disusun	179 laporan	201 laporan	112,29%
Penyelenggaran Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	35 laporan	49 laporan	140%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	106.282.425,00	82.333.800,00	77,47
Penyelenggaran Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	195.900.000,00	185.300.000,00	94,59
Jumlah	Rp 302.182.425,00	Rp 267.633.800,00	88,57

2. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** dengan anggaran sebesar Rp 419.439.500,- dan terealisasi sebesar Rp 391,619.500,- atau 93,37%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo Minimal Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	100%

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang Ditetapkan	16 kebijakan	16 kebijakan	100%
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi yang Disusun	27 laporan	27 laporan	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	41.000.000,00	37.975.000,00	92,62
Pendampingan dan Asistensi	378.439.500,00	353.644.500,00	93,45
Total	419.439.500,00	391,619.500,00	93,37

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan Unsur Penunjang Pengawasan

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk Unsur Penunjang Pengawasan

Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan

Unsur penunjang perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Unsur penunjang perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan pembangunan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	100	95,4	95,4
2	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	70	74,25	106,1
3	Persentase Program Pembangunan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian hasil (*outcame*) > 76 %	92	100	108.7
4	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	60	80,55	134,3

Pada dasarnya tidak dijumpai permasalahan yang signifikan yang menjadi kendala capaian sasaran. Namun pada tahun 2021 merupakan masa transisi Penerapan Permendagri 70 dan 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 sehingga menyebabkan banyaknya perbedaan antara dokumen Perencanaan PD dengan dokumen Perencanaan Daerah. Hal ini lah yang pada dasarnya menjadikan hambatan dalam pencapaian indikator salah satu sasaran Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.

Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik

Definisi Operasional untuk kriteria dokumen Perencanaan PD yang berkualitas baik sesuai Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Dokumen Renja disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu
b. Berisikan Program dan Kegiatan yang memuat Tupoksi SKPD
c. Memuat indikator kinerja yang terukur, lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber dana yang diperlukan
d. Terdapat keselarasan antara Renstra dan RPJMD
e. Terdapat keselarasan antara Renja, RKPD dan KUA-PPAS serta RAPBD

Sesuai definisi operasional tersebut di atas, terdapat 46 PD dari 48 PD yang ada di lingkungan Kabupaten Sidoarjo yang telah menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik sesuai ketentuan Permendagri 86 tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah PD	Sesuai	Capaian
1.	Dokumen Renja disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	48 PD	45 PD	93,75%
2.	Berisikan Program dan Kegiatan yang memuat Tupoksi SKPD	48 PD	48 PD	100%
3.	Memuat indikator kinerja yang terukur, lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber dana yang diperlukan	48 PD	48 PD	100%
4.	Terdapat keselarasan antara Renstra dan RPJMD	48 PD	47 PD	97,92%
5.	Terdapat keselarasan antara Renja, RKPD dan KUA-PPAS serta RAPBD	48 PD	41 PD	85,42%
Rata-rata		**48 PD**	**45,8 PD**	**95,42%**

Terdapat 2 (dua) OPD yang masih belum dapat menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik, yaitu :

1. Dinas P2CKTR
2. Kecamatan Krian

Adapun upaya yang telah dilakukan agar PD dapat Menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, yaitu :

- Pembinaan/pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra/Renja).
- Monitoring dan evaluasi agar dokumen perencanaan Perangkat Daerah tetap selaras dengan dokumen Perencanaan Daerah.

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.2.070.914.008,- dan terealisasi sebesar Rp.2.013.917.875 atau 97,25%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD	70%	74,25%	106,07%
Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	100%	99%	99%
Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	79%	79%

Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	3 dokumen	3 dokumen	100%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antara dokumen Renstra dan Renja PD	100%	65%	65%
	Persentase konsistensi antar dokumen RPJMD dan RKPD	100%	67%	67%
	Persentase konsistensi antar dokumen RKPD, KUA PPAS dan APBD	100%	99%	99%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.585.363.586,00	1.569.667.975,00	99,01%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	485.550.422,00	444.249.900,00	91,49%

2. **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.3.985.313.644,- dan terealisasi sebesar Rp.3.880.040.632,- atau 97,36%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Prosentase Rekomendasi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan yang ditindaklanjuti	95%	95%	100%
Prosentase Rekomendasi Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi yang ditindaklanjuti	95%	95%	100%

   Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		
		Target	Realisasi	%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Prosentase Capaian Kinerja Program PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia thd perencanaan dengan capaian ≥ 76 %	92%	95%	102,3%
	Persentase Hasil Rapat Koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti	90%	95%	105,6%
	Persentase dokumen perencanaan PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkualitas baik	100%	100%	100,0%
	Prosentase Kegiatan PD bidang Pembangunan Manusia yang difasilitasi	100%	100%	100,0%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Kinerja Program PD bidang Perekonomian dan SDA terhadap perencanaan dengan capaian ≥ 76%	100%	100%	100,0%
	Persentase Dokumen Perencanaan PD dibawah bidang Perekonomian dan SDA berkualitas baik	100%	100%	100,0%
	Persentase Hasil Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti sebagai bahan Kebijakan	95%	95%	100,0%
	Persentase Kegiatan PD bidang Perekonomian dan SDA yang difasilitasi	100%	100%	100,0%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Prosentase capaian kinerja program PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap perencanaan dengan capaian ≥ 76%	100%	100%	100,0%
	Prosentase dokumen perencanaan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkualitas baik	95%	95%	100,0%

	Prosentase Hasil Rapat Koordinasi bidang PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang ditindak lanjuti	90%	90%	100,0%
	Persentase dokumen perencanaan RKPD yang sesuai dengan arahan dalam dokumen tata ruang	75%	80,55%	107,4%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.287.873.261,00	1.251.332.906,00	97,16%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.217.763.247,00	1.179.283.150,00	96,84%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.479.677.136,00	1.449.424.576,00	97,96%

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan unsur penunjang perencanaan pembangunan, sebagai berikut :

No.	Perda / Perbup	Tentang
1	Perbup Nomor 06 Tahun 2021	Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk unsur penunjang perencanaan pembangunan.

Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Unsur penunjang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Unsur penunjang penelitian dan pengembangan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas dokumen penelitian/kajian dan data.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan unsur penunjang penelitian dan pengembangan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase dokumen Penelitian / kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah	80	80	100
2	Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria Indeks Inovasi Daerah (IID)	N/A	N/A	-

Persentase dokumen Penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah

Untuk data Realisasi Penelitian/Kajian yang telah ditindaklanjuti menjadi kebijakan Pembangunan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Penelitian / Kajian	Jumlah Penelitian / Kajian yang ditindaklanjuti		% Penelitian / Kajian yang ditindaklanjuti sebagai Kebijakan
			Non Kebijakan	Kebijakan	
1	2017	37	9	26	70,27%
2	2018	37	8	27	72,97%
3	2019	53	14	39	73,58%
4	2020	35	8	27	77,00%
5	2021	20	4	16	80,00%

Adapun pemanfaatan dokumen penelitian/kajian dimaksud, antara lain digunakan untuk :

- Memberikan informasi dan solusi dalam memecahkan permasalahan di berbagai bidang pemerintahan;
- Memberikan rekomendasi dalam pembuatan kebijakan;

- Sebagai alat ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Adapun permasalahan yang ada dalam pemanfaatan dokumen penelitian/kajian, yaitu :

- Pada Tahun 2019 sebanyak 5 Perangkat Daerah mengirimkan Laporan Akhir dan executive Summary ke Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah kajian sebanyak 20 kajian.
- Kajian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada Tahun 2018 tentunya harus menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Sidoarjo. Dari 20 judul kajian yang telah ditindaklanjuti tercatat **80% hasil kajian ditindaklanjuti sebagai kebijakan**. Ini menandakan bahwa hasil rekomendasi kajian tahun 2019 sudah dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Sidoarjo. Kenyataan ini sedikit banyak menunjukkan bahwa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah mulai mengambil kebijakan berbasis riset.
- Keterlambatan pengiriman Data terkait Penelitian/kajian oleh PD (di Tahun n-2) yang menjadi kebijakan pembangunan daerah di Tahun anggaran berjalan dikarenakan Perangkat Daerah yang memiliki Judul Kajian belum mengajukan dokumen KAK kajian, untuk dibahas oleh Tim Rekomendasi yang akan dibandingkan dengan Kebijakan Pembangunan Daerah yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar dokumen penelitian/kajian dapat bermanfaat dengan baik, yaitu :

- Diperlukan adanya pembinaan/pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Renstra/Renja PD serta monitoring dan evaluasi agar dokumen perencanaan PD tetap selaras dengan dokumen Perencanaan Daerah
- Melakukan sosialisasi secara intensif terkait mekanisme kelitbangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang kelitbangan dan memasukkannya ke pedoman pelaksanaan APBD setiap tahun serta jika diperlukan diberlakukan

reward dan punishment bagi PD yang tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut.

- Melakukan Monev terhadap seluruh rekomendasi Bidang litbang dan data yang telah dikeluarkan dan melakukan penelitian atas kelayakan rekomendasi yang dihasilkan.
- Menyusun Surat Edaran terkait pelaksanaan kajian yang dapat dijadikan acuan oleh PD dalam melaksanakan kajian sesuai mekanisme pada SE kajian no. 070/1207/438.6.1/2021 tertanggal 07 Desember 2021.

Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria Indeks Inovasi Daerah

1. PROFIL PEMERINTAH DAERAH

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Visi Misi	Visi: Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan Misi: 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan; 2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat; 3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan; 4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhakul karimah berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban; 5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
2.	Tingkat Lembaga Kelitbangan	Unit litbang ditangani setara eselon III	Kedudukan SOTK BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo
3.	APBD Tepat Waktu	Penetapan APBD tepat waktu dua tahun berturut-turut	APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021
4.	Kualitas Peningkatan Perizinan	7.892%	Presentasi Peningkatan Berusaha Kab. Sidoarjo

5.	Jumlah Pendapatan Perkapita	5.345%	PDRB Kabupaten Sidoarjo Menurut Lapangan Usaha 2016-2020
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	-6.3500000000000005	Keadaan Ketenagakerjaan Sidoarjo, Agustus 2020
7.	Jumlah Peningkatan Investasi	55.014%	Perbandingan Nilai realisasi PMAdan PMDN Sidoarjo ,Nilai investasi 2019 dan 2020
8.	Jumlah Peningkatan PAD	-99.911%	Perda APBD TA 2021,Perda APBDTA 2020
9.	Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ *unqualified Opinion*	Opini BPK Tahun 2020
10.	Nilai Capaian Lakip	Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) pada kisaran BTahun terakhir	LAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun2020
11.	Nilai IPM	0.300%	Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Jawa Timur Tahun 2020
12.	Penghargaan Bagi Inovator	Pemberian Piagam Penghargaandan Reward/insentif serta menerapkan ide inovasinya	Pameran inovasi publik dan pemberian pengharagaan,Penghargaa n Inovasi Kab. Sidoarjo,Piagam Penghargaan IID 2020
13.	Jumlah penelitian atau kajianyang mendukung Inovasi	diatas 7 Penelitian / Kajian	Ringkasan Eksekutif Penelitian/Kajian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
14.	Roadmap SiDA	telah membuat dokumen SIDAdan ditetapkan dalam Perkada	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014-2025
15.	Penurunan Angka Kemiskinan	-0.2699999999999996	Profil Kemiskinan KabupatenSidoarjo Tahun 2020
16.	Jumlah Inovasi Daerah	40	Dihitung otomatis oleh sistem (Inovasi Penerapan Tahun 2019 -2020)

2. DAFTAR INOVASI TAHUN 2019 dan 2020

No.	Inovasi
1	MARANI ANGKOT (Memutus Rantai Pandemi Di Angkot)
2	MAKAN TONGKOL BAKAR (Mengutamakan Protokol Kesehatan di Restoran dengan Baik dan Benar)
3	No Cash No Bon Transfer Wae
4	GAWE ONLINE (JOBFAIR SIDOARJO)

5	SISUK (Sistem Surat Masuk)
6	KBK SAKTI
7	Inovasi Multiguna Pemanfaatan Limbah Kotoran Ternak Sapi, Penghasil Biogas, Tenaga Listrik, PembakarSampah Ramah Lingkungan, Pupuk Organik dan Pupuk Cair
8	Mesin Pemusnah Sampah Berteknologi Sprayer
9	RESTO APUNG PENATARSEWU
10	SEDEKAH ILMU UMKM
11	AGROWISATA KEBUN BELIMBING
12	SEMeS 119 (Sidoarjo Emergency Medical Services 119) -update
13	Pengembangan Wisata Pulau LUSI
14	Bahagia Berwisata Dalam Tatanan Normal Baru
15	Mantan-PDP (Utamakan Kenyamanan Pengunjung Di Penginapan)
16	Perizinan Online Anti Ribet dan Bebas Covid-19
17	LEGI JAWA NIKMAT (Legalisir Ijasah Siswa Elektronik Otomatis)
18	TTIC (Toko Tani Indonesia Centre)
19	New Normal Restoran. Judul Video : “Makan Tongkol Bakar” (Mengutamakan Protokol Kesehatan diRestoran dengan Baik dan Benar)”
20	New Normal Pasar Tradisional. Judul Video : “Cash Less Transaction, Solusi Pembayaran Anti Covid-19 diPasar Tradisional”
21	Konfirmasi Status Wajib Pajak Elektronik (eKSWP & Integrasi BPN, DPMPTSP & Kecamatan)
22	Kolektif KIA Pelajar (TK dan SD)
23	New Normal Pasar Modern. Judul : “Mematuhi Protokol Kesehatan Kunci Kenyamanan Belanja di era NewNormal”.
24	New Normal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Judul : “Perizinan Online Anti Ribet dan BebasCovid-19”
25	New Normal Hotel. Judul : “Mantan-PDP (Utamakan Kenyamanan Pengunjung Di Penginapan)”
26	Alat Monitoring Keamanan Tanggul Lumpur Lapindo Berbasis IoT
27	Aplikasi Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Sidoarjo
28	e-BES (Elektronik Bumdes Desa Sugihwaras)
29	Game Edukasi Usia Dini “Multiple Intelligences” (GENDIS) for Android
30	Takdol.shop sebagai Aplikasi Online Pemasaran Produk IKM Binaan Dekranasda Sidoarjo
31	Aplikasi Posyandu
32	RDS (Regional Development System)
33	Pedang Acord Spentita (Pembelajaran Daring dengan Aplikasi Discord server Spentita -)
34	Telehealth Lansia
35	NRACA (Navigation Report Accounting by ChaakrA)
36	DITAKOPUM (Digital Data Koperasi dan Usaha Mikro)
37	Perubahan SOP Pelayanan Kecamatan Sukdono
38	Website Resmi Desa Sugih Waras

39	Cloud-based Test System Platform : Platform Ujian berbasis Online membantu Sekolah, Bimbel, dan Gurudalam pembelajaran Era 4.0
40	Carbon Addons: Plugin Software App untuk Mengimbangi Jejak Karbon Pembelian Online dan MembiayaiProyek Perubahan Iklim
41	APLIKASI AKUNTANSI PESANTREN BERBASIS WEB & ANDROID
42	Kremboeng Guyup Rukun
43	e-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) -upgrade
44	e-PBB ((eCT-PBB (Cek Tagihan PBB Elektronik), eMonKas-PBB (Monitoring Berkas PBB Elektronik), eSPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Elektronik)) --> upgrade
45	Sistem Informasi Pemantauan dan Pengelolaan Angkutan Sampah (SIPPAS)
46	Jejak Kita (Kalkulator Jejak Karbon)
47	METASHTIK (Mesin Tetas Statis Hemat Listrik)
48	PEMBUATAN TANGKI PENGENDAPAN UNTUK MENGHILANGKAN ZAT BESI DAN MANGAN DI DALAM AIR
49	KAMPUNG TANGGUH COVID-19
50	SINERGITAS KECAMATAN KABUPATEN SIDOARJO
51	Mini Mall Pelayanan Publik
52	SIPPADU 2.0 (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu) -upgrade
53	Alat Pembunuh Kuman (The Germ Killing Tool) Pada Masa Pandemi Covid19.
54	Si Padi (Sistem Informasi Pangan Desa Terintegrasi)
55	Implementasi Rekontruksi Permodalan Koperasi Berbasis Sistem Informasi Akuntasi
56	Robot Penyemprot Disinfektan Berbasis Internet of Things dan Camera ESP 32
57	KECAMATAN NGARTIS (KECAMATAN ANTAR GRATIS)
58	APLIKASI SIPRAJA (SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO) -upgrade
59	Layanan E-Sedot Tinja Periodik
60	SILANCAR (SIAP MELAYANI MENCETAK DAN MENGANTAR)
61	SISTEM PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT (SIPEKAT)
62	E-KGB (Kenaikan Gaji Berkala) -upgrade
63	Aplikasi Cuti Online
64	Trash Burner (Alat Pembakar Sampah dari Barang Bekas)
65	Bioelectricity from Lapindo Mud (Bio-L) Sebagai Upaya Penyediaan Sumber Energi Terbarukan dengan Metode Microbial Fuel Cells (MFCs)
66	Rancang Bangun Pengelolaan Air Limbah Industri Kali Buntung Berbasis Microbubble Generator dan Elektrokoagulasi menjadi Air Layak Pakai
67	VRADA (Virtual Reality Anti Drug Addict)
68	E-BPHTB (Elektronik Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)
69	DRIVE THRU UJI KIR -upgrade
70	Drive Thru Pembayaran Pajak Daerah
71	Memutus Mata Rantai Covid-19 di Angkutan Umum

72	JEBOL KIA PELAJAR KECAMATAN SIDOARJO (Jemput Bola KIA Pelajar Kecamatan Sidoarjo)
73	IMS (Intelligence Monitoring System) -upgrade
74	SEGATA BERKAH (Sedekah Gaya Hidup Kita Menuju Berkah) JUM'AT BERKAH
75	E-BUDDY Teman Kerjaku
76	PEDULI DILAN (Peduli Disabilitas, ODGJ, dan Lanjut Usia) -update
77	ARTIS By Pos
78	LKBH (Layanan Konsultasi dan bantuan Hukum) -update
79	SIM-BMD (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah)
80	SMART COMMUNITY for COMPETENCY DEVELOPMENT (SCCD)
81	Update JOBFAIR SIDOARJO
82	PEKAN PENGUATAN INOVASI DAERAH
83	BOLAM (Bioskop Literasi Anak dan Masyarakat) -update
84	TORPIN (Motor Pintar) -update
85	MPK (Mobil Perpustakaan Keliling) -update
86	SIDIRA (Sidoarjo Information Digital Library) -upgrade
87	SIKSDA Kabupaten Sidoarjo -upgrade
88	PLAVON DUKCAPIL (Pelayanan via Online Dukcapil)
89	YANTIS (Layanan Antar Gratis)
90	GAPURA DELTA (Garda Petugas Registrasi Adminduk Desa/Kelurahan di Kota Delta)
91	Sidoarjo TV Present
92	Sidoarjo City Tour
93	e-consulting
94	KIA Back To School
95	Jemput Bola Pelayanan KIA
96	Wisata Susur Sungai Desa Tambak Cemandi
97	Media Promosi Produk Unggulan UKM Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
98	Pesona Sidoarjo
99	LADEN (Aplikasi Pendaftaran Penduduk Non Permanen)
100	E-MONEV PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) inovasi yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan, yaitu :

- Kategori - Predikat		Nama Inovasi	Nama	Kabupaten / Kota Asal
1	2	3	4	5
1.	**Inovasi Daerah**			
	Terinovatif I	SIPPADU 2.0 (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu)	Ari Suryono, S.Sos., M.Si	Kabupaten Sidoarjo
	Terinovatif II	SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo)	Ketua : Drs. Achmad Zaini, MM Anggota : 1. M. Ainur Rahman, AP,M.Si 2. Drs. Imam Mukri A,M.Si 3. Vira Murti Krida Laksmi, S.STP,MH, 4. Dharma Putro Prakoso, S.STP	Kabupaten Sidoarjo
2	**Inovasi Aplikasi berbasis Website/Android**			
	Terinovatif I	Aplikasi Akuntansi UMKM	Ketua : Andry R., S.Kom, M.Kom,	Kabupaten Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar inovasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat, yaitu :

- Memfasilitasi inovator dalam pelaksanaan lomba inovasi;
- Melaksanakan penkan penguatan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan Indek Inovasi Daerah setiap tahunnya;
- Memberikan penghargaan kepada inovator berprestasi;

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.863.141.646,- dan terealisasi sebesar Rp.786.953.000 atau 91,17%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti	95%	95%	100%
Persentase ketersediaan elemen data yang aktual dan valid sebagai masukan perencanaan pembangunan daerah	90%	90%	100%

Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase usulan penelitian dan pengembangan yang difasilitasi	90%	100%	111,11%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah penelitian/ pengembangan/ perekayasaan bidang teknologi dan inovasi yang difasilitasi	10 inovasi	10 inovasi	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	549.175.000,00	488.795.400,00	89,01%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	313.966.646,00	298.157.600,00	94,96%

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 tidak ada Perda / Perbup yang ditetapkan yang menunjang pelaksanaan unsur penunjang penelitian dan pengembangan

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk unsur penunjang penelitian dan pengembangan.

Unsur Penunjang Keuangan

Unsur penunjang Keuangan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pelayanan Pajak Daerah, dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Unsur penunjang Keuangan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak dan Retribusi.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan unsur penunjang Keuangan sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	58,3365	58,3365	100%
2	Persentase Aset Tetap yang terdokumentasi Legal	99,752%	99,50%	99,75%
3	Rasio Pajak terhadap PAD	60 : 100	53,31 : 100	88,85%

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Terdapat 6 (enam) Dimensi dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Dimensi 1 tentang Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
2. Dimensi 2 tentang Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD
3. Dimensi 3 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Dimensi 4 tentang Penyerapan Anggaran
5. Dimensi 5 tentang Kondisi Keuangan Daerah
6. Dimensi 6 tentang Opini BPK

Pada tahun 2021 hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah 58,3365 dengan target Tahun 2021 adalah 58,3365 Hal ini menunjukkan bahwa capaian telah mencapai target.

Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo dimaksud mencerminkan bahwa meskipun target yang telah ditetapkan tercapai namun masih dalan kategori B (perlu perbaikan).

Adapun hasil penilaian untuk masing – masing dimensi, adalah sebagai berikut :

No.	Dimensi	Nilai
1	Dimensi 1	9,2254
2	Dimensi 2	19,6552
3	Dimensi 3	6,4655
4	Dimensi 4	10,0000
5	Dimensi 5	2,9854
6	Dimensi 6	10,0050

Berdasarkan Hasil evaluasi Tahun 2021, terdapat beberapa hal yang masih menjadi catatan untuk pengelolaan keuangan Kabupaten Sidoarjo, yaitu antara lain :

- Ketidaksesuaian pagu RKPD dan KUA PPAS;
- Ketidaksesuaian pagu KUA PPAS dan APBD;
- Publikasi dokumen keuangan belum tepat waktu;
- Tingginya sisa anggaran atas belanja modal dimana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.771.356.411.242,21 sedangkan realisasi sebesar Rp.519.252.871.399,47 dengan capaian 67,32%.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

- Membangun komitmen bersama melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- Koordinasi dengan OPD terkait sehubungan dengan kebutuhan publikasi dokumen keuangan di website Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan update publikasi dokumen keuangan melalui website BPKAD;
- Evaluasi penyerapan anggaran perangkat daerah yang dilaksanakan setiap triwulan;
- Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah melalui pelaksanaan bimtek pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Penyusunan kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Persentase Aset Tetap yang terdokumentasi Legal

Jumlah aset tetap yang terdokumentasi legal sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 401.390 aset dari keseluruhan yang seharusnya terdokumentasi legal sebanyak 403.405 aset atau tercapai 99,50% dari target 99,752% dengan capaian 99,75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu 99,48% maka terdapat peningkatan angka 0,02 atau sekitar 0,2%.

Perkembangan jumlah aset tetap yang terdokumentasi legal, dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.D.8
Perkembangan Aset Yang Terdokumentasi Legal

Sumber Data : BPKAD Kab. Sidoarjo

Sedangkan apabila ditampilkan dalam bentuk tabel, maka rincian dokumentasi legal untuk aset tetap, sebagai berikut :

Total Aset Tetap	Aset Tetap Berupa Tanah	Tanah Telah Bersertifikat	Tanah Belum Bersertifikat	Total Aset Tetap terdokumentasi Legal	% Aset Tetap Terdokumentasi Legal
403.405	2.497	482	2.015	401.390	99,50%

Sampai dengan Tahun 2021 telah dilakukan proses legalisasi aset tanah melalui BPN Kabupaten Sidoarjo, dengan perkembangan berkas yang dalam proses setiap tahunnya sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Berkas
2014	1
2019	8
2020	14
2021	606
Total	**629**

Adapun upaya yang telah dilakukan agar semakin banyak aset tetap yang terdokumentasi legal, yaitu :

- Pemanfaatan aplikasi mapping tanah;
- Sosialisasi dan atau Bimbingan Teknis kepada pengguna barang terkait hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pengamanan aset (BMD);
- Koordinasi dengan OPD terkait kelengkapan persyaratan untuk pengurusan sertifikat;
- Membentuk Tim Penyelesaian Status Kepemilikan BMD;
- Penelusuran dokumen BMD guna tertib administrasi;
- Pemasangan papan nama aset daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Pemasangan patok batas tanah;
- Koordinasi secara intensif dengan BPN guna percepatan pemrosesan sertifikat tanah;
- Penambahan SDM untuk pelaksanaan percepatan pensertifikatan tanah.
- Penambahan anggaran untuk pensertifikatan tanah.

Rasio Pajak terhadap PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen pendapatan yang dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai operasional dan pembangunan daerahnya. Semakin besar PAD yang mampu dihimpun akan semakin menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhannya. Salah satu komponen utama yang memiliki kontribusi paling besar terhadap pencapaian PAD adalah sektor penerimaan pajak daerah.

Pada tahun 2021 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.1.027.822.704.720,00 dari target Rp.962.962.000.000,00 sehingga tercapai

106,74%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu Rp.929.261.529.986,45 maka terdapat peningkatan senilai Rp.98.561.174.733,55 atau sekitar 10,61%.

Perkembangan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo, dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.D.9

Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Sumber Data : BPPD Kab. Sidoarjo

Adapun penerimaan pajak untuk masing-masing sektor pajak, adalah sebagai berikut :

Tabel III.D.2

Rincian Penerimaan Pajak

PENERIMAAN PAJAK DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
Pajak Daerah	962.962.000.000,00	1.027.822.704.720,00
Pajak Hotel	12.000.000.000,00	14.080.874.501,00
Pajak Restoran	56.742.000.000,00	63.518.290.481,00
Pajak Hiburan	1.056.000.000,00	1.201.039.009,00
Pajak Reklame	14.000.000.000,00	14.593.286.453,00
Pajak Penerangan Jalan	352.000.000.000,00	313.967.752.550,00
Pajak Parkir	11.781.000.000,00	11.788.834.175,00
Pajak Air Tanah	3.080.000.000,00	3.167.681.195,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	258.000.000.000,00	254.650.339.833,00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	254.303.000.000,00	350.854.606.523,00

Sumber Data : BPPD Kab. Sidoarjo

Apabila dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 senilai Rp1.928.091.787.367,69 maka Rasio Pajak terhadap PAD adalah 53,31 : 100.

Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021, dengan kontribusi terbesar ada pada tiga jenis pajak daerah, yakni Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang masing-masing menyumbang 31%, 25%, dan 34% atas total penerimaan pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp1.027.822.704.720,00.

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan pajak daerah, yaitu:

- Pendataan kembali data potensi OP/WP
- Kebijakan untuk relaksasi pembayaran pajak daerah, baik penundaan pembayaran ataupun memberikan keringan atas pembayaran pajak tertentu
- Penyesuaian target penerimaan pajak daerah yang disesuaikan dengan turunnya perekonomian dan daya beli masyarakat.
- Optimalisasi penagihan aktif melalui pembayaran berbasis aplikasi/online.
- Pemasangan alat perekam transaksi untuk wajib pajak restoran dan hotel.

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.750.421.604.438,00 dan terealisasi sebesar Rp.728.181.098.983,07 atau 97,04%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. Ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (APBD dan PAPBD)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2. % dokumen penganggaran yang telah dipublikasikan melalui media publik	100%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
3. % OPD yang tepat waktu dalam menentukan kode rekening pada RKA OPD	100%	100%	100%
4. % OPD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan berbasis SAP (Akrual)	100%	100%	100%
5. % OPD yang tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran yang kas yang ditetapkan	100%	100%	100%
6. Ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%

Program tersebut didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Tersusunya dokumen raperda/perda APBD,Raperda/Perda PAPBD, Pedoman pelaksanaan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyaluran dana darurat mendesak, penyaluran dana bagi hasil kabupaten, penyaluran bantuan keuangan, penyaluran subsidi	100%	100%	100%
3. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	95%	100%	100%
4. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah	100%	100%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	1.357.541.021,00	1.251.459.750,00	92,19%
2. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	748.037.226.907,00	725.994.950.996,07	97,05%
3. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	214.835.811,00	192.315.000,00	89,52%
4. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	812.000.700,00	742.373.237,00	91,43%

2. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.3.066.199.196,00,- dan terealisasi sebesar Rp.2.350.931.433,00,- atau 76,67%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
1. Prosentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum	100%	100%	100%
2. Prosentase aset tetap (tanah) dengan dokumentasi legal	32,81%	19,30%	58,82%
3. Prosentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian aporan BMD	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan barang milik daerah	a. Prosentase dokumen Laporan Barang milik Daerah (BMD) yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	b. Persentase laporan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	c. Persentase pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	d. Persentase penghapusan BMD yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	e. Persentase aset tetap berupa tanah yang bersertifikat	32,81%	19,30%	58,82%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengelolaan barang milik daerah	3.066.199.196,00	2.350.931.433,00	76,67%

3. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.6.520.446.111,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.146.943.060,00 atau 94,27%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Prosentase jumlah surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang sesuai ketentuan	84%	86,23%	102,65%
Prosentase pertumbuhan obyek pajak daerah	4%	4,28%	107,00%
Prosentase realisasi pembayaran tagihan pajak daerah	24%	28,09%	117,04%

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah tunggakan pajak daerah	25%	28,09%	112,36%
	Jumlah OP dan WP baru yang terdata	4%	4,28%	107,00%
	Jumlah laporan hasil evaluasi yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rp6.520.446.111,00	Rp6.146.943.060,00	94,27

c. **Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup**

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan unsur penunjang keuangan, sebagai berikut :

No.	Perda/Perbup	Tentang
1	Perda Nomor 06 Tahun 2021	Sistem Pajak Daerah Secara Elektronik
2	Perbup Nomor 016 Tahun 2021	Kode Rekening Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo
3	Perbup Nomor 034 Tahun 2021	Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

4	Perbup Nomor 037 Tahun 2021	Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan
5	Perbup Nomor 081 Tahun 2021	Tata Cara Pemberian Insentif Pemanfaatan Barang Milik Daerah

c. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk unsur penunjang keuangan, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Penggalian potensi dan penetapan obyek-obyek pajak baru harus memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dimasa pandemi Covid-19	Menerbitkan kebijakan terkait penggalian potensi pada masa pandemi dengan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dengan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/809/438.1.1.3/2020 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah/Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan rencana aksi sebagai berikut: 1. Pendataan ulang dan pemeriksaan/pengawasan OP/WP pada masa Pandemi 2. Sosialisasi melaui media elektronik dan cetak (spanduk) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah/Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan rencana aksi sebagai berikut: 1. Pendataan ulang dan pemeriksaan/pengawasan OP/WP pada masa Pandemi 2. Sosialisasi melaui media elektronik dan cetak (spanduk)
2	Penggunan e-tax (pajak online) dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah serta penyesuaian tarif pajak dan	Memberikan kemudahan dalam membayar pajak daerah secara online yang bekerjasama dengan Bank Persepsi dan PPOBnya (Payment Point Online Bank)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah/Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan rencana aksi sebagai berikut: 1. Optimalisasi pelayanan pembayaran yang bekerjasama dengan Bank Persepsi dan PPOB nya (Payment Point Online Bank, misalnya Link Aja, Indomart, Alfamart, Bukalapak, Tokopedia) dan Pemasangan alat perekam transaksi pada OP Hotel dan Restoran 2. Sosialisasi melaui media elektronik dan cetak (spanduk)
3	Memperbaiki sistem atau inovasi baru dalam sertifikasi aset Pemerintah Daerah dan memperjelas status hak aset dan desa tentang SD inpres yang belum diserahkan oleh Desa	Dalam rangka tertib pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo wajib melakukan pengamanan hukum terhadap tanah yang berada dalam penguasaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo berusaha terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pertanahan dan pihak Desa terkait percepatan pensertifikatan tanah BMD. Terkait tanah SDN yang sudah tercatat sebagai barang inventaris milik Pemkab Sidoarjo, maka Pemkab Sidoarjo berpedoman pada ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Pasal 399 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		dimana barang milik desa yang masih digunakan untuk fasilitas umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain.
4	Agar DPRD diberi tambahan data rincian laporan SILPA tahun berjalan 2020 unaudited berdasarkan obyek dan rincian obyek sumbernya	Data rincian SiLPA Tahun 2020 sudah disampaikan pada saat rapat Banggar terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.
5	Melakukan evaluasi penyebab dan menentukan langkah-langkah konkrit dalam mengatasi masalah SILPA	Telah dilakukan langkah-langkah kongkrit untuk menekan SiLPA yang terbukti dengan menurunnya SiLPA Tahun 2021.
6	Membuat roadmap yang terukur dan jelas berupa Rencana Aksi DID untuk mendapat DID	Rencana aksi untuk mendapatkan DID antara lain dilakukan dengan penyusunan APBD tepat waktu

Unsur Penunjang Kepegawaian dan Diklat

Unsur penunjang kepegawaian dan diklat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Unsur penunjang kepegawaian dan diklat dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Pada Tahun 2021 telah tercapai kinerja penyelenggaraan unsur penunjang kepegawaian dan diklat sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Profesionalitas ASN	80	79,39	99.23
2	Persentase penempatan ASN sesuai dengan Kompetensinya	73	79,02	108,24
3	IKM layanan administrasi kepegawaian	88	93,29	106

Indeks Profesionalitas ASN

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Indeks Profesionalitas ASN dihitung menggunakan 4 dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi (diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai),bobot 25%;
2. Kompetensi (diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan) bobot 40%;
3. Kinerja (diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS), bobot 30%;
4. Disiplin (diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami), bobot 5%

Sesuai surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 810/B-BH.02.01/SD/C/2022 Tanggal 13 Januari 2022 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun, pengukuran IP ASN Tahun 2021 dilakukan dengan aplikasi online pada alamat website https://ip-jasn.bkn.go.id

Mekanisme penginputan tiap unsur instrumen pengukuran dilakukan melalui updating pada aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepgawaian (import data). Proses input dan integrasi data SAPK BKN dan IP ASN saat ini sedang berlangsung serta membutuhkan waktu untuk sinkronisasi dan sampai saat ini belum didapatkan nilai final. Proses ini diberi tenggat waktu paling lambat akhir bulan Maret 2022.

Mendasari hal tersebut, Hasil Indeks Profesionalitas (IP) ASN yang disajikan pada laporan kinerja ini adalah nilai IP ASN Tahun 2020. Apabila menggunakan nilai IP ASN pada tahun 2020 capaian kinerja IP AsN sebagai berikut :

Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN

No.	TUJUAN	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2021	Realisasi di Tahun 2021	Capaian (%)
1	Membangun SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang profesional	Indeks Profesionalisme ASN	80	79,39	99.23

Adapun hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk masing-masing dimensi dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Rincian Pengukuran IP ASN

NILAI RATA -RATA DARI INDEKS VARIABEL KOEFISIENNYA				INDEKS PROFESIONALITAS PEGAWAI tahun 2021
KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	
12.08	37.32	25.01	4.97	79,39

Grafik III.D.10

Perkembangan Indeks Profesionalisme ASN

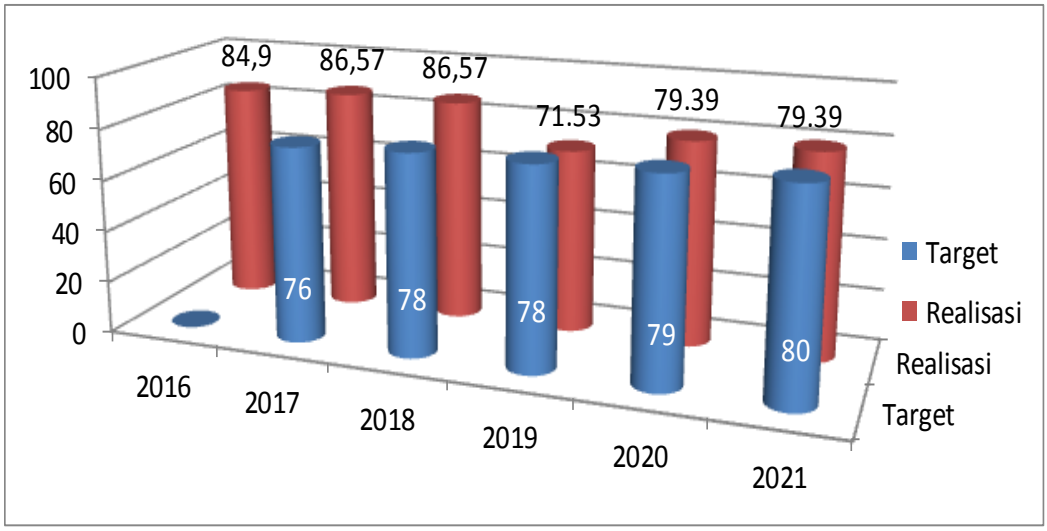

Sumber Data : BKD Kab. Sidoarjo

Untuk penjelasan lebih lanjut atas tiap dimensi pengukuran, sebagai berikut :

1. Kualifikasi

   Sebagian besar PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki kualifikasi pendidikan formal rata-rata sebesar 12,08. Dari total 10.103 PNS, didominasi oleh kualifikasi Pendidikan S1/D4 sebanyak 5.559 orang, sedangkan sisanya diduduki dengan kualifikasi D1/D2/SMA Sederajat dengan total 1.875 orang, jenjang D3 sebanyak 1.379 orang, S2 sebanyak 739 orang, S3 sebanyak 8 orang dan jenjang SD/SMP/Sederajat sebanyak 543 orang. Kualifikasi pendidikan menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas SDM, untuk itu kedepan perlu untuk meningkatkan kualifikasi pegawai yang sesuai dengan jabatan yang diduduki.

2. Kompetensi

   Pada dimensi ini, program pengembangan kompetensi telah terpenuhi dengan baik dengan rata-rata penilaian sebesar 36,88. Nilai terendah terdapat pada pelaksanaan diklat fungsional untuk ahli utama dengan nilai sebesar 26,67 dan belum terlaksana sepenuhnya. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan lain seperti seminar/workshop telah ditingkatkan, serta upaya update data kediklatan akan terus dilaksanakan secara rutin. Untuk itu, dimensi kompetensi memiliki kontribusi yang dominan pada tingkat profesionalitas ASN karena dapat menunjang kesesuaian jabatan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai.

3. Kinerja

   Hampir seluruh PNS memiliki nilai prestasi kerja dikategori “Baik” dan “Sangat Baik”, adapun pegawai dengan nilai kategori cukup, kurang, maupun buruk disebabkan karena kurang tertib dalam hal melaporkan capaian realisasi dan penilaian perilaku kerja. Capaian kategori “Baik” dan “Sangat Baik” kedepan hendaknya dikarenakan instrumen penilaian kinerja yang terukur, dimulai dari perencanaan kinerja dimana penetapan indikator kinerja individu dapat diturunkan sampai ke level bawah dengan tepat. Selain itu, agar capaian target dapat terpenuhi, proses pemantauan kinerja sangat penting untuk memastikan kemajuan kinerja pegawai agar tidak terjadi keterlambatan atau penyimpangan.

4. Disiplin

   Pada dimensi ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencapai nilai rata-rata sebesar 4,97 dengan data indisipliner di tahun 2020 terdapat 17 PNS yang didominasi dengan kategori hukuman indisipliner berat. Diharapkan untuk penilaian selanjutnya dapat disempurnakan terkait pendefinisian disiplin pegawai, terdapat instrument dan indikator yang dapat mengukur tingkat disiplin pegawai itu sendiri.

Adapun upaya yang dilakukan agar profesionalitas ASN di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat, yaitu :

- Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN 2020 dihitung berdasarkan empat dimensi, yakni Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja, Dimensi Disiplin. Dari keempat dimensi tersebut, Dimensi Kinerja memiliki nilai paling rendah, hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pelaporan prestasi kerja pada aplikasi e-kinerja. Untuk itu, kedepan perlu disusun instrument penilaian kinerja sesuai Peraturan Pemerintah terbaru tentang penilaian kinerja PNS agar kinerja PNS dapat lebih terukur dan bersifat objektif. Selain itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi pelaporan pada aplikasi e-

kinerja dan dilakukan secara berkala untuk dapat memantau kinerja PNS dalam mencapai target yang ditetapkan.

- Selain Dimensi Kinerja, Dimensi Kompetensi menjadi salah satu aspek penting dalam mengukur profesionalitas ASN. Hal ini dapat ditingkatkan dengan pemutakhiran data kediklatan yang telah dilakukan oleh seluruh PNS. Sebagian besar, data kediklatan wajib saja yang terekam pada Sistem Informasi Kediklatan, disamping itu banyak PNS yang telah mengikuti kegiatan diklat baik itu seminar/*workshop*/pelatihan dan sejenisnya. Untuk itu kedepan akan terus dilakukan pemutakhiran data diklat secara berkala dan dilakukan sinkronisasi dengan data di SAPK.

Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya

Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan target sasaran penempatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kompetensinya sebesar 73%. Berdasarkan penempatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diperoleh data pengukuran kompetensi ASN, sebagai berikut :

Rincian Penempatan ASN sesuai kompetensinya

Uraian	Jumlah ASN (31 Des 2021)	Terpetakan	ASN yang telah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya					
			2021	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Jumlah ASN JFT	7160	7160	7160	7630	7409	7.507		
Jumlah ASN JFU	2698	1246	748	854	589	322		
Jumlah ASN J. Struktural	402	402	190	158	343	267		
Jumlah ASN Kab. Sidoarjo	10260	10260	199	8642	8.341	8.096		
			79,02	**77,35%**	**73,85 %**	**70,29%**	69,4%	63,8%

Adapun perkembangan indikator Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya pada tiap tahun Renstra sebagai berikut :

Grafik III.D.11

Perkembangan Penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya

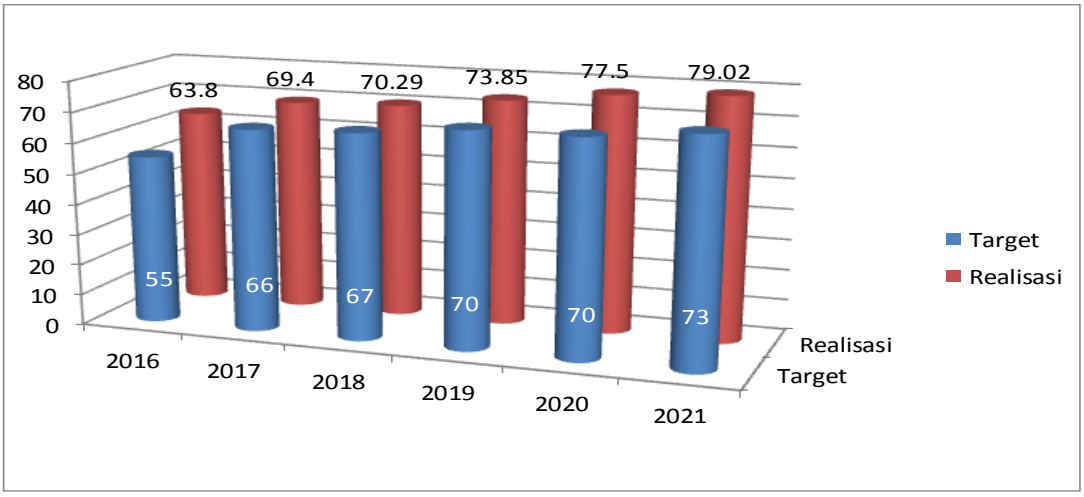

Sumber Data : BKD Kab. Sidoarjo

Apabila dilihat pada target tahun 2021, maka capaian kinerja tahun 2021 pada indikator Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya mencapai 108,24% atas target yang ditetapkan. Penempatan ASN sesuai kompetensinya didukung melalui pengembangan kompetensi ASN baik yang dapat didukung APBD maupun fasilitasi pengembangan kompetensi yang dilakukan mandiri melalui penerbitan rekomendasi Ijin Belajar, Pencatuman gelar, Keterangan Pendidikan serta mulai mengembangkan metode peningkatan kompetensi berbasis " Smart Community for Competency Development" – SCCD yang secara legal dan terintegrasi dalam satu sistem di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam hal penilaian kompetensi ASN, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 berhasil meraih penghargaan BKN Award 2021 untuk Kategori Penilaian Kompetensi dengan peringkat pertama kategori wilayah Kabupaten.

Penilaian kompetensi (Assesment) secara sektoral dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang pada tahun 2021 telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi A

Indikator IKM layanan administrasi kepegawaian

No	Unsur Pelayanan	Nilai SKM					
		2021	2020	2019	2018	2017	2016
1	Persyaratan	5.7144	90,95	79.73	78.21	76.55	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	5.6610	89,7	79.4	78.01	76.29	
3	WaktuPenyelesaian	5.6449	88,18	76.67	74.53	74.61	
4	Biaya / Tarif	5.6690	89,9	97.33	94.12	79.9	
5	Produk Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	5.6479	88,73	80.75	77.87	77.77	
6	Kompetensi Pelaksana	5.6560	89,45	80.73	79.28	78.67	
7	Perilaku Pelaksana	5.6449	89,7	81.81	78.81	78.61	
8	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	5.6138	88,25	79.11	77.61	76.35	
9	Sarana dan Prasarana	5.6313	87,05	90.5	89.21	77.56	
Nilai SKM		**93.29**	**88,992**	**82.06**	**80.05**	**77.56**	**77.28**

Grafik III.D.12

Perkembangan IKM Kepegawaian

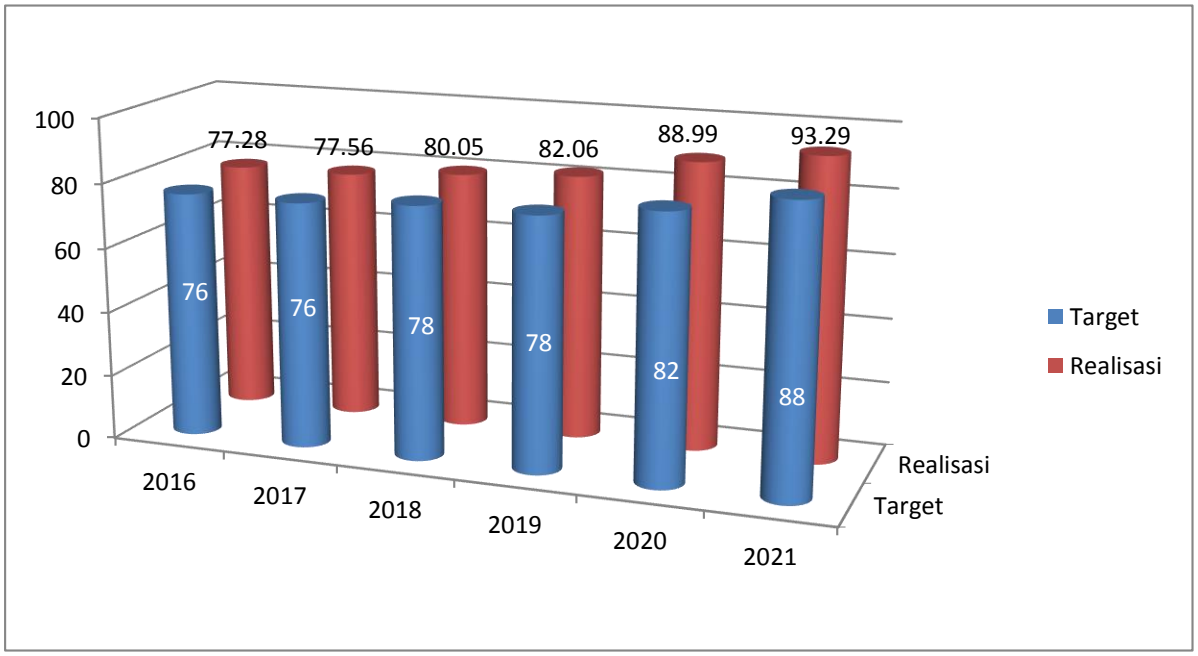

Sumber Data : BKD Kab. Sidoarjo

Dari penyajian data diatas, dapat dilihat bahwa kondisi tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat kenaikan 5,29 point dan capaian sebesar 108,5 % atas target point 88 di tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan dikarenakan adanya berbagai macam inovasi

dan perubahan aplikasi layanan yang telah tersosialisasikan atas implementasi SOP yang ada. Dan kondisi ini akan terus dilakukan perbaikan dari berbagai evaluasi internal sebagai usaha perwujudan meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang prima.

Perwujudan layanan prima dengan capaian yang maksimal dan tepat waktu pada tahun 2021 atas produk administrasi kepegawaian ini, tidak lepas dari dukungan inovasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Inovasi layanan ini diterapkan dengan menggunakan konsep digitalisasi dan aplikasi online. Efek positif dari inovasi ini, proses layanan administrasi kepegawaian menjadi lebih mudah, cepat, transparan dan efisien.

Berikut ragam inovasi yang diterbitkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam layanan administrasi kepegawaian ASN :

CUTI ONLINE
Aplikasi Pengajuan cuti secara online

SIPEKAT
Sistem Informasi Pengelolaan Kenaikan Pangkat

E-KGB
Elektronik Kenaikan Gaji Berkala

E KINERJA
Aplikasi Pelaporan Kinerja Individu secara online

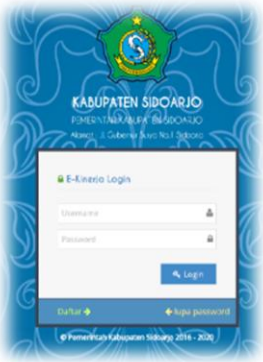

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Kepegawaian Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.***3.137.208.732*** dan terealisasi sebesar Rp.2.000.471.895 atau 63,77.%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Prosentase ASN yang Telah Ditempatkan Sesuai Dengan Formasi Jabatan	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Prosentase ASN yang Telah Ditempatkan Sesuai Dengan Formasi Jabatan	100%	100%	100%
Mutasi dan Promosi ASN	Prosentase administrasi mutasi jabatan, kepangkatan, pemberhentan dan pensiun yang terselesaikan	100%	100%	100%
Pengembangan Kompetensi ASN	Prosentase pegawai dalam talent pool pada kuadran 6,7,8 dan 9	80%	80%	100%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prosentase layanan pembinaan dan layanan kesejahteraan ASN yang ditjndaklanjuti	100%	100%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.270.848.788	780.936.375	61,44
Mutasi dan Promosi ASN	904.706,970	350.566.379	38,74
Pengembangan Kompetensi ASN	549.526.794	467.272.841	85,03
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	412.126.180	401.696.300	97,46

2. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** dengan anggaran sebesar Rp.3.281.315.268,- dan terealisasi sebesar Rp.3.027.689.650- atau 92,27 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Prosentase ASN yang meningkatkan kompetersinya	18%	18%	100%

Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengembangan Kompetensi Teknis	Prosentase PNS yang berdayaguna hasil mengikuti diklat ASN	70%	70%	100%
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Prosentase peserta diklat yang lulus bersertifikat	80%	80%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%
Pengembangan Kompetensi Teknis	24.005.771,00	21.543.700,00	89,74
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.257.309.497,00	3.006.145.950,00	92,29

c. Kebijakan Strategis yang ditetapkan melalui Perda dan Perbup

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda / Perbup yang menunjang pelaksanaan unsur penunjang kepegawaian dan diklat, sebagai berikut :

No.	Perda / Perbup	Tentang
1	Perbup Nomor 001 Tahun 2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
2	Perbup Nomor 076 Tahun 2021	Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3	Perbup Nomor 083 Tahun 2021	Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tambahan

		Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
4	Perbup Nomor 088 Tahun 2021	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

d. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya**

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2020 terdapat rekomendasi yang diberikan untuk unsur penunjang kepegawaian dan diklat, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Untuk meningkatkan kompetensi dan pola karir ASN Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi ASN berupa Pendidikan dan Pelatihan, dan membuat program assessment center yang profesional. Terkait kenaikan pangkat ASN harap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.	1. Pengembangan kompetensi berkelompok dengan pola pembiayaan : • APBD (pembiayaan honor pengajar, konsumsi dan sertifikat dari APBD) • Cost Sharing (pembiayaan konsumsi dari peserta, honor pengajar dan sertifikat dari APBD) • Mandiri (pembiayaan honor pengajar dan konsumsi dari peserta, sertifikat dari APBD) 2. Pengelolaan Assesment Center : • Pelaksanaan assesment secara periodik kepada ASN pada semua level jabatan mulai pelaksana, pengawas dan administrator, Jabatan Pimpinan Tinggi • Pemenuhan sarana - prasarana (gedung UPT Penilaian Kompetensi yang sesuai standar) dalam rangka Akreditasi UPT Penilaian Kompetensi • Sertfikasi UPT Penilaian Kompetensi dengan Akreditasi A 3. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN melalui aplikasi SIPEKAT dan dilakukan pengembangan aplikasi untuk jenis layanan lainnya yaitu SK pensiun

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun Program dan Kegiatan yang didapat dari Pemerintah Pusat berupa : Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Sedangkan untuk Penugasan, selama tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan tugas pembantuan secara eksplisit kepada Desa / Kelurahan, yang diberikan dalam bentuk bantuan stimulan Pembangunan Desa / Kelurahan, baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan pembangunan Desa / Kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat Desa / Kelurahan dalam proses pembangunan terus digalang melalui kegiatan Musrenbang.

BAB VI
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 yang disusun sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun anggaran 2021 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun anggaran 2021 yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2021.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, serta Legislatif (DPRD) dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang mendukung

situasi dan kondisi sehingga tetap terjaga kondusif dan penyelenggaraan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka selebar - lebarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian LKPJ Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2021 ini, diiringi harapan semoga di tahun - tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

BAB V
PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 9 Maret 2021 : Menerima Penghargaan Pelayanan Publik dengan Predikat Pelayanan Prima (A) untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo yang diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta.

2. Pada tanggal 7 April 2021 : Menerima Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Gubernur Jawa Timur, di Gedung Grahadi Surabaya.

3. Pada tanggal 18 Mei 2021 : Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD Tahun Anggaran 2020 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur.

4. Pada tanggal 1 April 2021 : Menerima Penghargaan Pencapaian Terbaik Pertama Kategori III Penilaian Kompetensi dalam ajang BKN Award 2020 dari Kepala BKN Repubik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Bupati Sidoarjo diberikan di Ruang Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Pada tanggal 13 April 2021 : Menerima Penghargaan atas Kontribusinya Ikut Serta Membangun Sistem Menejemen Kinerja PNS Terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS di K/L/P diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Sidoarjo oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.

6. Pada tanggal 19 November 2021 : Menerima Penghargaan Top 30 Kovablik (Ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) melalui Aplikasi SiPraja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diterima oleh Bupati Sidoarjo dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diberikan di Grand City, Surabaya.

7. Pada tanggal 26 November 2021 : Menerima Penghargaan dari BKN melalui ajang BKN Award 2021 “Penilaian Instansi Pengelola Kepegawaian Terbaik” peringkat II yang diberikan oleh Kepala BKN kepada Bupati Sidoarjo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

8. Pada tanggal 30 November 2021 : Menerima Penghargaan Investment Award 2021 kategori Juara Pertama Klaster 1 PDRB Lebih dari 100 Triliun rupiah, di Hall JW Marriot, Surabaya..

9. Pada tanggal 30 November 2021 : Menerima Penghargaan dan Sertifikat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Eksistensi Budaya Tradisional yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, di Provinsi Sumatera Selatan.

10. Pada tanggal 10 Desember 2021 : Menerima Penghargaan “PR INDONESIA Most Popular Leader In Social Media 2021” dari PR Indonesia ft. Kazee Digital Indonesia di Bali.

11. Pada tanggal 14 Desember 2021 : Menerima Penghargaan “Implementasi Program Smart City” kategori Smart Governance Gerakan Menuju Smart City dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, di Jakarta.

12. Pada tanggal 20 Desember 2021 : Menerima Penghargaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) untuk RSUD Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Sukodono dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KPK di Jakarta

13. Pada tanggal 20 Desember 2021 : Menerima Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan kategori “Pemimpin Perubahan” yang diberikan kepada Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, di Jakarta

14. Pada tanggal 26 Desember 2021 : Menerima Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai “Daerah Responsif Terhadap Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”, di Paseban Sena Hotel, Probolinggo

15. Pada tanggal 29 Desember 2021 : Menerima Penghargaan Pertama dari Menteri Desa dan PDTT Republik Indonesia atas “Komitmen dan Kerja Keras dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Desa” sehingga seluruh Desa di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai Status Berkembang, Maju, dan Mandiri, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya

16. Pada tanggal 12 Januari 2022 : Menerima Piagam Penghargaan Kategori Terbaik ke-4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Halaman Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur